

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023



RPJMDP

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

⌋⌋⌋⌋⌋⌋ ⌋⌋⌋⌋⌋⌋





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah;
- b. bahwa dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian target rencana pembangunan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD yakni sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Bab III. Gambaran keuangan daerah;
- d. Bab IV. Permasalahan dan isu-isu strategis;
- e. Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Bab IX. Penutup

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dipedomani dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. konsistensi antara RKPD dan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

- (1). Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota tetangga;
- (2). Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD;
- (3). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah kabupaten dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sekaligus sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

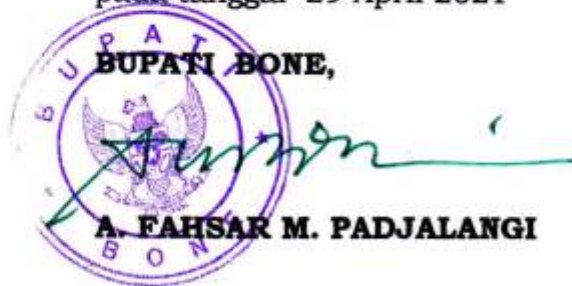
Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c) terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dokumen ini merupakan perubahan atas perencanaan pembangunan Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai tahun dengan 2023 yang didasarkan pada perubahan kebijakan nasional dan dampak Pandemi Covid-19. Penyusunan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam

rangka menjamin konsistensi kebijakan dan keberlanjutan program pembangunan yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dengan pelibatan masyarakat dan unsur pemangku kepentingan.

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Bupati / Wakil Bupati. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merancang, mengarahkan dan memperogramkan perjalanan pemerintahan sisa periode 2018-2023 sejak ditetapkan dan hasilnya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

Sehubungan dengan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai dokumen perencanaan komprehensif maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Pendekatan partisipatis dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD

- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.3. Aspek Pelayanan Umum	70
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	215
2.5. Hasil Gambaran Umum Kondisi Daerah	221
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	251
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	251
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	274
3.3. Kerangka Pendanaan	282
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	287
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	287
4.2. Isu Strategis	300
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	340
5.1. Visi	340
5.2. Misi	341
5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025	322
5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	344
5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024	325
5.6. Tujuan dan Sasaran	346

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKANDAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	353
6.1. Strategi Pembangunan Daerah	353
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	355
6.3. Prioritas Pembangunan Daerah	356
6.4. Program Pembangunan Daerah	358
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	34770
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	370
7.2. Program Perangkat Daerah	371
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	485
8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	485
8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	488
8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	488
8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	
505	
BAB IX PENUTUP	523
9.1. Pedoman Transisi.....	523
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	523

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019.....	10
Tabel 2.2.	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bone	11
Tabel 2.3.	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2019.....	12
Tabel 2.4.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bone, 2015-2019	22
Tabel 2.5.	Penduduk Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019	23
Tabel 2.6.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone (Rp. Juta), Tahun 2015-2019	25
Tabel 2.7.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bone (Rp. Juta) Tahun 2015-2019 ...	26
Tabel 2.8.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 ..	27
Tabel 2.9.	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone Tahun 2015- 2019 ..	28
Tabel 2.10.	Perkembangan inflasi rata-rata Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	29
Tabel 2.11.	PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	30
Tabel 2.12.	Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (dalam persen).....	45
Tabel 2.13.	Perkembangan Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Rasionya Terhadap Total Keluarga, di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	46
Tabel 2.14.	Skor IKM dan Kategori Mutu dan Kinerja Unit Pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019.....	46
Tabel 2.15.	Produksi Pertanian Pangan dan Palawija di Kabupaten Bone 2015-2019 (ton)	50
Tabel 2.16.	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Kabupaten Bone 2015-2019 (ton).....	51
Tabel 2.17.	Perkembangan Capaian APK PAUD Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	57
Tabel 2.18.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	57
Tabel 2.19.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019.....	58
Tabel 2.20.	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	59
Tabel 2.21.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bone, 2015-2019	59
Tabel 2.22.	Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019.....	61
Tabel 2.23.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bone, 2015-2019	61
Tabel 2.24.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019	62
Tabel 2.25.	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	63
Tabel 2.26.	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	63
Tabel 2.27.	Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	63
Tabel 2.28.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)	64
Tabel 2.29.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)	64
Tabel 2.30.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)	64
Tabel 2.31.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bone, 2015-2019.....	65
Tabel 2.32.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan di Kab Bone Tahun 2019	65
Tabel 2.33.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	66
Tabel 2.34.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone.....	66
Tabel 2.35.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	67
Tabel 2.36.	Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019.....	67

Tabel 2.37.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	68
Tabel 2. 38.	Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2019 (orang)	73
Tabel 2.39.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	85
Tabel 2.40.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2017	87
Tabel 2.41.	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	89
Tabel 2.42.	Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2019	90
Tabel 2.43.	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan	91
Tabel 2.44.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2017-2019.....	98
Tabel 2.45.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017.....	107
Tabel 2.46.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	108
Tabel 2.47.	Timbulan Sampah yang Ditangani Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (ton)	114
Tabel 2.48.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bone Berdasarkan Kecamatan.....	116
Tabel 2.49.	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bone Tahun 2019 (dalam persen) ...	138
Tabel 2.50.	Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon	139
Tabel 2.51.	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (orang).....	143
Tabel 2.52.	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (cabang olah raga)...	144
Tabel 2.53.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	144
Tabel 2.54.	Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (orang)..	150
Tabel 2.55.	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bone Tahun 2013-2019 (hari)	151
Tabel 2.56.	Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	159
Tabel 2.57.	Penetapan APBD Kabupaten Bone Tahun 2015-2019.....	162
Tabel 2.58.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2017 (jam pelajaran).....	162
Tabel 2.59.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	164
Tabel 2.60.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2015-2017 (dalam persen)	165
Tabel 2.61.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2015-2017 (dalam persen).	165
Tabel 2.62.	Persentase Unit Kerja yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2015-2017 (dalam persen).....	165
Tabel 2.63.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	165
Tabel 2.64.	Jumlah Temuan BPK-RI Dan Tindak Lanjutnya	214
Tabel 2.65.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Rp)	215
Tabel 2.66.	Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita di Kabupaten Bone.....	216
Tabel 2.67.	Jumlah Kasus Kriminal yang Dilaporkan dan Diselesaikan Kabupaten Bone Tahun 2019.....	217
Tabel 2.68.	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten BoneTahun 2015 - 2019	218
Tabel 2.69.	Lama Proses Pelayanan Perizinan Tahun 2019	218

Tabel 2. 70.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah	220
Tabel 3. 1.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, Tahun 2015-2019.....	253
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019	264
Tabel 3.3.	Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2019	266
Tabel 3.4.	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017-2019.....	269
Tabel 3.5.	Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone, Tahun 2017-2019.....	271
Tabel 3.6.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (%)	273
Tabel 3.7.	Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Bone, 2017-2019 (Miliar Rp)	274
Tabel 3.8.	Komponen Penurup Defisit Riil Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	274
Tabel 3.9.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2017-2019	275
Tabel 3.10.	Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Bone, 2020-2023	277
Tabel 3.11.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 2021-2023 (Rp Milyar)	280
Tabel 3.12.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp milyar)	283
Tabel 3.13.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp Milyar)	284
Tabel 4.1.	Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	302
Tabel 4.2.	Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	305
Tabel 4.3.	Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	307
Tabel 4.4.	Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data	312
Tabel 5.1.	Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi	322
Tabel 5.2.	Penjabaran misi ke dalam formulasi tujuan	327
Tabel 5.3.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018- 2023	328
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	331
Tabel 6.2.	Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan.....	332
Tabel 6.3.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan	334
Tabel 6.4.	Penyesuaian Nomenklatur Program KDH Terpilih ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan	336
Tabel 6.5.	Pemetaan Program Pembangunan Daerah Menurut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	337
Tabel 7. 1.	Kerangka Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp milyar)	347
Tabel 7.2.	Program Perangkat Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif Kabupaten Bone ..	349
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bone Tahun 2020-2023	419
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bone Tahun 2020-2023.....	422

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Ketinggian Lokasi Diatas Permukaan Laut	11
Gambar 2.2.	Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bone Tahun 2019	15
Gambar 2.3.	Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019	24
Gambar 2.4.	Piramida penduduk Kabupaten Bone Tahun 2019	25
Gambar 2.5.	Perkembangan Nilai Gini Ratio Bone, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	31
Gambar 2.6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	32
Gambar 2.7.	Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	32
Gambar 2.8.	Perkembangan angka Nilai IPM Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	33
Gambar 2.9.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan	34
Gambar 2.10.	Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2019	34
Gambar 2.11.	Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	34
Gambar 2.12.	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020	35
Gambar 2.13.	Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	37
Gambar 2.14.	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019	38
Gambar 2.15.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019	38
Gambar 2.16.	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015 – 2019	39
Gambar 2.17.	Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja	39
Gambar 2.18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019	40
Gambar 2.19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen), menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019	40
Gambar 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2014–2019	41
Gambar 2.21.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut	41
Gambar 2.22.	Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Bone Tahun 2014 – 2019	42
Gambar 2.23.	PDRB Per Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Bone	42
Gambar 2.24.	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Bone	43

Gambar 2.25.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	47
Gambar 2.26.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	48
Gambar 2.27.	Proporsi Jumlah Cadangan Pangan per 100 Ton Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	48
Gambar 2.28.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	49
Gambar 2.29.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015–2019	49
Gambar 2.30.	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	50
Gambar 2.31.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone	51
Gambar 2.32.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	52
Gambar 2.33.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	53
Gambar 2.34.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2016–2019	53
Gambar 2.35.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone, Tahun 2015–2019	53
Gambar 2.36.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	54
Gambar 2.37.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015–2019	55
Gambar 2.38.	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri di Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	55
Gambar 2.39.	Pertumbuhan Industri Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015–2019	56
Gambar 2.40.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone 2015-2019	69
Gambar 2.41.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	70
Gambar 2.42.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	70
Gambar 2.43.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2017-2019	71
Gambar 2.44.	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	71
Gambar 2.45.	Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	72
Gambar 2.46.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	72
Gambar 2.47.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2016-2019	73
Gambar 2.48.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	74
Gambar 2.49.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	74
Gambar 2.50.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	75
Gambar 2.51.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	75
Gambar 2.52.	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	76
Gambar 2.53.	Tingkat Prevalensi Tuberculosis Di Kabupaten Bone Tahun 2019	76
Gambar 2.54.	Tingkat Kematian Karena Tuberculosis Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2016	77
Gambar 2.55.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Bone Tahun 2018-2019	77

Gambar 2.56.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Bone	
78		
Gambar 2.57.	Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	79
Gambar 2.58.	Tingkat Kematian Akibat Malaria Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	79
Gambar 2.59.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bone	
80		
Gambar 2.60.	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	80
Gambar 2.61.	Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	81
Gambar 2.62.	Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	81
Gambar 2.63.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	82
Gambar 2.64.	Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	82
Gambar 2.65.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	83
Gambar 2.66.	Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	83
Gambar 2.67.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	84
Gambar 2.68.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	85
Gambar 2.69.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Jiwa/Km)	86
Gambar 2. 70.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kabupaten Bone	86
Gambar 2. 71.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bone	87
Gambar 2.72.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	88
Gambar 2.73.	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Bone	
91		
Gambar 2.74.	Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	92
Gambar 2. 75.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017-2019	92
Gambar 2.76.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2019	93
Gambar 2.77.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	94
Gambar 2.78.	Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	95
Gambar 2.79.	Persentase Permukiman yang tertata Kabupaten Bone Tahun 2018-2019	96
Gambar 2.80.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	96
Gambar 2.81.	Persentase Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bone Tahun 2016-2019	97
Gambar 2.82.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	97
Gambar 2.83.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2015-2018	98
Gambar 2.84.	Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	98
Gambar 2.85.	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	99
Gambar 2.86.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	100
Gambar 2.87.	Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	100
Gambar 2.88.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	101

Gambar 2.89. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	101
Gambar 2.90. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	102
Gambar 2.91. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	103
Gambar 2.92. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	103
Gambar 2.93. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	104
Gambar 2.94. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	105
Gambar 2.95. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	105
Gambar 2.96. Besaran Pekerja Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Bone	106
Gambar 2.97. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	106
Gambar 2.98. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	107
Gambar 2.99. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bone	107
Gambar 2.100. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Bone (dalam persen),	108
Gambar 2.101. Rasio KDRT Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	109
Gambar 2.102. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	109
Gambar 2.103. Produksi Beras Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (ton)	110
Gambar 2.104. Ketersediaan Energi Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (kkal/hari)	110
Gambar 2.105. Persentase Pangan yang Aman dikonsumsi Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	111
Gambar 2.106. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	111
Gambar 2.107. Indeks Kualitas Air Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	112
Gambar 2.108. Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	112
Gambar 2.109. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha	113
Gambar 2.110. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	113
Gambar 2.111. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	114
Gambar 2.112. Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah yang Tertangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	114
Gambar 2.113. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurai Melalui 3R Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	115
Gambar 2.114. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019	115
Gambar 2.115. Nilai TPA Passippo Kabupaten Bone Tahun 2018-2019	117
Gambar 2.116. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk/Jiwa Bone Tahun 2015-2019	117
Gambar 2.117. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (yang Memiliki KTP-EL /Jiwa) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	118
Gambar 2.118. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	118
Gambar 2.119. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	119

- Gambar 2.120. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 120
- Gambar 2.121. Persentase jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang Terbina Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019 120
- Gambar 2.122. Presentase LPM aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 121
- Gambar 2.123. Presentase PKK aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 121
- Gambar 2.124. Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 122
- Gambar 2.125. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone 122
- Gambar 2.126. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 123
- Gambar 2.127. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019 123
- Gambar 2.128. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bone tahun 2015-2019 124
- Gambar 2.129. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15– 49 Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2017-2019 124
- Gambar 2.130. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Bone 2017-2019 125
- Gambar 2.131. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Bone 126
- Gambar 2.132. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 127
- Gambar 2.133. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 127
- Gambar 2.134. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 128
- Gambar 2.135. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone 2015-2019 128
- Gambar 2.136. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 129
- Gambar 2.137. Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Bone 129
- Gambar 2.138. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Kab. Bone (persen), Tahun 2015-2019 130
- Gambar 2.139. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 130
- Gambar 2.140. Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 131
- Gambar 2.141. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Bone 131
- Gambar 2.142. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 132
- Gambar 2.143. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 132
- Gambar 2.144. Jumlah Arus Penumpang Kabupaten Bone, Tahun 2015-2019 133
- Gambar 2.145. Rasio Izin Trayek Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 133
- Gambar 2.146. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 134
- Gambar 2.147. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 135
- Gambar 2.148. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 135

Gambar 2.149. Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	136
Gambar 2.150. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	136
Gambar 2.151. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019	137
Gambar 2.152. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	137
Gambar 2.153. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun di Kabupaten Bone	138
Gambar 2.154. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	139
Gambar 2.155. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	140
Gambar 2.156. Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	140
Gambar 2.157. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	141
Gambar 2.158. Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	142
Gambar 2.159. Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	142
Gambar 2.160. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	143
Gambar 2.161. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	143
Gambar 2.162. Ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bone, 2015-2019	145
Gambar 2.163. Ketersediaan Buku "PDRB" Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	145
Gambar 2.164. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	146
Gambar 2.165. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	146
Gambar 2.166. Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	147
Gambar 2.167. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (orang)	147
Gambar 2.168. Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	148
Gambar 2.169. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	148
Gambar 2.170. Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	149
Gambar 2.171. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilaian yang Bersertifikat Kabupaten Bone	149
Gambar 2.172. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019	150
Gambar 2.173. PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Rp)	151
Gambar 2.174. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	152
Gambar 2.175. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019	153
Gambar 2.176. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone	153
Gambar 2.177. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun 2019 (Kuintal/Ha)	154
Gambar 2.178. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bone	154
Gambar 2.179. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Bone, Tahun 2015-2017	155
Gambar 2.180. Persentase Pertambangan yang Tidak Memiliki Izin Kabupaten Bone 2015-2019	155
Gambar 2.181. Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	156
Gambar 2.182. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	156
Gambar 2.183. Produksi Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (ton)	157
Gambar 2.184. Konsumsi Ikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	157
Gambar 2.185. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	158
Gambar 2.186. Persentase SILPA Kabupaten Bone 2015-2019	159

Gambar 2.187.	Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	160
Gambar 2.188.	Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	160
Gambar 2.189.	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone	160
Gambar 2.190.	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Desa Kabupaten Bone Tahun 2015-2019	161
Gambar 2.191.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Bone	162
Gambar 2.192.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	163
Gambar 2.193.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	163
Gambar 2.194.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	164
Gambar 2.195.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	164
Gambar 2.196.	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Bone Tahun 2015-2017	216
Grafik 3.1.	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019	255
Grafik 3.2.	Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019	256
Grafik 3.3.	Realisasi Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019	256
Grafik 3.4.	Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019	257
Grafik 3.5.	Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019	259
Grafik 3.6.	Realisasi DBH dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2019	260
Grafik 3.7.	Realisasi DAU dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan	260
Grafik 3.8.	Realisasi DAK dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan	262
Grafik 3.9.	Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	262
Grafik 3.10.	Surplus/Defisit Keuangan Daerah Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	265
Grafik 3.11.	Realisasi Komponen Pembiayaan Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	265
Grafik 3.12.	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (%)	273
Gambar 5.1.	Keselaran Visi RPJPD Kabupaten Bone dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone	323
Gambar 5.2.	Keselaran Misi RPJPD Kabupaten Bone dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone	323
Gambar 5.3.	Keselaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone	324
Gambar 5.4.	Keselaran Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone	324
Gambar 5.5.	Keselaran Visi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone	325
Gambar 5.6.	Keselaran Misi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone	326

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BONE NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023, Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. dan Drs. H. Ambo Dalle, MM., pada tanggal 26 September 2018 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr., maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen tersebut harus selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Bagian 5 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dari segimuan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone bersifat mutatis mutandis atau sama dengan penyusunan baru sesuai amanat pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan muatan perubahan dokumen RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 karena menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk kebijakan mendasar perubahan RPJMD Provinsi Sulsel tahun 2018-2023. Selain itu, Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bone memperhatikan konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk memastikan tujuan, target, dan indikator TPB benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis TPB juga menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Urgensi perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 di dasarkan adanya perubahan yang mendasar yaitu adanya dampak bencana non-alam Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional koreksi yang berdampak sistemik pada Kabupaten Bone, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam perkembangannya, setelah RPJMD Kabupaten Bone berjalan efektif selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pandemi Covid-19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Keseluruhan perubahan ini menuntut pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk melakukan penyesuaian desain perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan revisi/perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Inisiatif untuk melakukan perubahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Bone, sejalan dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 342, yang menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan karena tiga alasan, yaitu: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) terjadi perubahan yang mendasar, yaitu mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Selain adanya perubahan peraturan perundangan dan pandemi covid 19, perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dipengaruhi juga dengan capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,11 persen, tentunya sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok Tahun 2020 sebesar 9,18 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bone terutama pada sektor perhotelan, jasa, ketenagakerjaan dan perdagangan. Selanjutnya inflasi Kabupaten Bone Tahun 2020 sebesar 1,64 persen, capaian tersebut masih berada pada kisaran yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2020. Mengenai kondisi ketenagakerjaan meliputi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone Tahun 2020 sebesar 3,25 persen dan target RPJMD pokok sebesar 4,01 persen.

Peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone Tahun 2020 sebesar 10,62 persen dari total populasi atau sebanyak 81 ribu jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2019, penduduk miskin Kabupaten Bone meningkat sekitar 0,65 % atau sekitar 5 ribu jiwa tahun 2020. Peningkatan tersebut diakibatkan karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2019, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Kabupaten adalah 220 Indikator SDGs. Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 51 indikator (23,18 persen), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 31 indikator (14,09 persen), Indikator yang belum dilaksanakan / belum mencapai target sebanyak 102 indikator (46,36 persen), dan indikator yang belum memiliki data sebanyak 36 indikator (16,36 persen).

Perubahan RPJMD dari segi pentahapan lima tahunan, RPJMD periode ini merupakan tahapan ketiga dan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bone. RPJPD penting menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang melalui pentahapan pembangunan daerah. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

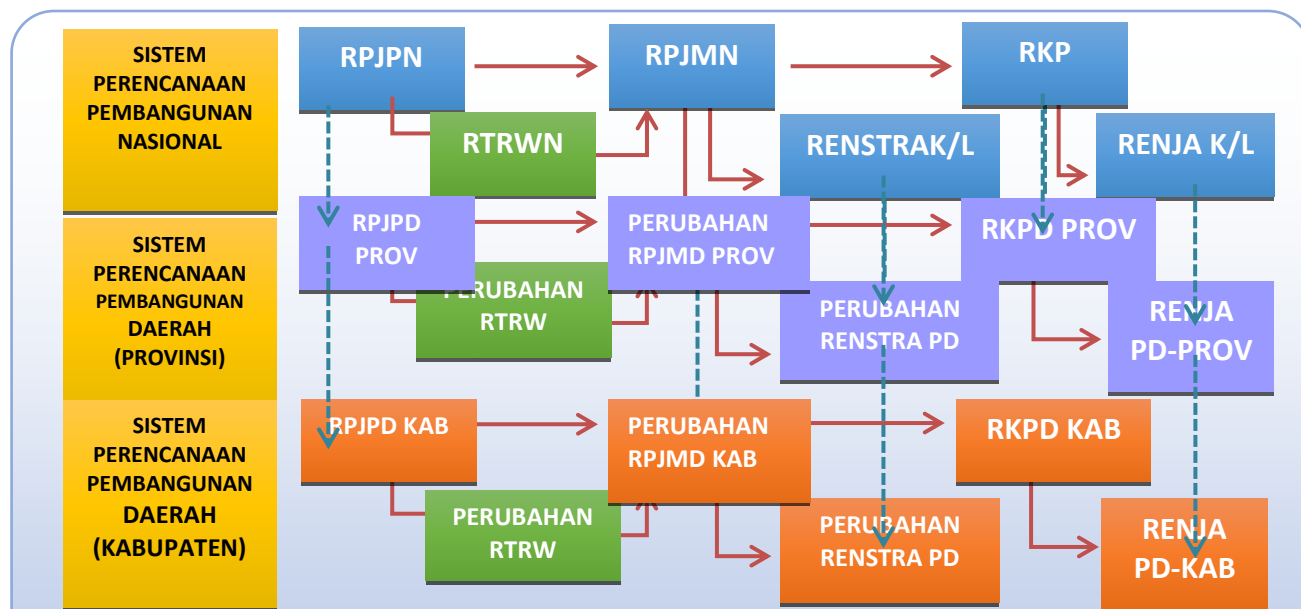
Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 mempunyai kaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025, dimana Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan arahan pembangunan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan daerah yang terdapat di dalam RPJPD tahapan ketiga dan keempat.

Dari segi keruangan, Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone juga disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada awalnya, acuan Nasional yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, mengingat RPJMD Kabupaten Bone disusun sebelum terbitnya RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Namun pada saat penyusunan Perubahan RPJMD ini, RPJM Nasional Tahun 2020-2024 telah terbit dan digunakan sebagai acuan. Sedikit berbeda dengan Visi Indonesia di dalam Rancangan Teknokratik RPJMN, Visi Indonesia di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut sejalan dengan Visi Kabupaten Bone tahun 2023 yaitu Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Tabel 1.1. Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Visi RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”			Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			Visi RPJMD Kabupaten Bone : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”		
MISI			MISI			MISI		
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia			4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan social dasar lainnya		
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing			3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			2. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat		
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan			2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel			4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis desa dan Kawasan perdesaan		
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public		
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa			1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beba korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)		
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya								

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga harus memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone harus menunjukkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan provinsi dan Nasional yang secara substansial tercermin pada formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejumlah substansi yang terdapat di dalam dokumen KLHS, seperti daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, isu strategis dan permasalahan, serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Secara regional, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga memperhatikan dokumen RPJMD kabupaten tetangga, antara lain, RPJMD Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Wajo, RPJMD Kabupaten Maros, RPJMD Kabupaten Sinjai, dan RPJMD Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi acuan bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Perubahan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bone, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selain itu, Perubahan RPJMD ini juga dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2018-2023 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan dicapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone.

5. Menjadi instrument bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Bone berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulsel.
7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini berisi uraian mengenai kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi capaian target indikator standar pelayanan minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable development goals dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah. Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta proyeksi keuangan ke depan dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah. Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah selama ini dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Terpilih Periode Tahun 2018-2023 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi tersebut, dan kemudian menjabarkan ke dalam pernyataan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, dan rincian program pembangunan daerah berdasarkan arah kebijakan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Bab ini akan menguraikan rencana penggunaan kapasitas riil dan alokasi anggaran berdasarkan prioritas serta program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja program, dan pagu indikatif yang dirinci per tahun selama periode 2018-2023.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bab ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Terpilih pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup. Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi Kabupaten Bone diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan uraian tentang aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batasan Wilayah

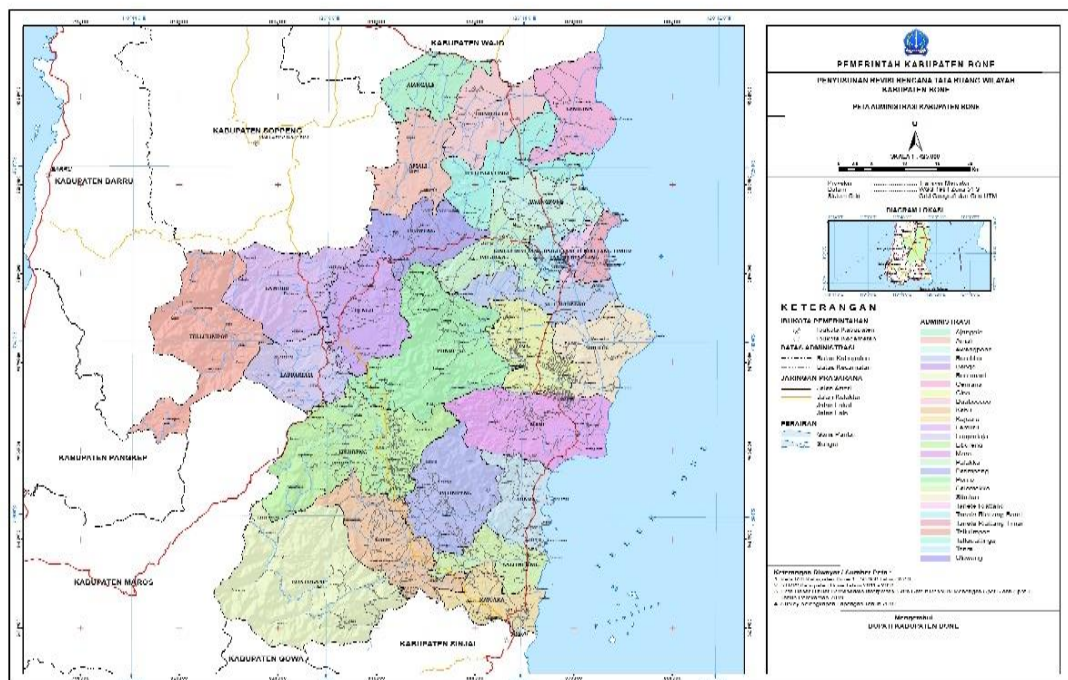
Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi 4013'-506' Lintang Selatan dan antara 119042'-120030' Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bone berada pada wilayah tropis. Kondisi ini menunjukkan ada potensi pengembangan berbagai jenis tanaman tropis.

Secara administratif, Kabupaten Bone berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2020

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Jarak (Km)	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bontocani	Kahu	112	463,35	10,16
2	Kahu	Palattae	100	189,50	4,16
3	Kajuara	Bojo	70	124,13	2,72
4	Salomekko	Manera	62	84,91	1,86
5	Tonra	Bulu-bulu	52	200,32	4,39
6	Patimpeng	Latobang	77	130,47	2,86
7	Libureng	Camming	83	344,25	7,55
8	Mare	Kadai	37	263,50	5,78
9	Sibulue	Pattiro Bajo	15	155,80	3,42
10	Cina	Tanete Harapan	17	147,50	3,24
11	Barebbo	Apala	9	114,20	2,50
12	Ponre	Lonrong	30	293,00	6,43
13	Lappariaja	Matango	51	138,00	3,03
14	Lamuru	Lalebata	62	208,00	4,56
15	Tellu Limpoe	Tujue	74	318,10	6,98
16	Bengo	Bengo	44	164,00	3,60
17	Ulaweng	Taccipi	17	161,67	3,55
18	Palakka	Passippo	12	115,32	2,53
19	Awangpone	Componge	8	110,70	2,43
20	Tellu Siattange	Tokaseng	17	159,30	3,49
21	Amali	Taretta	36	119,13	2,61
22	Ajangale	Pompanua	46	139,00	3,05
23	Dua Boccoe	Uloe	30	144,90	3,18
24	Cenrana	Ujung Tanah	38	143,60	3,15
25	TR Barat	Macanang	0	53,68	1,18
26	Tanete Riattang	Salekoe	3	23,79	0,52
27	TR Timur	Lonrae	8	48,88	1,07
Kabupaten Bone		Watampone		4.559,00	100,00

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2020

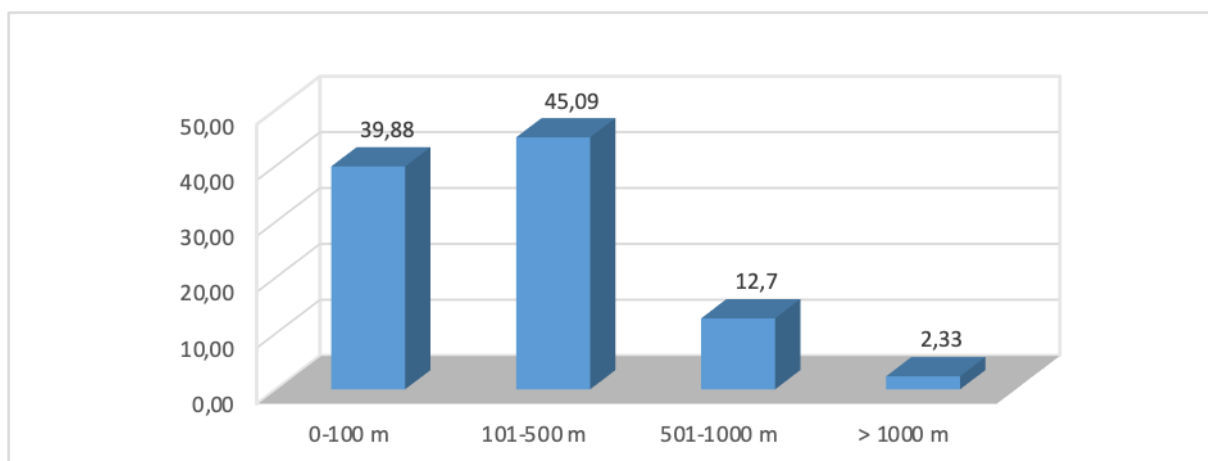
Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Luas wilayah Kabupaten Bone kurang lebih 4.559 Km² atau

7,30 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan, dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. Wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten Bone adalah Kecamatan Bontocani dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Bone memiliki wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir. Wilayah bagian barat Kabupaten Bone pada umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan, sedangkan wilayah bagian timur pada umumnya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan komoditas pada wilayah tersebut mayoritas sesuai untuk tanaman dataran rendah.

Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Ketinggian Lokasi Diatas Permukaan Laut (dalam persen), Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2020

2.1.1.3. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembapan udara berkisar antara 76%-87% dengan temperatur berkisar 24^oC-28^oC. Suhu cukup tinggi rata-rata terjadi pada bulan November-Desember dan terendah pada bulan Juli di musim kemarau. Pada periode April-September bertiup Angin Timur yang membawa hujan, sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu : Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Tabel 2.2. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No.	Bulan	Suhu (^o C)	Kelembaban (%)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	26,5	82	222
2	Februari	26,2	83	129
3	Maret	26,4	83	142
4	April	26,5	84	360
5	Mei	26,1	86	408
6	Juni	25,5	87	556
7	Juli	24,8	85	97
8	Agustus	24,9	81	6
9	September	25,9	81	5
10	Oktober	27,0	76	12
11	November	28,0	76	63
12	Desember	28,0	79	224

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2020

2.1.1.4. Hidrologi

Ketersediaan air untuk pengembangan sektor pertanian dan pemukiman bersumber dari sungai dan jaringan irigasi. Kondisi ketersediaan air di wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat dari banyaknya sungai, baik yang langsung bermuara ke laut, maupun bermuara di Danau Tempe di Kabupaten Wajo (melalui Sungai Walanae) dan sungai-sungai besar lainnya.

Beberapa lokasi-lokasi yang berkontribusi terhadap ketersediaan sumber-sumber air baku di Kabupaten Bone, diantaranya bersumber dari sungai-sungai besar dan prasarana jaringan irigasi. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Bone seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo. Sedangkan Wilayah Kabupaten Bone memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pada beberapa wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian dengan sistem irigasi teknis. Beberapa kawasan pertanian tersebut didukung oleh ketersediaan air yang memadai namun beberapa kawasan lainnya masih memiliki keterbatasan terutama pada musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air, maka beberapa prasarana dan potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah:

1. Beberapa sungai besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk irigasi.
2. Perluasan irigasi guna mengembangkan penggunaan air, melindungi areal produksi dan menghindari kerusakan lahan akibat banjir dan kekeringan serta mendukung pemanfaatan areal pertanian baru dan penyediaan air bagi masyarakat.
3. Sistem Prasarana Penyediaan Air Bersih, baik untuk permukiman maupun untuk keperluan industri dan kegiatan lainnya.
4. Sistem Prasarana Irigasi Pertanian dan Sistem Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.
5. Sistem Prasarana Konservasi Sungai dan Waduk.

Potensi lain yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya di Kabupaten Bone adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bone bermuara pada pesisir pantai Timur Kabupaten Bone, sedangkan hulu DASnya berada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, Maros dan Soppeng. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten lain disekitarnya dalam mengelola sumberdaya air tersebut.

Pengelolaan air di Kabupaten Bone dilakukan dengan pembentukan waduk dan embung, yang secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2019

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Wilayah Kecamatan
1	Lonrong	37.009,37	Kec. Tonra, Sibulue, Cina, Ponre dan Barebbo
2	Bulu-Bulu	8.558,84	Kec. Salomekko, Tonra, Mare
3	Marek	35.489,71	Kec. Tonra, Mare, Libureng, Cina, Ponre
4	Baleng	21.581,59	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Lappariaja, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone, Ulaweng.
5	Awangpone	12.760,84	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone
6	Lisu	667,67	Kec. Lamuru
7	Tippulue	736,88	Kec. Tanete Riattang Timur
8	Bajoe	379,98	Kec. Tanete Riattang Timur
9	Barebbo	2.812,56	Kec. Cina, Barebbo, Palakka
10	Boarenge	2.039,74	Kec. Sibulue dan Barebbo
11	Boto	202,06	Kec. Sibulue
12	Cumene	577,57	Kec. Sibulue
13	Maros	134,51	Kec. Bontocani
14	Lab Lang	10.199,88	Kec. Kajuara, Salomekko, Tonra
15	Matuju	15.677,37	Kec. Palakka, Awangpone, Ulaweng, Tellu Siattinge
16	Benteng Barang	1.883,00	Kec. Sibulue
17	Marek Ds	14.077,22	Kec. Mare, Sibulue, Cina, Ponre
18	Tangka	9.715,81	Kec. Kajuara, Bontocani, Kahu
19	Salomekko Ds	21.040,71	Kec. Kajuara, Salomekko, Bontocani, Kahu dan Tonra

20	Sigeri	4,20	Kec. Lamuru
21	Bila Walannae	257.531,25	Kec. Salomekko, Bontocani, Kahu, Tonra, libureng, Ponre, lappariaja, Lamuru, Awangpone, Ulaweng, Tellusiattinge, Dua Bocoe, Cenrana, Ajangale
22	Pangkajenne	4.843,57	Kec. Lamuru
23	Tanete Riattang	2.341,44	Kec. Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Palakka.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bone berdasarkan fungsi utama lahan. Secara makro penggunaan lahan dibagi kedalam beberapa kawasan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan pada kawasan lindung diarahkan pada pemantapan kawasan yang berfungsi lindung, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman/perkotaan maupun budidaya produktif (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya) sesuai arahan dalam RTRW.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah menurut arahan dalam RTRW di Kabupaten Bone, meliputi beberapa kawasan diantaranya adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Bone dijadikan titik tolak didalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya ditetapkan guna mengakomodasi kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya produksi maupun permukiman. Pengelolaan kawasan lindung yang ada perlu dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim pada wilayah belakangnya.

Pengelolaan kawasan lindung mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Bone meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sesuai dengan kondisi wilayah, kawasan lindung yang perlu ditetapkan di Kabupaten Bone sesuai dengan kriterianya masing-masing adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
2. Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, meliputi: kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar alam.
4. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi: kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung dan kawasan rawan tanah longsor.
5. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
6. Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi terumbu karang yang terdiri atas: zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Kawasan hutan lindung tersebar pada beberapa kecamatan dan luasnya bervariasi antar kecamatan. Luas kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Bone seluas 37.942,12 Ha dan tersebar di Kecamatan Awangpone seluas 456,89 Ha (1,20%), Kecamatan Tellu Siattinge seluas 396,57 Ha (1,05%), Kecamatan Cenrana seluas 2.046,72 Ha (5,39%), Kecamatan Mare seluas 4.680,66 Ha (12,34%), Kecamatan Sibulue seluas 1.605,96 Ha (4,23%), Kecamatan Barebbo seluas 235,95 Ha (0,62%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 303,10 Ha (0,80%), Kecamatan Lamuru seluas 15.824 Ha (41,71%), Kecamatan Ponre seluas 1.100,88 Ha (2,90%), Kecamatan Lappariaja seluas 2.505,65 Ha (6,60%), Kecamatan Tonra seluas 6.129,28 Ha (16,15%), Kecamatan Libureng seluas 2,81 Ha (0,01%), Kecamatan Cina seluas 2.361 Ha (6,22%), Kecamatan Dua Boccoe seluas 223,56 Ha (0,59%) dan Kecamatan Bontocani seluas 68,46 Ha (0,18%). Upaya dan arahan untuk melestarikan kawasan hutan lindung yang perlu dipertahankan dan tingkatkan dapat dilakukan melalui kebijakan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan,
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dapat mengganggu fungsi lindung,
- Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan,
- Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif,
- Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

Kawasan resapan air ditetapkan pada Daerah Aliran Sungai disebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru.

Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Cenrana, Tellu Siattinge, Awangpone, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara dengan ketentuan : daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit

100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan dan tersebar disepanjang tepian sungai di kabupaten Bone dengan kriteria : daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

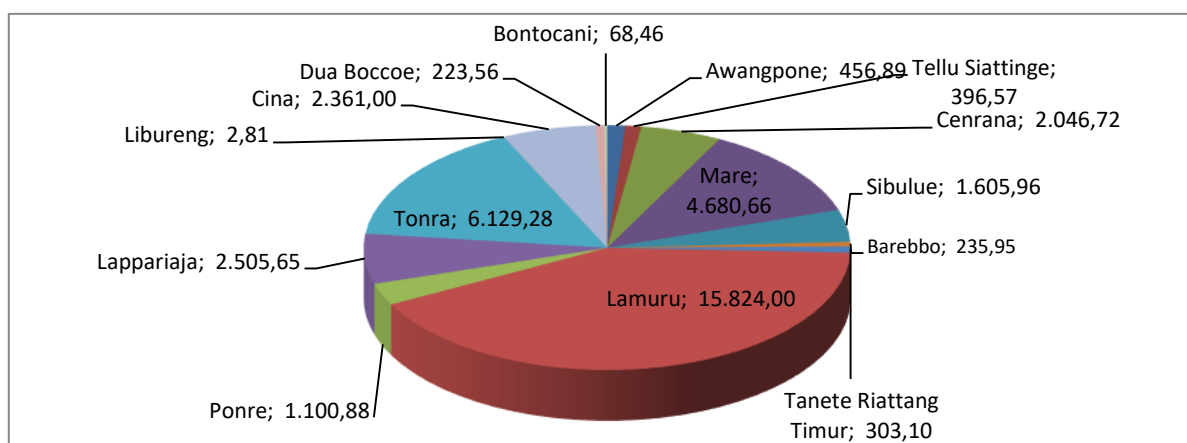
Kawasan Sekitar Mata Air ditetapkan di mata air Wollangi 1, Wollangi 2 dan Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan Sekitar Mata Air perlu mendapat perlindungan dan pelestarian. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Watampone dan sekitarnya sangat tergantung pada sumber mata air ini. Kemampuan cadangan air yang bersumber dari mata air, diperkirakan sebesar 293 Liter/Detik, dimana yang dimanfaatkan baru 36,86 persen (108 Detik/Liter).

Kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp, PPK dan PPL.

Kawasan taman wisata alam dengan luasan sekitar 3.770 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya disebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. Sedangkan Kawasan cagar alamyang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Cani Sirenreng yang berada disebagian wilayah Kabupaten Bone dengan luas sekitar 712,7 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Lappariaja seluas 108,93 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe seluas 603,77 Ha.

Gambar 2.2. Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber: RTRW Kabupaten Bone, 2012-2032

Kawasan Rawan Bencana Alam merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terjadinya bencana alam. Kawasan rawan banjir ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah

Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Kajuaara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.

Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue dan Libureng. Sedangkan kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuaara, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre.

Kawasan Lindung Geologi merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi agar fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak saling merugikan. Kawasan rawan bencana alam geologi merupakan kawasan rawan gempa bumi ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas: kawasan sempadan mata air ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng, mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuaara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur serta kawasan imbuhan air tanah ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Cina dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Siattinge.

Pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah, diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya. Dikaitkan dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting, delineasi kawasan lindung kemungkinan akan berhadapan dengan permasalahan tumpang tindih dengan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindungnya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pengendaliannya agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan. Di samping untuk mencegah erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjada hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Beberapa kasus permasalahan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bone adalah:

- Perambahan atau intervensi hutan lindung oleh masyarakat untuk kegiatan perlandangan berpindah, sehingga menyebabkan semakin meluasnya lahan-lahan kritis,
- Kondisi eksisting pada kawasan hutan lindung yang ternyata sudah tidak mempunyai fungsi lindung lagi,
- Kegiatan budidaya yang telah lama berkembang yang menurut kriteria fisik merupakan kawasan lindung, dan
- Permukiman yang telah berkembang lama di dalam kawasan lindung.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya secara umum merupakan kawasan di luar yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan manusia serta sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang mencakup; kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan 16.309,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Sibulue, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Salomekko, Libureng dan Mare. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 80.471 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Libureng, Mare, Kahu, Bontocani, Lamuru, Tellu Siattinge, Awangpone, Palakka dan Barebbo.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas : kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan

Tabel. 2.4 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2019

KECAMATAN	LUAS (HA)	PERSEN
AJANGALE	5.626	4,72

AMALI	-	-
AWANGPONE	5.525,31	4,63
BAREBBO	3.053,14	2,56
BENGO	-	-
BONTOCANI	4.286,40	3,60
CENRANA	5.162,60	4,33
CINA	4.970,85	4,17
DUABOCCOE	1.295,15	1,09
KAHU	9.767,08	8,19
KAJUARA	4.026,44	3,38
LAMURU	6.341,08	5,32
LAPPARIAJA	5.765,48	4,84
LIBURENG	19.731,70	16,55
MARE	3.884,50	3,26
PALAKKA	10.310,70	8,65
PATIMPENG	-	-
PONRE	1.700,02	1,43
SALOMEKKO	8.915,28	7,48
SIBULUE	6.009,37	5,04
TANETERIATTANG	276,04	0,23
TANETERIATTANG BARAT	908,28	0,76
TANETERIATTANG TIMUR	1.209,87	1,01
TELLULIMPOE	-	-
TELLUSIATTINGE	1.915,77	1,61
TONRA	7.284,82	6,11
ULAWENG	1.249,96	1,05
Total	119.215,84	100

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas 119.216 Ha ditetapkan yang paling potensial adalah Kecamatan Libureng seluas 19.731,70 Ha (16,55%), Kecamatan Kahu seluas 9.767,08 Ha (8,19%), dan Kecamatan Palakka seluas 10.310,70 Ha (8,65%).

Tabel. 2.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura di Kabupaten Bone Tahun 2019

Kecamatan	Luas (Ha)	Persen
AJANGALE	11.720,02	6,31
AMALI	-	-
AWANGPONE	6.455,30	3,47
BAREBBO	6.298,69	3,39
BENGO	-	-
BONTOCANI	10.363,24	5,58
CENRANA	2.615,38	1,41
CINA	8.852,20	4,76
DUABOCCOE	14.247,05	7,66
KAHU	7.358,54	3,96
KAJUARA	4.125,58	2,22
LAMURU	19.524,29	10,50
LAPPARIAJA	18.220,33	9,80
LIBURENG	8.524,18	4,59
MARE	9.438,67	5,08
PALAKKA	146,10	0,08

PATIMPENG	-	-
PONRE	8.824,40	4,75
SALOMEKKO	3.730,98	2,01
SIBULUE	4.682,12	2,52
TANETERIATTANG	574,14	0,31
TANETERIATTANG BARAT	1.507,82	0,81
TANETERIATTANG TIMUR	431,07	0,23
TELLULIMPOE	-	-
TELLUSIATTINGE	12.963,93	6,97
TONRA	5.876,43	3,16
ULAWENG	19.400,73	10,44
Total	185.881,19	100

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan 185.881,18 Ha ditetapkan disebagian Kecamatan Ajangale seluas 11.720,02 Ha (6,31%), Kecamatan Awangpone seluas 6.455,30 Ha (3,47%), Kecamatan Barebbo seluas 6.298,69 Ha (3,39%), Kecamatan Bontocani seluas 10.363,24 Ha (5,58%), Kecamatan Cenrana seluas 2.615,38 Ha (1,41%), Kecamatan Cina seluas 8.852,20 Ha (4,76%), Kecamatan Duaboccoe seluas 14.247,05 Ha (7,66%), Kecamatan Kahu seluas 7.358,54 Ha (3,96%), Kecamatan Kajuara seluas 4.125,58 Ha (2,22%), Kecamatan Lamuru seluas 19.524,29 Ha (10,50%), Kecamatan Lappariaja seluas 18.220,33 Ha (9,80%), Kecamatan Libureng seluas 8.524,18 Ha (4,59%), Kecamatan Mare seluas 9.438,67 Ha (5,08%), Kecamatan Palakka seluas 146,10 Ha (0,08%), Kecamatan Ponre seluas 8.824,40 Ha (4,75%), Kecamatan Salomekko seluas 3.730,98 Ha (2,01%), Kecamatan Sibulue seluas 4.682,12 Ha (2,52%), Kecamatan Tanete Riattang seluas 574,14 Ha (0,31%), Kecamatan Tante Riattang Barat seluas 1.507,82 Ha (0,81%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 431,07 Ha (0,23%), Kecamatan Tellusiattinge seluas 12.963,93 Ha (6,97%), Kecamatan Tonra seluas 5.876,43 Ha (3,16%), dan Kecamatan Ulaweng seluas 19.400,73 Ha (10,44%).

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi : kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada dan kelapa hibrida ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra dan Ulaweng serta Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan pabrik Gula Arasoe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng, Ponre, Kahu, Patimpeng, Tonra, Cina, Mare dan Salomekko.

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra, Amali, Bengo, Tellu Limpoe, Patimpeng, dan Ulaweng. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas 119.216 Ha.

3. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan dan pelabuhan perikanan.
4. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara serta kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
5. Kawasan peruntukan industri , terdiri atas kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.
6. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
7. Kawasan peruntukan pemukiman, terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman pedesaan.

8. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan perdagangan, olahraga, pertahanan dan keamanan serta keselamatan operasi penerbangan.

Tabel. 2.6 Kawasan Budidaya Kabupaten Bone Tahun 2019

Kawasan	Luas	Keterangan
1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		
1. Kawasan hutan produksi tetap	16.309,73 Ha	Kecamatan Tonra, Sibulue, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Salomekko, Libureng dan Mare
2. Kawasan hutan produksi	80.471 Ha	Kecamatan Tonra, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Libureng, Mare, Kahu, Bontocani, Lamuru, Tellu Siattinge, Awangpone, Palakka dan Barebbo.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian		
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	119.216 Ha	
	5.626 Ha (4,72%)	Kecamatan Ajangale
	5.525,31 Ha (4,63%)	Kecamatan Awangpone
	3.053,14 Ha (2,56%)	Kecamatan Barebbo
	4.286,40 Ha (3,60%)	Kecamatan Bontocani
	5.162,60 Ha (4,33%)	Kecamatan Cenrana
	4.970,85 Ha (4,17%)	Kecamatan Cina
	1.295,15 Ha (1,09%)	Kecamatan Dua Boccoe
	9.767,08 Ha (8,19%)	Kecamatan Kahu
	4.026,44 Ha (3,38%)	Kecamatan Kajuara
	6.341,08 Ha (5,32%)	Kecamatan Lamuru
	5.765,48 Ha (4,84%)	Kecamatan Lappariaja
	19.731,70 Ha (16,55%)	Kecamatan Libureng
	3.884,50 Ha (3,26%)	Kecamatan Mare
	10.310,70 Ha (8,65%)	Kecamatan Palakka
	1.700,02 Ha (1,43%)	Kecamatan Ponre
	8.915,28 Ha (7,48%)	Kecamatan Salomekko
	6.009,37 Ha (5,04%)	Kecamatan Sibulue
	276,04 Ha (0,23%)	Kecamatan Tanete Riattang
	908,28 Ha (0,76%)	Kecamatan Tanete Riattang Barat
	1.209,87 Ha (1,01%)	Kecamatan Tanete Riattang Timur
	1.915,77 Ha (1,61%)	Kecamatan Tellu Siattinge
	7.284,82 Ha (6,11%)	Kecamatan Tonra
	1.249,96 Ha (1,05%)	Kecamatan Ulaweng
b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura	185.881,18 Ha	
	11.720,02 Ha (6,31%)	Kecamatan Ajangale
	6.455,30 Ha (3,47%)	Kecamatan Awangpone
	6.298,69 Ha (3,39%)	Kecamatan Barebbo
	10.363,24 Ha (5,58%)	Kecamatan Bontocani

	2.615,38 Ha (1,41%)	Kecamatan Cenrana
	8.852,20 Ha (4,76%)	Kecamatan Cina
	14.247,05 Ha (7,66%)	Kecamatan Duaboccoe
	7.358,54 Ha (3,96%)	Kecamatan Kahu
	4.125,58 Ha (2,22%)	Kecamatan Kajuara
	19.524,29 Ha (10,50%)	Kecamatan Lamuru
	18.220,33 Ha (9,80%)	Kecamatan Lappariaja
	8.524,18 Ha (4,59%)	Kecamatan Libureng
	9.438,67 Ha (5,08%)	Kecamatan Mare
	146,10 Ha (0,08%)	Kecamatan Palakka
	8.824,40 Ha (4,75%)	Kecamatan Ponre
	3.730,98 Ha (2,01%)	Kecamatan Salomekko
	4.682,12 Ha (2,52%)	Kecamatan Sibulue
	574,14 Ha (0,31%)	Kecamatan Tanete Riattang
	1.507,82 Ha (0,81%)	Kecamatan Tante Riattang Barat
	431,07 Ha (0,23%)	Kecamatan Tanete Riattang Timur
	12.963,93 Ha (6,97%)	Kecamatan Tellusiattinge
	5.876,43 Ha (3,16%)	Kecamatan Tonra
	19.400,73 Ha (10,44%)	Kecamatan Ulaweng
c. Kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada dan kelapa hibrida		Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra dan Ulaweng
d. Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan pabrik Gula Arasoe		Kecamatan Libureng, Ponre, Kahu, Patimpeng, Tonra, Cina, Mare dan Salomekko.
e. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas		Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra, Amali, Bengo, Tellu Limpoe, Patimpeng, dan Ulaweng.
f. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	119.216 Ha	

3. Kawasan peruntukan perikanan		
a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap		
b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan		
c. kawasan pengolahan ikan dan pelabuhan perikanan.		
4. Kawasan peruntukan pertambangan		
a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara		
b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi		
5. Kawasan peruntukan industri		
a. Kawasan peruntukan industri besar		
b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.		
6. Kawasan peruntukan pariwisata		
a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya		
b. Kawasan peruntukan pariwisata alam		
c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.		
7. Kawasan peruntukan pemukiman		
a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan		
b. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan		
8. Kawasan peruntukan lainnya		
a. Kawasan peruntukan perdagangan		
b. kawasan peruntukan olahraga		
c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan		
d. kawasan peruntukan keselamatan operasi penerbangan		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.1.3. Demografi

Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang relatif luas pula. Jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 801.775 jiwa sedangkan luas wilayah Kabupaten Bone mencapai 4.559 Km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2019 mencapai 175 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 36 jiwa/km². Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran.

Fenomena demografi yang menarik diungkapkan di Kabupaten Bone adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun karena migrasi. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 742.912 jiwa menjadi 801.775 jiwa. Meskipun demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone relatif kecil, yaitu hanya bertumbuh 2,11 persen selama lima tahun terakhir (2015-2019), atau tumbuh sekitar 0,54 persen per tahun.

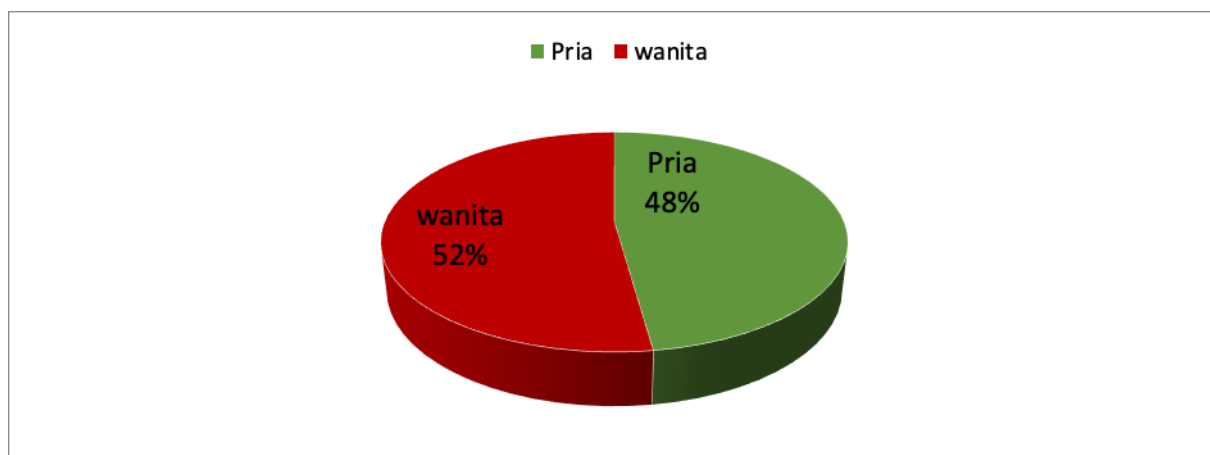
Tabel 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bone, 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Sex Ratio
1	2015	742.912	0,60	163	91,27
2	2016	746.973	0,55	164	91,39
3	2017	751.026	0,54	165	91,52
4	2018	754.894	0,52	165	91,63
5	2019	801.775	0,54	175	91,78

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2020

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bone lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 390.227 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 411.548 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah 92,28 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Proporsi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6. Persentase Penduduk Pria dan Wanita di Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2020

Penduduk Kabupaten Bone tersebar di 27 kecamatan, dimana jumlah penduduk paling banyak berada di sembilan kecamatan yaitu Tanete Riattang dengan 53.624 jiwa, Tanete Riattang Barat sebanyak 50.474 jiwa, Tanete Riattang Timur 44.303 jiwa, Tellu Siattinge 40.222 jiwa, Kahu 39.292 jiwa, Kajuara 37.160 jiwa, Sibulue 34.814 jiwa, Dua Boccoe 30.306 jiwa, dan Libureng sebanyak 30.200 jiwa. Penduduk Kabupaten Bone yang menetap di kecamatan ini mencapai 47,51 persen atau akumulasinya mencapai 360.395 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah di Kabupaten Bone adalah Tonra, Ponre, Tellu Limpoe, Salomekko, Bontocani, Patimpeng, Amali, Palakka, dan Lappariaja. Total penduduk di sembilan kecamatan ini hanya 158.626 jiwa atau 20,91 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bone.

Proporsi penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Bone tahun 2019 menunjukkan angka 91,78. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Jika $SR > 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, $SR = 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah

penduduk perempuan, dan $SR < 100$ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin yang berada dibawah 100 menunjukkan bahwa jumlah perempuan relatif lebih banyak daripada laki-laki. Hanya tiga kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki rasio jenis kelamin diatas 100 atau jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan yaitu Taneteriattang Timur (101,06), Tellu Limpoe (100,97), dan Libureng (101,94).

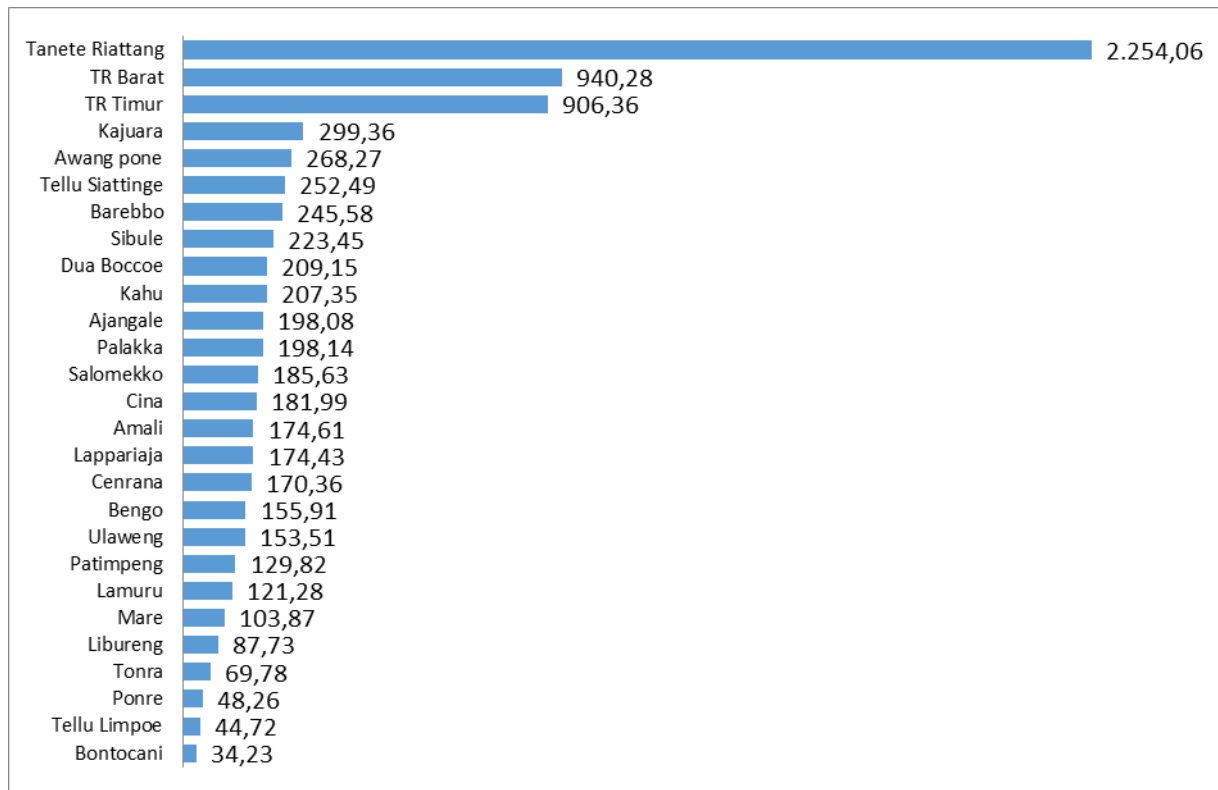
Tabel 2.5. Penduduk Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan	
1	Bontocani	7.909	7.953	15.862	49,83	50,17	99,45
2	Kahu	18.920	20.372	39.292	48,09	51,91	92,87
3	Kajuara	18.175	18.985	37.160	48,82	51,18	95,73
4	Salomekko	7.786	7.976	15.762	49,22	50,78	97,92
5	Tonra	6.793	7.185	13.978	48,47	51,53	94,54
6	Patimpeng	8.241	8.696	16.937	48,53	51,47	94,77
7	Libureng	15.245	14.955	30.200	50,34	49,66	101,94
8	Mare	13.330	14.041	27.371	48,63	51,37	94,94
9	Sibulue	16.488	18.326	34.814	47,21	52,79	89,97
10	Cina	12.885	13.959	26.844	47,93	52,07	92,31
11	Barebbo	13.089	14.956	28.045	46,66	53,34	87,52
12	Ponre	6.921	7.219	14.140	48,88	51,12	95,80
13	Lappariaja	11.500	12.571	24.071	47,76	52,24	91,48
14	Lamuru	11.740	13.486	25.226	46,57	53,43	87,05
15	Tellu Limpoe	7.147	7.078	14.225	50,10	49,90	100,97
16	Bengo	12.325	13.245	25.570	48,19	51,81	93,05
17	Ulaweng	11.591	13.227	24.818	46,70	53,30	87,63
18	Palakka	10.609	12.241	22.850	46,42	53,58	86,67
19	Awangpone	13.836	15.862	29.698	46,47	53,53	87,23
20	Tellu Siattinge	18.731	21.491	40.222	46,55	53,45	87,16
21	Amali	9.484	11.317	20.801	45,57	54,43	83,80
22	Ajangale	12.807	14.726	27.533	46,47	53,53	86,97
23	Dua Boccoe	13.999	16.307	30.306	46,17	53,83	85,85
24	Cenrana	11.841	12.822	24.463	47,55	52,45	90,79
25	TR Barat	24.329	26.145	50.474	48,11	51,89	93,05
26	Tanete Riattang	28.241	28.383	53.624	47,03	52,97	88,93
27	TR Timur	22.268	22.035	44.303	50,12	49,88	101,06
Total		390.227	411.548	801.775	47,79	52,21	91,78

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2020

Banyaknya jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Tanete Riattang, Taneteriattang Barat, dan Taneteriattang Timur dan wilayah yang relatif sempit, menyebabkan ketiganya menjadi wilayah terpadat di Kabupaten Bone.

Gambar 2.3. Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019



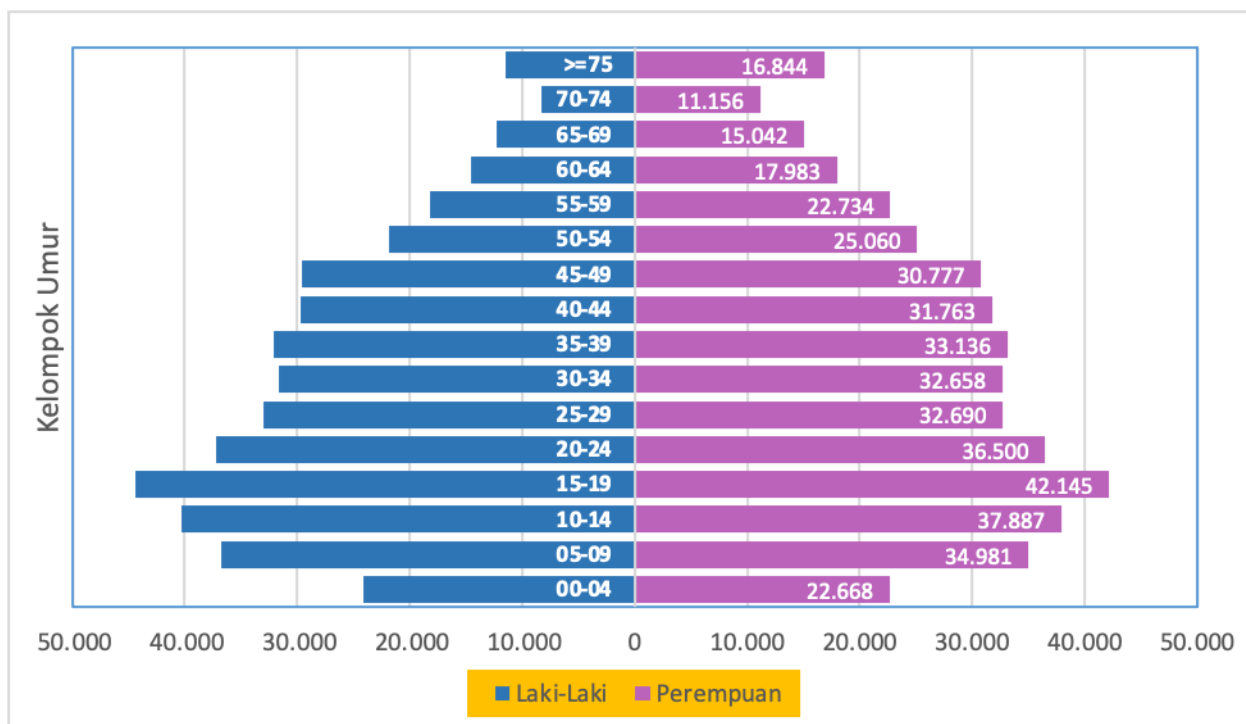
Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka 2020

Setiap Km² wilayah di Kecamatan Tanete Riattang dihuni oleh 2.254,06 jiwa, sementara Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur masing-masing 940,28 jiwa dan 906,36 jiwa per Km². Kecamatan lain yang juga memiliki tingkat kepadatan diatas 200 jiwa per Km² adalah Kajuara, Awangpone, Tellu Siattinge, Barebbo, Sibulue, Dua Boccoe, dan Kahu. Masing-masing kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk per Km² sebanyak 299,36 jiwa, 268,27 jiwa, 252,49 jiwa, 245,58 jiwa, 223,45 jiwa, 209,15 jiwa, dan 207,35 jiwa. Sedangkan lima kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk per Km² dibawah 100 adalah Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng. Di Kecamatan Bontocani, setiap Km² wilayahnya dihuni oleh 34,23 penduduk, sehingga menjadikanya wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah di Kabupaten Bone. Setelah Kecamatan Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng hanya memiliki tingkat kepadatan sebanyak 44,72 jiwa, 48,26 jiwa, 69,78 jiwa, dan 87,73 jiwa untuk setiap Km² dari luas wilayahnya.

Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Kabupaten Bone juga sepertinya sudah mulai memasuki periode bonus demografi dilihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-44 tahun) sebesar 47,95 persen pada tahun 2018. Meski persentasenya masih dibawah 50 persen, namun diperkirakan kedepan Kabupaten Bone akan memasuki periode emas seperti yang dialami Indonesia saat ini, dimana penduduk usia produktif akan mendominasi piramida penduduk.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penduduk usia tidak produktif (usia pensiun dan anak-anak) jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk produktif. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Bone jumlahnya mencapai 196.762 jiwa atau 22,63 persen dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 60 tahun ke atas) totalnya mencapai 107,571 jiwa atau 12,37 persen. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 35,01 persen.

Gambar 2.4. Piramida penduduk Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun), atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Terdapat dua perhitungan PDRB yakni berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pasar pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kabupaten Bone menurut Harga Konstan tahun 2019, mengalami peningkatan yang cukup baik selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2015, PDRB Harga konstan Kabupaten Bone sebesar Rp. 16,051,871 Juta meningkat menjadi Rp. 22,108,038 Juta pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata Rp. 1,514,042 Juta setiap tahunnya. PDRB Harga Konstan Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone (Rp. Juta), Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Konstan (Juta)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,654,002	8,454,418	9,164,707	9,972,946	10,305,180
Pertambangan dan Penggalian	458,872	507,048	563,003	624,829	682,791
Industri Pengolahan	1,123,606	1,225,643	1,315,917	1,347,702	1,571,690
Pengadaan Listrik, Gas	19,798	22,591	23,893	25,412	26,449
Pengadaan Air	7,084	7,411	7,787	8,463	9,038
Konstruksi	1,550,585	1,661,701	1,815,305	1,968,530	2,157,570

Real Estate	557,384	571,167	598,212	626,062	664,392
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,000,488	2,213,676	2,436,759	2,726,069	2,992,501
Transportasi dan Pergudangan	401,171	413,906	442,960	493,695	550,416
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,617	94,562	105,755	119,385	130,018
Informasi dan Komunikasi	335,636	372,027	410,727	459,371	502,207
Jasa Keuangan	462,260	522,869	550,048	585,161	602,640
Jasa Perusahaan	10,656	11,416	12,328	13,543	14,981
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	762,835	754,192	793,690	885,469	1,027,012
Jasa Pendidikan	399,960	429,187	470,396	517,064	556,412
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,214	177,883	194,117	213,077	234,303
Jasa lainnya	53,704	58,484	64,923	73,291	80,436
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	16,051,871	17,498,179	18,970,527	20,660,069	22,108,038

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Sehubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan permintaan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap berbagai barang dan jasa serta perbedaan elastisitas permintaan dari berbagai barang dan jasa berdampak terhadap peningkatan jumlah produksi dan harga barang dan jasa setiap sektor juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian. Uraian tersebut menyampaikan bahwa perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keberuntungan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan.

Tabel 2.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bone (Rp.Juta) Tahun 2015-2019

NO	Sektor	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,470,718	12,970,861	14,526,686	16,341,496	17,009,671
2	Pertambangan dan Penggalian	866,106	985,688	1,066,132	1,204,468	1,316,943
3	Industri Pengolahan	1,615,162	1,791,531	2,017,319	2,101,733	2,513,484
4	Pengadaan Listrik, Gas	17,416	20,108	23,815	26,112	27,304
5	Pengadaan Air	8,095	8,730	9,321	10,199	10,924
6	Konstruksi	2,235,912	2,558,767	2,888,207	3,364,247	3,833,839
7	Real Estate	885,068	979,273	1,037,959	1,122,736	1,211,284
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,555,956	3,045,777	3,403,616	4,009,760	4,541,978
9	Transportasi dan Pergudangan	589,663	608,304	648,179	735,722	836,264
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	118,090	129,814	148,758	170,451	190,433
11	Informasi dan Komunikasi	324,985	382,903	432,319	495,850	547,143
12	Jasa Keuangan	698,817	811,429	895,770	1,000,253	1,066,150
13	Jasa Perusahaan	14,583	15,945	17,935	20,335	22,901

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,100,997	1,127,273	1,218,453	1,400,984	1,659,984
15	Jasa Pendidikan	520,234	558,995	639,952	720,937	798,992
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199,311	220,701	249,088	282,889	320,357
17	Jasa lainnya	75,005	84,939	96,214	112,354	127,068
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23,296,118	26,301,035	29,319,724	33,120,527	36,034,720

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni (1) struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian, gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa; (2) analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusinya terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi.

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Bone dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan struktur perekonomian daerah ini terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Bone selama periode 2015-2019 Masih tetap bertumpu pada dominasi sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bone pada tahun 2019 mencapai 47,20 persen. Kemudian sektor penyumbang terbesar kedua dalam PDRB daerah masih ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, dengan kontribusi sekitar 12,60 persen, selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sekitar 10,64 persen dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 6,96 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.8. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Sektor Sektor	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49.24	49.32	49.55	49.34	47.20
2	Pertambangan dan Penggalian	3.72	3.75	3.64	3.64	3.65
3	Industri Pengolahan	6.93	6.81	6.88	6.35	6.98
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
5	Pengadaan Air	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6	Konstruksi	9.60	9.73	9.85	10.16	10.64
7	Real Estate	3.80	3.72	3.54	3.39	3.36
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.97	11.58	11.61	12.11	12.60
9	Transportasi dan Pergudangan	2.53	2.31	2.21	2.22	2.32
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.51	0.49	0.51	0.51	0.53
11	Informasi dan Komunikasi	1.40	1.46	1.47	1.50	1.52
12	Jasa Keuangan	3.00	3.09	3.06	3.02	2.96
13	Jasa Perusahaan	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.73	4.29	4.16	4.23	4.61
15	Jasa Pendidikan	2.23	2.13	2.18	2.18	2.22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.86	0.84	0.85	0.85	0.89
17	Jasa lainnya	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir (2015-2019), terlihat bahwa terdapat dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat, kedua sektor ini sering juga diklasifikasikan sebagai sektor primer. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) kontribusi sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan terhadap PDRB Mengalami peningkatan antara (2015-2018) Namun Sedikit Menurun 2,04 poin atau Menurun dari 49,24 persen tahun 2015 menjadi 47,20 persen tahun 2019, tetapi tetap berada di persentase tertinggi pada table di atas. Selanjutnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menurun 0,70 poin dalam periode yang sama atau turun dari 3,72 persen tahun 2015 menjadi 3,65 persen tahun 2019.

Demikian pula sektor-sektor tersier atau sektor jasa semuanya mengalami penurunan dalam memberikan andil terhadap PDRB daerah. Sektor tersier (jasa) yang mengalami penurunan paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah ditempati oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan penurunan kontribusi sekitar 0,12 poin dalam kurun waktu 2015-2019, atau menurun kontribusi dari 4,73 persen tahun 2015 menurun menjadi 4,61 persen tahun 2019. Namaun berbeda dengan Sektor konstruksi yang mengalami peningkatan yakni sekitar 1,04 poin selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2015 sektor konstruksi berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bone sekitar 9.60 persen menurun menjadi 10,64 persen tahun 2019.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bone yang disertai dengan kontribusi yang cenderung meningkat mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Bone seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementara sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.

Selama kurun waktu 2015-2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,33 persen pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,16 persen per tahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Bone, maka terdapat enam (6) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing masing adalah sektor pertambangan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,10 persen pertahun, kemudian diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (10,57 persen), sektor jasa lainnya (10.11 persen)., sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,79 persen) dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,88 persen.

Karena kontribusinya yang cukup besar dari tahun ke tahun dalam pembentukan PDRB, maka sektor yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan di daerah ini masing masing ditempati oleh sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone sebesar 8,33 persen per tahun, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil sekitar 3,72 persen dalam rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah ini, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sekitar 1,17 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone, sementara andil sektor lainnya berada dibawah angka 1 persen.

Tabel 2.9. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone Tahun 2015- 2019

No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata2
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.94	10.46	8.37	8.82	3.33	7.98

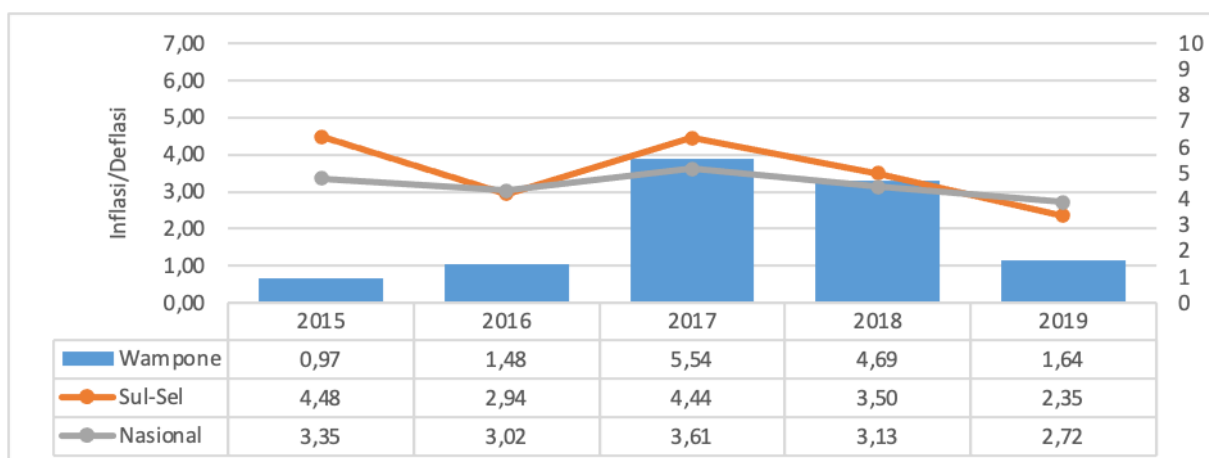
No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Rata2
2	Pertambangan dan Penggalian	13.69	10.50	11.04	10.98	9.28	11.10
3	Industri Pengolahan	7.30	9.08	7.37	2.42	16.62	8.56
4	Pengadaan Listrik, Gas	(3.72)	14.11	5.77	6.36	4.08	5.32
5	Pengadaan Air	0.47	4.61	5.08	8.67	6.80	5.13
6	Konstruksi	7.98	7.17	8.97	8.44	9.60	8.43
7	Real Estate	7.38	2.47	4.73	4.66	6.12	5.07
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.23	10.66	10.42	11.87	9.77	9.79
9	Transportasi dan Pergudangan	7.02	3.17	7.02	11.45	11.49	8.03
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.07	6.71	11.84	12.89	8.91	8.88
11	Informasi dan Komunikasi	10.44	10.84	10.40	11.84	9.32	10.57
12	Jasa Keuangan	7.72	13.11	5.20	6.38	2.99	7.08
13	Jasa Perusahaan	6.57	7.13	7.99	9.86	10.62	8.43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.39	(1.13)	5.24	11.56	15.99	8.21
15	Jasa Pendidikan	6.52	7.31	9.60	9.92	7.61	8.19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.66	7.67	9.13	9.77	9.96	8.84
17	Jasa lainnya	7.98	8.90	11.01	12.89	9.75	10.11
	PDRB	8.30	9.01	8.41	8.91	7.01	8.33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian. Tingginya inflasi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor. Merujuk pada data inflasi di Kota Watampone, memperlihatkan bahwa tren inflasi tahun ke tahun (yoy) Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 inflasi daerah ini hanya sekitar 0.97 persen, meningkat hingga mencapai puncaknya menjadi 5,54 persen pada tahun 2017, kemudian menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 4,69 persen dan pada tahun 2019 inflasi di daerah ini turun lagi mencapai 1.64 persen. Selama periode tahun 2015-2019, inflasi tahunan Kota Watampone berada di bawah inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, hingga saat ini kondisi inflasi tidak stabil.

Tabel 2.10. Perkembangan inflasi rata-rata Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Bone telah mengalami inflasi bulanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan deflasi sebanyak 2 (dua) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,54 persen, sedangkan deflasi tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 0,97 persen. Adapun yang memberikan

andil terbesar terhadap inflasi Kabupaten Bone sepanjang tahun 2019 adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar 2,20 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran sandang menjadi kelompok pengeluaran dengan andil terkecil, yaitu sebesar 0,12 persen.

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp. 31,36 juta per tahun meningkat menjadi Rp. 47,50 juta per tahun pada tahun 2019. Jika PDRB perkapita tahun 2019 dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun diperoleh nilai PDRB perkapita per bulan sebesar Rp. 3,96 juta per kapita per bulan, yang berarti setiap penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2019 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3,96 juta per bulan.

Tabel 2.11. PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	PDRB Per Kapita Kabupaten Bone				
		2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB	Rp Juta	23,296,118	26,301,035	29,319,724	33,120,527	36,034,720
Jumlah Penduduk	Jiwa	742,912	746,973	751,026	754,894	758,589
PDRB perkapita	Rp Juta/ Jiwa	31.36	35.21	39.04	43.87	47.50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

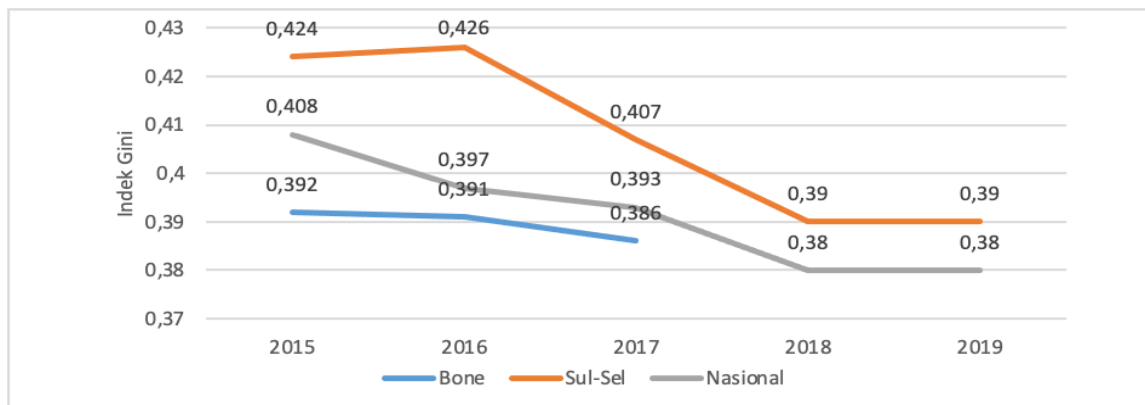
2.2.4. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio sebagai berikut:

- Gini Rasio < 0,35 : Kategori ketimpangan “rendah”;
- Gini Rasio 0,35 – 0,5: Kategori ketimpangan “moderat”
- Gini Rasio > 0,5 : Kategori ketimpangan “tinggi”

Nilai Gini rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2017 memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan nilai Gini rasio Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan nasional.

Gambar 2.5. Perkembangan Nilai Gini Ratio Bone, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

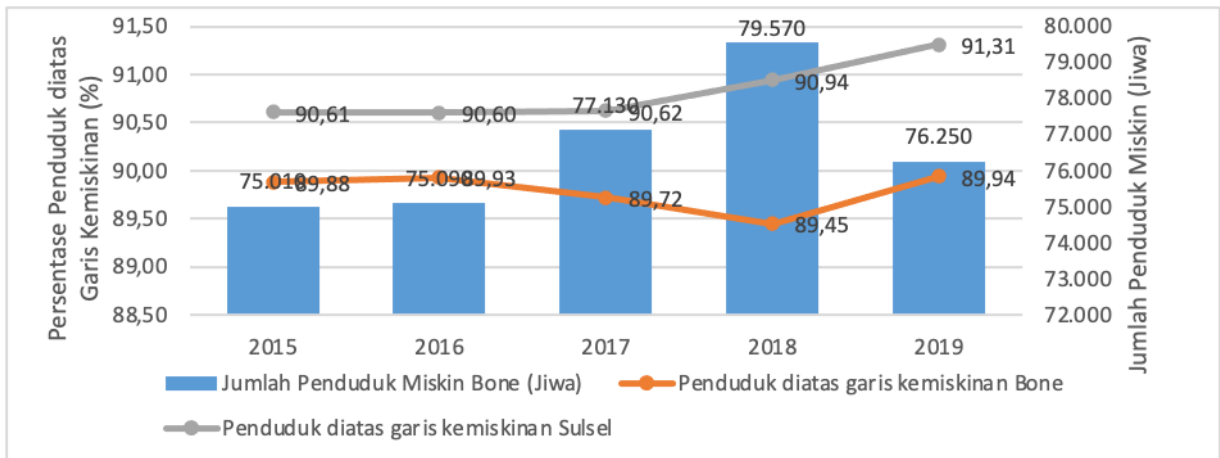
Selanjutnya, nilai Gini Rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Pada tahun 2015 nilai Gini Rasio Kabupaten Bone sebesar 0,392 menurun menjadi 0,386 pada tahun 2017, yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik. Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Gini Rasio yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”.

2.2.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan data jumlah dan prosentase penduduk miskin yang dirilis BPS, menunjukkan bahwa jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone selama periode 2015-2019 memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di daerah ini berjumlah 75.010 jiwa meningkat menjadi 76.250 jiwa pada tahun 2019, yang berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 1.240 jiwa. Data tingkat kemiskinan yang diukur dari Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan juga kecenderungannya meningkat. Pada tahun 2015 prosentase penduduk miskin di daerah ini mencapai 10,12 persen, menurun menjadi 10,06 persen tahun 2019. Meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir, namun dari tingkat prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bone masih tinggi, karena lebih tinggi dari tingkat kemiskinan rata-rata daerah di Sulawesi Selatan. Selama periode 2015-2019 Kabupaten Bone selalu menjadi kontributor terbesar dalam jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 Kabupaten Bone berkontribusi sekitar 9,49 persen dari total kemiskinan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan yang selanjutnya dikonversi ke angka persentase penduduk diatas garis kemiskinan dengan menggunakan formula: $100 - \text{tingkat kemiskinan}$, maka diperoleh persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



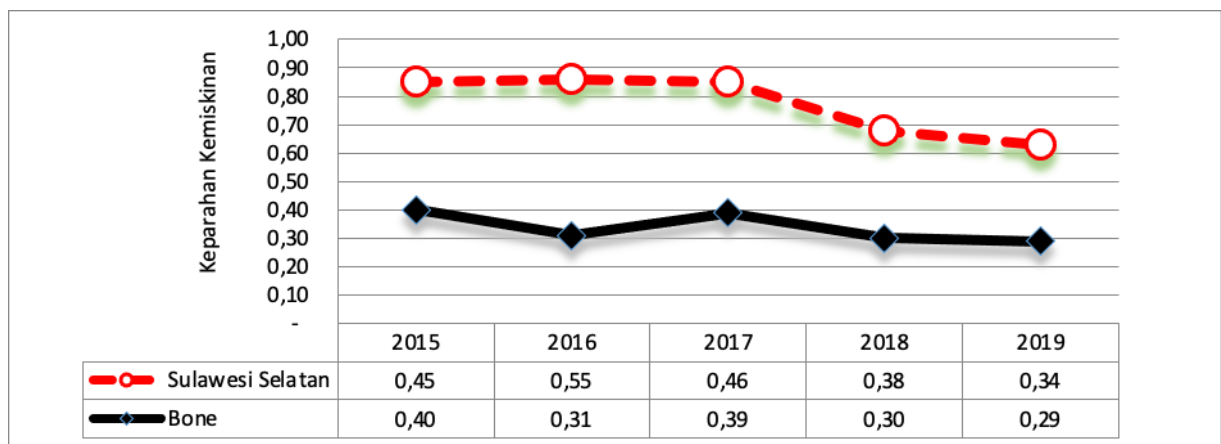
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk. indikator ini sering pula disebut sebagai ndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Berdasarkan perkembangan nilai indeks kesenjangan kemiskinan selama periode 2015-2019, terlihat bahwa nilai indeks kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone cenderung menurun, sedangkan di Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Gambaran perkembangan rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan periode tahun 2015-2019 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.7. Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

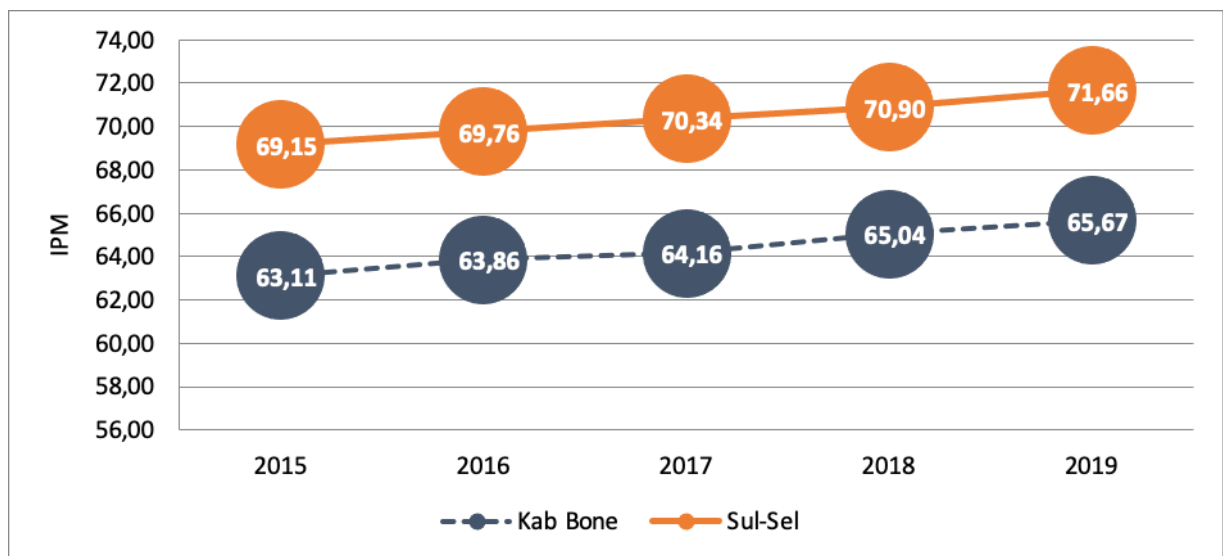
Berdasarkan data rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone, terlihat bahwa dalam periode 2015-2019, nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan indeks serupa di Sulawesi Selatan, akan tetapi dalam dua tahun terakhir kondisi sebaliknya terjadi dimana rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone lebih meningkat dibandingkan nilai indikator serupa di Sulawesi Selatan.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain: angka usia harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup penduduk suatu negara atau daerah, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur kondisi rata-rata lamanya menempuh pendidikan suatu negara atau daerah, dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk mengukur status tingkat harapan lamanya menempuh Pendidikan. Salah satu angka IPM lainnya yang berbasis ekonomi adalah daya beli riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak suatu negara atau daerah.

Capaian IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih jauh tertinggal dari angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 Nilai IPM Kabupaten Bone hanya sebesar 65,67, sementara angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 71,66. Hal ini disebabkan oleh terutama pada rendahnya pada derajat Pendidikan dan kesehatan di kabupaten Bone. Berikut merupakan Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Bone dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.8. Perkembangan angka Nilai IPM Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

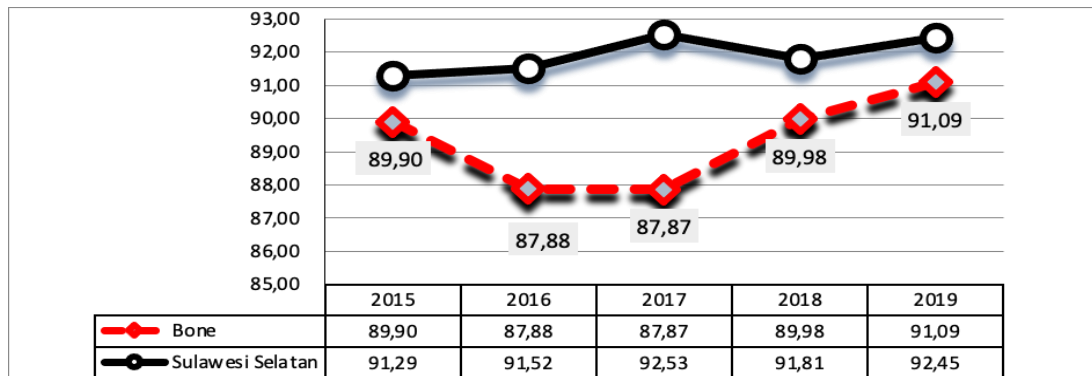
2.2.8. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, karena itu, Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan terwujudnya sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Kemampuan membaca penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Bone tampaknya masih tertinggal dari rata-rata kemampuan membaca penduduk di daerah lainnya di Sulawesi Selatan, hal ini tercermin dari capaian angka melek huruf Kabupaten Bone selama periode 2015-2019 masih dibawah rata-rata angka melek huruf penduduk di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 tercatat penduduk Kabupaten Bone yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 91.09 persen, yang berarti pemerintah Kabupaten

Bone masih mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 8,91 persen. Selengkapnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan, tahun 2015-2019 terlihat pada gambar berikut.

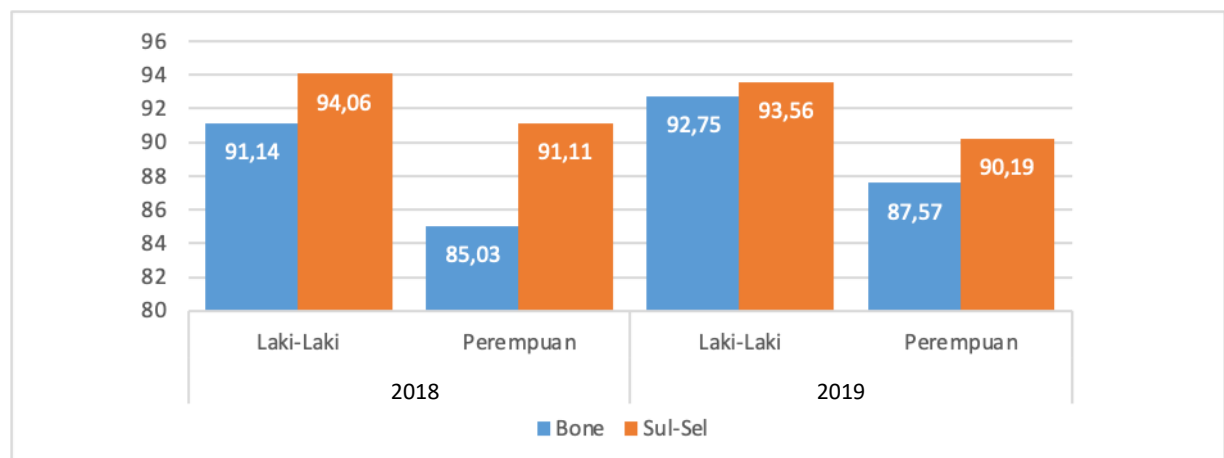
Gambar 2.9. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2018, masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 92,75 persen untuk penduduk laki-laki dan 87,57 persen untuk perempuan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah 1,53 persen dan perempuan 3,65 persen pada tahun 2018. .

Gambar 2. 10. Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2019

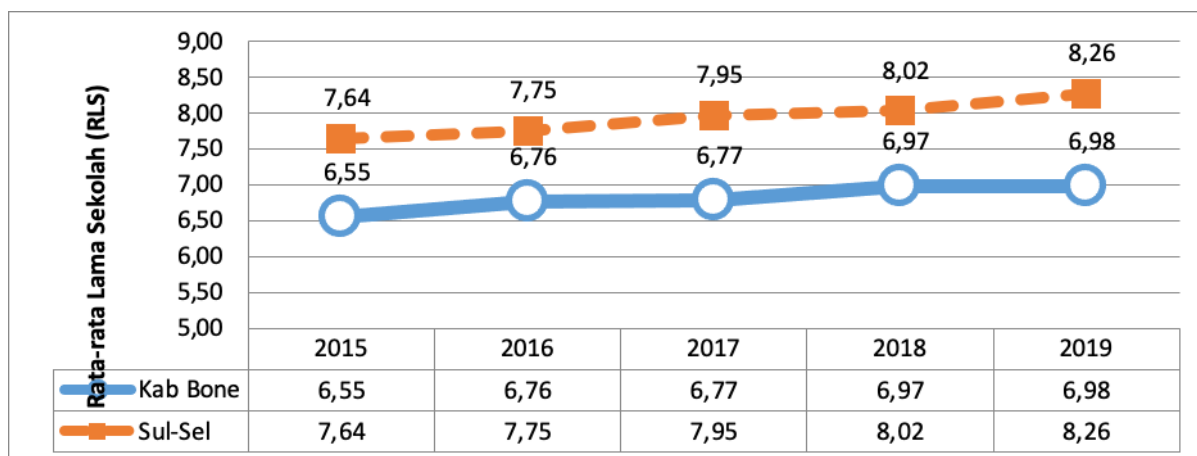


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.2.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Gambar 2.11. Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

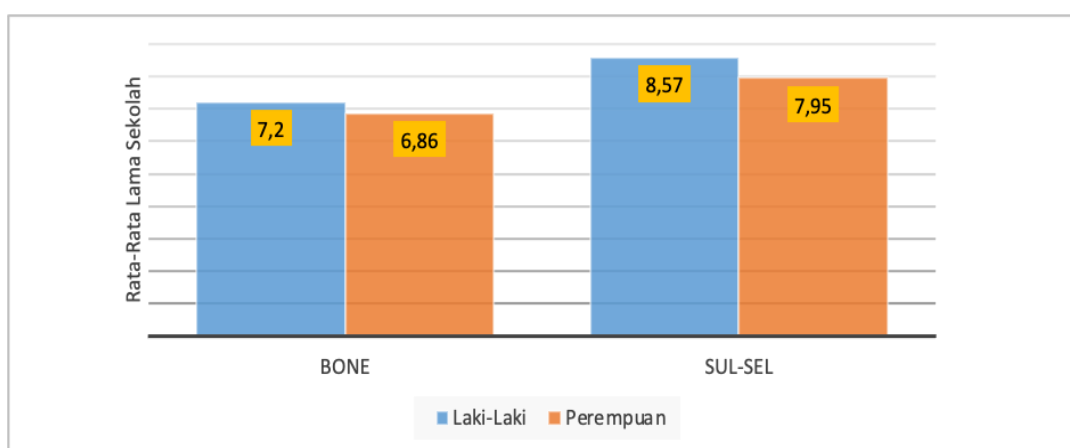


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2020

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 6,55 tahun kemudian meningkat menjadi 6,98 tahun, ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Bone memiliki pendidikan forma baru setara dengan duduk dibangku kelas satu SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2019 mencapai 8,26 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone relatif tertinggal dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya.

Berdasarkan jenis kelamin, seperti halnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Rata-rata Lama Sekolah perempuan di Kabupaten Bone masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2019, perempuan berada di 6,86 tahun sedangkan laki-laki 7,20 tahun.

Gambar 2. 12. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.10. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kabupaten Bone memiliki 2714 PAUD yang tersebar pada 27 kecamatan, SD/MI sejumlah 647 unit, ada sejumlah 224 unit SMP/MTs, SMA/MA sejumlah 85 unit, dan PKBM sebanyak 62 unit.

Tabel 2.13: Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Bontocani	23	2022	155	13,05
Kahu	28	3595	267	13,46
Kajuara	30	4030	273	14,76
Salomekko	13	1887	114	16,55
Tonra	15	1666	135	12,34
Patimpeng	13	1595	124	12,86
Libureng	30	3349	281	11,92

Mare	29	3436	266	12,92
Sibulue	32	3858	272	14,18
Cina	27	3069	221	13,89
Barebbo	29	2872	248	11,58
Ponre	21	1535	151	10,17
Lappariaja	17	2205	152	14,51
Lamuru	21	2143	153	14,01
Tellu Limpoe	14	1839	78	23,58
Bengo	19	2271	159	14,28
Ulaweng	27	2687	202	13,3
Palakka	21	2465	181	13,62
Awangpone	30	3049	233	13,09
Tellu Siattinge	39	4127	265	15,57
Amali	23	1957	156	12,54
Ajangale	28	2802	177	15,83
Dua Boccoe	40	3234	239	13,53
Cenrana	33	2967	218	13,61
TR Barat	12	3840	209	18,37
Tanete Riattang	33	6496	413	15,73
TR Timur	22	4038	249	16,22
Bone	669	79034	5591	14,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Tabel 2.14: Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Bontocani	2	333	22	15.14
Kahu	2	1312	49	26.78
Kajuara	1	745	40	18.63
Salomekko	1	213	23	9.26
Tonra	1	650	41	15.85
Patimpeng	1	385	31	12.42
Libureng	2	920	54	17.04
Mare	1	1074	55	19.53
Sibulue	1	728	36	20.22
Cina	1	611	46	13.28
Barebbo	3	830	48	30,22
Ponre	1	124	21	5.9
Lappariaja	1	1082	41	26.39
Lamuru	1	539	33	16.33
Tellu Limpoe	1	130	13	10
Bengo	1	337	15	22.47
Ulaweng	1	845	37	22.84
Palakka	1	48	29	1.66
Awangpone	1	496	43	11.53
Tellu Siattinge	2	698	50	13.96
Amali	1	426	26	16.38
Ajangale	1	689	34	20.26
Dua Boccoe	1	509	36	14.14
Cenrana	2	629	32	19.66
TR Barat	5	2831	190	14.9
Tanete Riattang	2	1410	63	22.38
TR Timur	2	725	61	11.89
Bone	37	18.489	1.121	16.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Tabel 2.15: Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru SMA Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Bontocani	2	333	22	15.14
Kahu	2	1312	49	26.78

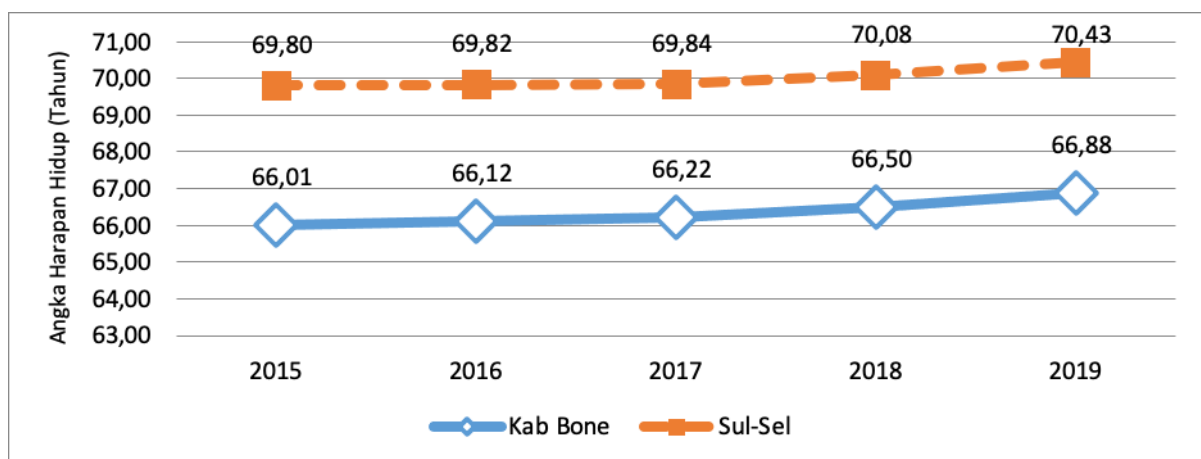
Kajuara	1	745	40	18.63
Salomekko	1	213	23	9.26
Tonra	1	650	41	15.85
Patimpeng	1	385	31	12.42
Libureng	2	920	54	17.04
Mare	1	1074	55	19.53
Sibulue	1	728	36	20.22
Cina	1	611	46	13.28
Barebbo	1	236	24	35.5
Ponre	1	124	21	5.9
Lappariaja	1	1082	41	26.39
Lamuru	1	539	33	16.33
Tellu Limpoe	1	130	13	10
Bengo	1	337	15	22.47
Ulaweng	1	845	37	22.84
Palakka	1	48	29	1.66
Awangpone	1	496	43	11.53
Tellu Siattinge	2	698	50	13.96
Amali	1	426	26	16.38
Ajangale	1	689	34	20.26
Dua Boccoe	1	509	36	14.14
Cenrana	2	629	32	19.66
TR Barat	5	2831	190	14.9
Tanete Riattang	2	1410	63	22.38
TR Timur	2	725	61	11.89
Bone	37	18489	1121	16.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.11. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu wilayah, maka derjat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi.

Gambar 2.13. Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



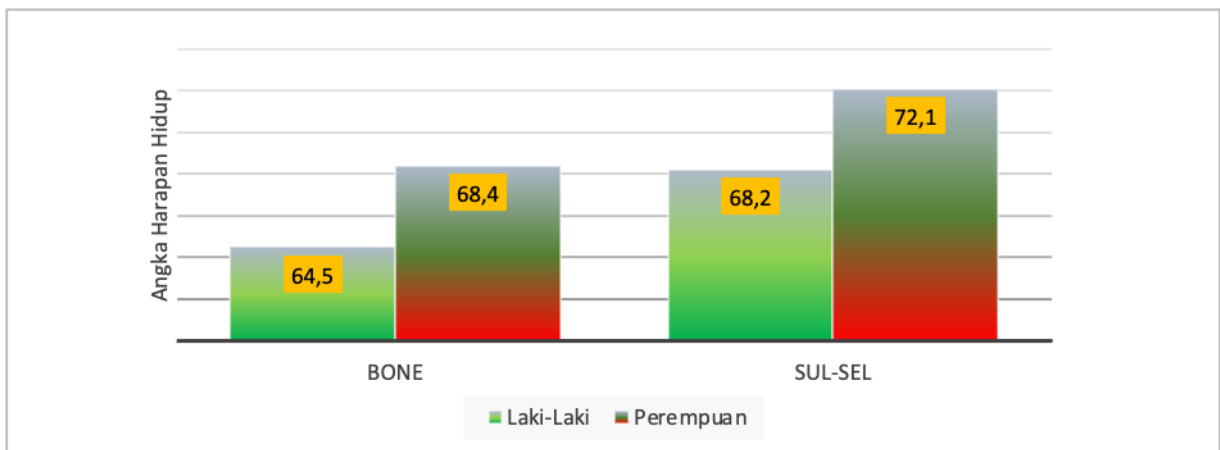
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Perkembangan AHH penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 AHH penduduk di daerah ini sebesar 66,01 tahun kemudian meningkat menjadi 66,88 tahun, yang berarti derajat kesehatan penduduk di daerah ini terus membaik. AHH pada tahun 2019 sebesar 66,88 tahun diartikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 66,88 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2019 mencapai 70,43 tahun, menunjukkan bahwa peluang untuk bertahan hidup

penduduk di Kabupaten Bone relatif lebih pendek dibandingkan dengan penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2018 AHH laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu 64,50 tahun bagi laki-laki dan 68,40 tahun bagi perempuan. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, namun AHHnya masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bone baik bagi perempuan maupun laki-laki.

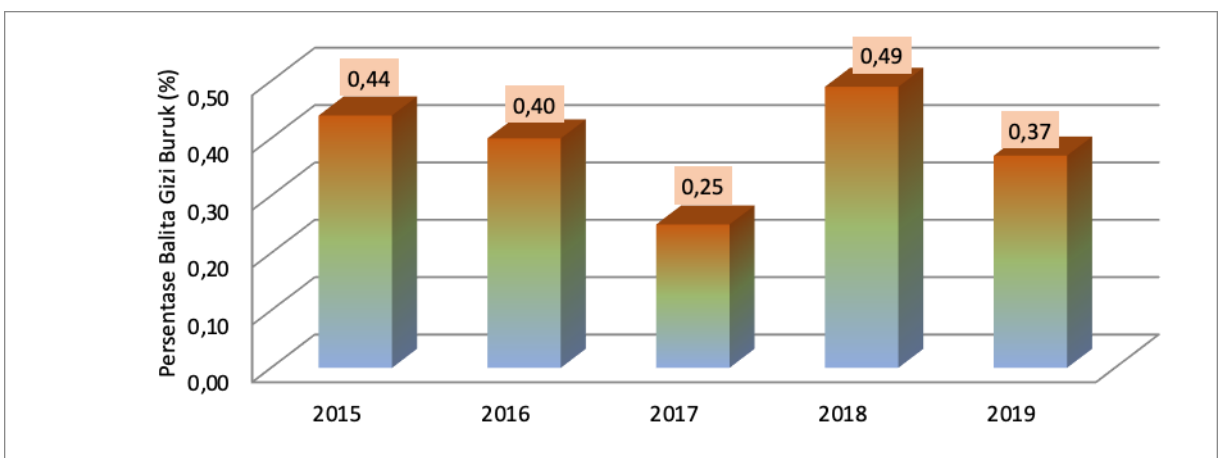
Gambar 2.14. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.12. Persentase Balita Gizi Buruk

Gambar 2.15. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

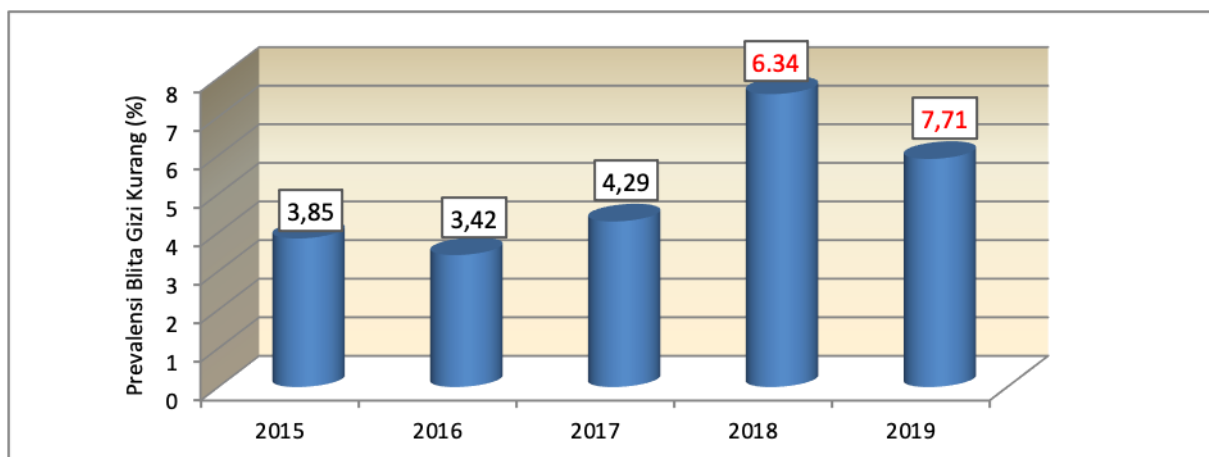
Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Porsi Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Bone cenderung mengalami penurunan Pada tahun 2018 porsi balita pada usia yang sama mengalami gizi buruk sebesar 0,33 persen, kemudian naik menjadi 0,80 persen tahun 2019.

2.2.13. Persentase Balita Gizi Kurang

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Berdasarkan data diatas dari tahun 2015 – 2019 balita yang mengalami gizi kurang tertinggi pada 2018 dengan 6,34 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 7,71 persen. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Bone masih perlu mendapat perhatian

dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Gambar 2.16. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015 – 2019

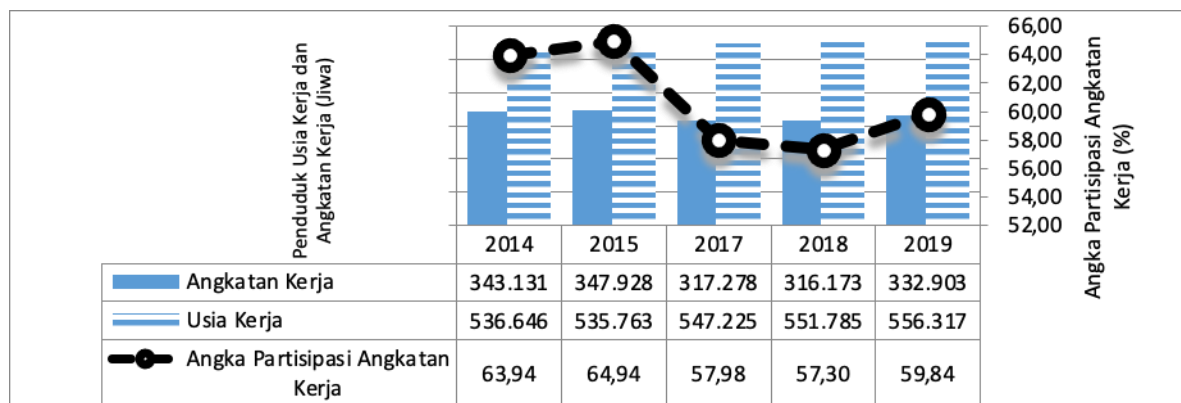


Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

2.2.14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong dalam usia kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja menurut kegiatan utamanya dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Gambar 2.17. Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2014–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

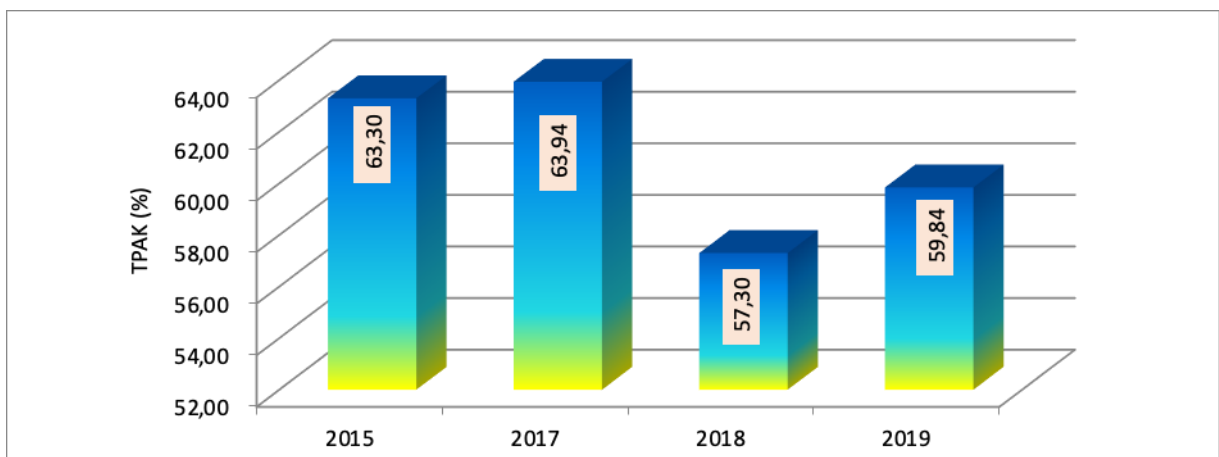
Berdasarkan data ketenagakerjaan, tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Bone mencapai 556,317 jiwa, dimana sekitar 59,84 persen diantaranya merupakan penduduk 15 tahun keatas yang digolongkan sebagai angkatan kerja.

2.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan data ketenaga kerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini mengalami penurunan. Pada Tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bone mencapai hampir 63,30 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 64 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini menurun menjadi 59,84 persen. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan penurunan dari jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja, penyebabnya diantaranya adalah terbatasnya kesempatan kerja, atau kecenderungan meningkatnya penduduk yang lebih memilih masuk golongan bukan angkatan kerja, seperti melanjutkan sekolah atau mengurus rumah tangga. Gambaran terhadap perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019, tersaji pada gambar berikut

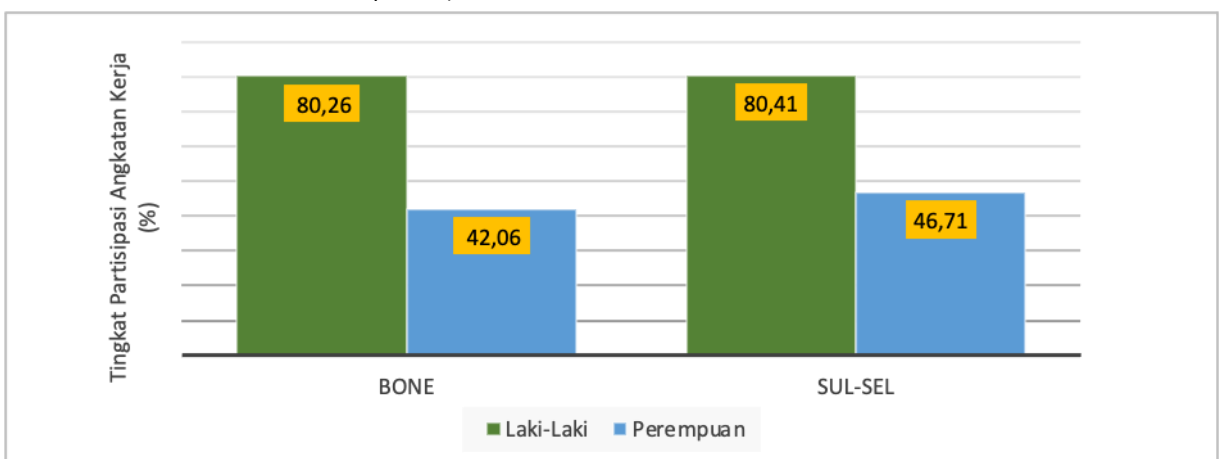
Gambar 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2019, TPAK laki-laki di Kabupaten Bone jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. TPAK laki-laki mencapai 80,26 persen dan perempuan hanya 42,06 persen. Dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK menurut jender di Kabupaten Bone lebih rendah dari TPAK menurut gender di Sulawesi Selatan.

Gambar 2.19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen), menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019



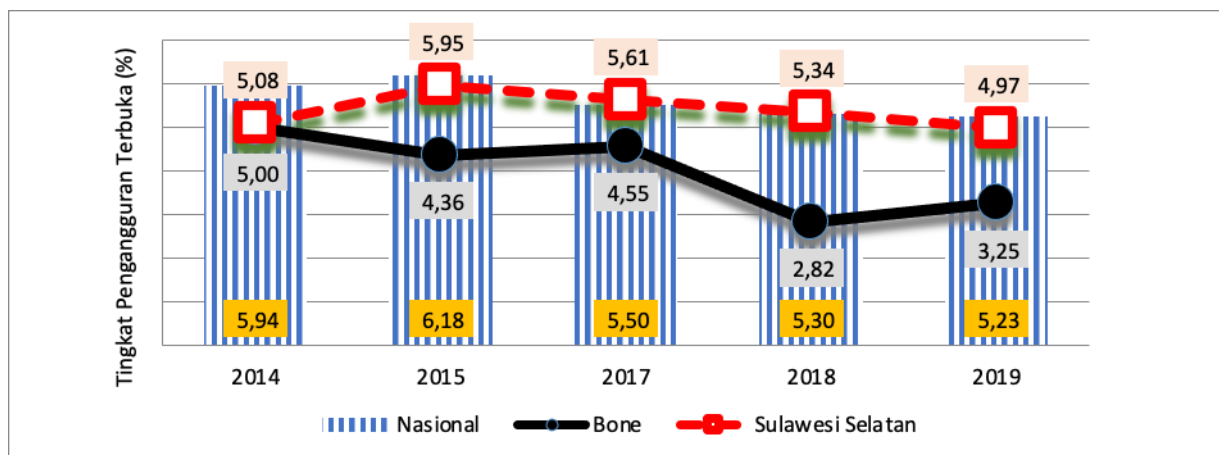
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat akan tinggi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2014-2019, terlihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran yang dicapai daerah Sulawesi Selatan. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di daerah ini dalam kurun waktu 2014-2019 cenderung meningkat. Pada Tahun 2014, tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone sebesar 5,00 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 5,00 persen orang termasuk dalam golongan angkatan kerja yang tidak bekerja tapi sedang mencari kerja. Atau pengangguran. Selanjutnya pada tahun 2019 tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini meningkat menjadi 3,25 persen. Gambaran tentang perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2014-2019, tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2014–2019

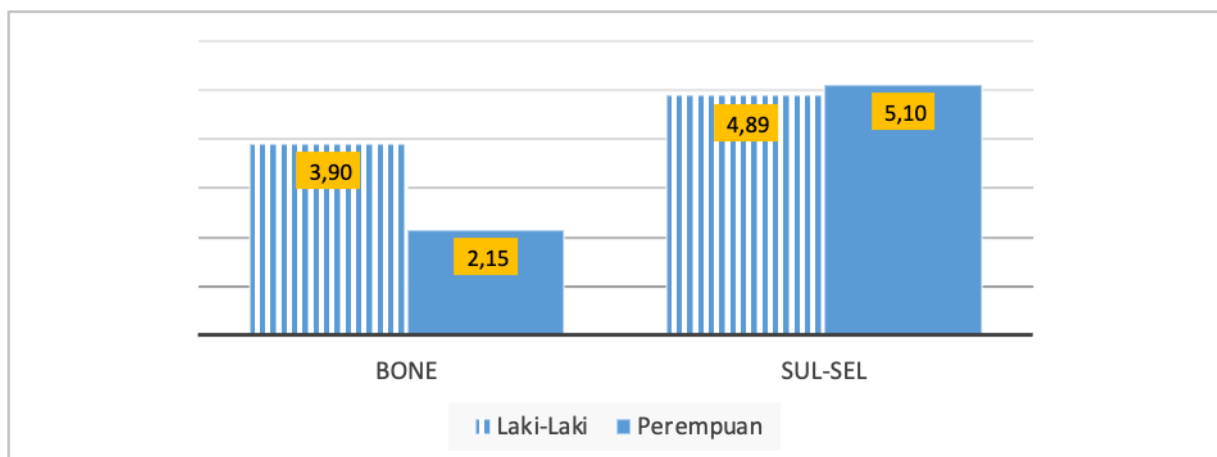


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan di Kabupaten Bone lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing 7.33 persen dan 3.00 persen. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, TPT laki-laki di Kabupaten Bone masih lebih rendah, tetapi perempuan tetap lebih tinggi

Gambar 2. 21. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin (dalam persen), Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

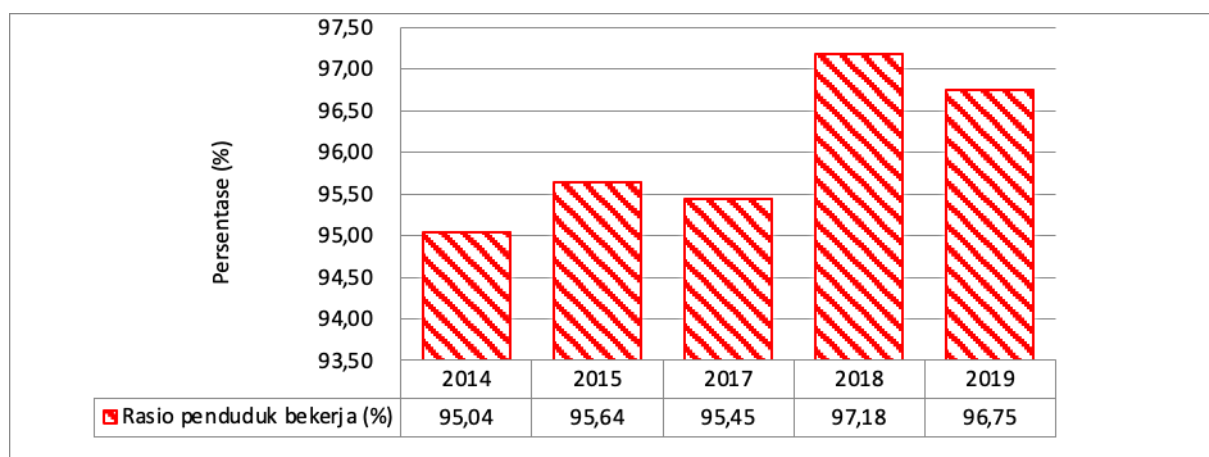


2.2.17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk

kelompok penduduk yang bekerja. Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bone memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 rasio penduduk bekerja di daerah ini mencapai 95,04 persen meningkat menjadi 96,75 persen pada tahun 2019. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir mengisyaratkan semakin berkembangnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi penduduknya

Gambar 2.22. Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Bone Tahun 2014 – 2019

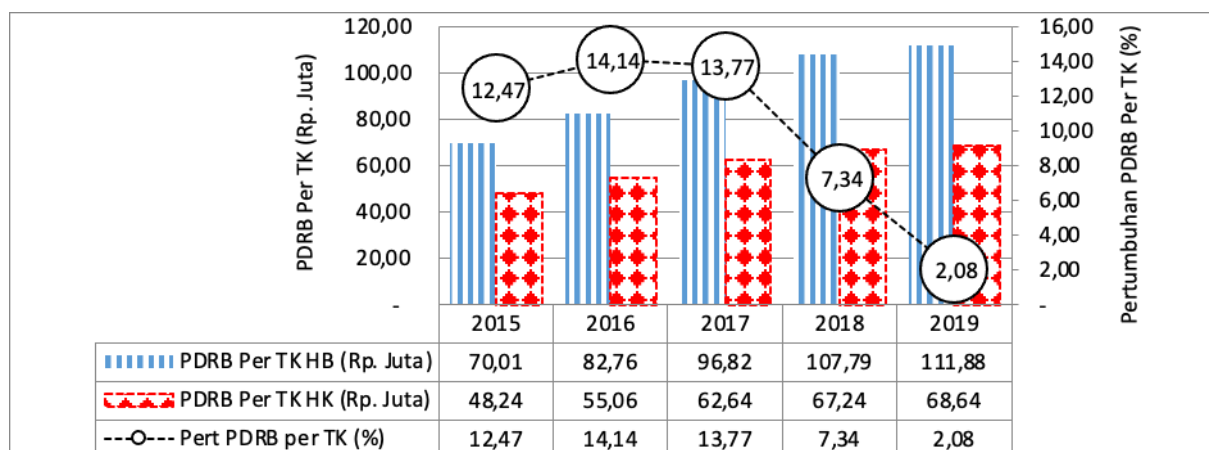


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.18. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja, PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2015-2019, baik yang diukur dalam PDRB Harga berlaku, maupun dalam PDRB harga konstan, dengan demikian PDRB per tenaga kerja, setiap tahunnya meningkat, walau dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung melambat pada tiga periode tahun terakhir.

Gambar 2.23. PDRB Per Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019

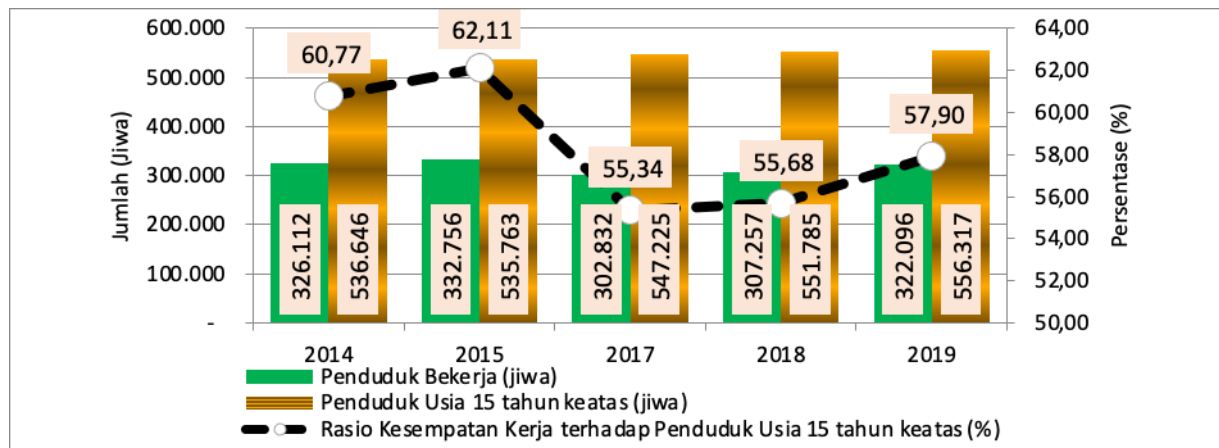


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.19. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah.

Gambar 2.24. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Bone Tahun 2014-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Bone, selama kurun waktu 2014-2019, baik penduduk bekerja, maupun penduduk usia kerja 15 tahun keatas keduanya menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 536.646 jiwa meningkat menjadi 556.317 jiwa pada tahun 2019. Kecenderungan sebaliknya terjadi untuk penduduk bekerja, Pada tahun 2014 penduduk bekerja yang ada di daerah ini sebanyak 326.112 jiwa, menurun menjadi 322.096 jiwa pada tahun 2019.

Kecenderungan penurunan jumlah penduduk bekerja di satu sisi, sementara disisi lainnya jumlah penduduk usia kerja terus meningkat, berimplikasi terhadap menurunnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Pada tahun 2014 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 60,77 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia, sebanyak 61 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas menurun menjadi 57,90 persen yang berarti hanya 58 orang penduduk di Kabupaten Bone yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2014-2019 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami penyempitan, karena itu sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja.

2.2.20. Proporsi TK yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbrbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri,

berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non - pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Berdasarkan pada tabel yang telah disajikan terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Bone dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga/tidak dibayar (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, proporsi tersebut sebesar 37,45 persen meningkat menjadi 48,27 persen tahun 2019. Secara keseluruhan, proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal juga mengalami peningkatan, yakni sekitar 68,79 persen tahun 2017 meningkat menjadi 70,18 persen tahun 2019. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil dan semakin kecil yang pada tahun 2019 hanya 29,82 persen dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Bone pada 2019.

Tabel 2.12. Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (dalam persen)

No	Status Pekerjaan	Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan		
		2017	2018	2019
A	Tenaga Kerja Formal	31.21	30.16	29.82
1	Buruh/Karyawan	28.99	28.45	26.81
2	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2.22	1.71	3.01
B	Tenaga Kerja Informal	68.79	69.84	70.18
1	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	31.34	23.63	21.91
2	Berusaha Sendiri	19.59	27.13	24.59
3	Pekerja bebas	4.21	5.95	5.20
4	Pekerja tidak dibayar	13.65	13.13	18.48
C	Total Penduduk Bekerja	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.21. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.

Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga Sejahtera di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2010-2016, menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) dan Keluarga sejahtera I (KS-I) mengalami peningkatan yakni KPS meningkat dari 12.260 keluarga tahun 2010 menjadi 12.459 keluarga tahun 2016, atau meningkat sekitar 0,27 persen per tahun. Dalam periode yang sama KS-I juga mengalami peningkatan dari 42.002 keluarga tahun 2010 menjadi 42.275 keluarga pada tahun 2016, atau meningkat 0,11 persen per tahun.

Meskipun jumlah keluarga yang berkategori miskin (KPS dan KS-I) mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2016, namun jumlah keluarga yang berkategori tidak miskin juga mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan total keluarga yang lebih tinggi dari pertumbuhan keluarga KPS dan KS-I, dalam periode yang sama. Selama kurun waktu 2010-2016 total keluarga di Kabupaten Bone tumbuh sekitar 1,67 persen per tahun, atau meningkat dari 179.336 keluarga tahun 2010 menjadi 196.729 keluarga tahun 2016. Selama periode tersebut, tercatat tahapan keluarga di Kabupaten Bone yang mengalami pertumbuhan paling tinggi ditempati oleh tahapan keluarga KS-III plus dengan pertumbuhan sekitar 3,55 persen per tahun, kemudian disusul tahapan keluarga KS-II dengan pertumbuhan 2,93 persen per tahun.

Selanjutnya berdasarkan data proporsi jumlah keluarga menurut tahapan keluarga terhadap total keluarga di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2010-2016, menunjukkan bahwa tahapan keluarga yang dominan di Kabupaten Bone adalah keluarga sejahtera II (KS-II) dengan proporsi sekitar 43,18 persen tahun 2016, kemudian disusul keluarga sejahtera III (KS-III) dengan proporsi sekitar 23,58 persen pada tahun yang sama. Gambaran mengenai proporsi keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bone sekaligus mengisyaratkan bahwa porsi keluarga yang berkategori miskin (KPS dan KS-I) di daerah ini masih cukup besar. proporsi keluarga yang berkategori miskin terhadap total keluarga di Kabupaten mencapai 30,26 persen tahun 2010, dengan rincian KPS sekitar 6,84 persen dan KS-I sebesar 23,42 persen, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi

27,82 persen tahun 2016, dengan rincian KPS sekitar 6,33 persen dan KS-I sebesar 21,49 persen. Selengkapnya gambaran mengenai proporsi keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2010-2016 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.13. Perkembangan Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Rasionya Terhadap Total Keluarga, di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera dan Rasionya Terhadap Total Keluarga				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Jumlah Keluarga (Keluarga)					
1	Pra Sejahtera	11.480	11.562	12.459	12.459	12.459
2	KS-I	43.451	41.433	42.275	42.275	42.275
3	KS-II	75.684	83.029	84.952	84.952	84.952
4	KS-III	45.743	44.457	46.390	46.390	46.390
5	KS-III Plus	9.630	9.685	10.653	10.653	10.653
6	Total Keluarga	185.988	190.166	196.729	196.729	196.729
B	Rasio Terhadap Total Keluarga (%)					
1	Pra Sejahtera	6,17	6,08	6,33	6,33	6,33
2	KS-I	23,36	21,79	21,49	21,49	21,49
3	KS-II	40,69	43,66	43,18	43,18	43,18
4	KS-III	24,59	23,38	23,58	23,58	23,58
5	KS-III Plus	5,18	5,09	5,42	5,42	5,42
6	Total Keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.22. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Bone yang telah dikonversi ke nilai skor indeks 25-100, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 skor IKM sebesar 75,66 yang berarti masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau dengan kinerja unit pelayanan tergolong baik, namun pada tahun 2016 skor IKM menurun menjadi 55,03 atau dengan kinerja pelayanan berkategori kurang baik, akan tetapi pada tahun 2017 kinerja pelayanan di daerah ini kembali berkategori baik. Selengkapnya skor konversi IKM dan kategori mutu dan kinerja unit pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Skor IKM dan Kategori Mutu dan Kinerja Unit Pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Indek Kepuasan Masyarakat		
		2017	2018	2019
1	Skor Konversi IKM	76,00	58,22	78,00
2	Mutu Pelayanan	A-	B	A-
3	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Kurang Baik	Baik

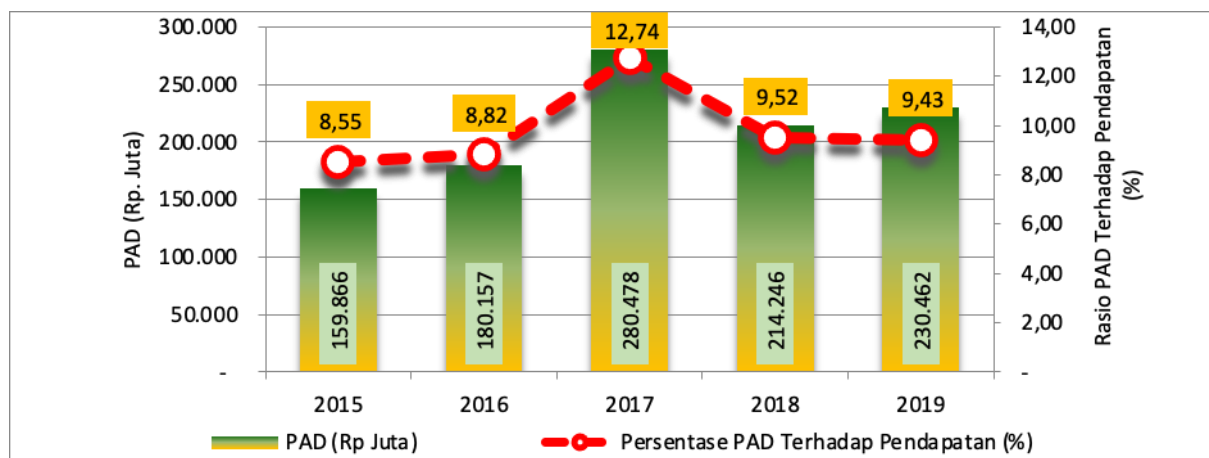
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.23. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Bone selama periode 2015-2019, memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 pendapatan Kabupaten Bone yang bersumber PAD sebesar Rp. 159,87 Milliar meningkat menjadi Rp. 230,46 Milliar pada tahun 2019, yang berarti selama periode 2015-2019 penerimaan PAD Kabupaten Bone tumbuh sekitar 11,04 persen per tahun. Nilai

pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total pendapatan daerah yang hanya tumbuh sekitar 7,66 persen per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memiliki trend peningkatan.

Gambar 2.25. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bone selama periode 2015-2019 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2015 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah ini sebesar 8,55 persen meningkat menjadi 9,43 persen pada tahun 2019. Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang terus meningkat, menunjukkan ketergantungan Kabupaten Bone terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya) semakin kecil, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan.

2.2.24. Opini BPK

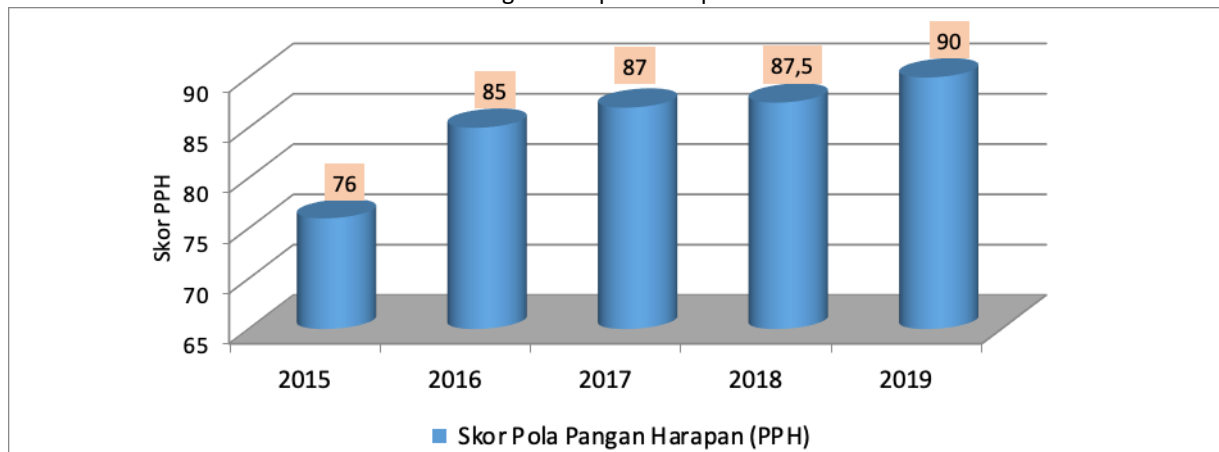
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion); (2) Wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion); (3) Tidak wajar (Adversed Opinion); (4) Tidak menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Bone dalam tiga tahun terakhir memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun jenis opini BPK yang diperoleh Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir adalah:

- Tahun 2015 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2016 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2017 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2018 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
- Tahun 2019 : Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)

2.2.25. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.

Gambar 2.26. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



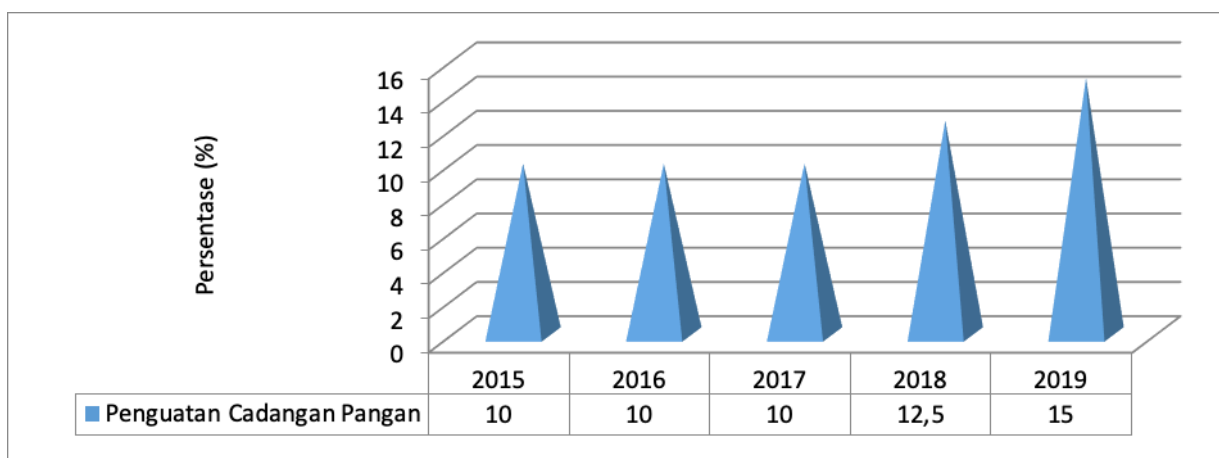
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2020

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 skor PPH di daerah ini sebesar 76 poin meningkat menjadi 90 pada tahun 2019 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi berdasarkan skor yang dicapai tahun 2019, skor PPH daerah ini belum mencapai pola pangan yang ideal (skor 100).

2.2.26. Penguatan Cadangan Pangan

Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Gambar 2.27. Proporsi Jumlah Cadangan Pangan per 100 Ton Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



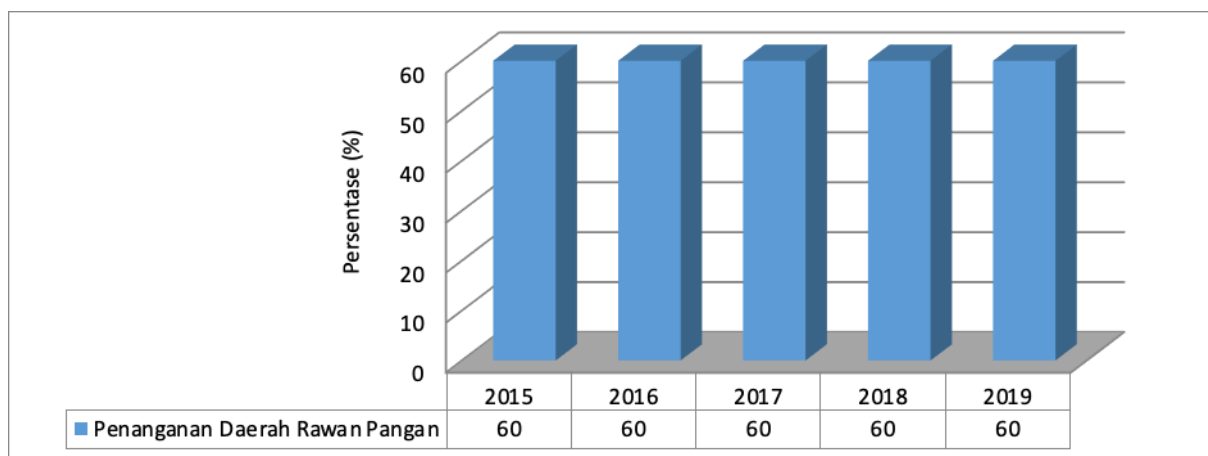
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2020

Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah cadangan pangan per 100 ton di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 10 persen kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 15 persen, yang berarti selama kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Bone menyediakan cadangan pangan sekitar 10-15 ton per tahun.

2.2.27. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Persentase penanganan daerah yang berpotensi rawan pangan serta daerah rawan pangan kronis maupun daerah rawan transien di Kabupaten Bone selama kurun waktu mencakup 60 persen daerah rawan pangan yang tertangani.

Gambar 2.28. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019

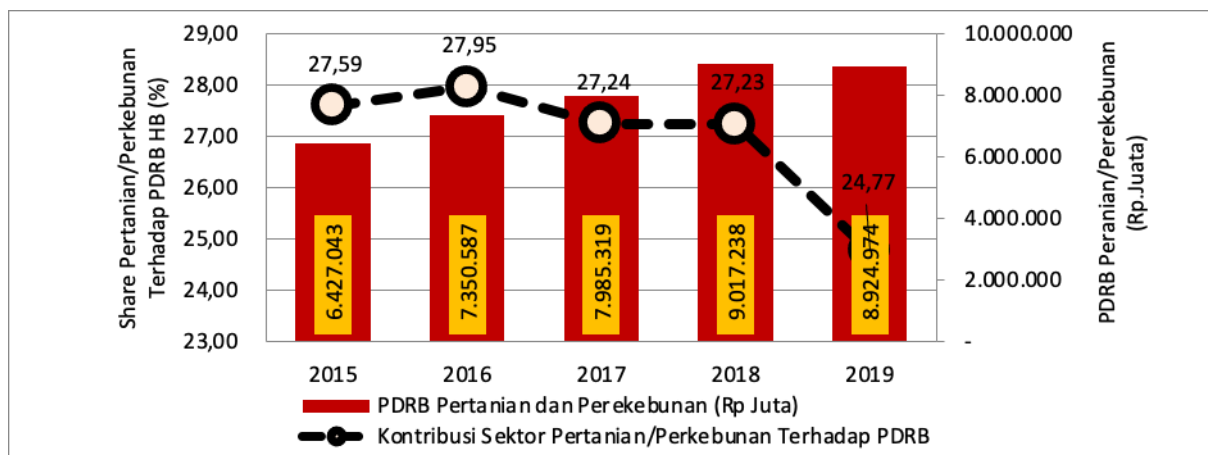


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.28. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp. 6,43 triliun meningkat menjadi Rp. 8,92 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan dalam PDRB harga berlaku Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2015-2016 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB meningkat yakni dari 27,59 persen tahun 2015 meningkat menjadi 27,94 persen tahun 2016. Akan tetapi pada periode berikutnya cenderung menurun bahkan pada tahun 2019 kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara tajam yakni hanya sekitar 24,77 persen. Penurunan tajam kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2019, terkait berbagai kondisi sepanjang tahun 2017, seperti terjadinya anomali cuaca di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit dan bencana alam berupa banjir di daerah Bone bagian utara.

Gambar 2.29. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015–2019



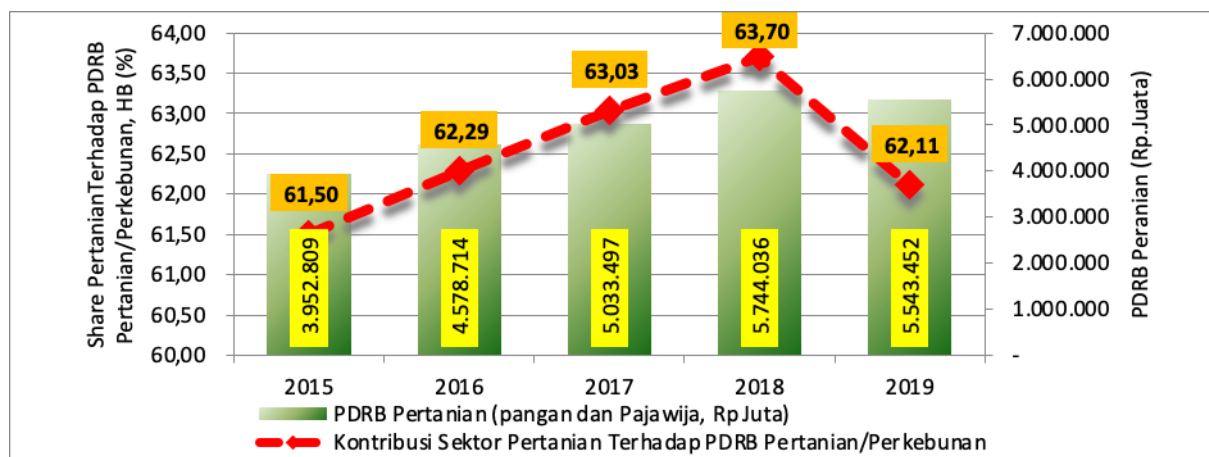
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.29. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga

berlaku sektor pertanian (pangan dan pawija) sebesar Rp. 3,95 triliun meningkat menjadi Rp. 5,54 triliun pada tahun 2019. Sektor pertanian pangan dan palawija di Kabupaten Bone tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, tetapi kecenderungan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian (pangan dan palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 61,50 persen meningkat yakni dari 62,11 persen tahun 2019. Uraian tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) yang merupakan basis utama pertanian Kabupaten Bone memiliki kinerja perkembangan yang cukup baik.

Gambar 2.30. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.30. Produksi Sektor Pertanian

Tabel 2.15. Produksi Pertanian Pangan dan Palawija di Kabupaten Bone 2015-2019 (ton)

No	Komoditi	Jumlah Produksi (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	983,219	1,058,812	1,228,702	1,428,883	971,941
2	Jagung	284,070	379,789	424,441	402,486	403,044
3	Kedele	28,548	53,881	12,959	13,047	4,388
4	Cabe merah	2,003	1,650	1,330.0	22,060	1,843.8
5	Bawang Merah	1,225	1,406	2,002.9	25,618	2,589.9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

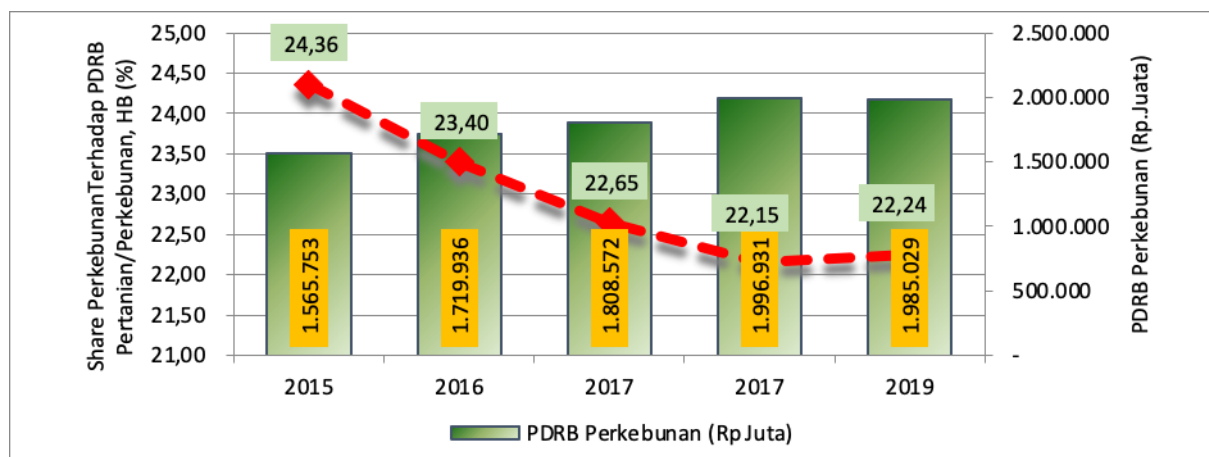
Kabupaten Bone merupakan sentra utama pengembangan komoditi pangan dan palawija di Sulawesi Selatan, terutama komoditi padi, jagung dan kedelai. Peran ini didukung oleh sumberdaya lahan yang cukup luas. daerahKondisi tanaman pangan di Kabupaten Bone didukung dengan lahan sawah yang ada di beberapa kecamatan. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone, pada tahun 2015 dihasilkan 983.219 ton padi sawah dan 284.070 ton jagung.

2.2.31. Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 memiliki kecendrungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp. 1,57 Triliun meningkat menjadi Rp. 1,98 triliun pada tahun 2019. Meskipun demikian sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan palawija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 24,36 persen sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 22,24 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

Gambar 2.31. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.32. Produksi Sektor Perkebunan

Kabupaten Bone selain sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan, seperti padi dan jagung, daerah ini juga menjadi sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Pada tahun 2019, Kabupaten Bone adalah sebagai sentra produksi kelapa terbesar kedua di Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Selayar dengan kontribusi produksi sekitar 20,19 persen terhadap produksi kelapa Sulawesi Selatan. Pada tahun yang sama daerah ini juga sebagai produsen Cengkeh terbesar ke dua setelah Kabupaten Luwu dengan kontribusi sekitar 23,47 persen, juga terbesar kedua dalam produksi Aren setelah Kabupaten Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 24,53 persen, sebagai produsen kakao terbesar ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 11,47 persen, bahkan daerah ini menduduki peringkat pertama sebagai produsen jambu mete dengan kontribusi produksi sekitar 14,57 persen terhadap produksi jambu mete Sulawesi Selatan. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahunan di Kabupaten Bone, tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.16. Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Kabupaten Bone 2015-2019 (ton)

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kakao	17,474,000	18,079,000	12,233,740	10,692,576	8,606,460
2	Cengkeh	3,769,000	4,748,000	4,744,559	4,949,310	5,056,760
3	Kelapa dalam	10,895	12,204,000	12,785,213	12,345,500	12,201,913
4	Tebu	7,035	36,238,793	40,133,700	40,561.01	42,510,310
5	Tembakau	374	373	530,37,000	765,7,000	753,622.86

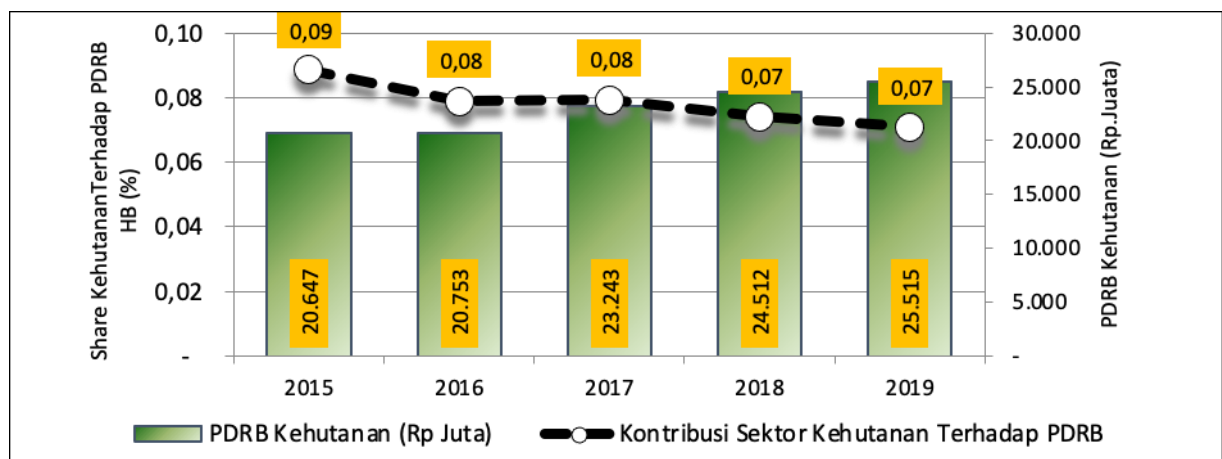
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Selain potensi perkebunan tahunan, daerah ini juga memiliki potensi komoditi perkebunan semusim yang cukup besar. Pada tahun 2019 Kabupaten Bone tercatat sebagai penghasil tebu rakyat paling besar di Sulawesi Selatan, dengan kontribusi sekitar 70,84 persen dari produksi tebu rakyat di Sulawesi Selatan.

2.2.33. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Luas kawasan hutan di Kabupaten Bone berdasarkan SK Menhut No. : 434/Menhut-II/2009, adalah seluas 145.053 Ha, dari luasan tersebut sekitar 62,85% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan sekitar 22,48 persen merupakan kawasan hutan lindung, sisanya terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan wisata. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini, diantaranya hutan pinus, hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti damar, rotan lebah madu dan lainnya.

Gambar 2.32. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



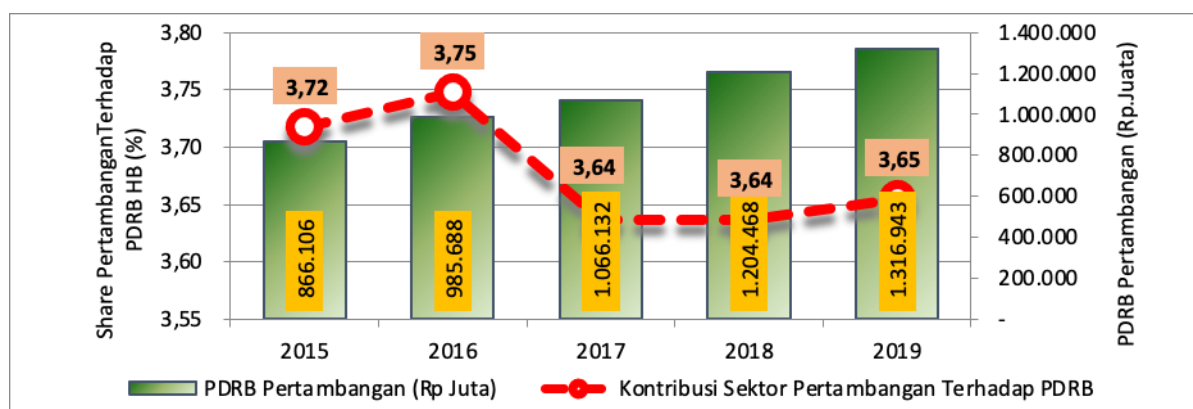
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019, menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 20,65 Milliar dan meningkat menjadi 25,52 Milliar tahun 2019. Kontribusi sektor kehutanan dalam total PDRB harga berlaku Kabupaten Bone juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Sektor kehutanan berkontribusi sekitar 0,09 persen dan meningkat menjadi 0,07 persen tahun 2019.

2.2.34. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Selama kurun waktu 2015-2019, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Bone memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar Rp. 866,11 Milliar meningkat menjadi Rp. 1.316,94 Milliar pada tahun 2019. Meski dengan kinerja pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 11,10 persen per tahun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB sedikit menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kabupaten Bone sebesar 3,72 persen menurun tipis menjadi 3,65 persen tahun 2019. Penurunan kontribusi sektor pertambangan yang terjadi pada tahun 2016, disebabkan kinerja sektor pertanian pada tahun tersebut cukup besar sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga meningkat, kondisi tersebut menekan kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB.

Gambar 2.33. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

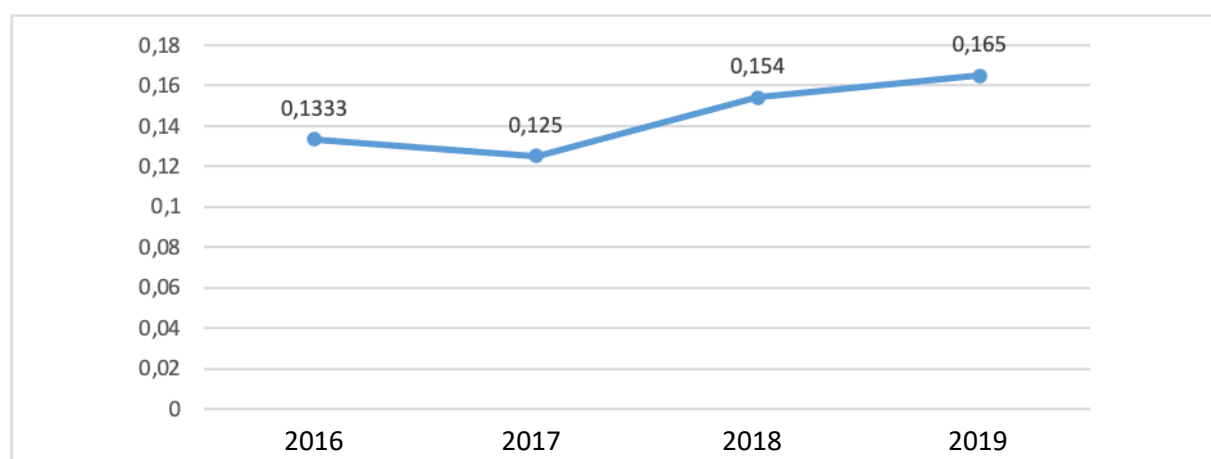


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.35. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir secara umum kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,133 persen terhadap PDRB meningkat menjadi 0,165 persen tahun 2019. Selengkapnya gambaran perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone tahun 2016-2019 terlihat pada Gambar berikut.

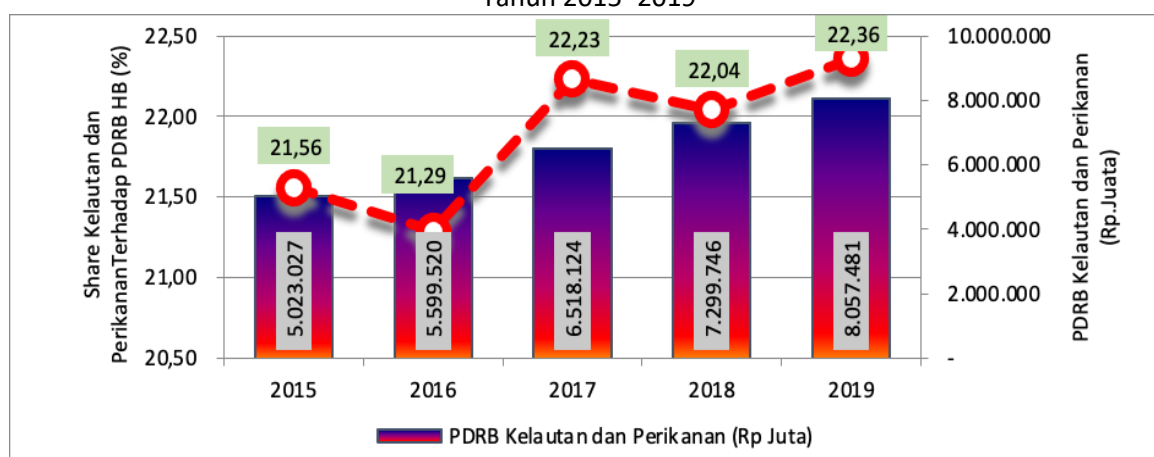
Gambar 2.34. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2016–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.36. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Gambar 2.35. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone, Tahun 2015–2019



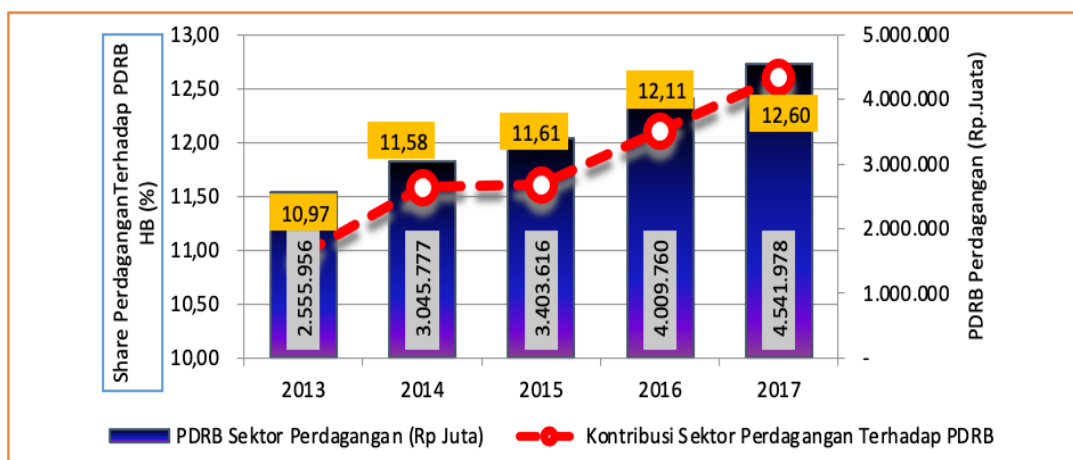
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bone. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 5,02 triliun kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 8,06 triliun. Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Bone. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi nilai tambah sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bone berkontribusi terhadap PDRB sekitar 21,56 persen, kemudian meningkat menjadi 22,36 persen tahun 2019.

2.2.37. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Bone menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di kabupaten Bone, tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp. 2,56 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 4,54 triliun tahun 2019. Kinerja pertumbuhan sektor ini juga cukup tinggi yakni tumbuh sekitar 9,79 persen pertahun. Dengan demikian kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019, secara konsisten menunjukkan trend peningkatan, yakni 10,97 persen tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 12,60 persen pada tahun 2019. Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang konsisten mengalami peningkatan menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini cukup stabil.

Gambar 2.36. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

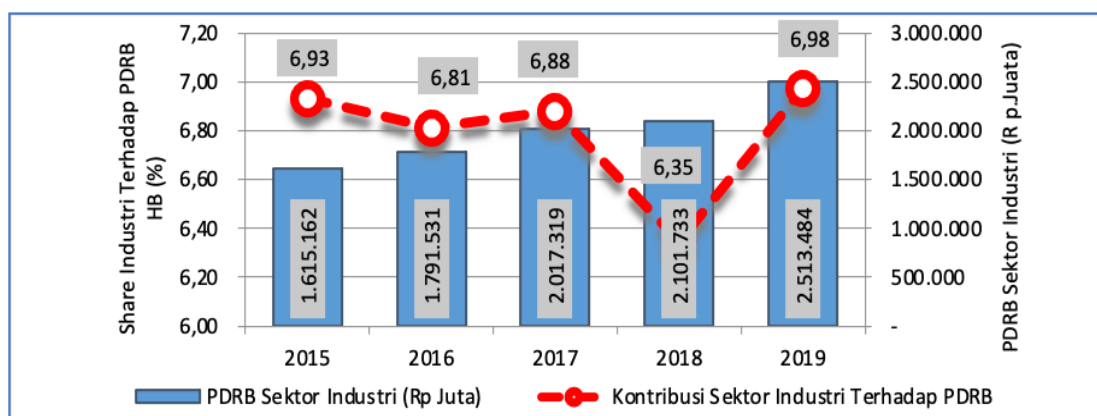


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.38. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Berdasarkan nilai PDRB harga berlaku sektor industri, tercatat bahwa nilai tambah yang diciptakan sektor ini selama periode 2015-2019 terus meningkat, yakni dari Rp 1,61 triliun tahun 2015 menjadi Rp. 2,51 triliun tahun 2019. Namun demikian kontribusi nilai tambah yang bersumber dari sektor ini terhadap total PDRB daerah meningkat tipis. Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri terhadap total PDRB sebesar 6,93 persen turun menjadi 6,98 persen tahun 2019.

Gambar 2.37. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015–2019

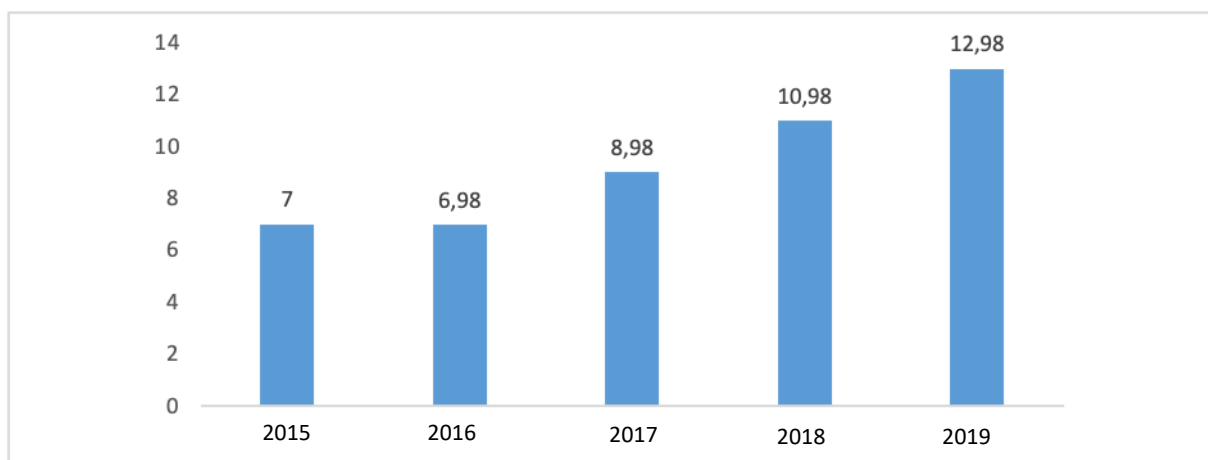


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.39. Kontribusi Sektor Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sektor industri rumah tangga hanya memberikan kontribusi sekitar 7,0 persen terhadap PDRB sektor industri, namun pada tahun 2019 perenannya meningkat menjadi 12,98 persen. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa perkembangan sektor industri rumah tangga di daerah berkembang lebih cepat dibandingkan kelompok industri lainnya. Gambaran perkembangan kontribusi sektor industri rumah tangga di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2019, terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.38. Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri di Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019

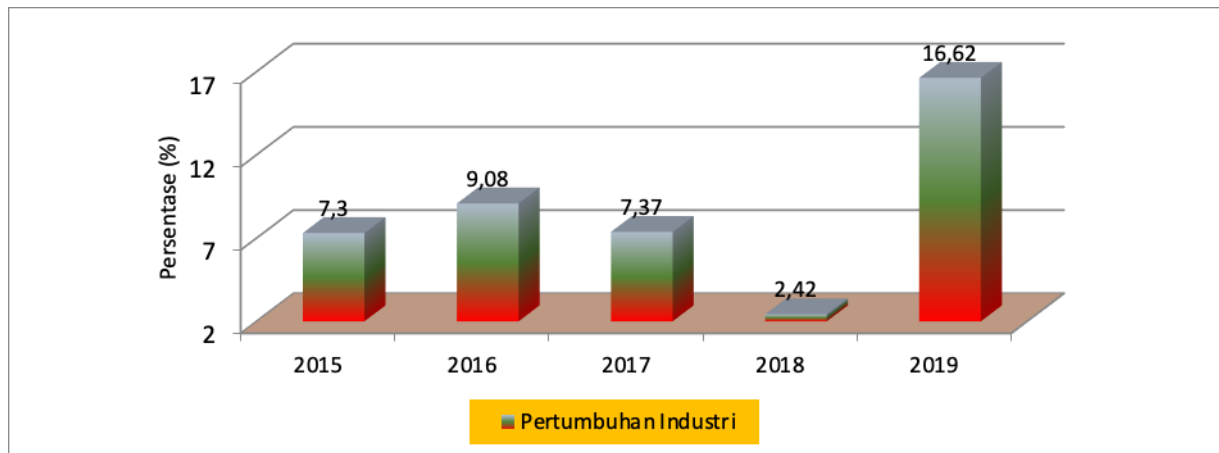


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.2.40. Pertumbuhan Industri

Kabupaten memiliki sejumlah industri, baik yang berkategori besar dan sedang, maupun industri yang berkategori industri kecil dan rumah tangga. Industri besar yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng, Pabrik Gula Arasoe di Kecamatan Cina, Pengolahan Alkohol/Spritus di Kecamatan Cina. Sedangkan industri kecil beragam seperti Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Makanan, Industri Kerajinan, Industri Meubel dan Industri Pertukangan. Perkembangan industri di Kabupaten Bone digambarkan berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri di Kabupaten Bone, seperti yang digambarkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.39. Pertumbuhan Industri Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing adalah melalui pendidikan. Di dalam UUD 1945 Pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, tujuan ke-4 dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Karena pentingnya aspek pembangunan manusia ini, RPJMN 2020-2024 memasukkan peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan layanan pendidikan sebagai salah satu agenda pembangunan.

Strategisnya peran pendidikan dalam pembangunan nasional membuat seluruh tingkatan pemerintah, dari nasional hingga daerah, menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda pembangunan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan manajemen pendidikan hingga pada akhirnya terjadi perbaikan dalam beberapa indikator utama pendidikan, baik itu di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan persiapan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan pada jenjang ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan jasmani, rohani, motorik, kognitif, emosional, dan sosial anak sebagai bekal dalam mengikuti pendidikan dasar nantinya. Persiapan anak yang kurang sebelum memasuki pendidikan dasar dapat membuat anak tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, hingga pada akhirnya putus sekolah. Adapun rentang usia anak yang diharapkan memasuki jenjang pendidikan ini adalah pada rentang umur 0-6 tahun.

Gambaran kasar mengenai persentase penduduk usia sekolah PAUD yang berpartisipasi dalam PAUD di Bone dapat terlihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Tren APK PAUD Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung menurun, yaitu dari 63,24 persen di tahun 2015 lalu terus menurun sampai di tahun 2019 (45,12%). Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan

penduduk usia 5-6 tahun yang terus meningkat tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah siswa PAUD, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Hal ini menjadi temuan tersendiri mengingat sarana dan prasarana pendidikan PAUD, baik itu jumlah guru maupun jumlah sekolah, terus bertambah dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 2.17. Perkembangan Capaian APK PAUD Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sekolah (TK dan RA)	538	538	553	540	564
2	Jumlah Siswa	22,830	22,279	22,232	23,419	22,553
3	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	36,099	36,895	37,695	49,777	49,979
4	Jumlah Guru	1,696	183	1,746	1,670	1,761
5	Jumlah Kelas / Rombel	1,374	1,371	1,371	1,371	1,371
6	Ruang Kelas menurut Kondisi					
	· Baik	897	930	925	917	901
	· Rusak Ringan	257	257	262	270	254
	· Rusak Berat	118	120	120	120	120
7	Rasio Siswa / Sekolah	42.00	41.00	40.00	43.37	39.99
8	Rasio Siswa / Guru	13.00	12.00	13.00	14.02	12.81
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63.24	60.38	59.00	47.05	45.12

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah 2020

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Dalam kurun waktu 2015-2019 terjadi perbaikan indikator angka partisipasi kasar (APK) Bone untuk jenjang pendidikan sekolah menengah, baik itu di pendidikan menengah pertama maupun pendidikan menengah atas. Sementara untuk jenjang pendidikan sekolah dasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu yang sama. APK SMP/MTs di tahun 2019 mencapai 101,98 persen, meningkat dibandingkan capaian di tahun 2015 dengan nilai 71,87 persen. Peningkatan juga terjadi untuk capaian APK SMA/MA/SMK dalam kurun waktu yang sama. APK SMA di tahun 2019 mencapai 70,80 persen, juga meningkat dibandingkan capaian di tahun 2015 dengan nilai APK 69,32 persen. Kondisi berbeda terlihat pada capaian APK SD/MI dengan terjadi penurunan dalam kurun waktu yang sama. APK SD/MI di tahun 2019 mencapai 95,70 persen, lebih rendah dari capaian di tahun 2015 dengan nilai APK 96,4 persen. Jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) memang mengalami penurunan sejak tahun 2018. Hal ini juga diikuti dengan tingkat penurunan yang bahkan lebih besar yang terjadi pada angka siswa yang mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Jika dilihat secara lebih spesifik berdasarkan kecamatan, terdapat jarak yang cukup lebar antara capaian APK di satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Di tahun 2017, capaian APK berdasarkan kecamatan untuk jenjang pendidikan SD/MI Kecamatan yang tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 112,5 persen sementara kecamatan yang terendah menyerap pendidikan sebesar 59,69 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs kecamatan yang tertinggi menyerap pendidikan sebesar 110,29 persen dan terendah adalah 28,39 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK kecamatan yang mempunyai nilai tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 121,28 persen dan yang terendah sebesar 13,19 persen. Hal ini secara sederhana menggambarkan bahwa upaya pemerataan partisipasi sekolah di tiap kecamatan masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	63,229	67,549	64,832	64,832	80,089

1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	82,185	84,77	84,698	84,698	83,688
1.3	APK SD/MI	96,4	90,14	85,66	85,66	95.70
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	24,964	21,609	20,237	20,237	42,640
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	40,688	40,93	40,621	40,621	41,813
2.3	APK SMP/MTs	71,87	71,12	69,4	69,4	101.98
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	29,656	30,051	31,872	30,705	28,678
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	42,779	43,213	44,754	42,864	39,940
3.3	APK SMA/MA/SMK	69,32	69,54	71,22	71,63	71,80

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah 2020

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APK
1	Bontocani	1.983	2.589	76,59	678	1.087	62,37	358	587	60,99
2	Kahu	3.490	4.805	72,63	1.727	2.399	71,99	1.478	1.869	79,08
3	Kajuara	3.912	4.256	91,92	1.325	2.217	59,77	1.285	2.009	63,96
4	Salomekko	1.842	2.419	76,15	744	1.051	70,79	308	815	37,79
5	Tonra	1.632	1.829	89,23	466	921	50,60	600	654	91,74
6	Patimpeng	1.583	2.288	69,19	709	1.096	64,69	487	883	55,15
7	Libureng	3.274	3.878	84,42	1.123	1.914	58,67	1.032	1.481	69,68
8	Mare	3.284	3.468	94,69	1.386	1.653	83,85	1.553	1.423	109,14
9	Sibulue	3.682	4.341	84,82	1.243	2.109	58,94	893	1.892	47,20
10	Cina	3.964	3.524	112,5	1.195	1.684	70,96	676	1.402	48,22
11	Barebbo	2.763	3.515	78,61	1.261	1.738	72,55	241	1.483	16,25
12	Ponre	1.472	2.115	69,6	455	954	47,69	326	665	49,02
13	Lappariaja	2.075	3.437	60,37	1.344	1.549	86,77	1.015	1.173	86,53
14	Lamuru	2.064	3.458	59,69	632	1.630	38,77	514	1.139	45,13
15	Tellu Limpoe	1.749	2.054	85,15	453	982	46,13	165	1.251	13,19
16	Bengo	2.199	3.126	70,35	610	1.686	36,18	411	1.330	30,90
17	Ulaweng	2.477	3.378	73,33	1.033	1.650	62,61	893	1.273	70,15
18	Palakka	2.370	2.816	84,16	942	1.485	63,43	253	1.254	20,18
19	Awangpone	2.841	4.185	67,89	1.069	1.884	56,74	539	1.683	32,03
20	Tellu Siattinge	4.001	5.027	79,59	1.367	2.571	53,17	718	592	121,28
21	Amali	1.885	2.926	64,42	567	1.410	40,21	435	927	46,93
22	Ajangale	2.928	3.584	81,7	890	1.811	49,14	845	1.405	60,14
23	Dua Boccoe	3.165	4.235	74,73	686	1.973	34,77	260	1.587	16,38
24	Cenrana	2.912	3.777	77,1	901	1.579	57,06	777	1.281	60,66
25	TR Barat	3.742	4.764	78,55	778	2.740	28,39	3.338	3.121	106,95
26	Tanete Riattang	3.606	6.012	59,98	3.376	3.061	110,29	1.810	3.121	57,99
27	TR Timur	3.979	4.985	79,82	1.655	2.583	64,07	1.547	2.788	55,49
	Jumlah	80,089	83,688	95,70	42,640	41,813	101,98	28,678	39,940	91,54

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah 2020

2.3.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Perkembangan pendidikan yang ditamatkan (APT) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Bone pada tingkat pendidikan SD dan SMP sangat berfluktuasi dan cenderung stagnan di tahun 2018. Jika dilihat dari perkembangan siswa SD yang ditamatkan di tahun 2018

sebanyak 14,202 terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 14.157. demikian juga untuk tingkat pendidikan SMP. Hal yang menjadi masalah adalah pada jenjang pendidikan SMA Di mana terjadi kecenderungan penurunan jumlah siswa yang tamat dari jenjang pendidikan tersebut. Di tahun 2015 terdapat 9,020 siswa yang menamatkan jenjang pendidikan SMA, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 7.188 siswa. Setelah tahun 2015, jumlah siswa yang tamat terus menurun hingga pada tahun 2018 hanya terdapat 6,483 siswa yang tamat SMA.

Tabel 2.20. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	APT	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	15.449	14.915	14.247	14.202	14.157
2	SMP	12.735	12.584	11.248	11.133	11.121
3	SMA	9.020	8.913	6.285	6.483	7.188
4	Perguruan Tinggi	3.222	3.467	3.605	3.721	3.814

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, 2020

2.3.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu tersebut. Secara umum, APM menunjukkan persentase jumlah anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Dalam kurun waktu 2015-2019, APM Bone mengalami penurunan di tingkat pendidikan SD dan SMP, sementara APM di tingkat pendidikan SMA mengalami peningkatan. APM Bone di tingkat pendidikan SD di tahun 2019 mencapai 87,39 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun 2015 dengan 76,93 persen.

Di tingkat SMP, APM juga mengalami tren penurunan yaitu dari 61,35 persen di tahun 2015 menjadi 75,94 di tahun 2019. Sementara di tingkat SMA, tren APM SMA justru mengalami peningkatan yaitu dari 42,89 persen di tahun 2015 menjadi 71,80 persen di tahun 2019.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bone di tahun 2017 berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar kecamatan dalam hal indikator APM. APM tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI ditunjukkan oleh Kecamatan Mare (98,62%) dan angka yang terendah di Kecamatan Amali (76,49%). Demikian juga pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dimana APM tertinggi terdapat di Kecamatan Tanete Riattang (165,83%) sedangkan terendah berada di Tellu Limpoe (43,69%). Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK memperlihatkan masalah yang sangat serius karena ada kecamatan yang hanya menunjukkan APM sebesar 13,19 persen (Kecamatan Tellu Limpoe).

Tabel 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bone, 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	92,034	87,987	84,361	72,698	73,136
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	96,001	96,791	96,791	84,698	83,688
1.3.	APM SD/MI	76,93	79,69	96,31	96,51	87,39
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	40,054	39,614	38,658	30,681	31,751
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	46,622	47,417	47,417	40,621	41,813

2.3.	APM SMP/MTs	61,35	52,8	79,83	81,89	75.94
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	29,656	30,051	31,872	30,705	28,678
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	42,779	43,213	44,754	42,864	39,940
3.3.	APM SMA/MA/SMK	42,89	42,67	49,42	50,96	71.80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, 2020

Tabel 2.22. Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71	358	587	60,99
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83	1.478	1.869	79,08
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28	1.285	2.009	63,96
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30	308	815	37,79
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26	600	654	91,74
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93	487	883	55,15
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24	1.032	1.481	69,68
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66	1.553	1.423	109,14
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75	893	1.892	47,20
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59	676	1.402	48,22
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49	241	1.483	16,25
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47	326	665	49,02
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25	1.015	1.173	86,53
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21	514	1.139	45,13
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69	165	1.251	13,19
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98	411	1.330	30,90
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21	893	1.273	70,15
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50	253	1.254	20,18
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89	539	1.683	32,03
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37	718	592	121,28
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67	435	927	46,93
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12	845	1.405	60,14
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43	260	1.587	16,38
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99	777	1.281	60,66
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25	3.338	3.121	106,95
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83	1.810	3.121	57,99
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66	1.547	2.788	55,49
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53	22.757	39.088	58,22

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

2.3.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) secara sederhana ingin menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk pada tingkat usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu per seribu penduduk. APS Bone untuk jenjang pendidikan SD cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Di tahun 2015, terdapat 95,87 penduduk usia 7-12 tahun yang telah berpartisipasi pada SD per seribu penduduk di Bone. Angka ini terus menurun sampai tahun 2018, dimana terdapat 85,83 penduduk per seribu penduduk usia 7-12 tahun yang telah terserap pada jenjang pendidikan SD. APS Bone kemudian sedikit terkoreksi di tahun 2019 dengan capaian 87,39. APS pada jenjang pendidikan SMP Bone juga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sampai pada tahun 2018 terjadi penurunan APS, yaitu dari 85,91 penduduk per seribu penduduk usia 13-15 tahun di tahun 2015 menjadi 75,53 penduduk. Hingga pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan APS pada jenjang pendidikan SMP menjadi 75,94 penduduk.

Tabel 2.23. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bone, 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa usia 7-12 tahun	92.034	87.987	84.361	72.698	73.136
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	96.001	96.791	96.791	84.698	83.688
1.3.	APS SD/MI	95,87	90,90	87,16	85,83	87,39
2	SMP/MTs					

2.1.	jumlah siswa usia 13-15 tahun	40.054	39.614	38.658	30.681	31.751
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	46.622	47.417	47.417	40.621	41.813
2.3.	APS SMP/MTs	85,91	83,54	81,53	75,53	75,94
3	SMA/MA					
2.1	Jumlah Siswa usia 16-18 tahun	29,656	30,051	31,872	30,705	28,678
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	42,779	43,213	44,754	42,864	39,940
2.3	APS SMA/MA	69,32	69,54	71,22	71,63	71,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Tabel 2.24. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMP/MA		
		Jumlah murid 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA	Jumlah penduduk usia 16-18 th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71	358	587	60,99
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83	1.478	1.869	79,08
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28	1.285	2.009	63,96
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30	308	815	37,79
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26	600	654	91,74
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93	487	883	55,15
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24	1.032	1.481	69,68
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66	1.553	1.423	109,14
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75	893	1.892	47,20
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59	676	1.402	48,22
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49	241	1.483	16,25
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47	326	665	49,02
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25	1.015	1.173	86,53
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21	514	1.139	45,13
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69	165	1.251	13,19
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98	411	1.330	30,90
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21	893	1.273	70,15
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50	253	1.254	20,18
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89	539	1.683	32,03
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37	718	592	121,28
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67	435	927	46,93
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12	845	1.405	60,14
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43	260	1.587	16,38
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99	777	1.281	60,66
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25	3.338	3.121	106,95
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83	1.810	3.121	57,99
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66	1.547	2.788	55,49
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53	22.757	39.088	91,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Jumlah anak putus Sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 0,09 pada tahun 2015 turun menjadi 0,08 pada tahun 2017.

Tabel 2.25. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,09	0,8	0,08	0,08	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama SMP/MTs dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan. Dari 0,05 pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 0,07 pada tahun 2019.

Tabel 2.26. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,05	0,1	0,1	0,2	0,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas SMA/SMK/MA mencapai 0,01 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2.27. Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan UPT SMA/SMK Wilayah III Sulsel, 2021

2.3.1.1.7. Angka Kelulusan

Tahun 2015 dan 2016, peserta didik tingkat SD di Kabupaten Bone yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan hingga 97,80 persen akibat adanya beberapa faktor penyebab antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 2.28. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan	15.449	14.915	13.677	14.464	12.618
2	Jumlah Siswa Kelas VI	15.449	14.915	13.984	14.464	12.771
3	Angka Lulusan SD/MI	100	100	97,80	100	98,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Tahun 2018 dan 2019, peserta didik tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bone yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen.

Tabel 2.29. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan	12.735	12.584	12.833	13.089	12.486
2	Jumlah Siswa Kelas XII	12.735	12.584	12.833	13.089	12.486
3	Angka Lulusan SMA/SMK	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Tahun 2015 dan 2016, peserta didik tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bone yang lulus dan menyelesaikan pendidikan mencapai 100 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 98,50 persen akibat adanya beberapa faktor penyebab antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 2.30. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan	17.524	12.584	12.245	11.604	8.023
2	Jumlah Siswa Kelas IX	17.524	12.584	12.431	11.604	8.023
3	Angka Lulusan SMP/MTs	100	100	98,50	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.8. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah merupakan bentuk layanan dasar dari sebuah sistem pemerintahan daerah. Untuk jenjang pendidikan SD, ketersediaan sekolah per seribu penduduk menunjukkan kecenderungan peningkatan, setidaknya dalam lima tahun terakhir (2015-2019). Di tahun 2015 terdapat 7,87 sekolah untuk tiap seribu penduduk di Bone. Hingga pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,12 sekolah. Kecenderungan peningkatan juga terjadi di jenjang pendidikan SMP dalam kurun waktu yang sama. Di tahun 2015 terdapat 4,53 sekolah untuk tiap seribu penduduk di Bone. Hingga tahun 2019 terdapat 5,29 sekolah per seribu penduduk.

Tabel 2.31. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bone, 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	756	758	759	754	763
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	96.001	96.791	97.591	84.698	83.688
1.3	Rasio	7,87	7,83	7,78	8,90	9,12
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	211	211	219	209	221
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	46.622	47.417	48.215	40.621	41.813
2.3	Rasio	4,53	4,50	4,54	5,15	5,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Ketersediaan sekolah untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk jenjang sekolah Dasar/MI dan Sekolah Menengah Pertama/MTs cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Angka rata-rata perbandingan antara jumlah sekolah dengan penduduk mempunyai rasio 1:19 untuk sekolah Dasar/MI dan untuk tingkat sekolah menengah Pertama /MTs rata-rata perbandingannya adalah 1:35. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruangan menunjukkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan.

Tabel 2.32. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan di Kab Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Bontocani	39	2.589	1:66	27	1.087	1:40
2	Kahu	212	4.805	1:23	79	2.399	1:30
3	Kajuara	230	4.256	1:19	40	2.217	1:55
4	Salomekko	130	2.419	1:19	57	1.051	1:18
5	Tonra	102	1.829	1:18	25	921	1:37
6	Patimpeng	112	2.288	1:20	19	1.096	1:58
7	Libureng	253	3.878	1:15	48	1.914	1:40
8	Mare	230	3.468	1:15	74	1.653	1:22
9	Sibulue	259	4.341	1:17	74	2.109	1:29
10	Cina	220	3.524	1:16	53	1.684	1:32
11	Barebbo	227	3.515	1:15	59	1.738	1:29
12	Ponre	116	2.115	1:18	37	954	1:26
13	Lappariaja	133	3.437	1:26	44	1.549	1:35
14	Lamuru	152	3.458	1:23	42	1.630	1:39
15	Tellu Limpoe	89	2.054	1:23	22	982	1:45
16	Bengo	150	3.126	1:21	28	1.686	1:60
17	Ulaweng	183	3.378	1:18	31	1.650	1:53
18	Palakka	187	2.816	1:15	47	1.485	1:32
19	Awangpone	234	4.185	1:18	58	1.884	1:32
20	Tellu Siattinge	291	5.027	1:17	89	2.571	1:29
21	Amali	157	2.926	1:19	10	1.410	1:141
22	Ajangale	198	3.584	1:18	43	1.811	1:42
23	Dua Boccoe	305	4.235	1:14	39	1.973	1:51
24	Cenrana	229	3.777	1:16	53	1.579	1:30
25	TR Barat	134	4.764	1:36	-	2.740	-
26	Tanete Riattang	301	6.012	1:20	74	3.061	1:41
27	TR Timur	201	4.985	1:25	166	2.583	1:16
	Jumlah	5.074	96.791	1:19	1.338	47.417	1:35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Jumlah guru SD/MI di Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cukup berfluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Jumlah guru meningkat di tahun 2017, yaitu dari 6.633 guru di tahun 2015 menjadi 7.010 guru di tahun 2017. Lalu menurun terus sampai di tahun 2019 menjadi 6.650

guru. Meski begitu, dengan jumlah murid SD/MI yang terus berkurang dalam kurun waktu tersebut, membuat rasio guru/murid menjadi semakin membaik. Jika di tahun 2015 terdapat satu guru untuk 13,88 murid, di tahun 2019 cakupannya berkurang menjadi 11,92 murid.

Jumlah guru di Bone pada rentang tahun 2015-2019 juga cukup berfluktuatif yang juga diikuti dengan jumlah murid yang berfluktuasi juga. Hal ini membuat rasio guru/murid juga menjadi cukup berfluktuasi dalam rentang tahun tersebut. Jika di tahun 2015, satu guru menghadapi 11,81 murid, di tahun 2017 cakupannya meningkat menjadi 14,99 murid. Meski begitu cakupan ketersediaan guru ini mulai membaik di dua tahun berikutnya menjadi 11,12 murid di tahun 2018 dan 12,05 murid di tahun 2019.

Tabel 2.33. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	6.633	6.792	7.010	6.988	6.650
1.2	Jumlah Murid	92.034	88.236	88.153	79.807	79.244
1.3	Rasio	13,88	12,99	12,58	11,42	11,92
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	3.386	3.264	3.195	3.391	3.270
2.2	Jumlah Murid	39.974	47.703	47.884	37.710	39.426
2.3	Rasio	11,81	14,61	14,99	11,12	12,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Tabel 2.34. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Bontocani	177	2,122	1:12	78	791	1:10
2	Kahu	352	4,002	1:11	162	2,295	1:14
3	Kajuara	291	3,934	1:14	135	1,971	1:14
4	Salomekko	144	1,958	1:14	87	928	1:10
5	Tonra	139	1,536	1:11	58	668	1:11
6	Patimpeng	148	1,830	1:12	74	782	1:10
7	Libureng	280	3,005	1:11	156	1,601	1:10
8	Mare	260	3,068	1:12	117	1,491	1:12
9	Sibulue	328	3,688	1:11	165	1,808	1:10
10	Cina	234	2,960	1:12	111	1,312	1:11
11	Barebbo	302	2,904	1:10	125	1,487	1:11
12	Ponre	159	1,473	1:9	72	662	1:9
13	Lappariaja	209	2,588	1:12	158	2,021	1:12
14	Lamuru	191	2,432	1:12	96	924	1:9
15	Tellu Limpoe	107	1,566	1:14	37	489	1:13
16	Bengo	221	2,420	1:10	73	782	1:10
17	Ulaweng	227	2,475	1:10	96	1,148	1:11
18	Palakka	230	2,674	1:11	81	872	1:10
19	Awangpone	315	3,158	1:10	138	1,440	1:10
20	Tellu Siattinge	352	4,110	1:11	164	2,065	1:12
21	Amali	210	1,766	1:8	97	867	1:8
22	Ajangale	223	2,699	1:12	100	1,388	1:13
23	Dua Boccoe	317	3,058	1:9	139	1,554	1:11
24	Cenrana	236	2,724	1:11	126	1,224	1:9
25	TR Barat	290	4,644	1:16	94	1,092	1:11
26	Tanete Riattang	415	6,093	1:14	371	5,747	1:15
27	TR Timur	293	4,402	1:15	160	2,017	1:12
	Jumlah	6,650	79,289	1:11	3,270	39,426	1:12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Jika dilihat lebih spesifik di tiap kecamatan, jumlah guru yang tersedia masih sesuai dengan standar nasional mengenai rasio guru. Di tingkat pendidikan SD, rasio guru tertinggi terdapat di Tanete Riattang Barat dengan nilai rasio 1:16, sedangkan di tingkat pendidikan SMP, rasio guru tertinggi terdapat di Tanete Riattang dengan rasio guru 1:15.

2.3.1.1.10. Penduduk yang Berusia di atas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka melek huruf di Kabupaten Bone sudah cukup baik di tahun 2017 karena secara persentase telah mencapai angka 100 persen, namun jika dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 capaiannya masih berada disekitar 50 persen sampai dengan 51 persen. Namun jika dilihat dari angka mutlak dari angka jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang sudah bisa membaca dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas usia 15 tahun masih ada beberapa yang belum melek huruf secara keseluruhan.

Angka melek huruf secara keseluruhan di Kabupaten Bone berdasarkan sebaran kecamatan, maka angka melek huruf diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sebesar 14.340 Penduduk. Namun besaran angka melek huruf tersebut di setiap kecamatan mempunyai variasi melek huruf yang sangat timpang dan sangat jauh perbedaannya. Perbedaan tersebut antara setiap kecamatan sangat berbeda, yakni kecamatan yang memiliki angka melek huruf yang paling rendah adalah sebesar 30 penduduk dan yang paling tinggi adalah 1.817 Penduduk. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pemerataan melek huruf di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone masih sangat timpang. Ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang belum merata pada sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Tabel 2.35. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	313.638	326.479	326.479	519.185	529.324
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	628.904	641.724	326.511	577.000	581.100
3	Angka Melek Huruf (dalam persen)	50	51	100	89.98	91,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

Tabel 2.36. Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf (dalam persen)
1	Bontocani	13.583	13.697	110
2	Kahu	36.426	35.162	110
3	Kajuara	35.980	32.400	259
4	Salomekko	15.539	13.652	497
5	Tonra	13.194	11.985	701
6	Patimpeng	16.488	14.982	1.312
7	Libureng	23.563	26.543	200
8	Mare	25.022	23.297	1.817
9	Sibulue	34.206	30.348	110
10	Cina	25.455	23.376	110
11	Barebbo	27.523	24.708	570
12	Ponre	12.715	12.337	120
13	Lappariaja	23.824	21.619	838
14	Lamuru	24.969	22.826	1.686
15	Tellu Limpoe	14.097	12.258	140
16	Bengo	25.481	23.210	1.665
17	Ulaweng	24.731	22.044	834
18	Palakka	22.639	20.174	949
19	Awangpone	28.560	26.337	149
20	Tellu Siattinge	38.218	35.960	130

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf (dalam persen)
21	Amali	19.799	18.774	120
22	Ajangale	26.100	24.631	120
23	Dua Boccoe	28.827	26.971	30
24	Cenrana	23.269	21.188	680
25	TR Barat	48.098	44.584	431
26	Tanete Riattang	51.404	45.645	382
27	TR Timur	42.409	39.138	270
	Jumlah	722.119	667.846	14.340

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 terjadi perbaikan kompetensi guru pada seluruh jenjang pendidikan dasar. Di tahun 2017, persentase guru yang telah berkualifikasi S1 ke atas di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai 100 persen. Sementara untuk guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, telah terdapat sebesar 99,25 persen yang telah berkualifikasi S1 ke atas.

Tabel 2.37. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (dalam persen)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Guru berkualifikasi S1 Keatas SD/MI	87,31	90,63	100	100	100
2	Persentase Guru berkualifikasi S1 keatas SMP/MTs	100	96,72	100	100	100
3	Persentase Guru berkualifikasi S1 keatas SMA/SMK/MA	99,25	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2020

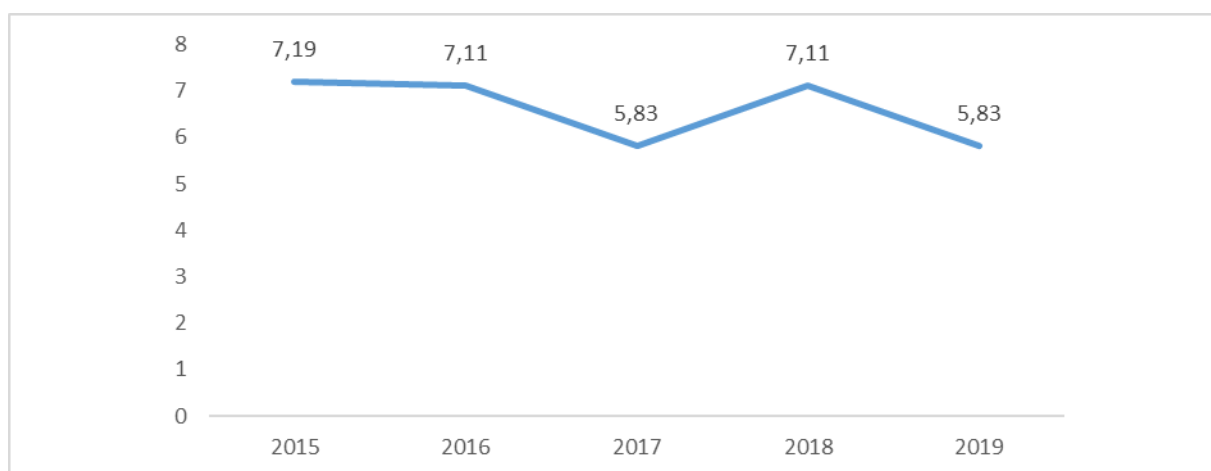
2.3.1.1. Kesehatan

Selain melalui layanan pendidikan, pembangunan SDM dengan sasaran meningkatkan kualitas dan daya saingnya juga perlu dilakukan melalui penghantaran layanan kesehatan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, strategisnya peran layanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadikan aspek kesehatan sebagai urusan pemerintahan konkuren, dimana dalam menghantarkan layanan kesehatan perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penekanan strategisnya aspek kesehatan ini dipertegas dengan dijadikannya urusan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib, yang mana menjadi prioritas pemerintah daerah untuk diselesaikan terlebih dahulu. RPJMN 2020-2024 juga menyadari betul peran aspek kesehatan sebagai modal utama pembangunan nasional. Pemerintah pusat juga memasukkan peningkatan cakupan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

2.3.1.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. AKB Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif yang cenderung telah menurun. Di tahun 2015 terdapat 7,19 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran. Capaian tersebut lalu terus mengalami penurunan menjadi 5,83 pada tahun 2017. Di tahun 2018 capaian AKB Bone kembali meningkat menjadi 7,11 hingga pada tahun 2019 AKB Bone kembali turun dengan capaian 5,83 persen. Capaian di tahun 2019 ini lebih tinggi dari target SDG'S tahun 2017 yaitu sebesar 1,02. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait agar di tahun mendatang angka kematian bayi (AKB) dapat terus ditekan.

Gambar 2.40. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone 2015-2019

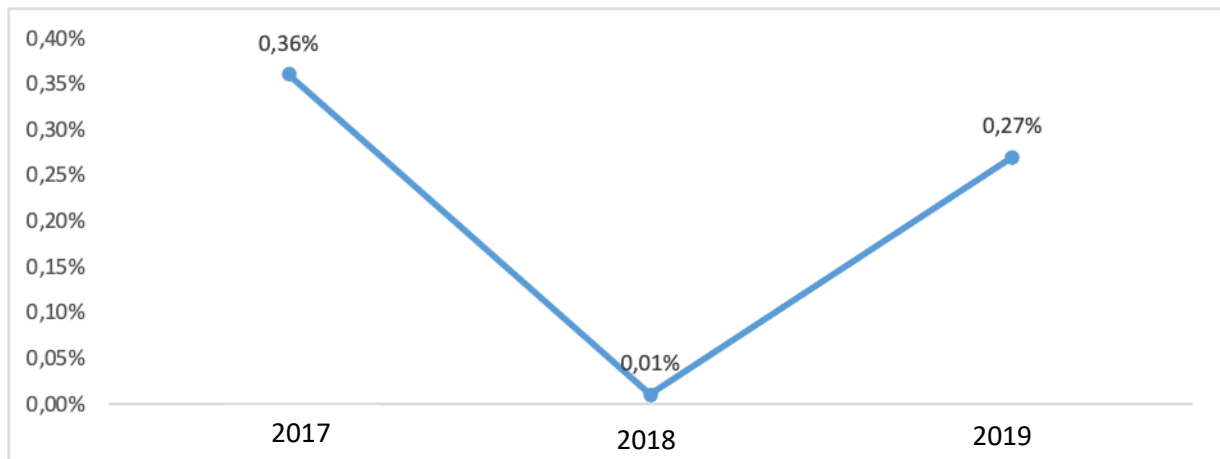


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi cukup berfluktuasi dalam rentang tahun 2017-2019. Angka kelangsung hidup bayi di tahun 2016 mencapai 0,36. Capaian ini kemudian menurun di tahun berikutnya (2018) menjadi 0,01, lalu meningkat kembali menjadi 0,27 di tahun 2019. Rendahnya angka kelangsung hidup bayi menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah harus berupaya lebih keras untuk memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama pada masa kehamilan dan pasca melahirkan.

Gambar 2. 41. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

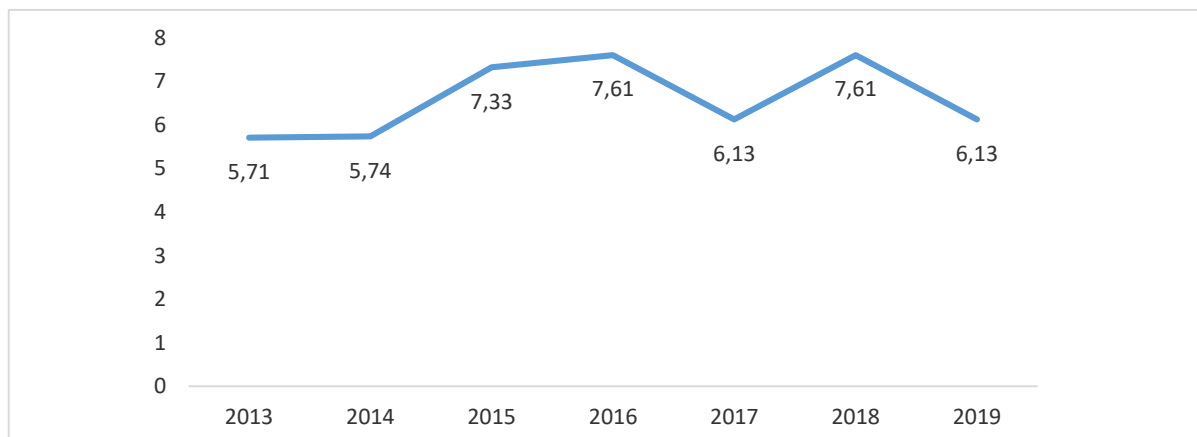


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Sementara angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Bone dalam rentang tahun tahun 2015-2019 juga cukup berfluktuasi dengan kecenderungan penurunan. Di tahun 2016 capaian indikator kematian balita sempat meningkat, yaitu dari 7,33 balita di tahun 2015 menjadi 7,61 bayi di tahun 2016. Setelahnya, di tahun 2017 angka kematian balita menurun menjadi 6,13 balita per seribu penduduk. Hingga di tahun 2019, angka kematian balita mencapai 6,13 setelah sempat meningkat menjadi 7,61 balita per 1000 kelahiran.

Gambar 2.42. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



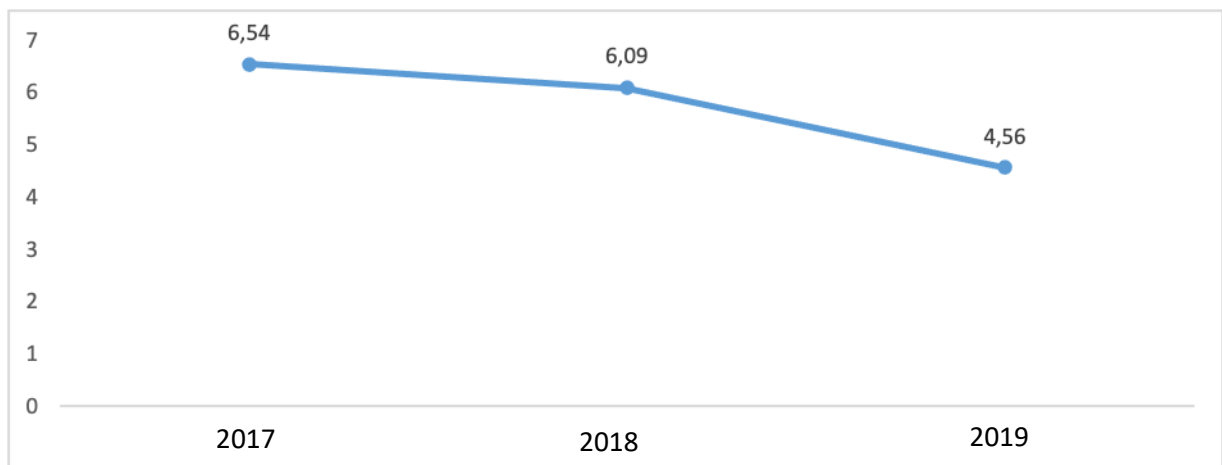
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi fokus utama bagi Dinas Kesehatan. Berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada target tersebut dilanjutkan kembali, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya, mengingat bahwa perlu keterpaduan berbagai kegiatan dan kesinambungan program dari tahun ke tahun.

2.3.1.1.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Tahun 2017 sampai 2019 angka kematian Neonatal terus mengalami penurunan. Di tahun 2017, angka kematian neonatal mencapai 6,54 per seribu kelahiran hidup. Lalu menurun di dua tahun berikutnya menjadi 6,09 di tahun 2018 dan 4,56 di tahun 2019. Hal ini menandakan adanya keseriusan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian neonatal yang ada di Kabupaten Bone.

Gambar 2.43. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup, Tahun 2017-2019

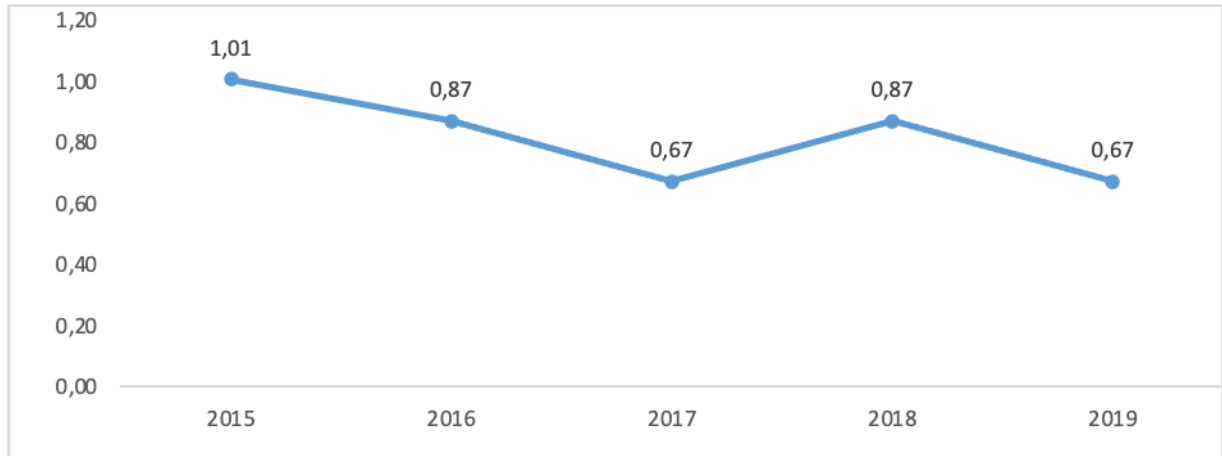


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Angka kematian ibu pada tahun 2015 mencapai 1,01/100.000 KH, lalu terus menurun sampai pada tahun 2017 menjadi 0,67. Capaian ini kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 0,87, hingga kembali pada capaian 0.67 di tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia perlu menjadi perhatian serius dan penanganan secara berkesinambungan.

Gambar 2.44. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

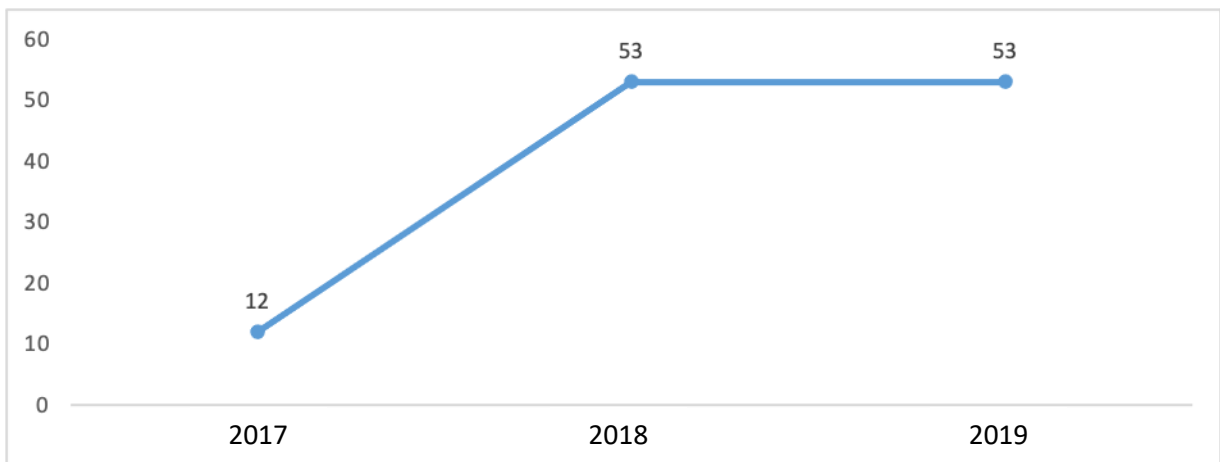


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu dibagi jumlah balita pada tahun tertentu dikalikan 1000. Pada tahun 2019 jumlah Posyandu Aktif yang tersebar di Kabupaten Bone mencapai jumlah 970. Jumlah ini mencakup 53 posyandu per seribu balita. Capaian ini telah meningkat dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2017 dimana angka rasio posyandu per satuan balita pada waktu itu mencapai 12.

Gambar 2.45. Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

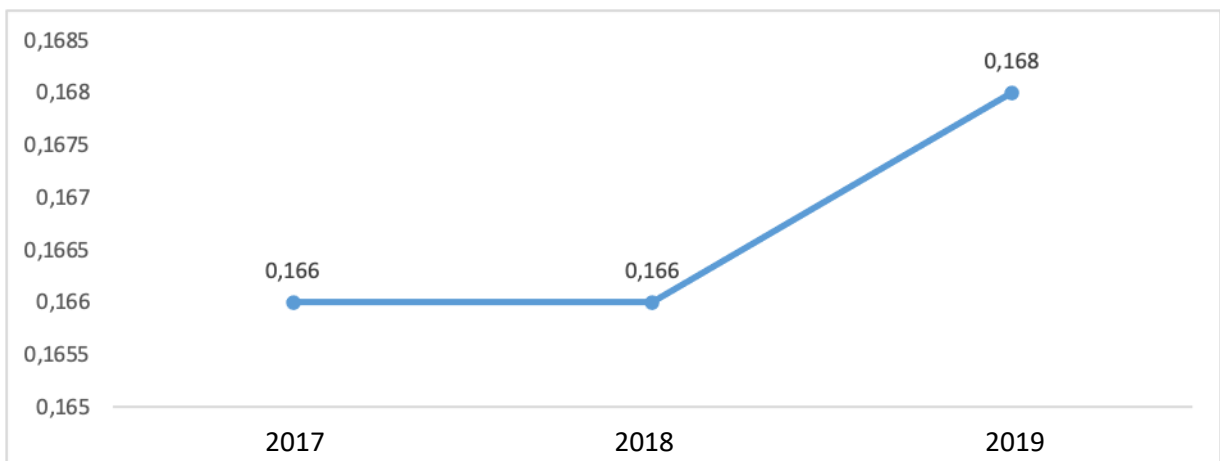


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu PerSatuan Penduduk

Laporan Kementerian Kesehatan dalam Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa pada 2017, rasio ketersediaan Puskesmas terhadap 30.000 penduduk di Indonesia adalah 1,15. Dalam hal ini berarti bahwa, satu puskesmas dapat melayani sekitar 26.000 penduduk di Indonesia. Di Kabupaten Bone jumlah Puskesmas adalah 38, Pustu 74 dan 14 Klinik. Adapun rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Bone di tahun 2019 mencapai 0,168 persen. Hal ini didapatkan dari penjumlahan dari 38 Puskesmas ditambah 74 Pustu dan 14 Klinik totalnya 126 dan di bagi total jumlah penduduk Kabupaten Bone (746.973) dikalikan 1000 dan hasilnya adalah 0,168. Artinya, cakupan ketersediaan puskesmas untuk seribu penduduk belum mencapai satu Puskesmas. Hal ini membuat ketersediaan fasilitas kesehatan perlu menjadi perhatian tersendiri.

Gambar 2.46. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

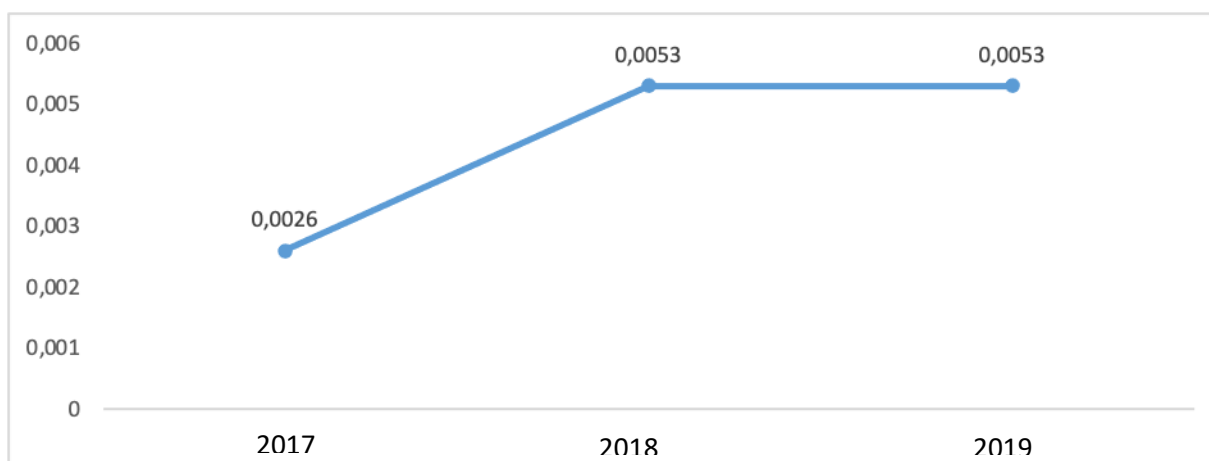


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit di Kabupaten Bone sejak 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah sakit di Kabupaten Bone sudah bertambah. Pada tahun 2017, jumlah rumah sakit di Kabupaten Bone adalah 2 rumah sakit pemerintah sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk mencapai 0,0026. Pada Tahun 2019 ada 2 tambahan rumah sakit, yaitu 1 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit pemerintah tipe C, sehingga pada tahun tersebut angka rasio ketersediaan rumah sakit meningkat menjadi 0,0053. Capaian ini berlanjut sampai tahun berikutnya.

Gambar 2.47. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan ketersediaan SDM dokter di Kabupaten Bone masih sangat tinggi. Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan dan penduduk yang besar dan tentunya membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang tinggi dari tenaga kesehatan khususnya dokter.

Tabel 2. 38. Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone Tahun 2019 (orang)

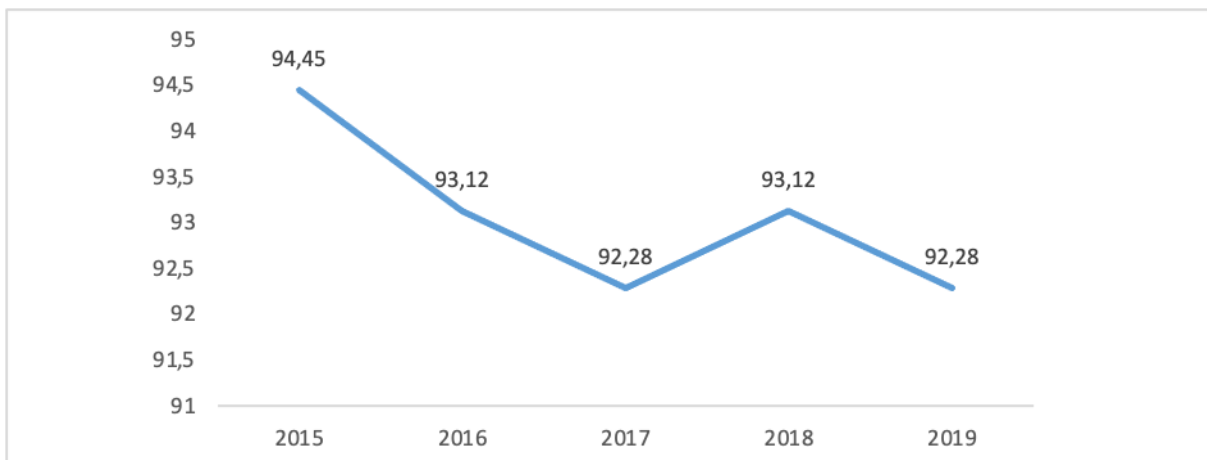
No	Jenis Tenaga	Puskesmas	Rumah Sakit	Balai Kesehatan Gigi	Dinkes
1	Dokter Spesialis	0	12	0	1
2	Dokter Umum	30	15	0	2
3	Dokter Gigi	15	2	4	0
	Total	45	29	4	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.10. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka pelayanan pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini penting mengingat bahwa seringkali penyebab kematian ibu dan bayi saat melahirkan adalah karena ditolong/ditindak oleh dukun atau orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang persalinan. Kejadian pendarahan, infeksi, atau pun timbulnya eklampsia pasca persalinan adalah penyebab utama kefatalan dalam persalinan. Faktor lain yang cukup berhasil dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program adalah indikator gizi buruk, gizi kurang dan penanganannya yang telah sesuai target.

Gambar 2.48. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

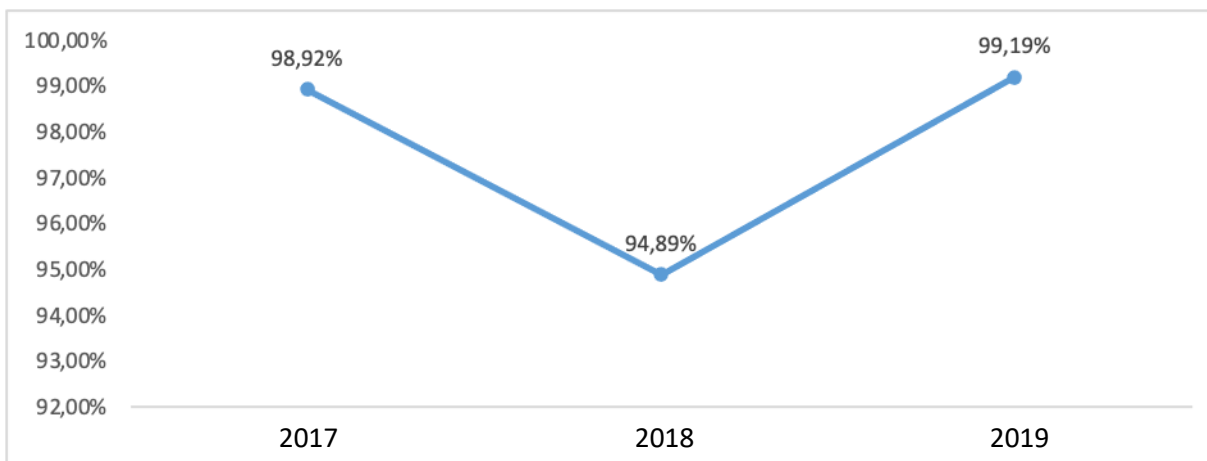
Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, indikator cakupan persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan cukup fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun pada tingkatan yang cukup tinggi. Di tahun 2019, cakupan persalinan yang ditolong oleh bidan yang kompeten mencapai 92,28 persen. Capaian ini cukup meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 dengan cakupan persalinan dengan tenaga yang kompeten pada waktu tersebut mencapai 94,45 persen.

2.3.1.1.11. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian UCI desa/kelurahan tahun 2009 di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 69,6 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena fokus perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah belum optimal terhadap program imunisasi, terbatasnya dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang adekuat. Selain itu juga kurangnya koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta, kurang sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi.

Guna mencapai target 100 persen UCI desa/ kelurahan pada tahun 2014 perlu dilakukan berbagai upaya percepatan melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai UCI (GAIN UCI). Di Kabupaten Bone Program UCI sendiri sudah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan dikarenakan masih menggunakan data proyeksi di tahun 2015. Namun di Tahun 2017 sudah meningkat lagi dan sudah menggunakan data riil.

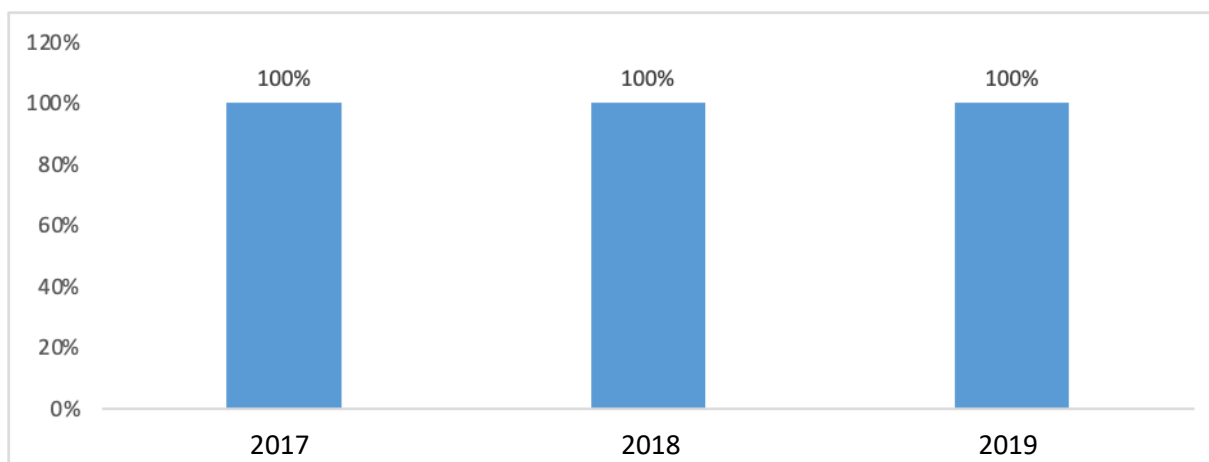
Gambar 2.49. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gambar 2.50. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



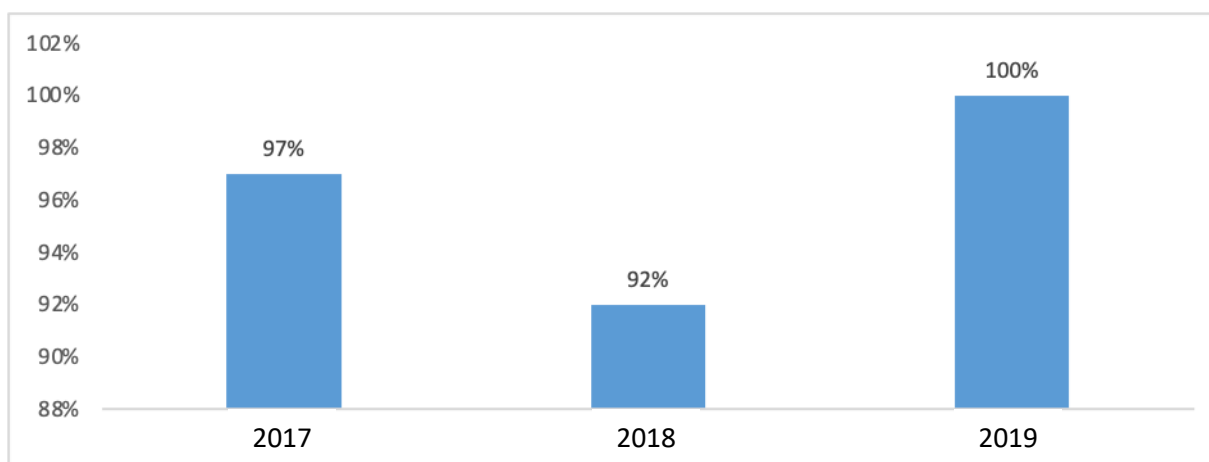
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama. Anak disebut gizi buruk apabila berat badan dibanding umur tidak sesuai (selama 3 bulan berturut-turut tidak naik). Perawatan bagi balita Gizi Buruk di Kabupaten sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 telah tertangani dengan baik. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, menunjukkan angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone memiliki perhatian serius terhadap permasalahan gizi buruk tersebut.

2.3.1.1.13. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Indonesia dinyatakan telah berhasil menekan terjangkitnya jumlah penyakit cacar dan polio. Pada 2020 mendatang, Indonesia diharapkan untuk terbebas dari penyakit campak. Di Kabupaten Bone selama tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan dan penurunan persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi. Pada tahun 2017 telah menunjukkan nilai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun di Kabupaten Bone telah merata dan dilakukan secara menyeluruh, dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya tetap akan berada di persentase 100 persen.

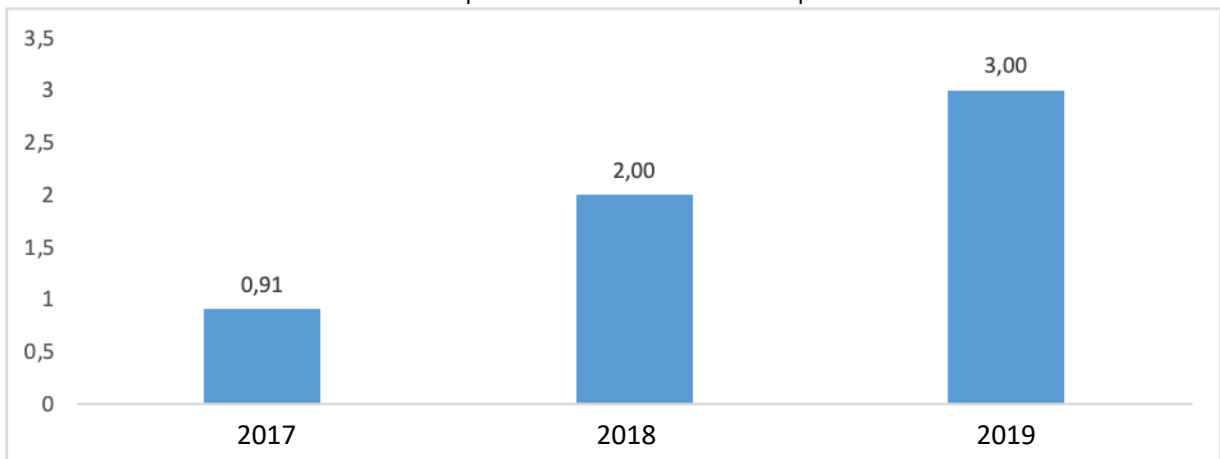
Gambar 2.51. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.14. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Gambar 2.52. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

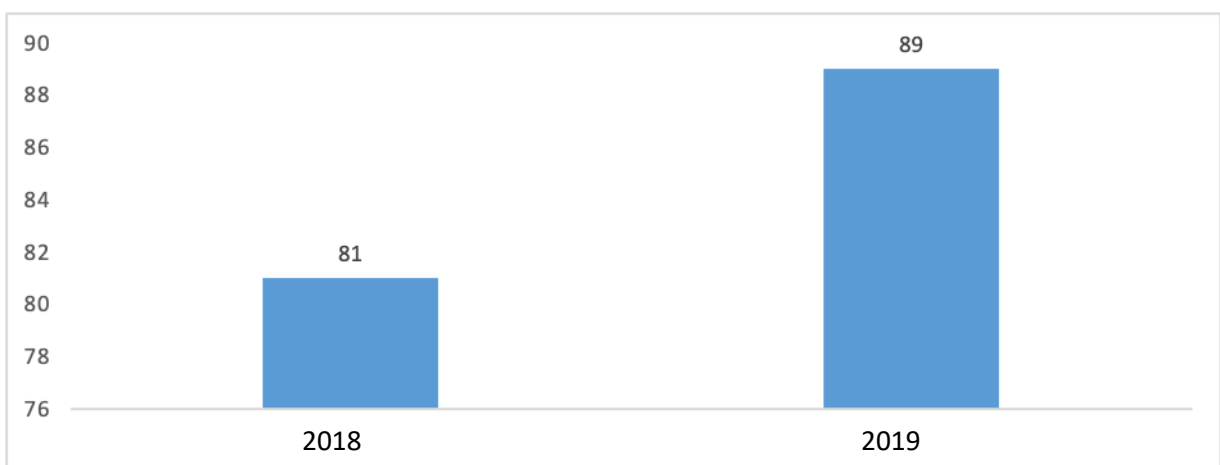


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flacid* (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Jumlah non polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Bone sejak tahun 2017 mencapai 0,91 persen. Hingga pada tahun 2018 dan 2019 meningkat masing-masing menjadi 2 persen dan 3 persen.

2.3.1.1.15. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Gambar 2.53. Tingkat Prevalensi Tuberculosis Di Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

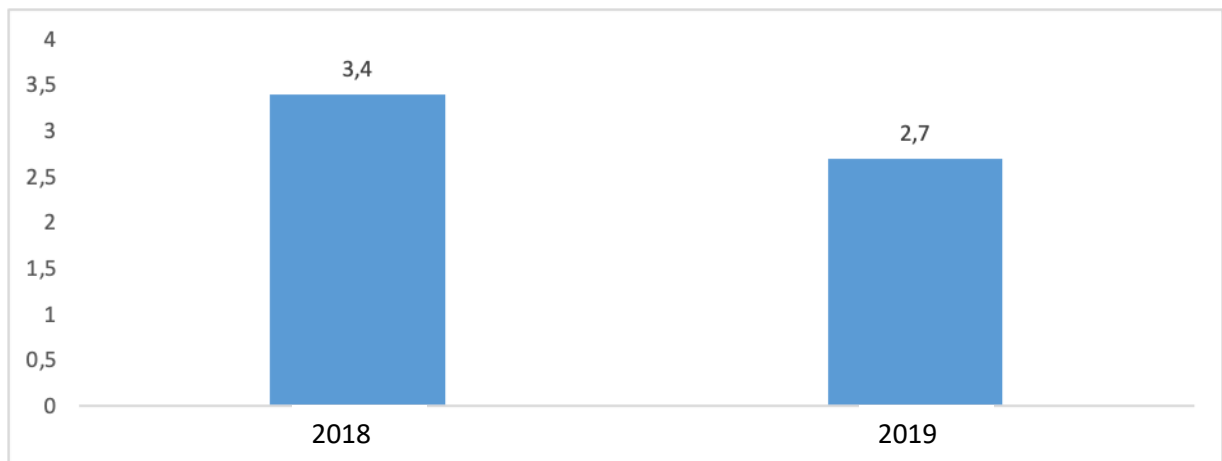
Penanganan penyakit TB dilakukan secara komprehensif dari penemuan kasus hingga pengobatan pada pasien TB. Tanpa pengobatan maka angka kematian akibat TB menjadi tinggi. Selain untuk menyembuhkan pasien dan mencegah kematian, tujuan pengobatan TB lainnya yaitu mencegah kekambuhan dan memutuskan rantai penularan. Salah satu upaya untuk menekan timbulnya kasus TB serta kematian akibat TB adalah membentuk strategi pengobatan TB secara global. Sekitar 37 juta orang berhasil diselamatkan melalui diagnosa dan pengobatan TB pada periode 2000-2013 (WHO,2014). Adapun tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Bone per 100.000 penduduk dari tahun 2019 adalah 89, cenderung meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 tingkat prevalensi TB per 100.000 penduduk di Bone adalah 81.

2.3.1.1.16. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang sangat berbahaya. Di Indonesia, kasus TBC terus meningkat. Menurut Kepala Bidang Penyakit Menular dan Tropis, Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Hindri*, tuberkulosis berada

di urutan kedua dari sejumlah penyakit menular yang masuk 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih. Tempat hidup yang kotor merupakan tempat tumbuh kembang virus, bakteri, dan kuman penyakit. Selain itu kualitas air dan sanitasi juga memiliki dampak yang fatal. Di Kabupaten Bone tingkat kematian karena Tuberkulosis dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan jumlah kasus kematian per 100.000 penduduk. Tahun 2018 angka mencapai 3,40 persen dan tahun 2019 turun menjadi 2,70 persen.

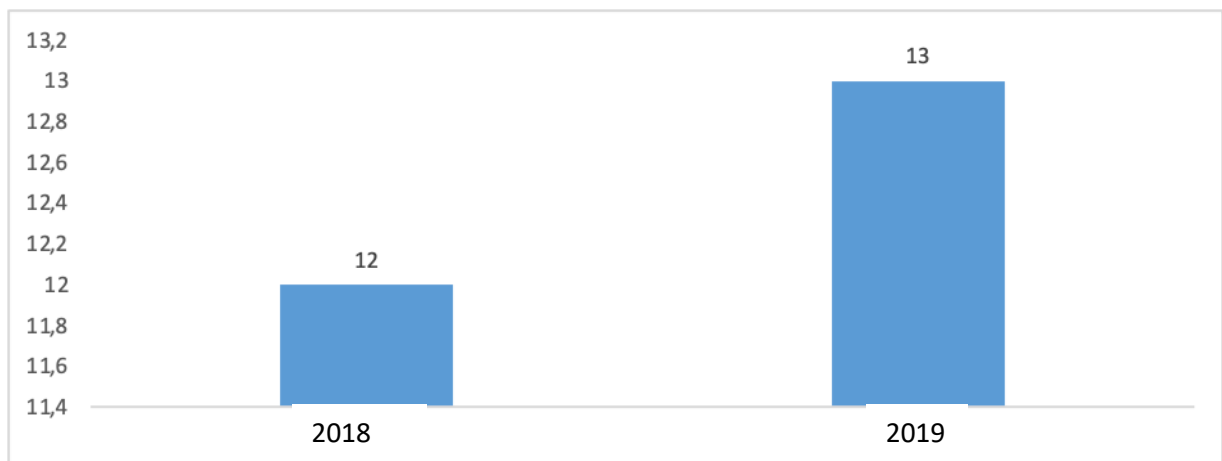
Gambar 2.54. Tingkat Kematian Karena Tuberculosis Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.17. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Gambar 2.55. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Bone Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

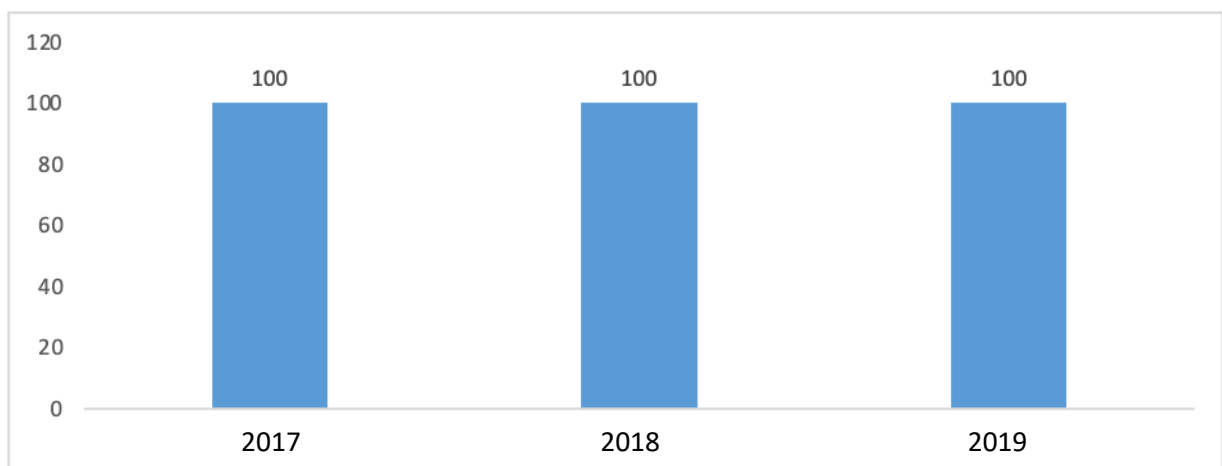
DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. DOTS dapat dimulai dengan keharusan setiap pengelola program tuberkulosis untuk *direct attention* dalam usaha menemukan penderita atau dengan kata lain mendeteksi kasus dengan pemeriksaan mikroskop. Kemudian setiap penderita harus di *observed* dalam memakan obatnya, setiap obat yang ditelan penderita harus di depan seorang pengawas. Selain itu tentunya penderita harus menerima *treatment* yang tertata dalam sistem pengelolaan, distribusi dengan penyediaan obat yang cukup. Kemudian, setiap penderita harus mendapat obat yang baik, artinya pengobatan *short course* standar yang telah terbukti ampuh secara klinis. Akhirnya, harus ada dukungan dari pemerintah yang membuat program penanggulangan tuberkulosis mendapat prioritas yang tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Dinas Kesehatan telah melaksanakan Program DOTS ini selama beberapa tahun dengan didapatkannya Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi. Pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kenaikan proporsi jumlah

kasus yang terdeteksi dalam program DOTS, dimana pada tahun 2018 angka persentasenya mencapai 12 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 13 persen.

2.3.1.1.18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit ini dikenal dengan gejala yang sangat khas, yaitu suhu tubuh tinggi atau panas sekaligus nyeri sendi, sakit kepala, otot, tulang, dan sakit area belakang mata. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah di Bone dalam kurun waktu tahun 2017-2019 telah menunjukkan capaian yang paling optimal. Capaian indikator ini dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Gambar 2.56. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

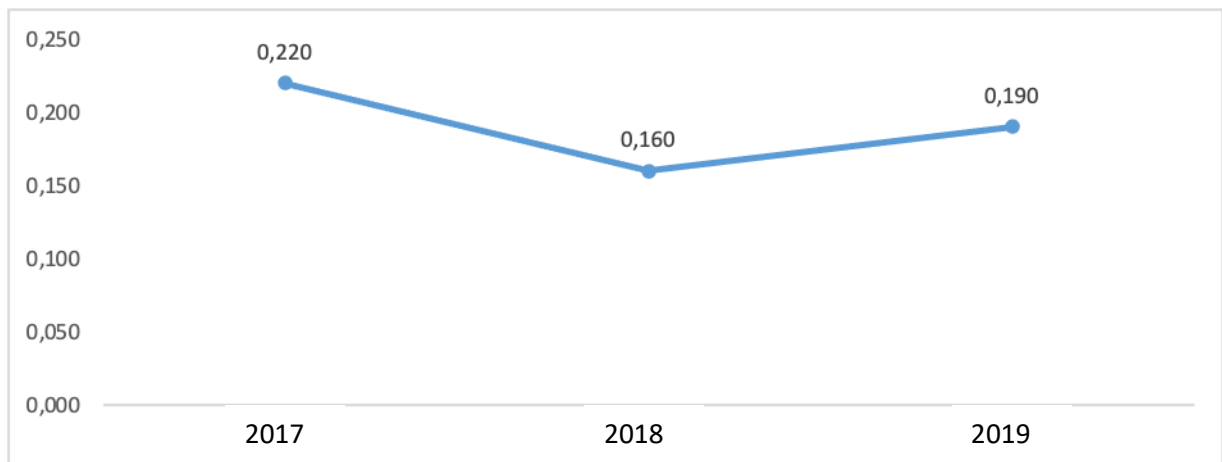


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.19. Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan dengan frekuensi buang air besar (BAB) yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus memanjang hingga berminggu-minggu. Diare bisa berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi akibat kehilangan banyak cairan dari tubuh. Oleh sebab itu diare tidak boleh dianggap enteng walaupun kondisi ini umum terjadi. Adapun penderita diare yang ditangani oleh petugas di fasilitas kesehatan di Kabupaten Bone pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan pola yang fluktuatif. Terjadi penurunan di tahun 2017 yaitu dari 0,220 di tahun 2018 menjadi 0,160. Kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 0,190 dengan jumlah penderita diare sebanyak 14.257.

Gambar 2.57. Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

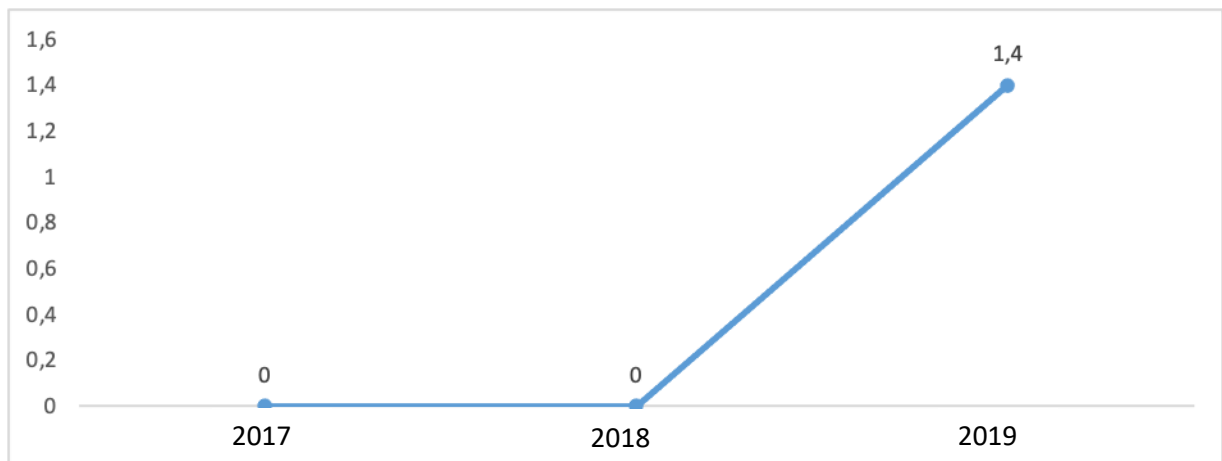


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.20. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit yang menyebar akibat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini bisa menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga bisa terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Angka kematian akibat malaria di Kabupaten Bone dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menunjukkan tidak ada kematian, tetapi pada Tahun 2019 terjadi kematian sebanyak 1 orang atau 1,4 persen dari total penderita malaria.

Gambar 2.58. Tingkat Kematian Akibat Malaria Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

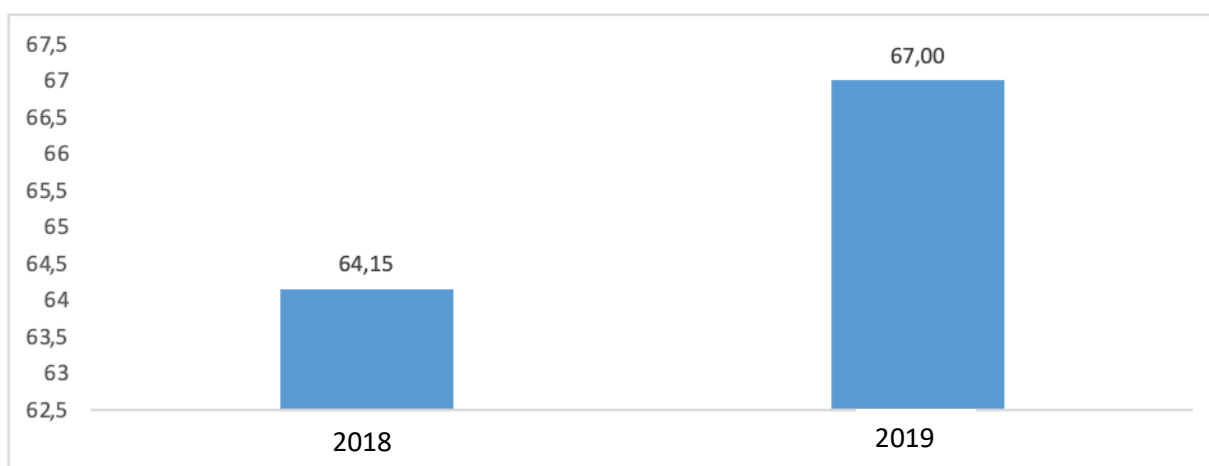


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Di Bone, pada tahun 2018 telah tertangani sebanyak 64,15 persen masyarakat miskin yang mendapat rujukan. Angka ini meningkat di tahun 2019 dengan nilai persentase 67 persen.

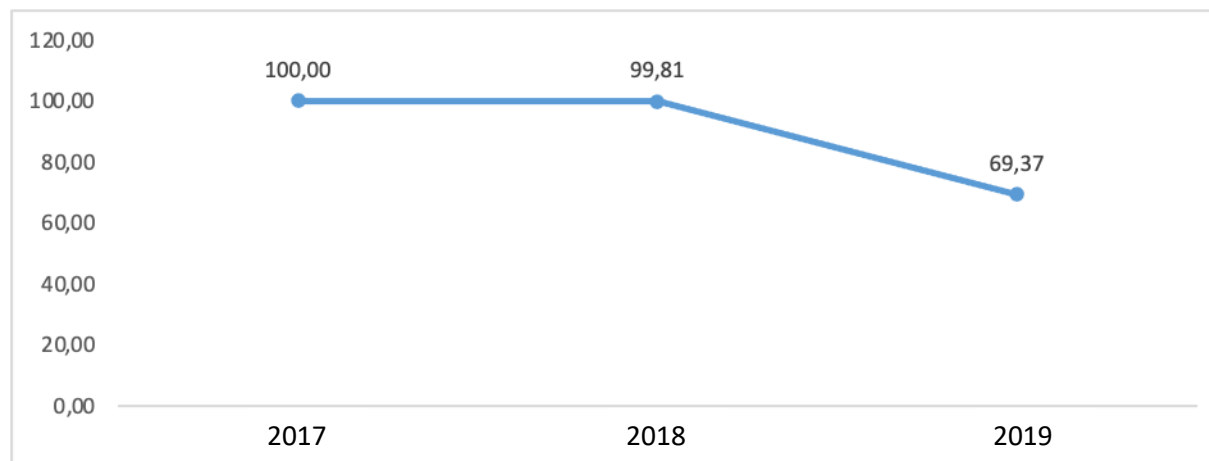
Gambar 2.59. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.22. Cakupan Kunjungan Bayi

Gambar 2.60. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Bone Tahun 2017–2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

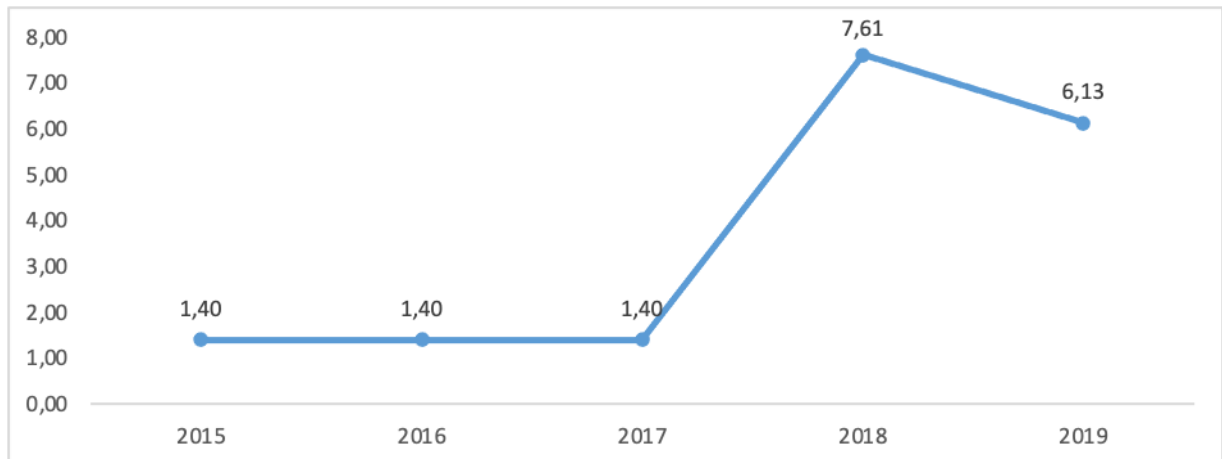
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 1-12 bulan di sarana pelayanan kesehatan. Kunjungan pelayanan termasuk ke rumah sakit, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya, melalui kunjungan petugas (Umur 1-12 bulan yang dimaksud adalah 12 bulan kurang 1 hari). Sepanjang tahun 2017-2019, cakupan kunjungan bayi cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2017 cakupan kunjungan bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan mencapai angka maksimal (100%) lalu mengalami penurunan menjadi 99,81 di tahun 2018 dan 69,37 persen di tahun 2019.

2.3.1.1.23. Cakupan Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Penghitungan cakupan Puskesmas dilakukan dengan membagi jumlah puskesmas dengan jumlah seluruh kecamatan lalu dikalikan seratus. Jumlah

cakupan puskesmas sepanjang tahun 2015 sampai 2017 adalah 1,40 persen. Hal ini menjelaskan bahwa di setiap kecamatan terdapat puskesmas sebanyak kurang-lebih 1,4 Puskesmas. Angka rasio cakupan puskesmas ini kemudian meningkat di dua tahun berikutnya. Di tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah puskesmas menjadi 205 sehingga rasio cakupan Puskesmas menjadi 1:7,61. Capaian ini kemudian sedikit berkurang di tahun berikutnya dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah Puskesmas menjadi 165 sehingga rasio cakupan Puskesmas menjadi 1:6,13.

Gambar 2.61. Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

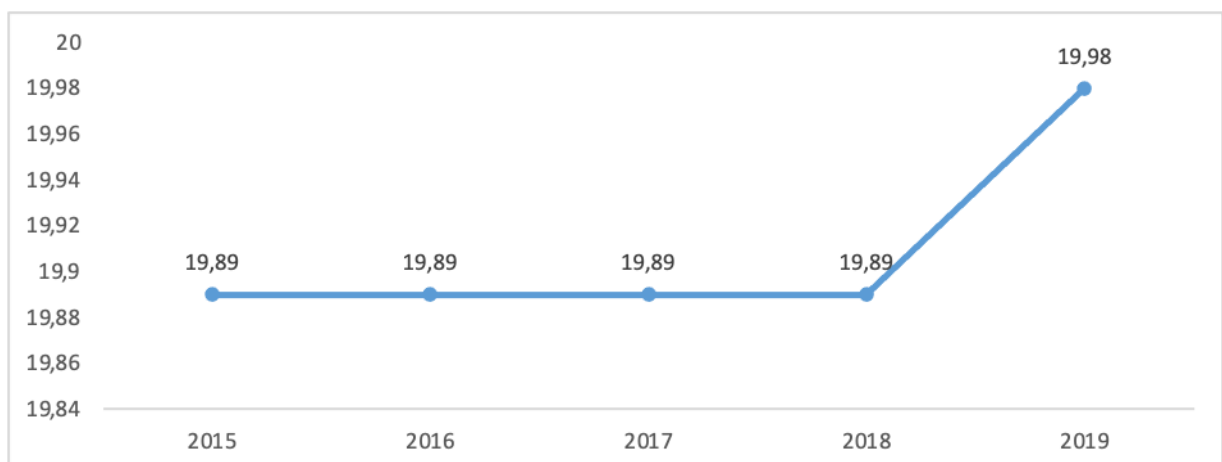


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.24. Cakupan Pembantu Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya pada Puskesmas pembantu. Untuk mendapatkan cakupan Pustu adalah jumlah Pustu dibagi jumlah seluruh desa dikalikan 100. Jumlah cakupan Pustu sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah 19,89 persen dengan perolehan Jumlah Pustu adalah 74 dibagi 372 dan dikali 100 persen, jadi rasio Pustu di Kabupaten Bone 1 : 19,89 (1 Pustu melayani 19 Desa). Angka rasio di tahun 2017 ini kemudian naik di tahun 2019 dengan capaian angka rasio 1:19,98.

Gambar 2.62. Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



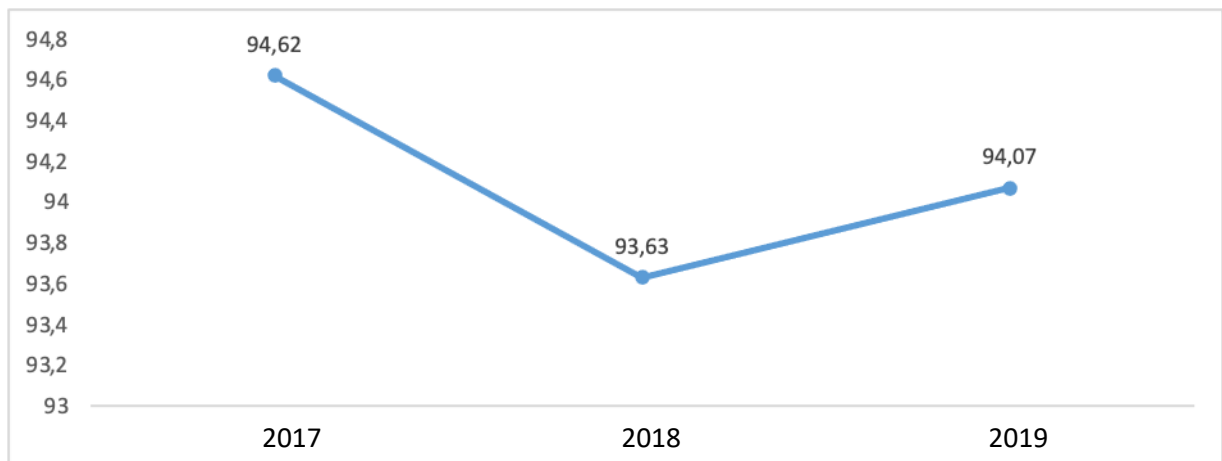
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.25. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Standar pelayanan paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah 7T pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Tekanan darah

diukur (3) Tetanus Toxoid yaitu Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toxoid), (4) Tinggi fundus uteri diukur, (5) Tablet besi (diberikan 90 tablet selama kehamilan), (6) Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Cakupan kunjungan ibu hamil di pelayanan kesehatan mencapai angka 94,07 persen pada tahun 2019, naik dibandingkan dua tahun sebelumnya dengan capaian 94,62 persen. Capaian tahun 2019 sudah sesuai dengan target RPJMD yaitu 94 persen.

Gambar 2.63. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

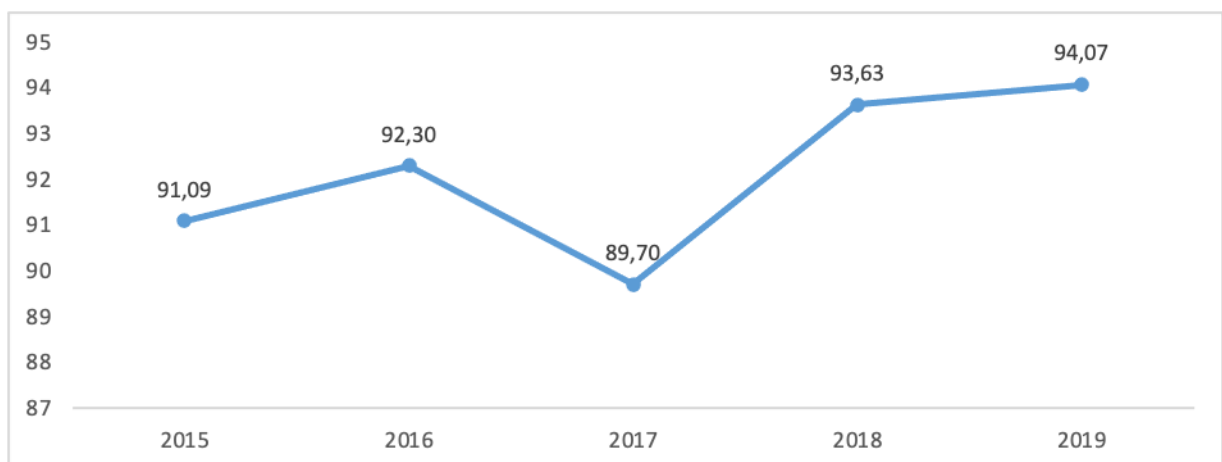


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.26. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, diharapkan dapat mengatasisebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan ibu nifas (Kemenkes RI, 2009). Perawatan nifas adalah perawatan terhadap ibu yang telah selesai melahirkan, salah satunya adalah perawatan payudara (Siregar, 2009). Perawatan nifas mencakup pemeriksaan tanda vital, keadaan umum untuk melihattanda tanda anemia, pemeriksaan abdomen dan luka, pemeriksaan genitalia, melihat komplikasi persalinan, dan perawatan payudara. Cakupan pelayanan bagi ibu nifas dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat. Tahun 2015 pelayanan ibu nifas di Kabupaten Bone mencapai 91,09 persen. Capaian ini kemudian mengalami perluasan cakupan di tahun 2016 menjadi 92,30 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan tajam ke angka 89,70 persen. Peningkatan cakupan peyananan nifas kemudian meningkat kembali di tahun 2018 dan tahun 2019 dimana di dua tahun ini angka cakupan pelayanan nifas berturut-turut mencapai 93,63 persen dan 94,07 persen.

Gambar 2.64. Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

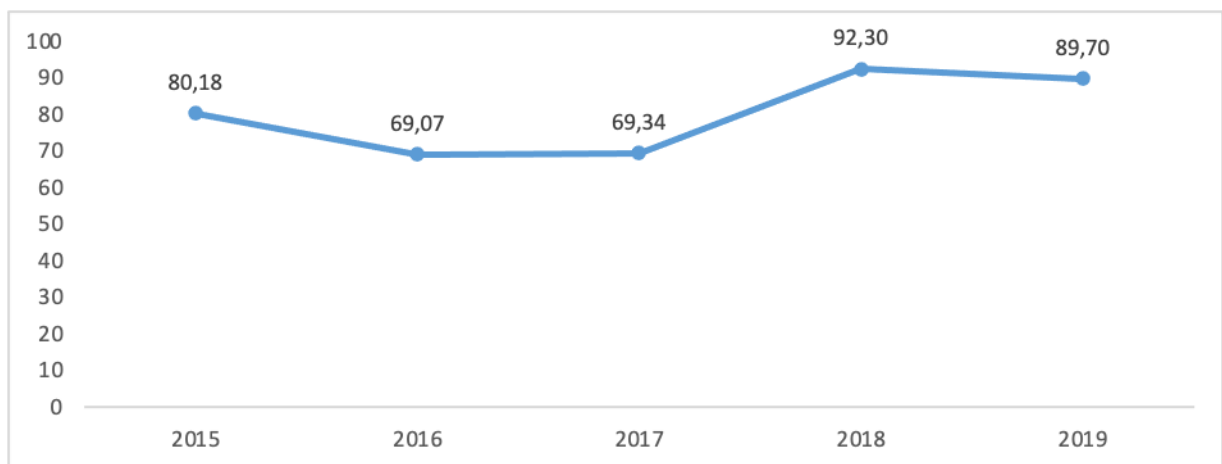


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.27. Cakupan Neonates dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung satu kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan indikator cakupan neonatus di tahun 2018 dan 2019. Tahun 2017 jumlah penanganan neonatal dengan komplikasi adalah 69,34 persen, hingga kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 92,30 persen. Di tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan tingkat cakupan penanganan dengan capaian 89,70 persen. Meski begitu, capaian di tahun 2019 ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 dengan angka cakupan penanganan hanya mencapai 80,18 persen. Hal ini menandakan bahwa keadaan kesehatan neonatal di Kabupaten Bone relatif lebih baik dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.65. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

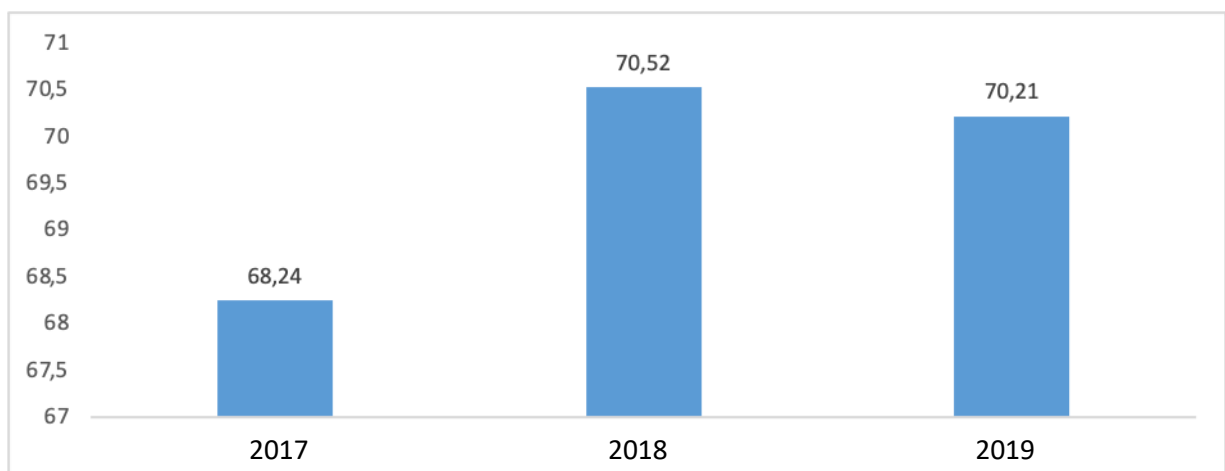


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.28. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Puskesmas berperan sebagai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam menurunkan angka kematian balita. Upaya promotif dan preventif sangat diperlukan dan diutamakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan balita. Salah satu upaya Puskesmas dalam mencapai tujuan tersebut tercakup di dalam suatu indikator Puskesmas yang ditetapkan Pemerintah.

Gambar 2.66. Cakupan Pelayanan Anak Balita Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



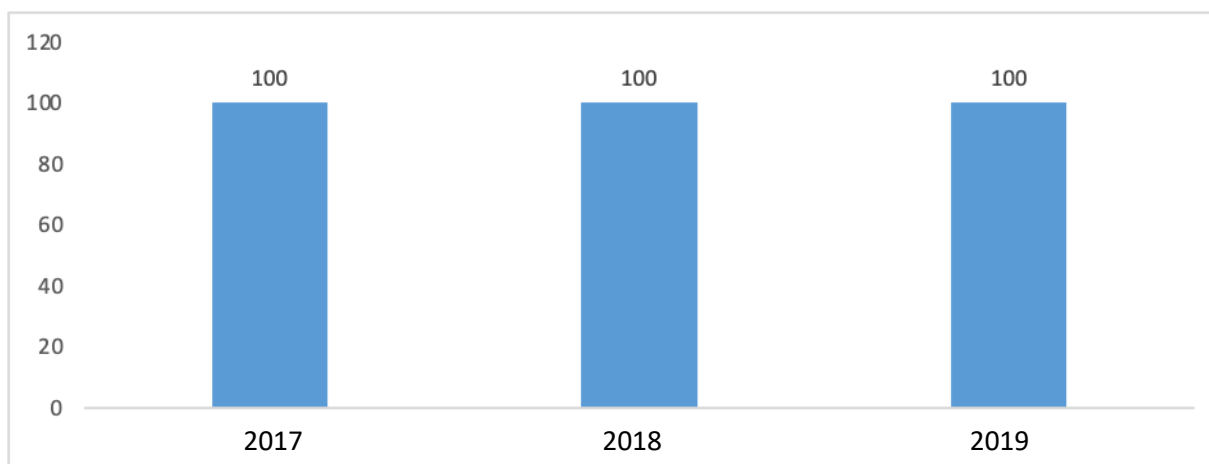
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

Indikator-indikator ini disebut sebagai standar Pelayanan minimal (SPM). Salah satu SPM dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan balita adalah indikator cakupan pelayanan anak balita. Cakupan pelayanan balita di Kabupaten Bone di sepanjang tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Di tahun 2017 cakupan pelayanan anak balita mencapai 68,24 persen lalu meningkat menjadi 70,52 persen di tahun berikutnya. Hanya saja di tahun 2019 cakupan pelayanan anak balita di Bone sedikit menurun menjadi 70,21 persen. Data yang cenderung meningkat tersebut menunjukkan bahwa kerja Puskesmas dalam pelayanan terhadap balita membaik dalam lima tahun terakhir.

2.3.1.1.29. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin

MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi. Makanan ini diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan anak pada masa ini tidak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya. Kegiatan pemberian makanan pendamping bagi anak usia 6 – 24 bulan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bone sudah baik. Data memperlihatkan bahwa capaian selama tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan angka 100 persen, hal ini sudah sesuai dengan target RPJMD Tahun 2019.

Gambar 2.67. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

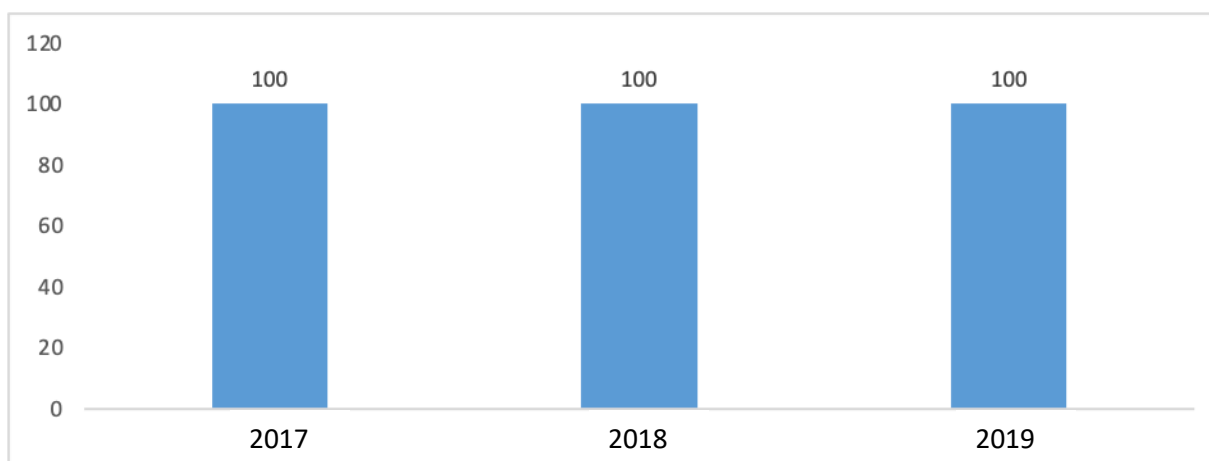


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.1.30. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di Kabupaten Bonemenunjukkan kinerja yang sangat baik. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bone konsisten menyentuh angka seratus (100) persen, menunjukkan bahwa tidak satupun masyarakat miskin yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dasar. Salah satu faktornya adalah semakin tersosialisasinya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehinggamembuat banyak masyarakat sadar akan pentingnya mendapat pelayanan kesehatan, baik dasar maupun rujukan.

Gambar 2.68. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu aspek pelayanan dasar yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Aspek PUPR berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana umum yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses kebutuhannya seperti kebutuhan akan air bersih, sanitasi, rumah tinggal, dan lingkungan yang sehat. Urgensi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik bagi masyarakat semakin mengemuka ketika dimasukkannya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan SDGs sampai tahun 2030. Untuk itu, karena selain amanat undang-undang, pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat perlu memperhatikan beberapa indikator yang berhubungan dengan aspek PUPR agar target pencapaian SDGs pada tahun 2030 dapat tercapai dengan baik.

2.3.1.2.1. Pekerjaan Umum

2.3.1.2.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di suatu wilayah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik+sedang) cukup bervariasi dalam rentang waktu tahun 2015-2019. Persentase kondisi jalan dalam kondisi mantap semakin bertambah sampai tahun 2017 dimana pada tahun 2015 angkanya mencapai 57,46 persen lalu meningkat sampai tahun 2017 menjadi 71,25 persen. Meski begitu capaian ini kemudian berkurang di tahun-tahun berikutnya. Sampai tahun 2019 persentase kondisi jalan dalam kondisi mantap mencapai 60,19 persen.

Tabel 2.39. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Kondisi	Panjang Jalan (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	41,04	43,21	45,24	44,01	36,87
2	Kondisi Sedang	16,42	18,47	26,01	15,18	23,32
3	Kondisi Rusak Ringan	22,55	23,34	15,24	17,18	11,04
4	Kondisi Rusak Berat	19,99	14,98	13,51	23,63	28,77
5	Mantap	57,46	61,68	71,25	59,19	60,19

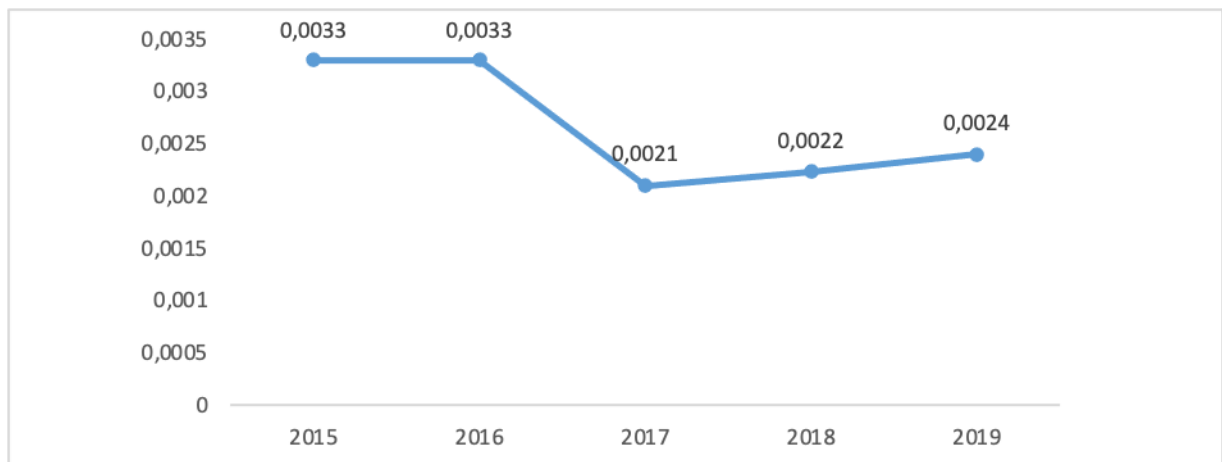
Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk tertentu. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah,

meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Gambar 2.69. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Jiwa/Km)



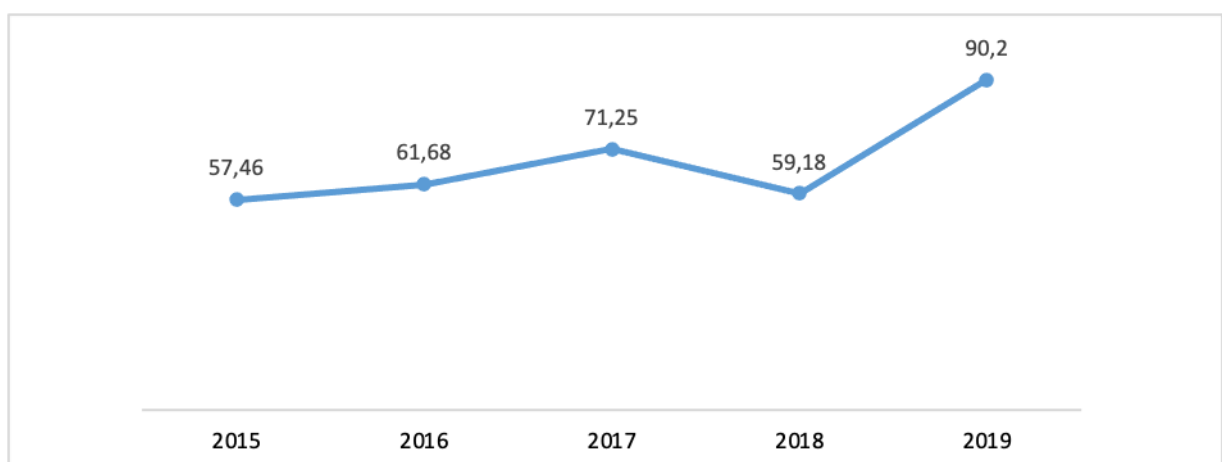
Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

Dalam kurun waktu 2015-2019, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan tren sedikit penurunan. Kabupaten Bone menambah panjang jalan di tahun 2016 sehingga rasio panjang jalan naik menjadi 0,0033 jiwa/Km, sebelum akhirnya menurun menjadi 0,0021 karena terjadi pengurangan panjang jalan di tahun 2017. Rasio panjang jalan kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2018 dan 2019 dengan nilai rasio masing-masing mencapai 0,0022 jiwa/km dan 0,0024 jiwa/km. Masih rendahnya angka rasio panjang jalan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan/penggunaan jalan di Kabupaten Bone masih sangat rendah.

2.3.1.2.1.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bone terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Tahun 2015, Kabupaten Bone hanya memiliki panjang jalan dalam kondisi baik sebanyak 57,46 persen, dan kemudian bertambah menjadi 61,68 persen tahun 2016. Di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bone meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik sehingga persentasenya meningkat cukup signifikan menjadi 90,2 persen.

Gambar 2. 70. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

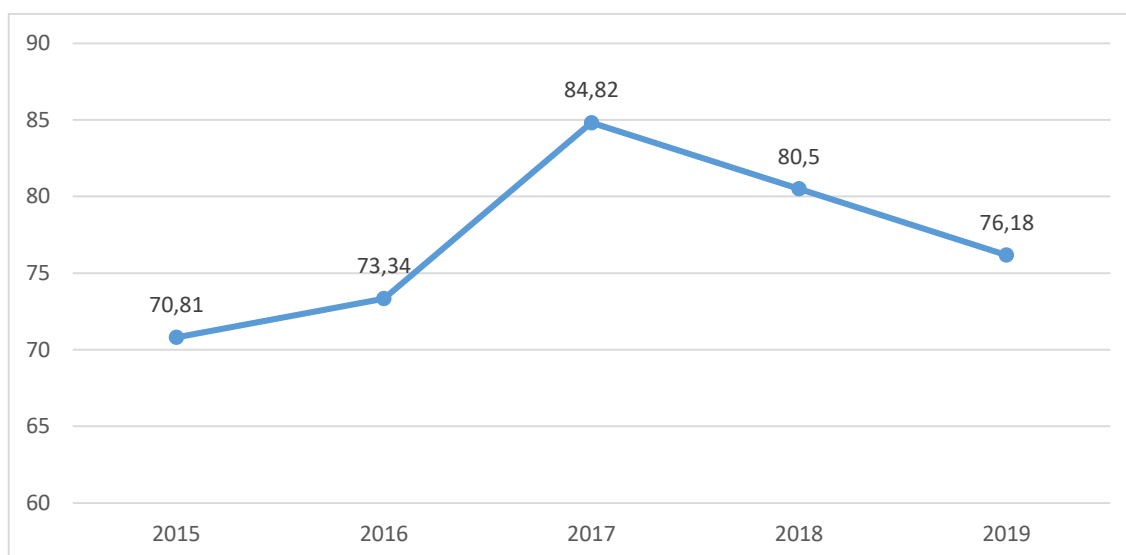
Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya

merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas.

Dalam kurun waktu 2015-2019, terjadi tren peningkatan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Bone. Meski di tahun 2019, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 84,82 persen di tahun 2017 menjadi 76,18 persen di tahun 2019, namun capaian di tahun 2019 ini masih lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya. Di tahun 2015, persentase rumah tinggal bersanitasi hanya mencapai 70,81 persen.

Meski begitu, dilihat dari sebaran rumah tinggal dengan sanitasi layak berdasarkan kecamatan di tahun 2017, masih terdapat beberapa kecamatan dengan nilai persentase rumah tinggal di bawah 50 persen. Lima kecamatan dengan angka persentase rumah tinggal bersanitasi paling tinggi adalah Tanete Riattang sebesar 96,89 persen, Tanete Riattang Barat 95,99 persen, Lamuru 94,65 persen, Libureng 86,18 persen, dan Bengo sebesar 84,30. Sedangkan lima kecamatan paling rendah persentase rumah tinggal bersanitasi adalah TelluSiattinge dengan 59,23 persen, Patimpeng 56,15 persen, Sibulue 58,13 persen, Cenrana 60,31 persen, dan TelluLimpoe 60,67 persen.

Gambar 2. 71. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

Tabel 2.40. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	3.144	2.049	65,16
2	Kahu	7.752	5.741	74,06
3	Kajuara	7.287	4.914	67,43
4	Salomekko	3.108	1.918	61,72
5	Tonra	2.730	1.691	61,93
6	Patimpeng	3.315	1.862	56,15
7	Libureng	5.982	5.155	86,18
8	Mare	5.347	3.603	67,39
9	Sibulue	6.841	3.977	58,13
10	Cina	5.290	3.829	72,39
11	Barebbo	5.516	3.908	70,85
12	Ponre	2.775	1.956	70,49
13	Lappariaja	4.765	3.266	68,54
14	Lamuru	4.994	4.727	94,65
15	TelluLimpoe	2.819	1.711	60,67
16	Bengo	5.096	4.296	84,30

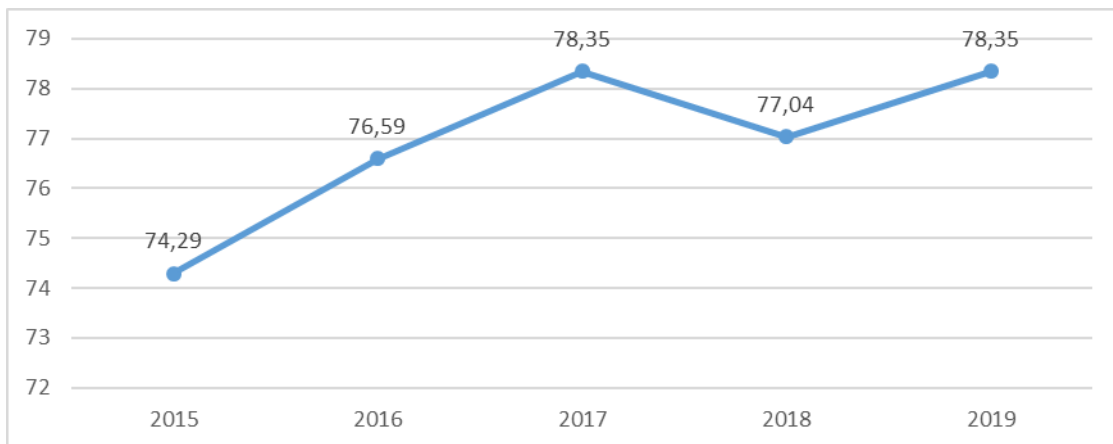
No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
17	Ulaweng	4.946	3.398	68,69
18	Palakka	4.528	2.862	63,20
19	Awangpone	5.877	4.442	75,58
20	TelluSiattinge	8.017	4.749	59,23
21	Amali	4.146	3.201	77,20
22	Ajangale	5.488	4.482	81,66
23	DuaBoccoe	6.041	4.937	81,72
24	Cenrana	4.831	2.914	60,31
25	TR Barat	9.688	9.299	95,99
26	TaneteRiattang	10.434	10.110	96,89
27	TR Timur	8.637	5.546	64,21
	Jumlah	149.395	5.546	71,35

Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.5. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas PU-PTR telah berhasil mencapai target dalam indikator persentase drainase dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2019 telah mencapai 78,35 persen. Capaian ini telah meningkat dibandingkan capaian di lima tahun sebelumnya (2015) dimana di tahun tersebut persentase drainase dalam kondisi baik baru mencapai 74,29 persen.

Gambar 2.88. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

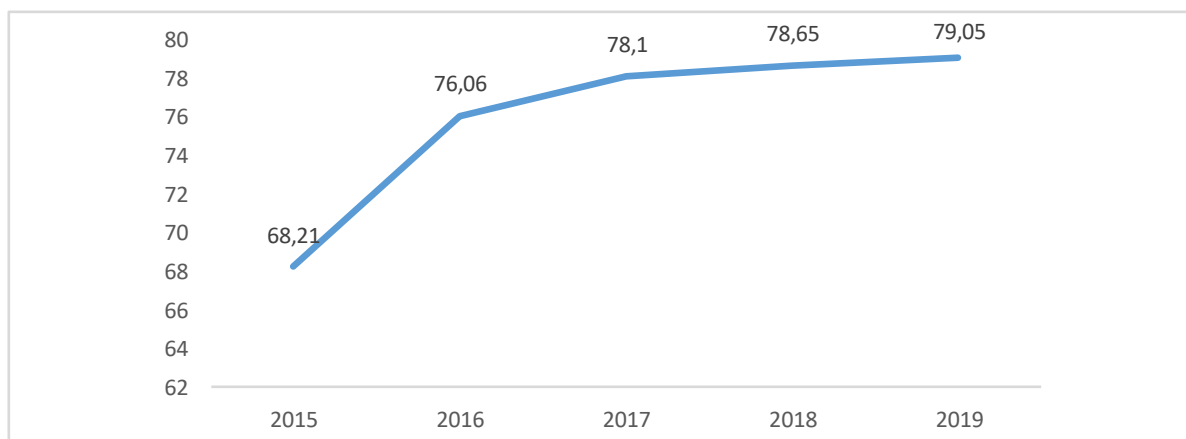


Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.6. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tingkat capaian kinerja dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pelaksanaan program prioritas hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari capaian kondisi baik pada keseluruhan kondisi jaringan irigasi kabupaten di tahun 2019 telah mencapai 79,05 persen. Capaian ini mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan di tahun 2015 dengan capaian sebesar 68,21 persen. Hal ini disebabkan karena prioritas penanganan pada kondisi rusak berat telah ditingkatkan menjadi kondisi baik.

Gambar 2.72. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas PSDA Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.7. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi terdiri dari tiga jenis yaitu jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier.

Jaringan Irigasi utama/primer meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang. Bangunan ini mutlak diperlukan bagi eksplot, meliputi bangunan pembendung, bangunan pembagi dan bangunan pengukur. Bangunan bendung berfungsi agar permukaan air sungai dapat naik dengan demikian memungkinkan untuk disalurkan melalui pintu pemasukan ke saluran pembawa. Bangunan pembagi berfungsi agar air pengairan dapat didistribusikan di sepanjang saluran pembawa (saluran primer) ke lahan-lahan pertanian melalui saluran sekunder dan saluran tersier.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.41. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jaringan Primer (meter)	288.812	297.772	336.222	266.682	227.272
2	Jaringan Sekunder (meter)	60.545	71.230	74.979	55.791	58.728
3	Jaringan Tersier (meter)	-	-	-	-	-
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	110.760	110.760	110.761	22.106	23.270
5	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	3,15	3,33	3,71	14.59	12.29

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, 2020

Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, ketersediaan jaringan irigasi menjadi sangat penting, terutama bagi daerah seperti Kabupaten Bone yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor pertanian. Sepanjang tahun 2015 sampai 2019 rasio jaringan irigasi (m/ha) Kabupaten Bone terus bertambah. Di tahun 2019, tiap Ha luas lahan yang ada di Bone terdapat 4,31 M jaringan irigasi. Capaian ini telah bertambah lebih dari satu meter jika dibandingkan dengan yang terdapat di tahun 2015 (3,15 m/ha).

Di tahun 2017 jika ditinjau dari capaian rasio jaringan irigasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone maka rasio jaringan irigasi terbesar berada di Kecamatan Ulaweng, Lamuru, dan Lappariaja. Rasio jaringan irigasi masing-masing kecamatan tersebut secara berurut adalah 38,71 M/Ha, 22,11 M/Ha dan 10,28 M/Ha.

Tabel 2.42. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2019

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	PANJANG JARINGAN IRIGASI			TOTAL PANJANG	LUAS LAHAN	RASIO
		PRIMER	SEKUNDER	TERSIER	JARINGAN IRIGASI	BUDIDAYA	
1	2	3	4	5	(6=3+4+5)	7	(8=6/7)
1	BONTO CANI	22976	2010	-	24986	2129	12
2	KAHU	3370	0	-	3370	520	6
3	KAJUARA	881	0	-	881	200	4
4	SALOMEKKO	341	0	-	341	150	2
5	TONRA	2070	3620	-	5690	732	8
6	PATIMPENG	2306	0	-	2306	288	8
7	LIBURENG	19364	1877	-	21241	1285	17
8	MARE	2231	1171	-	3402	365	9
9	SIBULUE	369	752	-	1121	400	3
10	CINA	24573	9695	-	34268	2727	13
11	BAREBBO	12619	5720	-	18339	2071	9
12	PONRE	11861	4036	-	15897	1165	14
13	LAPPARIAJA	49451	8458	-	57909	3933	15
14	LAMURU	48031	3744	-	51775	2683	19
15	TELLU LIMPOE	16047	0	-	16047	1576	10
16	BENGO	26722	11842	-	38564	2720	14
17	ULAWENG	31089	3598	-	34687	2017	17
18	PALAKKA	14388	4981	-	19369	1463	13
19	AWANGPONE	2490	0	-	2490	362	7
20	TELLU SIATTIENGE	18762	2729	-	21491	2077	10
21	AMALI	3474	5038	-	8512	550	15
22	AJANGALE	0	0	-	0	0	
23	DUA BOCCOE	17978	1720	-	19698	2400	8
24	CENRANA	4162	0	-	4162	700	6
25	TR BARAT	0	0	-	0	0	
26	TANETE RIATTANG	667	3988	-	4655	552	8
27	TR TIMUR	0	0	-		0.00	

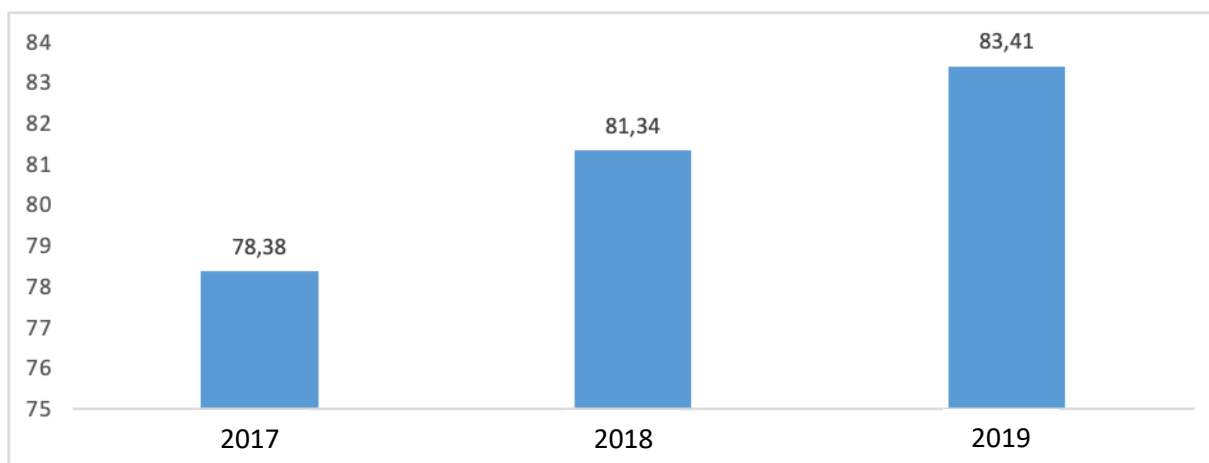
Sumber: Dinas PSDA Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang memiliki kemampuan mengakses air minum di Kabupaten Bone cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Pada tahun 2019, 78,38 persen penduduk Kabupaten Bone telah mengakses air minum. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dimana proporsi penduduk berakses air minum di dua tahun tersebut masing-masing mencapai 81,34 persen dan 83,41 persen.

Kemampuan akses air minum di wilayah perkotaan termasuk baik karena persentase jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum diatas 90 persen. Penduduk di wilayah perkotaan ini termasuk Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang. Beberapa kecamatan lainnya yang masih rendah kemampuan mengakses air bersih (<70%) adalah Kecamatan Cina, Libureng, Tonra dan Bontocani. Kecamatan ini sering mengalami kesulitan mengakses air minum terutama pada musim kemarau.

Gambar 2.73. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas PSDA Kab. Bone, 2020

Tabel 2.43. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	15.719	10.661	67,82
2	Kahu	38.761	29.086	75,04
3	Kajuara	36.435	26.357	72,34
4	Salomekko	15.539	11.418	73,48
5	Tonra	13.651	8.464	62,00
6	Patimpeng	16.577	14.843	89,54
7	Libureng	29.908	20.819	69,61
8	Mare	26.733	22.493	84,14
9	Sibulue	34.206	24.002	70,17
10	Cina	26.449	18.178	68,73
11	Barebbo	27.580	25.332	91,85
12	Ponre	13.873	13.532	97,54
13	Lappariaja	23.824	18.163	76,24
14	Lamuru	24.969	18.832	75,42
15	TelluLimpoe	14.097	12.653	89,76
16	Bengo	25.481	22.872	89,76
17	Ulaweng	24.731	22.344	90,35
18	Palakka	22.639	20.712	91,49
19	Awangpone	29.386	22.183	75,49
20	TelluSiattinge	40.087	39.790	99,26
21	Amali	20.731	19.338	93,28
22	Ajangale	27.441	21.440	78,13
23	DuaBoccoe	30.207	23.000	76,14
24	Cenrana	24.155	22.517	93,22
25	TR Barat	48.438	45.411	93,75
26	TaneteRiattang	52.171	50.209	96,24
27	TR Timur	43.185	41.781	96,75
	Jumlah	751.026	626.432	83,41

Sumber: Dinas PSDA Kab. Bone, 2020

2.3.1.3.1.10. Persentase Areal Kawasan Kumuh

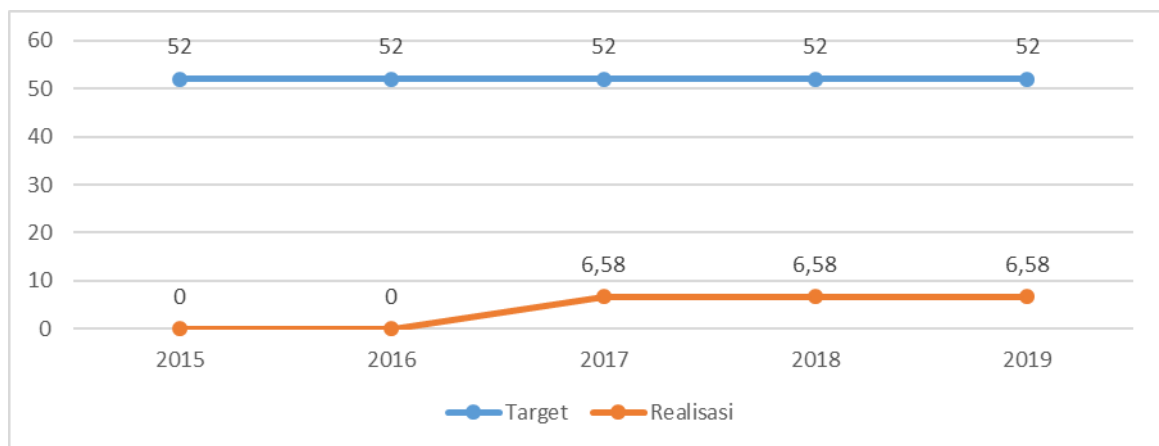
Kondisi luas kawasan kumuh didapatkan melalui hasil identifikasi dan profil kekumuhan Kabupaten Bone yang disusun dan disajikan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman. Di tahun 2013, luas areal pemukiman kumuh mencapai 260,46 Ha. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah sehingga muncul inisiatif

pemerintah untuk membuat Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh Kota Watampone sesuai SK Bupati Bone Nomor :373 Tahun 2014 Tanggal 07 juli 2014.

Tren penanganan areal luasan permukiman kumuh ini menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu 2013-2017. Di tahun 2014, luas penanganan areal permukiman kumuh mencapai sebesar 52 Ha namun yang dapat direalisasikan sebanyak 0 Ha. Sementara di tahun 2015 rencana penanganan sebesar 52 Ha, namun realisasi sebanyak 6,58 Ha. Di tahun 2016 rencana capaian sebanyak 52 Ha realisasi 6,58 Ha dan di tahun 2017 rencana capaian sebanyak 52 Ha namun yang terealisasi hanya seluas 6,58 Ha.

Realisasi atau capaian rencana pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Bone, disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.74. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

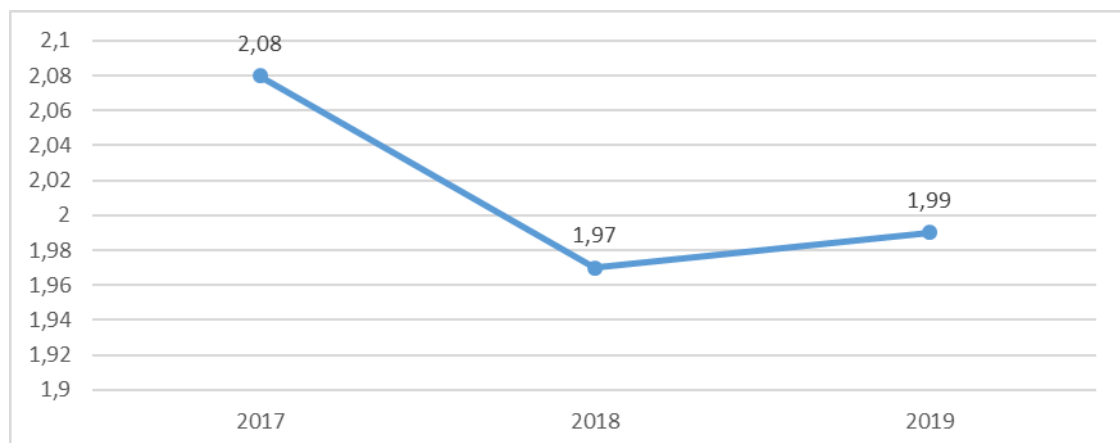


Sumber : Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.2.1.9. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam beragama dan beribadah. Bentuk jaminan tersebut salah satunya dilihat dari kemampuan daerah dalam menyediakan rumah ibadah untuk semua agama. Di Kabupaten Bone, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sehingga rumah peribadatan paling banyak adalah mesjid dan mushollah, sementara gereja, pura, dan vihara jumlah sangat terbatas. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bone, rasio tempat ibadah per satuan penduduk tiga tahun terakhir cenderung turun. Pada tahun 2015, rasio tempat ibadah sempat mencapai 2,08 per 1.000 penduduk, sebelum menurun ke 1,97. Meskipun mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar 1,99, tapi angkanya jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena tempat ibadah jumlah cenderung berkurang di tiga tahun terakhir, tapi jumlah penduduk terus bertambah.

Gambar 2. 75. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017-2019



Sumber: BPS, 2020

2.3.1.2.2. Penataan Ruang

2.3.1.2.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. RTH dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bone menyebar pada berbagai kecamatan dengan luas yang bervariasi antar kecamatan. Total RTH di Kabupaten Bone seluas 911,26 Ha dimana luasan paling banyak di Kecamatan Bontocani dan Tonra masing-masing 92,67 Ha dan 40,064 Ha. Ruang terbuka hijau paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang dengan luasan masing-masing 9,776 Ha dan 4,758 Ha.

Gambar 2.76. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km ²)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km ²)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Bontocani	463,35	46,21	92,670	2,00
2	Kahu	189,50	23,43	37,900	1,61
3	Kajuara	124,13	20,37	24,826	1,21
4	Salomekko	84,91	11,45	16,982	1,48
5	Tonra	200,32	21,13	40,064	1,89
6	Patimpeng	130,47	18,61	26,094	1,40
7	Libureng	344,25	24,21	68,850	2,84
8	Mare	263,50	17,48	52,700	3,01
9	Sibulue	155,80	20,32	31,160	1,53
10	Cina	147,50	19,74	29,500	1,49
11	Barebbo	114,20	18,62	22,840	1,22
12	Ponre	293,00	20,54	58,060	2,82
13	Lappariaja	138,00	21,36	27,600	1,29
14	Lamuru	208,00	20,63	41,600	2,01
15	TelluLimpoe	318,10	22,41	63,620	2,83
16	Bengo	164,00	21,14	32,800	1,55
17	Ulaweng	161,67	28,55	32,334	1,13
18	Palakka	115,32	19,60	23,064	1,17
19	Awangpone	110,70	14,38	22,140	1,53
20	TelluSiattinge	159,30	24,84	31,860	1,28
21	Amali	119,13	16,63	23,826	1,43
22	Ajangale	139,00	13,28	27,800	2,09
23	DuaBoccoe	144,90	15,67	28,980	,84

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km ²)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km ²)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
24	Cenrana	143,60	12,36	28,720	2,32
25	TR Barat	53,68	8,44	10,736	1,27
26	TaneteRiattang	23,79	3,26	4,758	1,45
27	TR Timur	48,88	7,71	9,776	1,26
	Jumlah	4,559	512,37	911,260	1,77

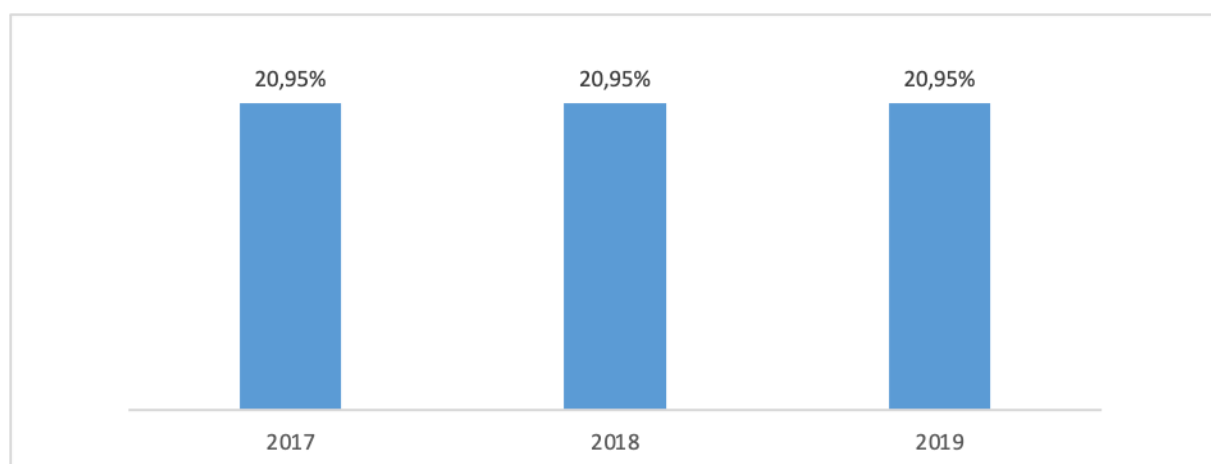
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.2.2.2. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Kawasan tertutup pepohonan atau kawasan hutan berfungsi sebagai paru-paru bagi suatu wilayah daratan tertentu. Kawasan tertutup pohon ini dapat berperan sebagai regulator iklim melalui penyerapan CO₂ dan menyimpannya dalam bentuk biomassa. Kawasan ini juga bertindak sebagai pengemisi CO₂ yang dihasilkan dari proses respirasi, dekomposisi, dan pembusukan. Selain itu, kawasan hutan yang tertutup pepohonan berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna sehingga menjaga kelestariannya berarti juga menjaga kelangsungan hidup berbagai organisme yang ada di dalamnya.

Luas kawasan tertutup pepohonan di Bone dalam kurun waktu 2017-2019 belum mengalami perubahan. Dalam kurun waktu tersebut, persentase kawasan yang tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit adalah 20,95 persen.

Gambar 2.77. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



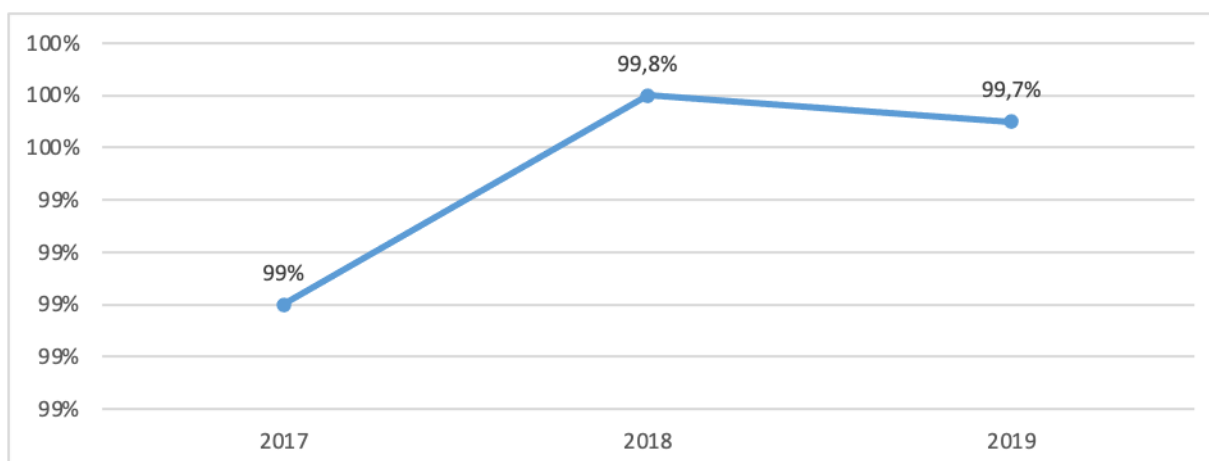
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.2.2.3. Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone tahun 2013-2033 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013. Penetapan RTRW Bone 2013-2033 ini bertujuan untuk memperjelas pemanfaatan ruang dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan agar ruang dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. RTRW Bone juga bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Secara lebih spesifik, RTRW menetapkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi.

Di Bone dalam rentang tahun 2017-2019, persentase pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan dokumen RTRW telah hampir mencapai 100 persen. Di tahun 2019 terdapat 99,7 persen pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan RTRW, meningkat jika dibandingkan di tiga tahun sebelumnya (99%).

Gambar 2.78. Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber : Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2020

2.3.1.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan merupakan amanat undang-undang dasar kepada pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bertindak sebagai sarana tumbuh kembang individu, sehingga perkembangan individu juga ditentukan dari seberapa layak tempat tinggal yang dihuninya. Rumah yang layak huni, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Pemenuhan rumah yang layak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersifat wajib sekaligus mendasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pembagian urusan pemerintahan.

Tabel. 2.89 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bone 2017-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja			Target Akhir RPJMD
					2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Infrastruktur Dasar	Rasio Rumah Layak Huni	Persen (%)	0,21066	0,946	0,927	1,073	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bone, 2020

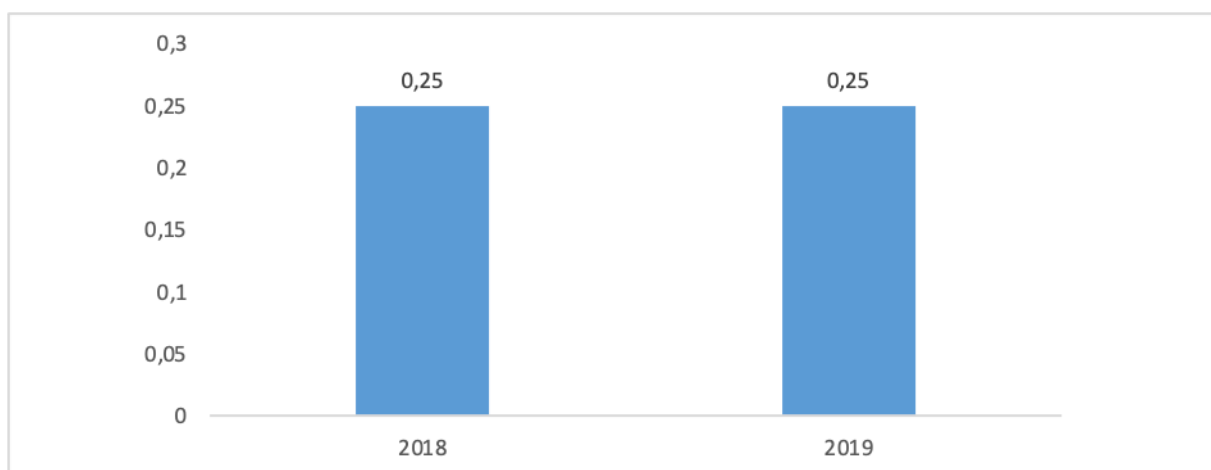
Berdasarkan table tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran “Rasio Rumah Layak Huni” sesuai target kinerja ada tahun 2020 sebesar 0,21066 % dan realiasi dari target 2020 mencapai 1,073 %.

2.3.1.3.1. Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman yang tertata merupakan lingkungan hunian yang terdiri dari satu satuan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai fungsi penunjang lainnya yang terletak baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Dalam pengertian yang lebih umum permukiman dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.

Luasan permukiman yang tertata di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2019. Di dua titik waktu ini, persentase kawsan permukiman yang tertata baru mencapai mencapai 25 persen.

Gambar 2.79. Persentase Permukiman yang tertata Kabupaten Bone Tahun 2018-2019

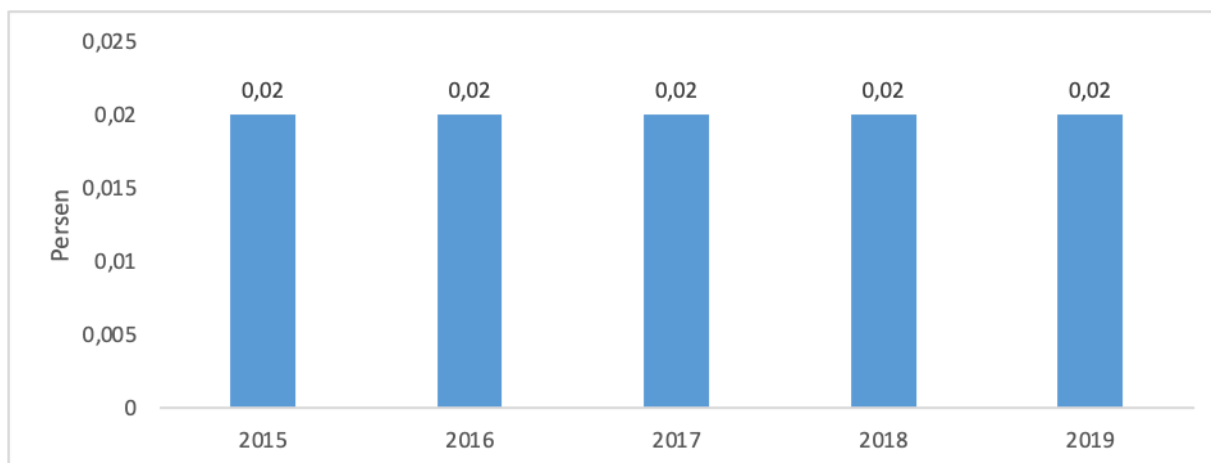


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bone, 2020

2.3.1.3.2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh juga dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah karena karakteristik permukiman kumuh biasanya digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Selain karena menjadi potret tingkat kesejahteraan yang rendah, perhatian pemerintah pada penanganan permukiman kumuh diperlukan karena biasanya menjadi sumber penyakit endemik yang akhirnya menular. Persentase luas lingkungan permukiman kumuh dibandingkan luas wilayah Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019 belum menunjukkan perubahan. Dalam kurun waktu tersebut, persentase lingkungan permukiman kumuh konsisten di angka 0,02 persen.

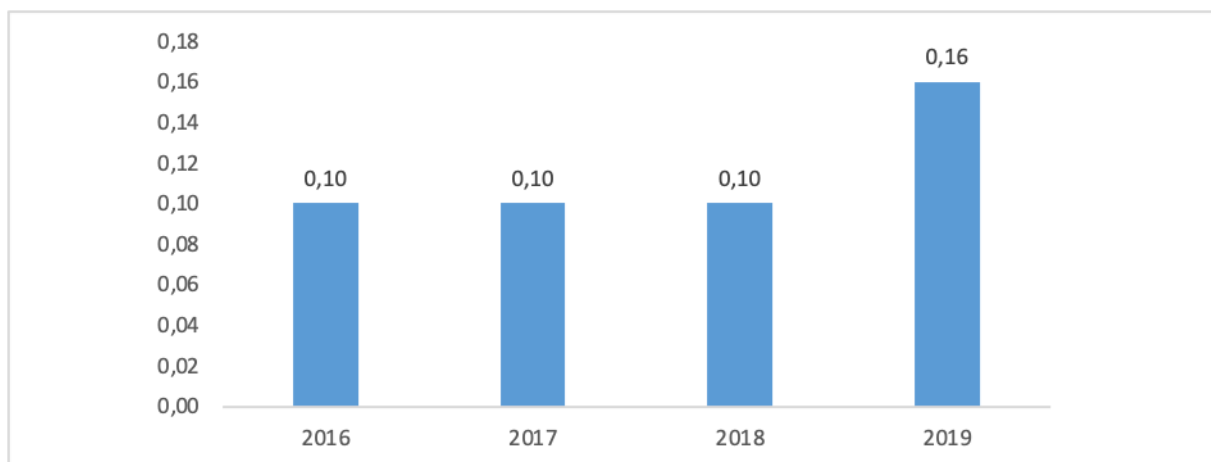
Gambar 2.80. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bone, 2020

2.3.1.3.3. Persentase Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2016, persentase permukiman kumuh mencapai 0,10 persen, pencapaian ini konsisten terjadi sampai dua tahun berikutnya yaitu di tahun 2017 dan 2018. Hingga pada tahun 2019, indikator ini telah mencapai 0,16 persen. Meski cenderung meningkat di tahun 2019, capaian ini sudah lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 0,20 persen.



Gambar 2.81. Persentase Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bone Tahun 2016-2019

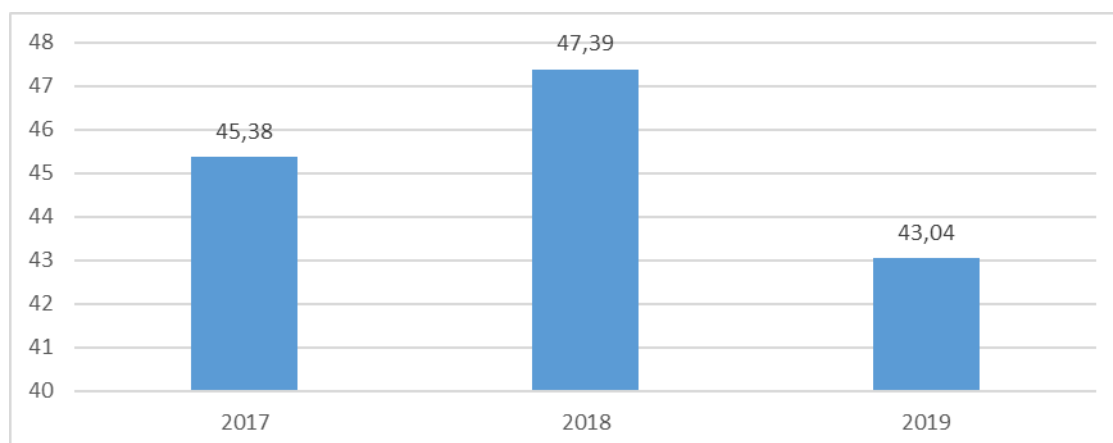
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bone, 2020

2.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.4.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan menjamin terwujudnya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan petugas perlindungan masyarakat dan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan. Kabupaten Bone mampu menaikkan angka cakupan petugas perlindungan masyarakat dalam rentang tahun 2017-2018, lalu menurun di tahun 2019. Pada tahun 2017, cakupan petugas perlindungan masyarakat mencapai 45,38 persen, lalu mengalami kenaikan menjadi 47,39 persen pada tahun 2018. Akhirnya capaian ini menurun di tahun berikutnya menjadi 43,04 persen. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun, pemerintah daerah menambah jumlah petugas perlindungan masyarakat untuk memastikan kehidupan sosial berjalan aman dan tertib.

Gambar 2.82. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

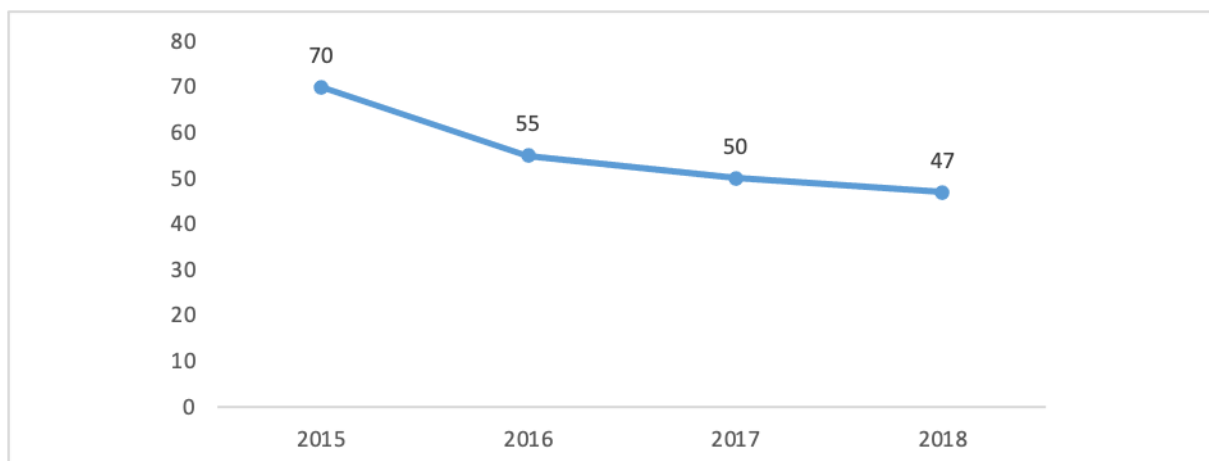


Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone, 2020

2.3.1.4.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercakup pelayanan bencana kebakaran semakin menurun dalam kurun waktu 2015-2018. Di tahun 2015 terdapat 70 KK yang tercakup pelayanan kebakaran, hingga kemudian menurun di tahun berikutnya dengan 55 KK. Angka ini kemudian terus menurun hingga di tahun 2018 hanya terdapat 47 KK. Kinerja pelayanan bencana kebakaran yang terus menurun perlu mendapatkan perhatian. Guna menunjang kinerja pelayanan pemadam kebakaran, pemerintah perlu meninjau kondisi sarana dan prasarana yang tersedia yang saat ini digunakan dalam menjalankan tugas.

Gambar 2.83. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, 2019

2.3.1.4.3. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri.

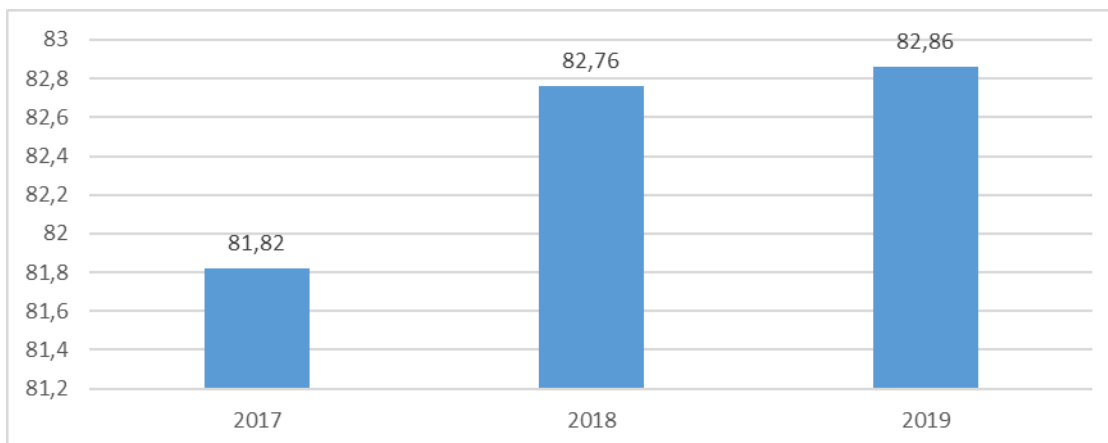
Pada Tahun 2017 terjadi kebakaran sebanyak 64 kali kebakaran yang terdiri dari 33 kali di dalam WMK dan 31 kali di luar jangkauan WMK dengan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 27 kejadian kebakaran. Pada Tahun 2018 terjadi kebakaran sebanyak 42 kali kebakaran yang terdiri dari 29 kali di dalam WMK dan 13 kali di luar jangkauan WMK, tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 24 kejadian kebakaran. Pada Tahun 2019 terjadi kebakaran sebanyak 63 kali kebakaran yang terdiri dari 35 kali di dalam WMK dan 28 kali diluar jangkauan WMK dengan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 29 kejadian kebakaran.

Tabel 2.44. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah WMK	Jumlah Luas WMK
1.	2017	27	33
2.	2018	24	29
3.	2019	29	35

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, 2020

Gambar 2.84. Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



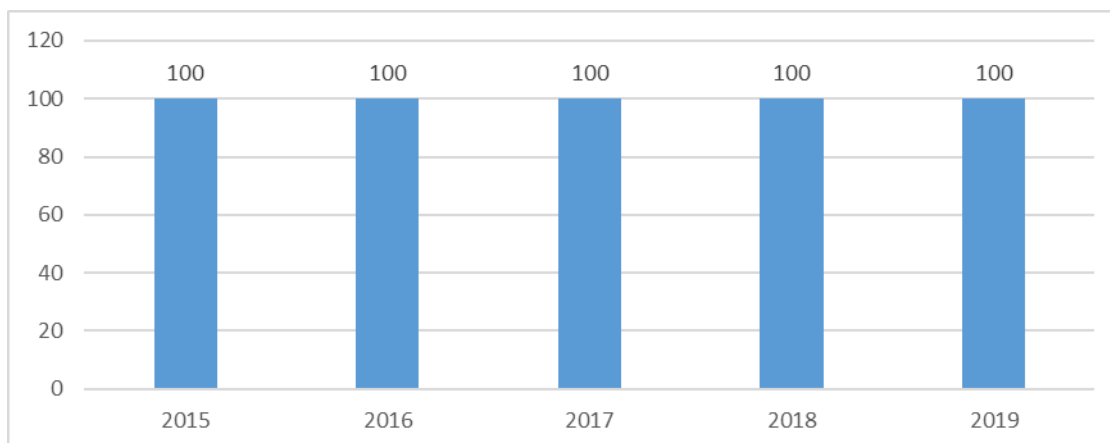
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, 2019

2.3.1.4.4. Persentase Penegakan PERDA

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Gambar 2.85. Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone, 2020

2.3.1.5. Sosial

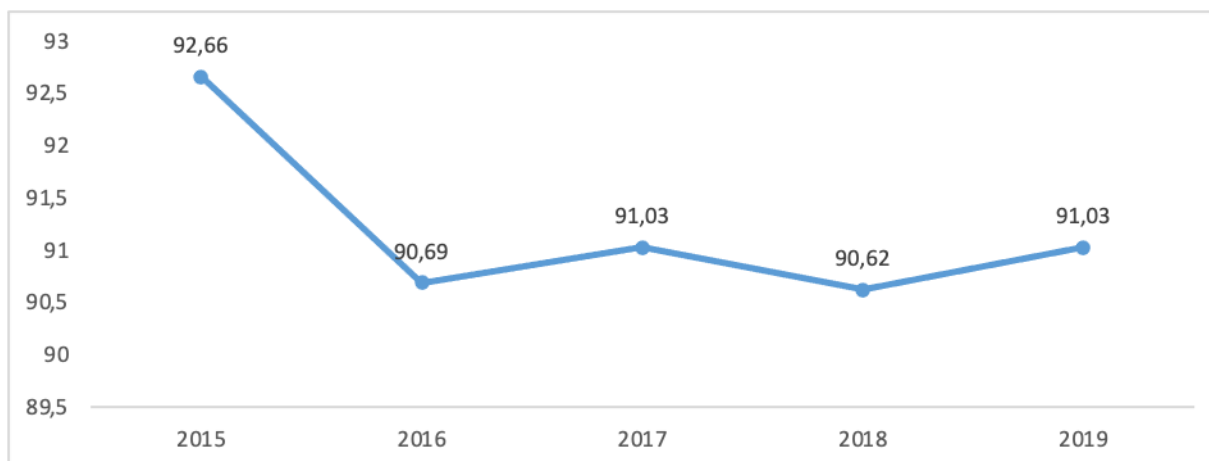
Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 129/HUK/2008, pemerintah daerah menyelenggarakan SPM bidang sosial yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh oleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS sendiri adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sesuai yang diamanatkan melalui Permensos 129/HUK/2008 antara lain adalah (1) pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota; (2) penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota; (3) penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota; dan (4) pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlanter yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota.

2.3.1.5.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Keterlibatan negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam Permensos No.8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsinya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Penduduk yang termasuk dalam kategori PMKS ini antara lain adalah anak atau balita terlanter, anak jalanan, penyandang disabilitas, pengemis, fakir miskin, dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Kabupaten Bone telah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perhatian kepada PMKS. Meski menunjukkan sedikit penurunan namun tingkat cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial telah sangat tinggi. Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial di tahun 2019 mencapai 91,03 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015 dengan angka persentase mencapai 92,66 persen.

Gambar 2.86. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



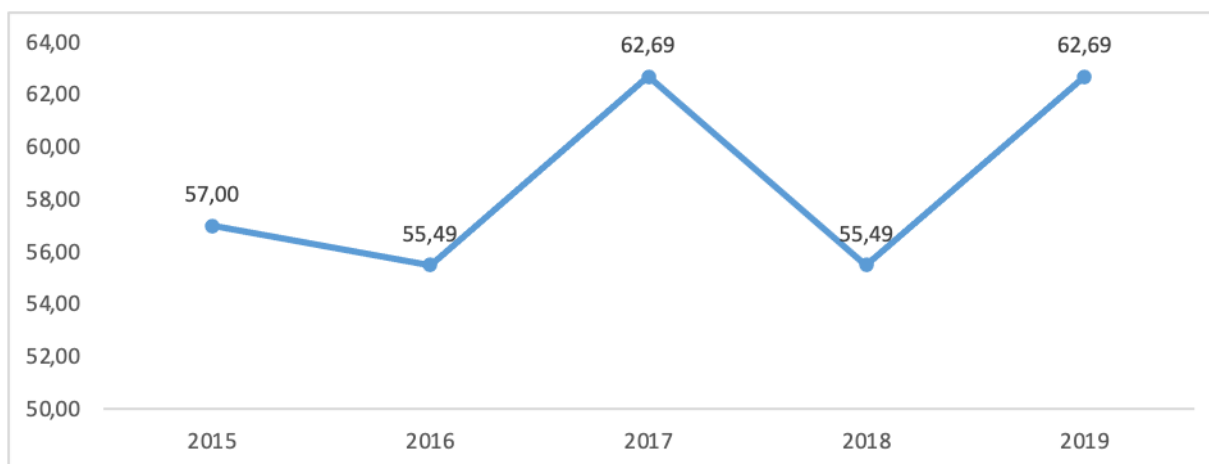
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Semakin meluasnya cakupan pemberian bantuan kepada penduduk PMKS di Kabupaten Bone berpengaruh terhadap angka persentase PMKS yang tertangani. Jika angka Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan proporsi antara jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan, angka persentase PMKS tertangani merupakan proporsi dari jumlah PMKS tertangani dibandingkan dengan total PMKS.

Tren angka persentase persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bone dalam rentang tahun 2015-2019 beriringan dengan tren yang terjadi pada indikator persentase PMKS yang menerima bantuan sosial. Di tahun 2015, persentase PMKS tertangani di Kabupaten Bone mencapai 57 persen. Pada tahun ini lebih dari 1/2 penduduk PMKS di Kabupaten Bone berhasil mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sebelum sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 55,49 persen. Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan PMKS tertangani di tahun 2017 dengan mencatat angka sebesar 62,69 persen. Capaian ini berlanjut di dua tahun berikutnya (2019) dengan nilai persentase mencapai 62,69 persen. Artinya hanya tersisa lebih dari 1/3 penduduk PMKS yang belum ditangani oleh pemerintah daerah.

Gambar 2.87. Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



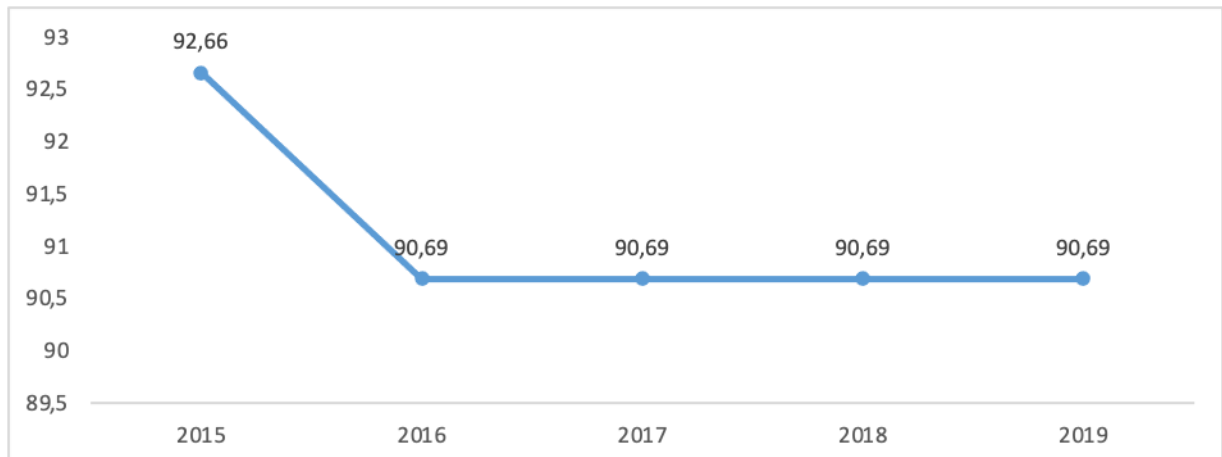
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar menunjukkan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS. Kementerian Sosial mendefinisikan bantuan sosial sebagai semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial

(termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Untuk itu, bantuan sosial diharapkan dapat menjadi persiapan PMKS sehingga nantinya dapat secara mandiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Gambar 2.88. Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

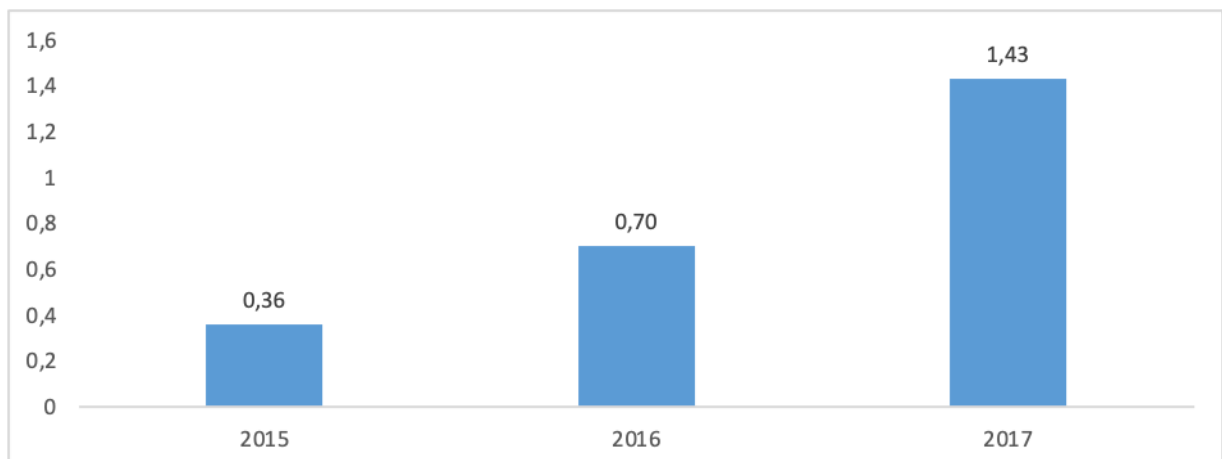


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

Dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada penduduk PMKS. Hasilnya, dalam rentang waktu tersebut, angka persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasarnya selalu berada di atas 90 persen. Jika di tahun 2015 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 92,66 persen, di tahun 2016 angka ini sedikit menurun menjadi 90,69 persen. Capaian di tahun 2016 ini berlangsung di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019.

2.3.1.5.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Gambar 2.89. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

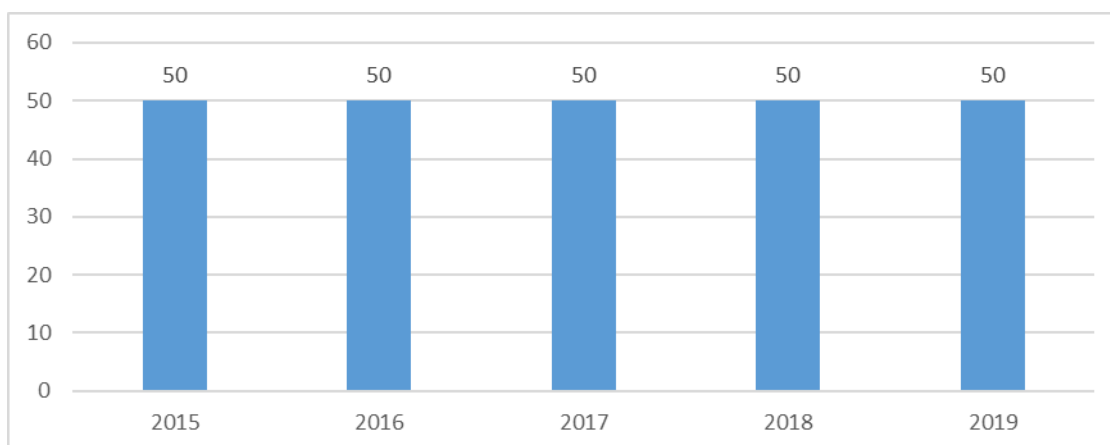
Tidak hanya menyasar individu PMKS, pemerintah daerah juga menargetkan pemberian bantuan kepada panti sosial atau kelompok sosial ekonomi yang layak mendapat bantuan pemberdayaan sosial. Dalam kurun waktu tahun 2015-2017, angka persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Bone konsisten meningkat, meski angkanya masih relatif rendah. Di tahun 2015, persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE mencapai 0,36 persen. Capaian ini terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai 1,43

persen. Meskipun begitu, masih ada sekitar 98,57 persen panti sosial di Kabupaten Bone yang belum menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya.

2.3.1.5.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Salah satu instansi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat PMKS adalah panti sosial. Berdasarkan Kepmenkos No.50/HUK/2004, panti sosial diartikan sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Karena pentingnya peran panti sosial, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial menjadi salah satu indikator menilai kemampuan pemberian layanan. Di Kabupaten Bone, tidak semua panti sosial memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Sejak tahun 2015 hingga 2017 hanya 50 persen dari total panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Jika jumlah masyarakat PMKS bertambah, maka proporsi panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial seharusnya juga mengalami kenaikan.

Gambar 2.90. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



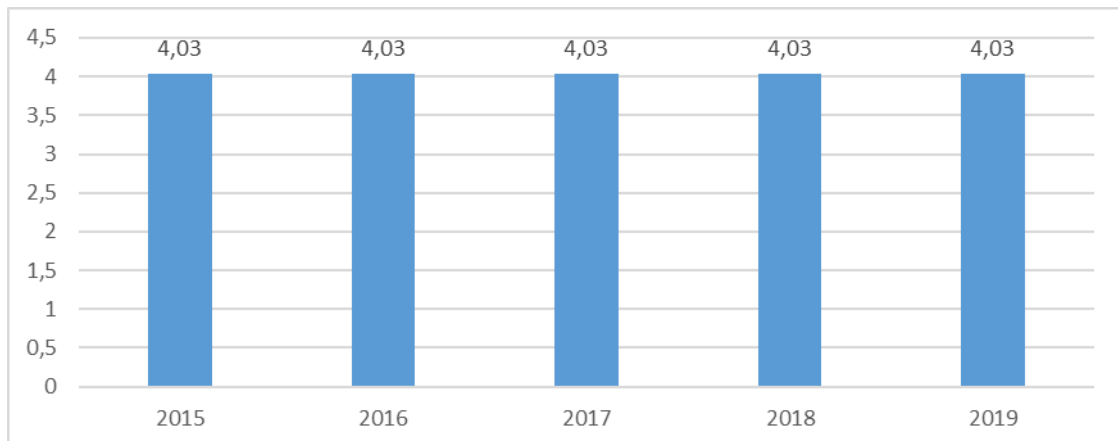
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Selain panti sosial, ketersediaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial juga penting bagi PMKS. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat merupakan sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Menurut Kemensos RI, wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Sama halnya dengan angka persentase panti yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan setidaknya dari 2015 hingga 2019. Angka 4,03 persen menunjukkan bahwa dari sekian banyak WKBSM di Kabupaten Bone hanya 4,03 persen yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.91. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



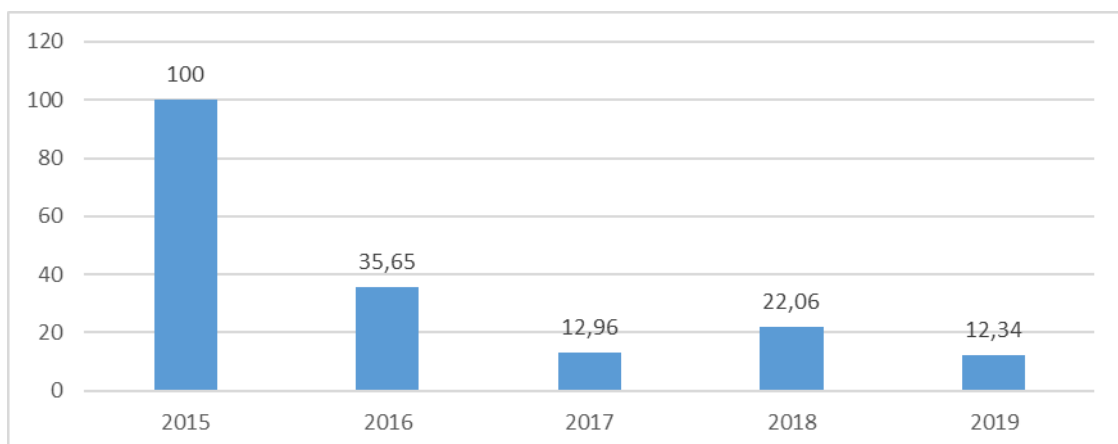
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang mengalami beberapa bencana alam tahun 2017. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, terdapat empat jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu kebakaran, puing beliung, banjir, dan longsor dengan masing-masing jumlah kejadian sebanyak 52, 10, 8, 1 kejadian. Menurut BPS, jumlah korban paling banyak mencapai 3.825 karena bencana alam banjir. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam membantu penduduk yang menjadi korban bencana dapat dilihat dari angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Dalam rentang waktu 2015 sampai 2017, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bone konsisten menurun. Setelah mencapai angka 100 persen di tahun 2015, satu tahun kemudian angkanya menurun signifikan menjadi 35,65 persen. Di tahun 2017, angkanya kembali mengalami penurunan menjadi 12,96 persen.

Gambar 2.92. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



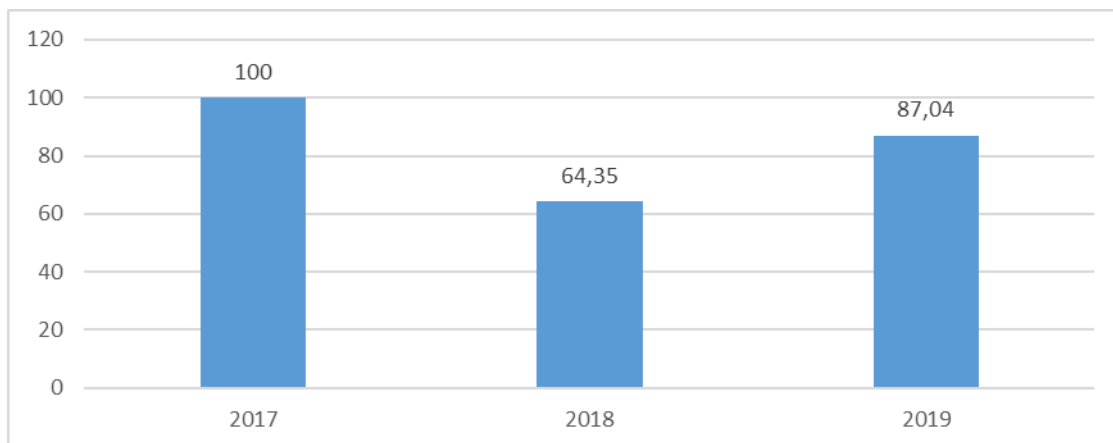
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Banjir merupakan salah satu bencana paling besar yang seringkali terjadi di Kabupaten Bone dan membutuhkan kesiap-siagaan pemerintah daerah untuk mengevakuasi penduduk yang terdampak. Upaya pemerintah daerah dalam mengevakuasi korban bencana nampaknya mengalami perubahan setiap tahun sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Di tahun 2015 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di kabupaten bone mencapai 100 persen, artinya semua korban berhasil di evakuasi menggunakan

sarana dan prasarana yang tersedia. Namun di tahun 2016 capaian ini menurun menjadi 64,35 persen. Hingga tahun 2017 masing-masing sebesar 64,35 persen dan 87,04 persen. Ada dua faktor penting penyebab menurunnya angka persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Bone yaitu jangkauan lokasi bencana dan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia.

Gambar 2.93. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



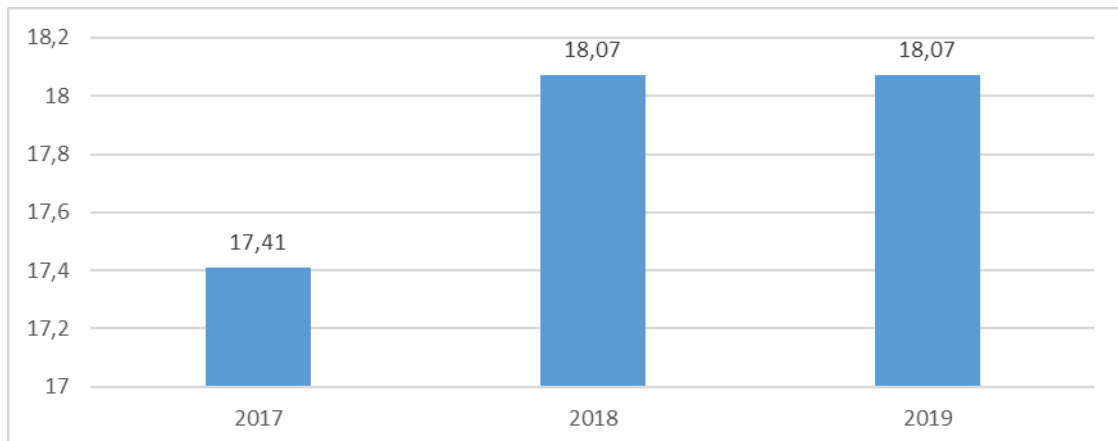
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, 2020

2.3.1.5.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tidak semua penduduk dalam satu daerah memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sebagian penduduk harus mendapatkan bantuan pemerintah agar memudahkan mereka menjalankan kehidupan sosial secara lebih baik. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan kelompok rentan, di antaranya adalah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia. Untuk melaksanakan kehidupan normal di tengah masyarakat, mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah Kabupaten Bone, dalam lima tahun terakhir, mampu menaikkan angka persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan terus memperluas cakupannya. Pada tahun 2015 sebanyak 17,41 persen penduduk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah mendapatkan bantuan jaminan sosial, dan jumlahnya terus bertambah menjadi 18,07 persen di tahun 2016 dan 2017. Meskipun trennya cenderung naik, namun persentasenya masih relatif rendah, karena masih terdapat 81,93 persen penduduk rentan belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Gambar 2.94. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2020

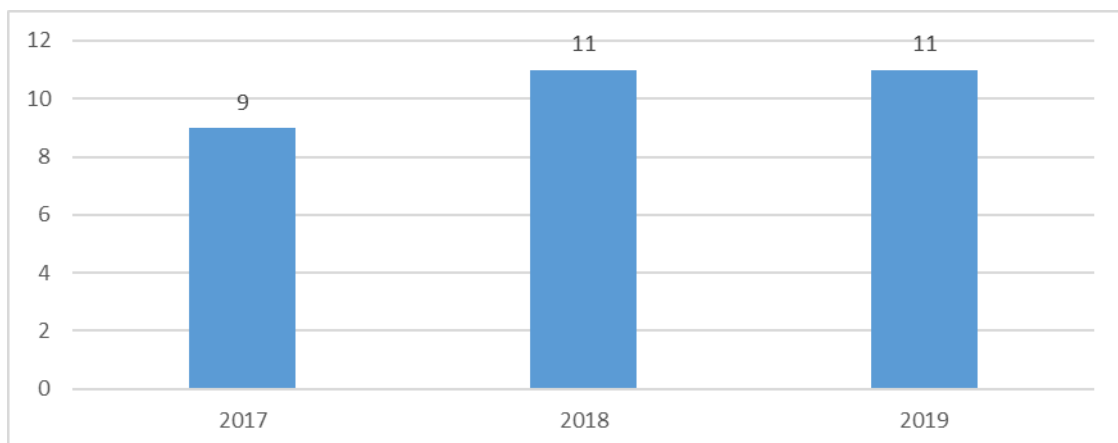
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Besaran angka sengketa di perusahaan dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan kasus. Di tahun 2017, pemerintah menghadapi sebelas kasus sengketa antara pengusaha dengan pekerja. Besaran angka ini cenderung terus meningkat sejak tahun 2015, di mana pada tahun tersebut terdapat sembilan (9) kasus. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai, aturan, hak, kewajiban, kesejahteraan dan hak maupun kewajiban pekerja lainnya.

Gambar 2.95. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

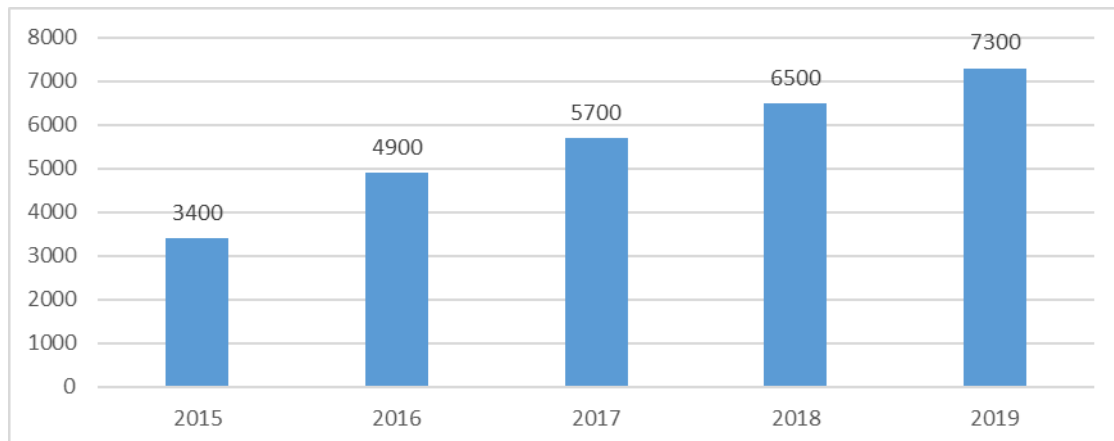


Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2020

2.3.2.1.2. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jamsostek (Jaminan Sosial tenaga Kerja) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang berkurang dalam jangka waktu tertentu. Jamsostek ini bertujuan melindungi pekerja dari resiko keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di masa yang akan datang. Jumlah pekerja yang mengikuti program Jamsostek semakin bertambah dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2015 jumlah pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek mencapai 3.400 pekerja, lalu meningkat di tahun selanjutnya menjadi 4.900 pekerja. Hingga tahun 2019, jumlah pekerja yang terdaftar Jamsostek telah mencapai 7.300 pekerja. Hal ini menunjukkan keseriusan pengusaha dalam menjamin keselamatan pekerjaannya di masa yang akan datang.

Gambar 2.96. Besaran Pekerja Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

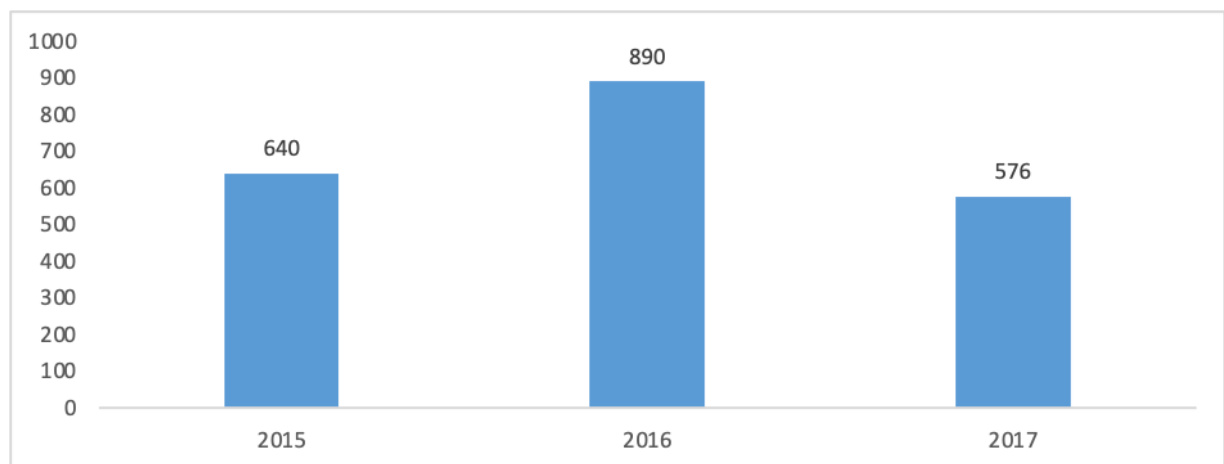


Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2020

2.3.2.1.3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam kurun waktu 2015-2017 memiliki tren yang cukup berfluktuatif. Capaian tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di tahun 2016 mencapai 880 pekerja. Capaian di tahun 2016 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 mencapai 640 pekerja. Hingga pada akhirnya di tahun 2017 menjadi menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 576 pekerja. Fluktuasi jumlah pekerja ini bergantung pada ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pelatihan.

Gambar 2.97. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

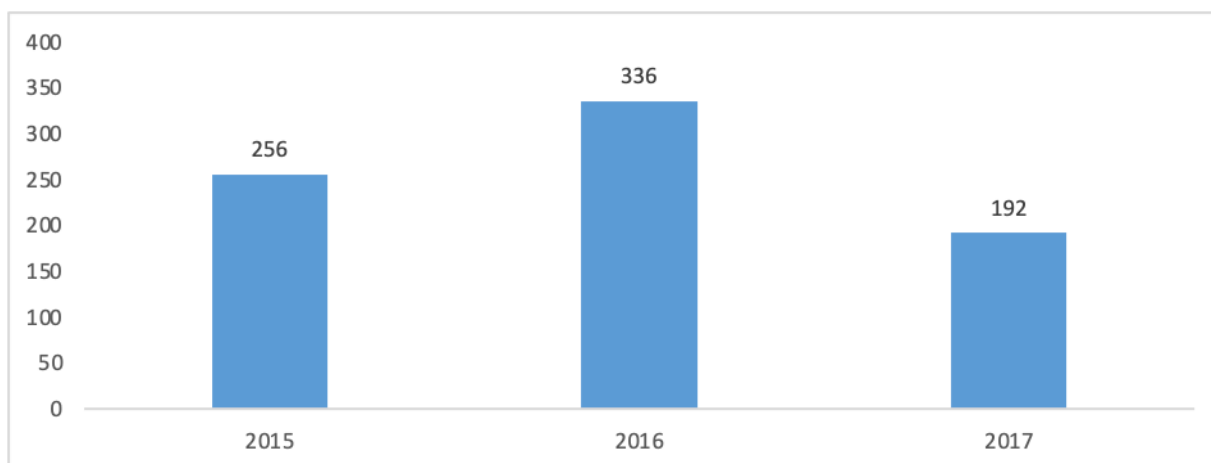


Sumber : BLK Bone, 2018

2.3.2.1.4. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat merupakan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Bone di masing-masing kelurahan di kabupaten Bone. Pelatihan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk menambah keterampilan masyarakat yang diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ini jumlahnya cukup dinamis, hal ini disebabkan oleh jumlah paket pelatihan yang tersedia disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Gambar 2.98. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

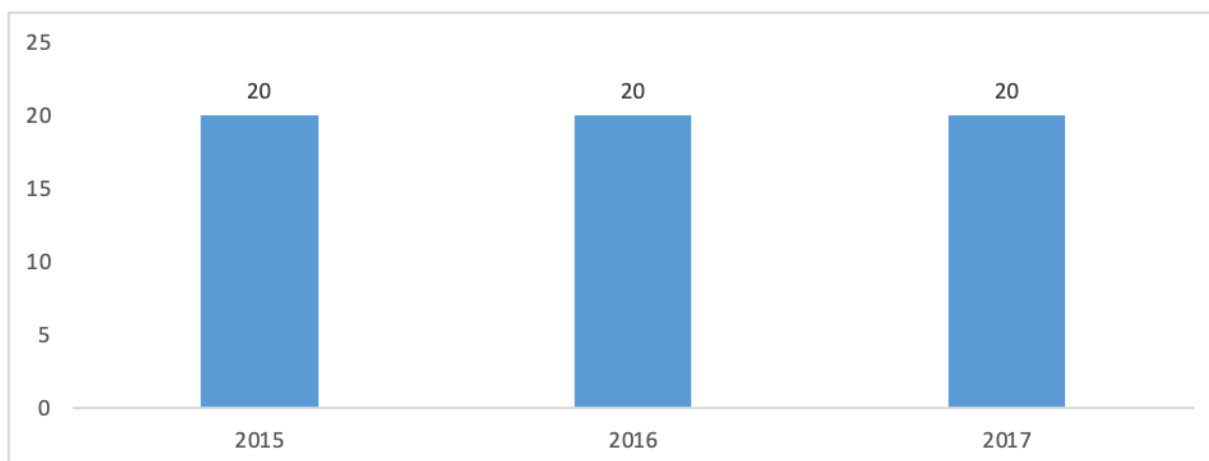


Sumber : BLK Bone, 2018

2.3.2.1.5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Program pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BLK Bone diikuti oleh 20 peserta dalam kurun waktu 2015-2017. Pelatihan ini diprogramkan untuk empat kelompok wirausaha setiap tahunnya dimana setiap kelompok terdiri dari lima orang peserta.

Gambar 2.99. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber : Bid. Penempatan Disnaker Bone, 2020

2.3.2.1.6. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan suatu daerah. Oleh karena itu, rasio perimbangan jumlah lulusan kesarjanaan untuk strata satu, strata dua, dan strata tiga memberikan indikasi kemajuan suatu daerah. Jumlah lulusan sarjana terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah yaitu berkisar 2.89 persen – 3.08 persen tiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2017-2019.

Tabel 2.s45. .Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	20,940	22,768	22,313
2.	Jumlah penduduk	724,905	738,515	723,745
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2.89	3.08	3.08

Sumber : BPS Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan memegang peranan penting dalam memajukan pembangunan daerah. Perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting yang diharapkan dapat berkontribusi

sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Karena strategisnya peran perempuan dalam agenda pembangunan maka pemberdayaan perempuan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selama ini terdapat anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, sehingga peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan aspek gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah dapat dilihat pada seberapa banyak perempuan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau menempati jabatan pada berbagai eselon.

Tren persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan di Bone cenderung stabil pada tingkatan yang cukup rendah. Di tahun 2019, persentase perempuan mencapai 1,46 persen dari total pekerja di lembaga pemerintahan. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai persentase 1,63 persen. Capaian di tahun 2019 juga sedikit lebih rendah jika dibandingkan yang dicapai di tahun 2013 dengan nilai persentase 1,66 persen.

Tabel 2.46. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II	4	3	9	3	9
2	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon III	45	37	63	37	63
3	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon IV	466	468	515	468	515
4	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	6.330	6.378	5.728	6.378	5.728
5	Jumlah Pekerja Perempuan					
6	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	1,62	1,63	1,46	1,63	1,46

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone, 2018

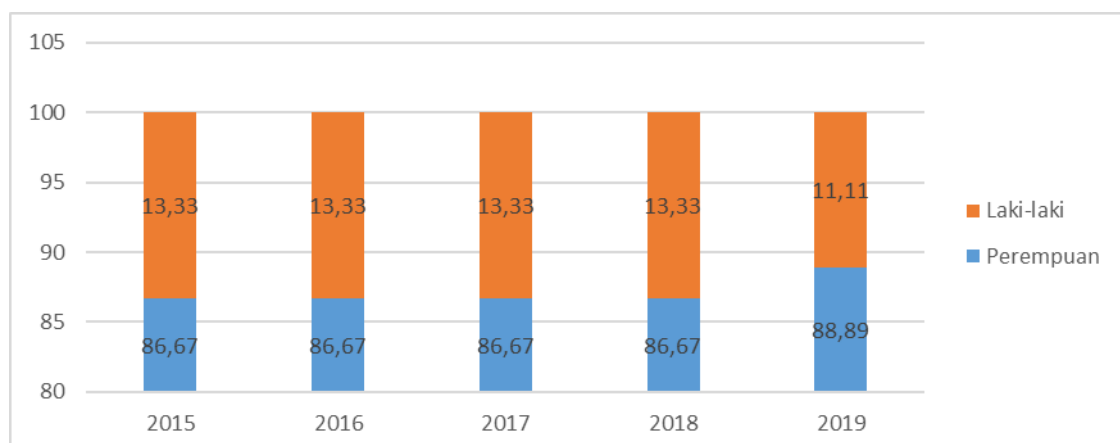
2.3.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Arah pembangunan saat tidak semata fokus pada permasalahan ekonomi, namun semua aspek yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dijadikan arah pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan yang dianggap penting saat ini adalah kesetaraan gender, khususnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Beberapa peraturan yang mengharuskan keterwakilan 40 persen perempuan di parlemen diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Parlemen Kabupaten Bone nampaknya masih jauh dari apa yang disyaratkan dalam regulasi atau komposisinya masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data yang tersedia di BPS Kabupaten Bone, proporsi perempuan dalam parlemen Kabupaten Bone dari tahun 2015 sampai 2017 masih 6,92 persen, sementara anggota DPRD laki-laki 86,67 persen. Butuh upaya lebih keras dari semua stakeholder, terutama pemerintah dan daerah dan partai politik untuk mendorong perempuan terlibat lebih aktif dalam bidang politik.

Gambar 2.100. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Bone (dalam persen),

Tahun 2015-2019



Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka, 2020

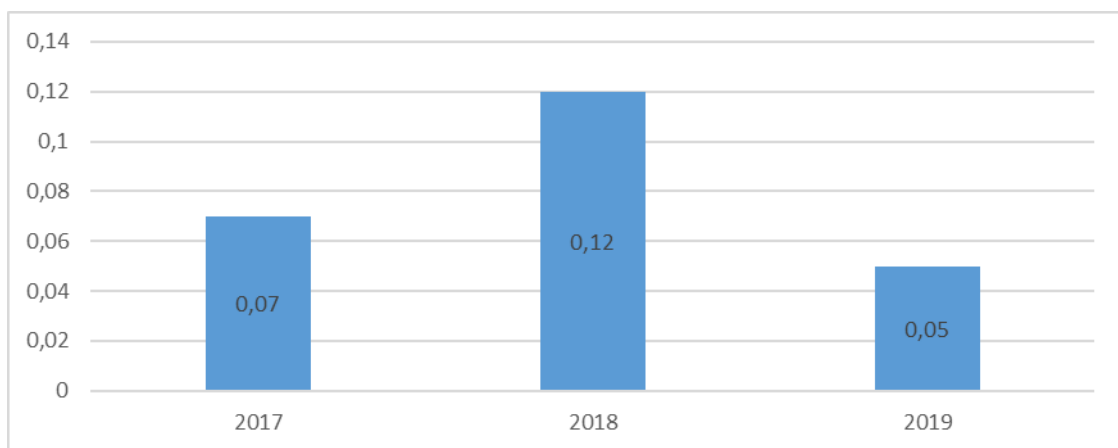
2.3.2.2.3. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Data Sektor dalam hal ini belum terdata secara maksimal (belum ada). Sehingga masih sulit diukur partisipasi perempuan di lembaga swasta dari Tahun 2012 sampai sekarang ini.

2.3.2.2.4. Rasio KDRT

Rasio kasus KDRT terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Bone sempat meningkat di tahun 2018, yaitu dari 0,07 kasus per seratus rumah tangga di tahun 2017 menjadi 0,12. Di tahun 2019, terjadi penurunan temuan kasus KDRT dimana pada tahun tersebut hanya terdapat 0,05 kasus per seratus rumah tangga. Penurunan ini terjadi karena terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gambar 2.101. Rasio KDRT Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

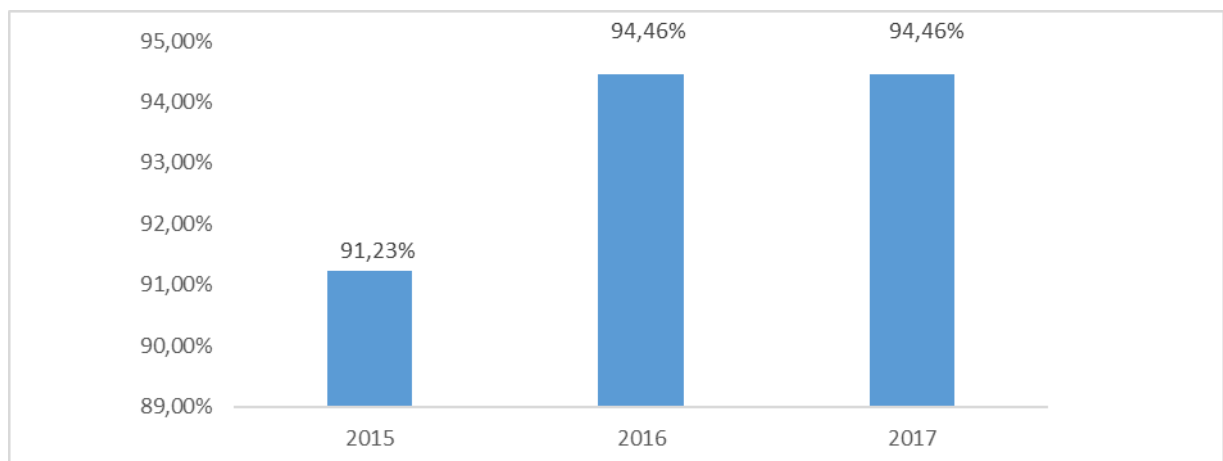


Sumber : Data Diolah, 2020

2.3.2.2.5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2016 dan tahun 2017 capaian indikator ini adalah 94,46 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 dengan capaian 91,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan hampir seluruhnya telah terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

Gambar 2.102. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



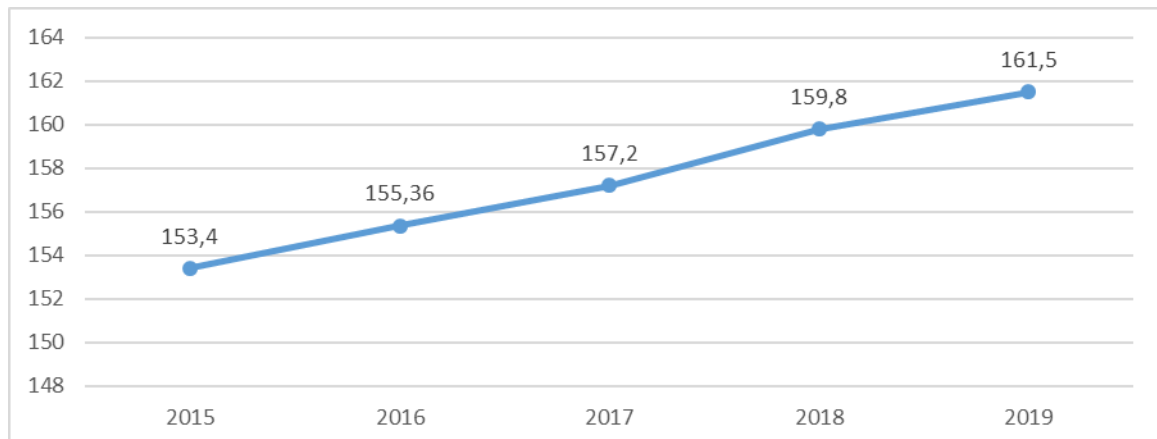
Sumber : BPS, 2018

2.3.2.3. Pangan

2.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Produksi beras sebagai pangan utama di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 produksi beras mencapai 153,4 ton. Meningkat menjadi 155,36 ton di tahun 2016. Produksi beras meningkat kembali menjadi 157,2 ton di tahun 2017 dan pada tahun 2019 sebesar 161,5 ton.

Gambar 2.103. Produksi Beras Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (ton)

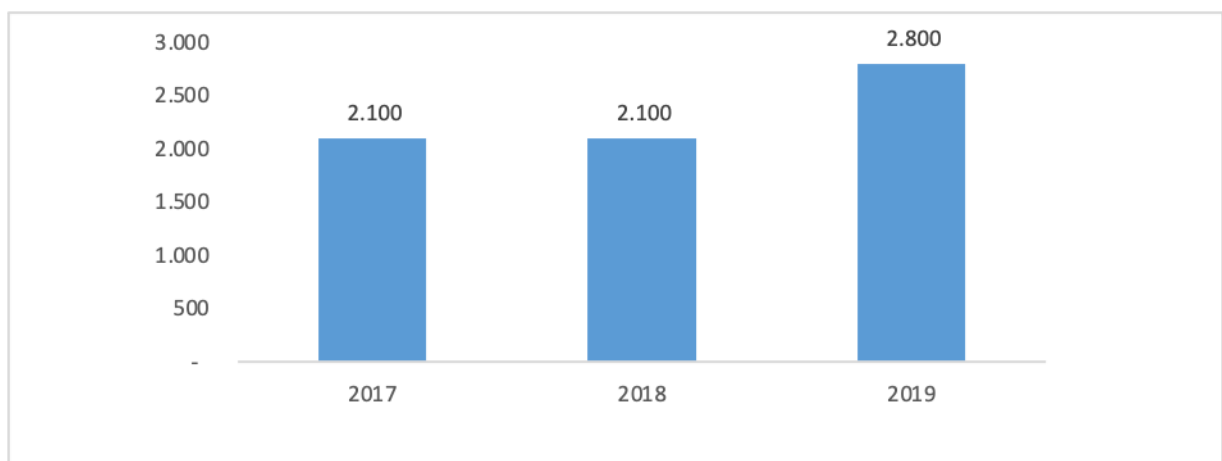


Sumber: Badan pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Seiring dengan meningkatnya produksi pangan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2017-2019, konsumsi energi dan protein perkapita juga mengalami peningkatan. Ketersediaan energi di tahun 2015 mencapai 2.100 kkal/hari, lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 2.800 kkal/hari. Sementara konsumsi protein perkapita konsisten di angka 59 gram/hari dalam kurun waktu 2017-2019.

Gambar 2.104. Ketersediaan Energi Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (kkal/hari)

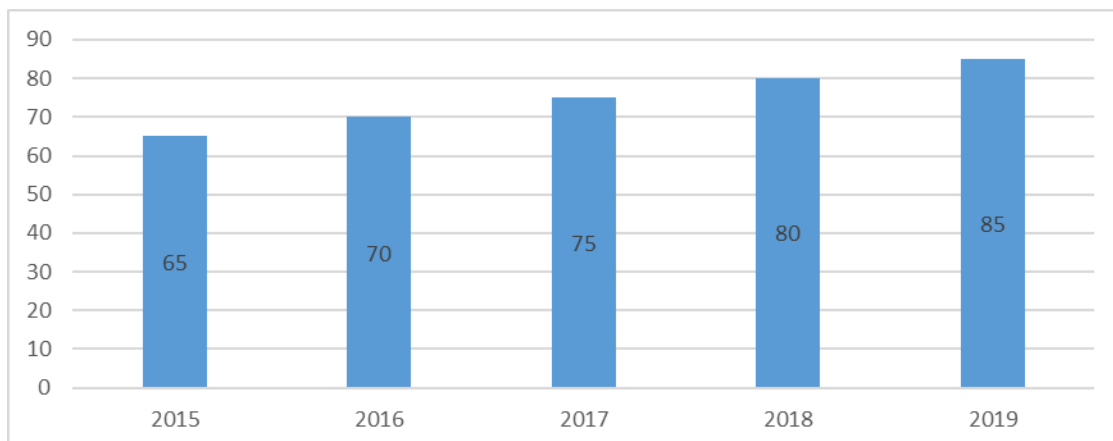


Sumber: Badan pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Dalam hal keamanan pangan yang tersedia di Kabupaten Bone tahun 2015-2017, terjadi peningkatan kualitas keamanan pangan. Di tahun 2015, terdapat 65 persen sampel pangan yang telah terjamin aman dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Bone. Tahun 2017, indikator ini meningkat menjadi 75 persen hingga tahun 2019 menjadi 85 persen yang berarti bahwa 85 persen sumber pangan di Kabupaten Bone telah terjamin keamanannya untuk dikonsumsi.

Gambar 2.105. Persentase Pangan yang Aman dikonsumsi Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



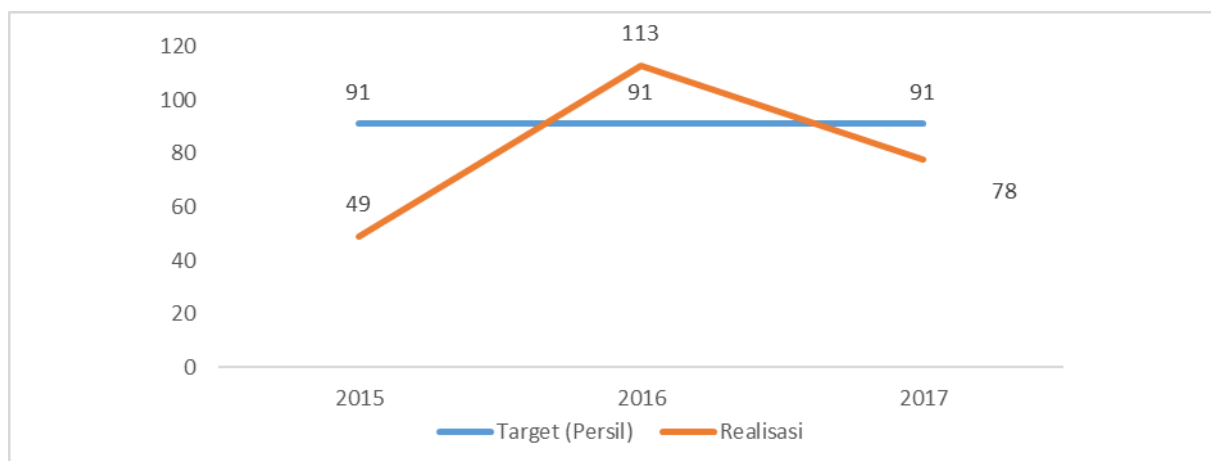
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2020

2.3.2.4. Pertanian

2.3.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Capaian sertifikasi lahan pemerintah dalam kurun waktu 2015-2017 memperlihatkan tren yang cukup fluktuatif. Di tahun 2015 terdapat 49 persil tanah pemerintah yang berhasil disertifikasi, kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 113 persil tanah. Akhirnya pada tahun 2017 terjadi penurunan realisasi sertifikasi lahan dengan 91 persil tanah.

Gambar 2.106. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



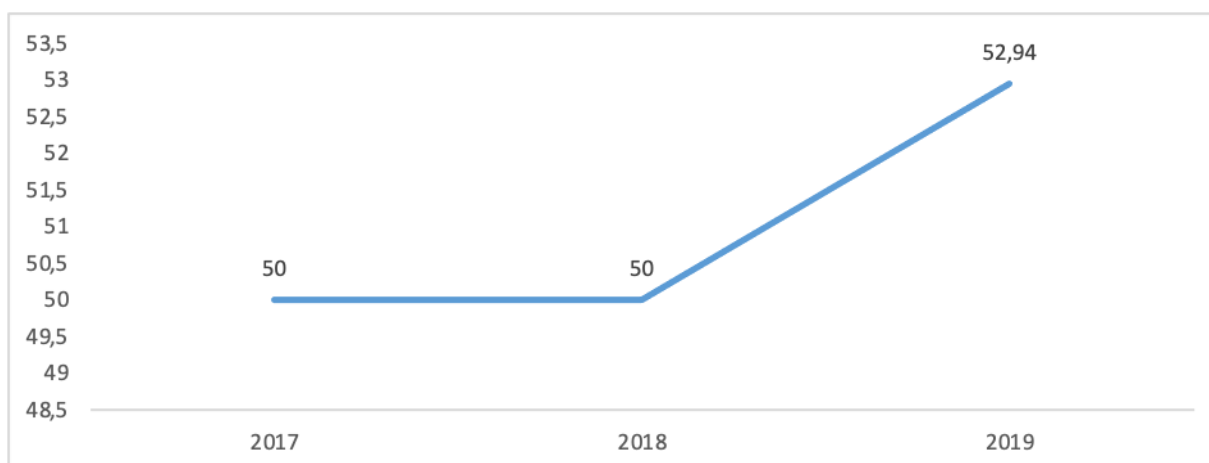
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Bone, 2018

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Penghitungan indeks kualitas air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa penentuan status mutu air dihitung dengan menggunakan metode indeks pencemaran (Pollution Index/PI). Kriteria kualitas air berdasarkan hasil angka indeksnya adalah $0 \leq IP \leq 1,0$ untuk kategori baik, $1,0 \leq IP \leq 5,0$ untuk kategori cemaran ringan, $5,0 \leq IP \leq 10,0$ untuk kategori cemaran sedang, dan $> 10,0$ untuk kategori cemaran berat. Hasil penghitungan indeks kualitas air di Bone menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2017-2019), kondisi air yang berada di sungai, laut, dan sumber air lainnya berada dalam kategori cemaran berat. Angka indeks kualitas air di tahun 2017 dan 2018 mencapai 50. Di tahun 2019, angka ini meningkat menjadi 50,94.

Gambar 2. 107. Indeks Kualitas Air Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



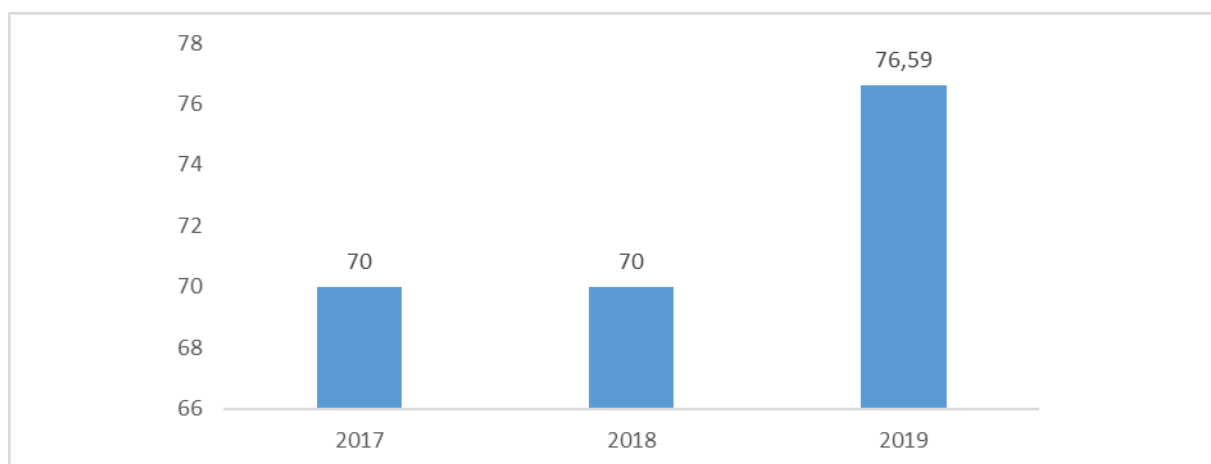
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2020

2.3.2.5.2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks standar pencemar udara adalah angka yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Pengukuran kualitas udara dilakukan di beberapa titik yang mencakup wilayah pemukiman, wilayah industri, wilayah padat transportasi dan wilayah komersil. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2019 kualitas udara di Kabupaten Bone tergolong dalam kondisi baik. Di tahun 2017 dan 2018 angka indeks kualitas udara mencapai 70 yang mana masih berada pada kategori kualitas udara yang baik. Meski di tahun 2019 capaian ini meningkat menjadi 76,59, namun angka ini masih berada dalam kategori kualitas udara baik.

Gambar 2.108. Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber : Analisis Laboratorium Lingkungan DLH, 2018

Kategori :

0 – 50 : Baik

51 – 100 : Sedang

101 – 199 : Tidak Sehat

200 – 299 : Sangat Tidak Sehat

300

: Berbahaya

2.3.2.5.3. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh

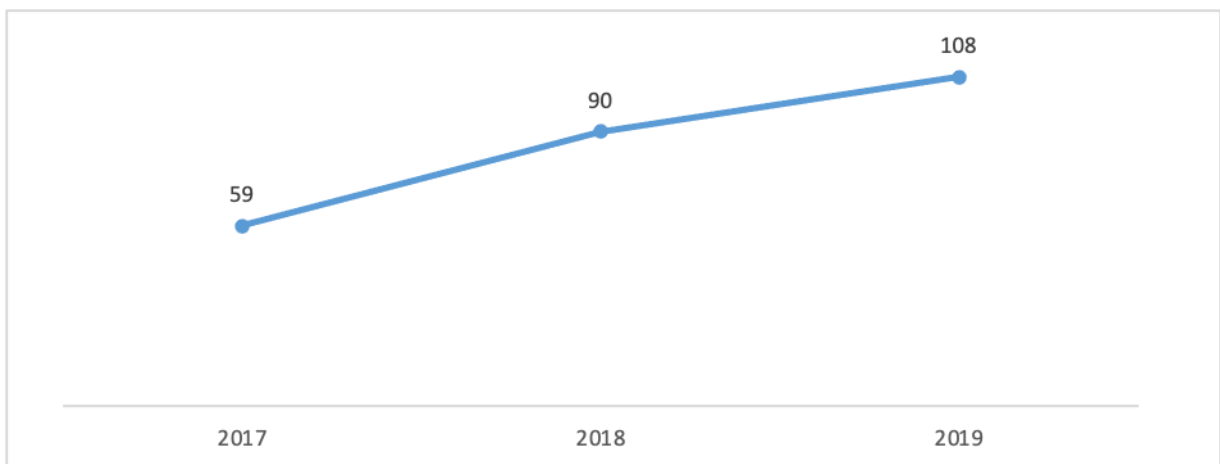
Pemerintah di tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menyusun RPPLH sesuai dengan UU No. 32/2009 disyaratkan ada instrument KLHS dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal).

Dalam kurun waktu 2015-2019 Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3.2.5.4. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH D yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menaati izin lingkungan yang diterbitkan terus meningkat dalam kurun waktu 2017-2019. Di tahun 2017, persentase penanggung jawab usaha yang menaati peraturan terkait lingkungan hidup baru mencapai 59 persen. Hingga tahun 2019, angka persentase naik menjadi 108 persen. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kesadaran penanggung jawab usaha terhadap isu lingkungan di Bone.

Gambar 2.109. Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

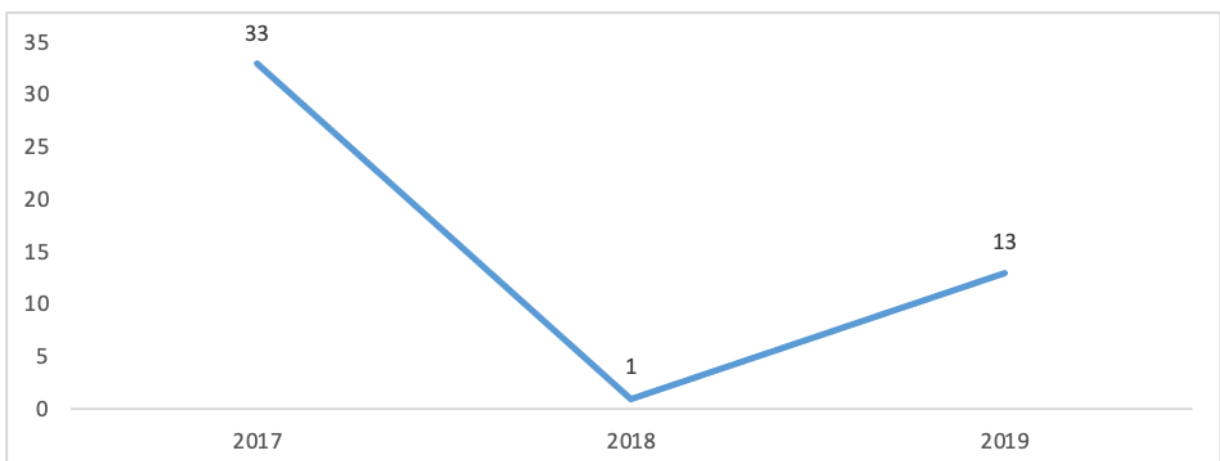


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2020

2.3.2.5.5. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan. Dalam rentang tahun 2017-2019, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone telah menyelenggarakan 47 program pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Dari 47 penyelenggaraan program ini, terdapat 33 program yang dijalankan di tahun 2017, lalu menurun di tahun berikutnya menjadi hanya satu (1) program. Di tahun 2019 terjadi peningkatan penyelenggaraan program dengan capaian 13 program.

Gambar 2. 110. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

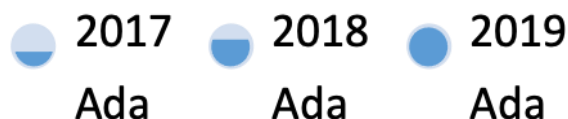


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2020

2.3.2.5.6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, Kabupaten Bone telah mengadakan pemberian penghargaan lingkungan hidup di tiga tahun terakhir (2017-2019).

Gambar 2. 111. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

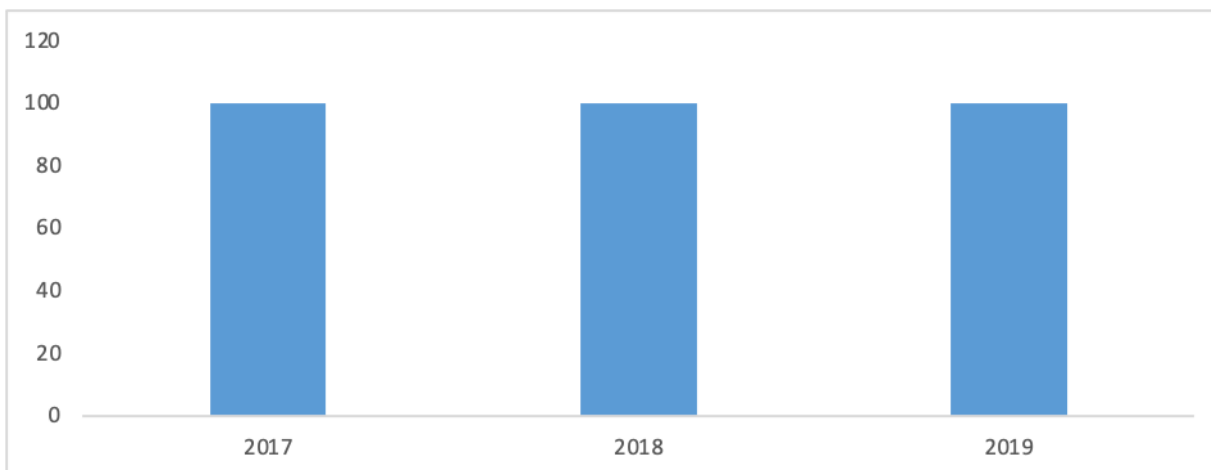


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2020

2.3.2.5.7. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Dinas Lingkungan Hidup secara optimal telah menerima dan menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang telah diterbitkan. Dalam rentang tahun 2017-2019, DLH telah menindaklanjuti seluruh aduan masyarakat atau persentase pengaduan masyarakat yang telah ditangani dalam rentang tahun tersebut mencapai seratus (100) persen.

Gambar 2. 112. Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah yang Tertangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2020

2.3.2.5.8. Timbulan Sampah yang Ditangani

Jumlah timbulan sampah yang ditangani di Bone cenderung berkurang dalam kurun waktu tahun 2017-2018. Di tahun 2017, jumlah sampah yang ditangani mencapai 80.970 ton. Jumlah sampah ini kemudian berkurang di tahun 2018 menjadi 70.387 ton. Capaian ini kemudian meningkat kembali di tahun 2019 dengan jumlah sampah menjadi 72.890 ton.

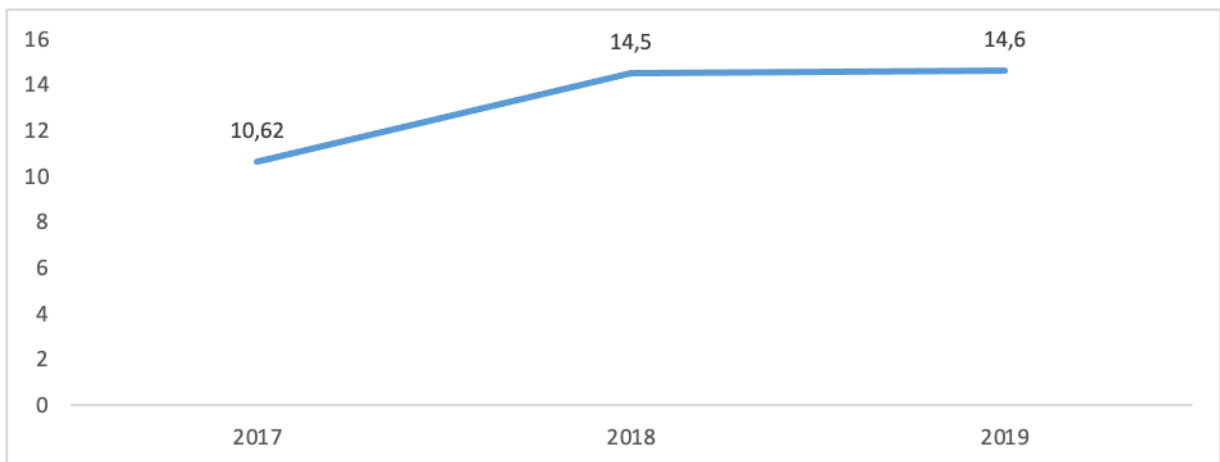
Tabel 2.47. Timbulan Sampah yang Ditangani Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (ton)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (ton)	-	-	80.970	70.387	72.890
2.	Total timbulan sampah di 27 Kecamatan (ton)	-	-	134.950		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.5.9. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Gambar 2.113. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurai Melalui 3R Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

Sampah-sampah yang dikurangi melalui 3R yakni sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengkomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Dalam kurun waktu 2017-2019 terjadi peningkatan jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan 3R. Di tahun 2017, dari 80.970 ton sampah yang tertangani, 10,62 persen dari sampah yang tertangani tersebut telah menggunakan metode 3R. Di tahun 2018 dan 2019 capaian ini meningkat masing-masing menjadi 14,50 persen dan 14,60 persen.

2.3.2.5.10. Persentase Cakupan Area Pelayanan

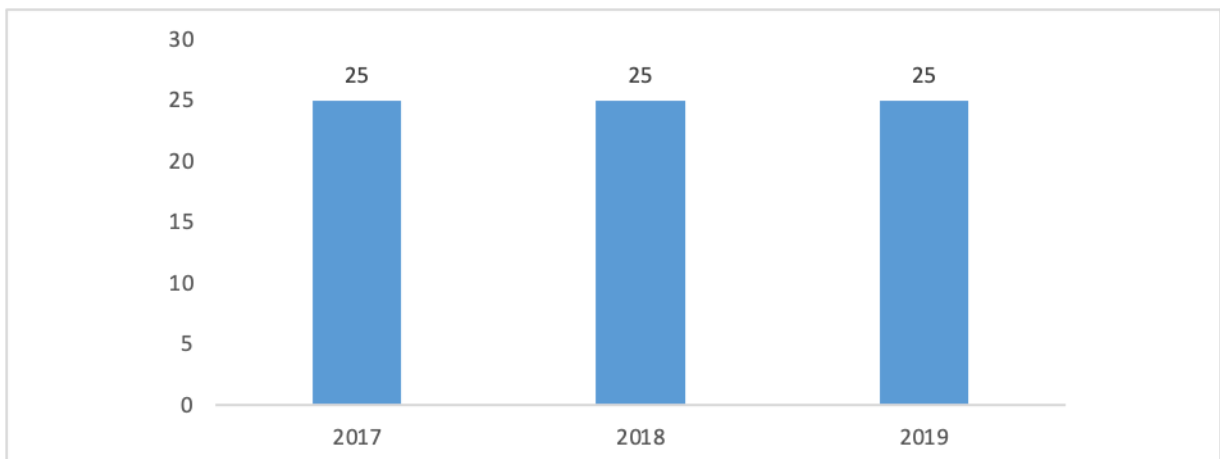
Sejak tahun 2015 hingga Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melayani pengelolaan persampahan di 3 wilayah kecamatan kota yakni Kec. Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan tanete Riattang Timur dengan luas area 121.650 Km².

2.3.2.5.11. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Pola konsumsi, pertambahan jumlah penduduk, dan kemajuan ekonomi menyebabkan produksi sampah di daerah terus bertambah. Jika tidak ditangani dengan baik, maka sampah bisa menjadi masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam bab tentang tugas dan kewenangan, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Persentase jumlah sampah yang tertangani dalam kurun waktu 2017-2019 belum banyak menunjukkan perbaikan. Dalam tiga tahun tersebut, persentase sampah yang tertangani konsisten mencapai 25 persen.

Gambar 2.114. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Kabupaten Bone Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

Berdasarkan data tahun 2017 yang tersedia terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, tercatat jumlah volume sampah tahun tersebut mencapai 134.950 ton, namun yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah hanya 80.970 atau 60 persen dari total volume sampah. Volume sampah yang jumlahnya terus bertambah, paling besar berasal dari lima kecamatan yaitu Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu. Tercatat, tahun 2017 sebanyak 9.847 ton sampah diproduksi oleh kecamatan Tanete Riattang, 8.949 ton berasal dari Tanete Riattang Barat, 7.420 ton bersumber dari TR Timur, sebanyak 6.821 ton dan 8.365 ton datang dari Tellu Siattinge, dan Kahu. Total volume sampah yang dihasilkan di lima kecamatan tersebut mencapai 1/3 dari seluruh sampah Kabupaten Bone.

Tabel 2. 48. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bone Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019 (dalam persen)

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	Persentase Yang Ditangani
1	Bontocani	300	2.715,6	4,74
2	Kahu	400	8.365,8	2,57
3	Kajuara	400	5.515,15	3,11
4	Salomekko	300	2.469,6	5,16
5	Tonra	300	3.438,3	6,00
6	Patimpeng	300	5.420,25	4,68
7	Libureng	300	5.161,1	2,38
8	Mare	300	5.318,05	3,12
9	Sibulue	400	4.438,4	3,23
10	Cina	400	4.376,35	3,87
11	Barebbo	400	2.792,25	3,92
12	Ponre	100	4.234	1,54
13	Lappariaja	200	2.792,25	2,03
14	Lamuru	300	4.234	2,90
15	Tellu Limpoe	100	4.445,7	1,85
16	Bengo	300	2325,05	2,89
17	Ulaweng	200	4.4449,35	2,15
18	Palakka	300	4.989,55	2,66
19	Awangpone	300	6.007,9	2,68
20	Tellu Siattinge	300	6.821,85	1,89
21	Amali	300	3.821,55	3,37
22	Ajangale	400	4.737,7	3,63
23	Dua Boccoe	400	5.347,25	3,30
24	Cenrana	300	3.971	3,30
25	TR Barat	24.420	8.949,8	99,59
26	TR Timur	20.000	7.420,45	98,38
27	Tanete Riattang	26.700	9.847,7	98,98
Total		80.970	134.950	60,00

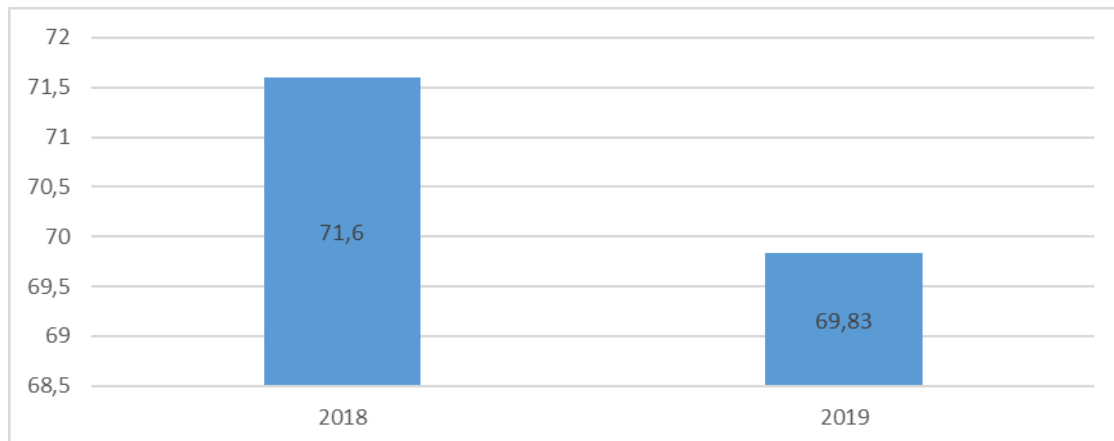
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

Banyaknya sampah yang diproduksi Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu membuat pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam menangani. Hanya Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur yang angka persentase penanganan sampahnya masing-masing mencapai 98,98 persen, 99,59 persen, dan 98,38 persen atau hanya sekitar kurang lebih 1 persen volume sampah tahun 2019 yang belum tertangani. Sementara di Kecamatan Tellu Siattinge dan Kahu hanya mampu menangani 1,89 persen dan 2,57 persen dari sampah yang mereka produksi.

2.3.2.5.12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota

Penilaian Program Adipura Tahun 2018, Nilai TPA Passippo 71,60 poin. Di tahun 2019, terjadi penurunan nilai TPA dengan capaian 69,83 poin. Penurunan poin ini mengindikasikan bahwa pemerinth perlu menaruh perhatian pada perbaikan operasional TPA Passippo.

Gambar 2.115. Nilai TPA Passippo Kabupaten Bone Tahun 2018-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2020

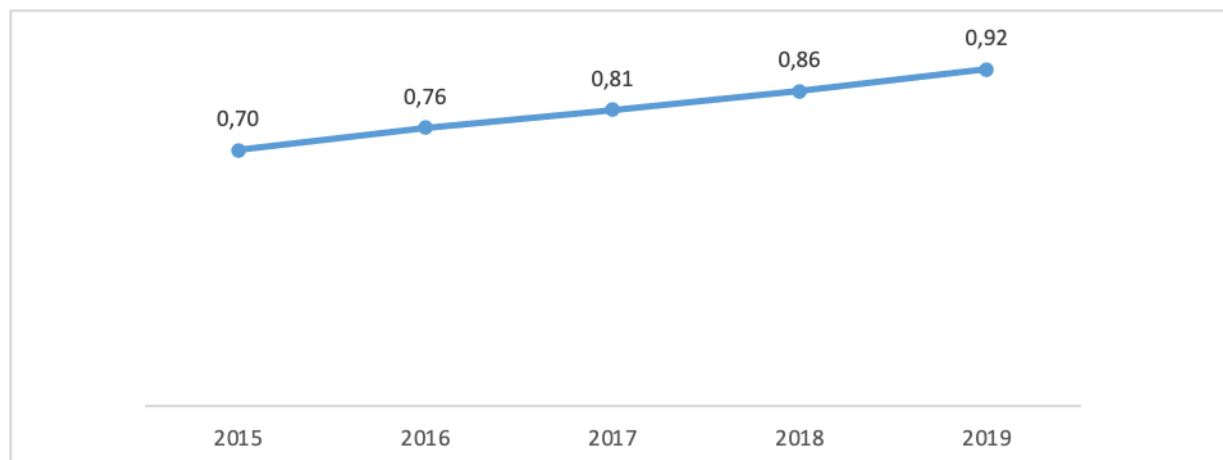
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Era otonomi daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan cara mendistribusikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Hal ini termasuk pelayanan administrasi kependudukan dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Wujud nyata pelayanan administrasi kependudukan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat sebagai bukti autentik hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan ini dapat meliputi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Kepemilikan dokumen kependudukan ini pada akhirnya menunjukkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal kepemilikan KTP oleh penduduk Bone, terjadi peningkatan rasio penduduk yang telah memiliki KTP dalam kurun waktu 2015-2019. Hingga pada tahun 2019, rasio penduduk yang telah memilih KTP telah mencapai 0,92, jauh melampaui capaian di tahun 2015 dengan nilai rasio 0,70.

Gambar 2.116. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk/Jiwa Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

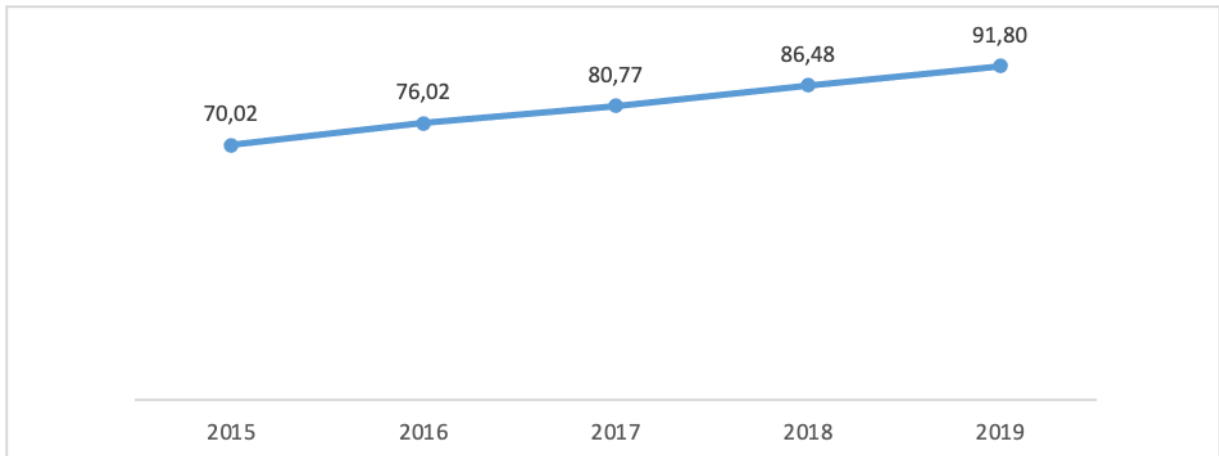
2.3.2.6.2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Membaiknya rasio penduduk yang telah memiliki KTP di Bone juga diikuti dengan konsistensi penggunaan KTP nasional berbasis NIK. Dalam kurun waktu 2015-2019, penduduk Bone konsisten telah menggunakan KTP berbasis NIK atau KTP-EL.

2.3.2.6.3. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penduduk yang telah memiliki KTP berbasis NIK juga meningkat dalam rentang waktu 2015-2019. Di tahun 2019, hampir seluruh penduduk di Bone telah menggunakan KTP berbasis NIK (91,80%). Capaian ini jauh melampaui capaian di tahun 2015 dengan nilai cakupan penduduk baru mencapai 70,02 persen.

Gambar 2.117. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (yang Memiliki KTP-EL /Jiwa) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

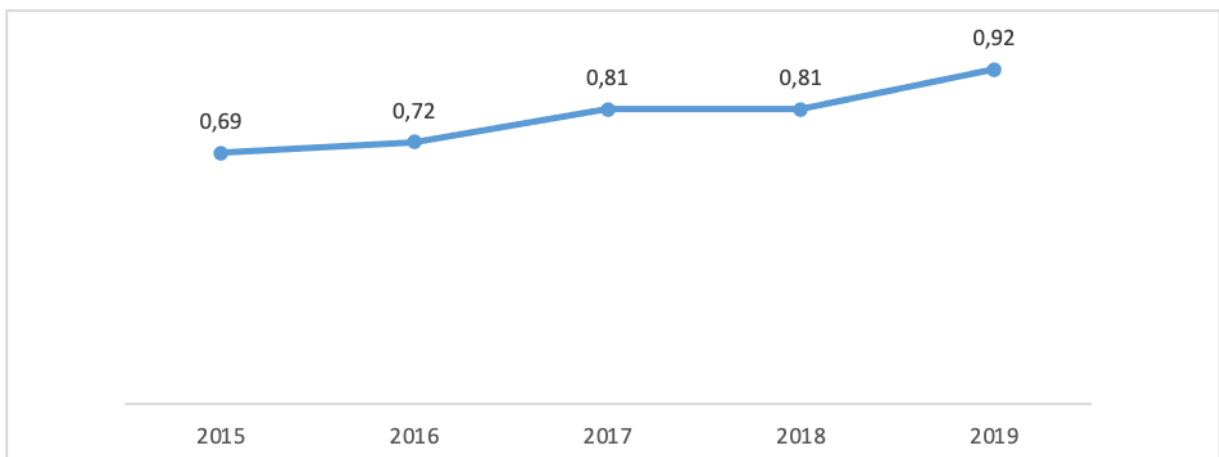


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.4. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk juga dapat tercermin dalam indikator rasio bayi yang memiliki akte kelahiran. Dalam kurun waktu 2015-2019, angka rasio untuk indikator ini telah mencapai 0,92, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian rasio sebesar 0,81. Capaian di tahun 2019 jauh telah membaik jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 dengan nilai rasio hanya mencapai 0,69.

Gambar 2.118. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

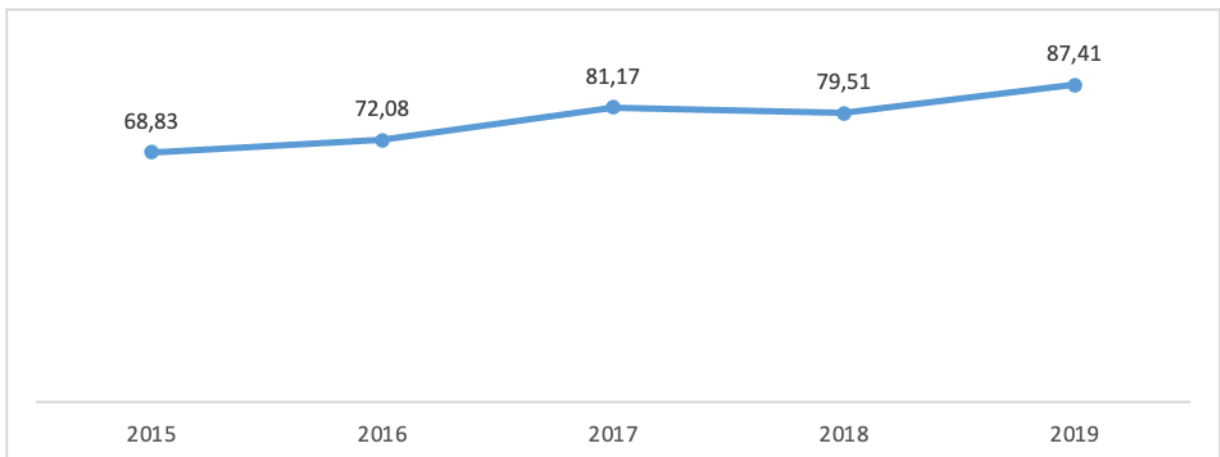


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.5. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tren cakupan penduduk yang sudah menerima akta kelahiran Bone menunjukkan perbaikan yang sangat impresif dalam kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2019, cakupan penerbitan akta telah mencapai 87,41 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun 2015 yang baru mencapai 68,83 persen. Hal ini terjadi mengingat tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri sebagai warga negara.

Gambar 2.119. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.3.2.6.6. Ketersediaan Data Kependudukan Skala Kabupaten

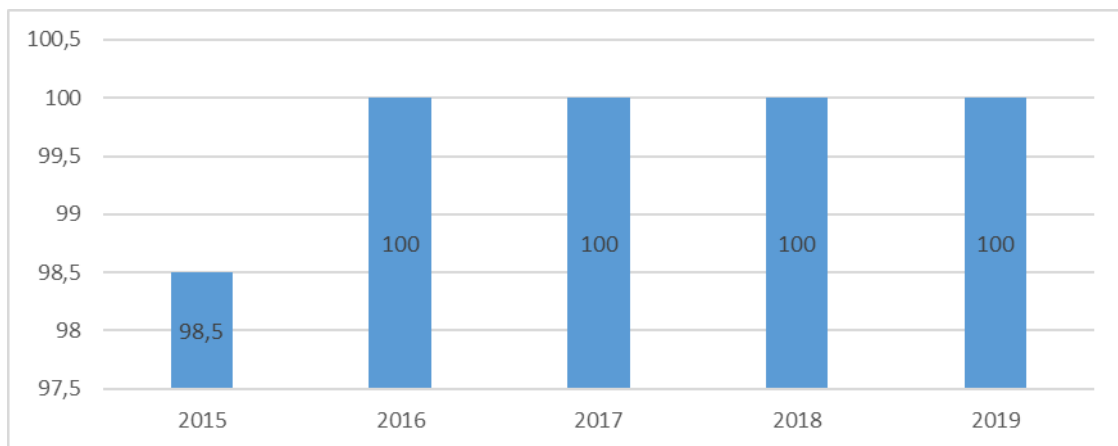
Dokumentasi mengenai kondisi kependudukan Bone ditunjukkan melalui publikasi Profil kependudukan Kabupaten Bone yang diterbitkan berkala tiap tahun. Dokumen ini konsisten terpublikasi dalam kurun waktu 2015-2019.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pada tahun 2015 dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 pihak Pemerintah Desa banyak yang memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana kantor Desa melalui Dana APBD Desa sampai dengan sekarang. Hal ini membuat cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mulai meningkat sejak tahun 2015, dimana pada tahun tersebut terdapat 98,50 persen dari seluruh sarana dan prasarana perkantoran desa yang berada dalam kondisi baik. Di dua tahun berikutnya, angka ini telah mencapai titik maksimum di mana cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik telah mencapai seratus persen (100%).

Gambar 2 120. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

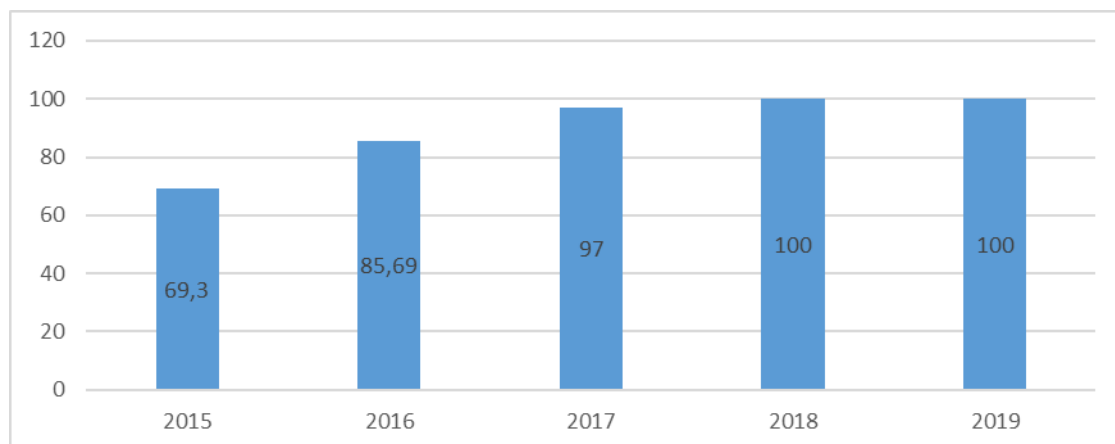


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2020

2.3.2.7.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan cukup meningkat terlihat dengan presentase jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada setiap Desa di 24 kecamatan. Di tahun 2016, persentase LPM yang terbina telah mencakup 85,69 persen, cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka persentase 69,30 persen. Peningkatan persentase LPM yang terbina kembali terjadi di tahun 2017 dengan angka persentase mencapai 97 persen dan tahun 2020 mencapai 100 persen. Peningkatan LPM yang terbina tiap tahunnya didorong oleh adanya Bantuan Dana dengan berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan di Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini berdampak pada peningkatan kegiatan pembelajaran kepada LPM tentang mekanisme pengelolaan organisasi.

Gambar 2.121. Persentase jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang Terbina Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019

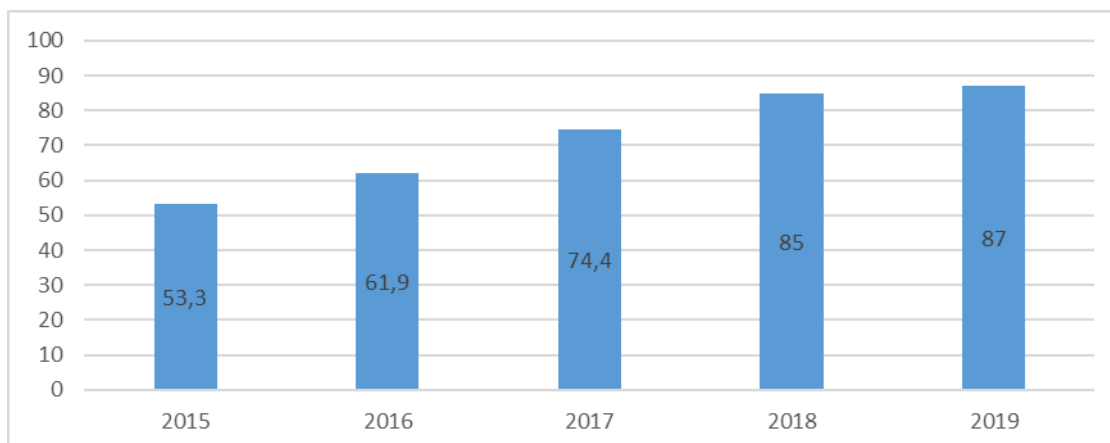


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2020

2.3.2.7.3. Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pemerintah sekaligus secara mandiri menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat. Persentase LSM yang terdaftar dan masih aktif mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2019 terdapat 87 persen LSM yang masih beraktifitas, cukup meningkat dibandingkan capaian di tahun 2015 dan 2016 dengan persentase LSM yang aktif masing-masing mencapai 55,30 persen dan 61,90 persen.

Gambar 2.122. Presentase LPM aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

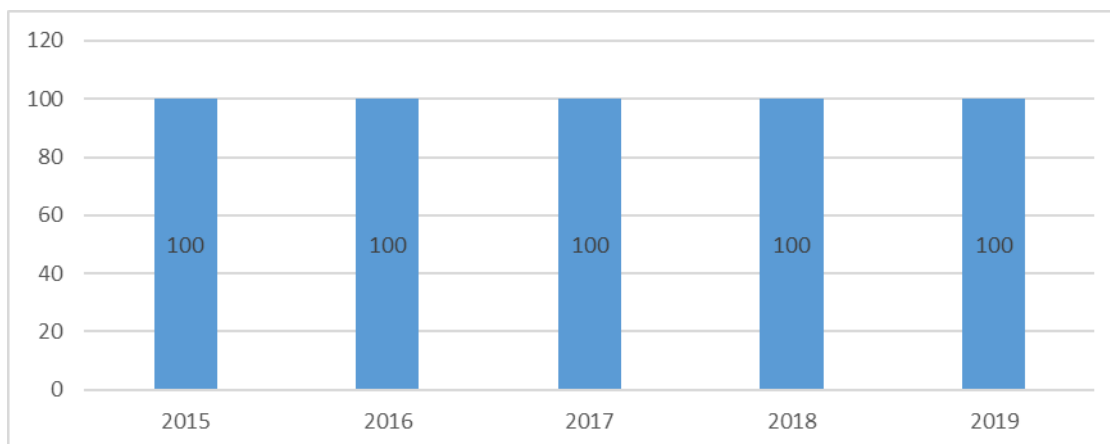


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2018

2.3.2.7.4. Persentase PKK aktif

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten, baik berupa kegiatan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah, mengakibatkan motivasi dan partisipasi dari seluruh kader PKK untuk semakin aktif. Dari tahun 2015 sampai 2019, persentase PPK yang aktif di Bone selalu mencapai seratus persen (100%).

Gambar 2.123. Presentase PKK aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



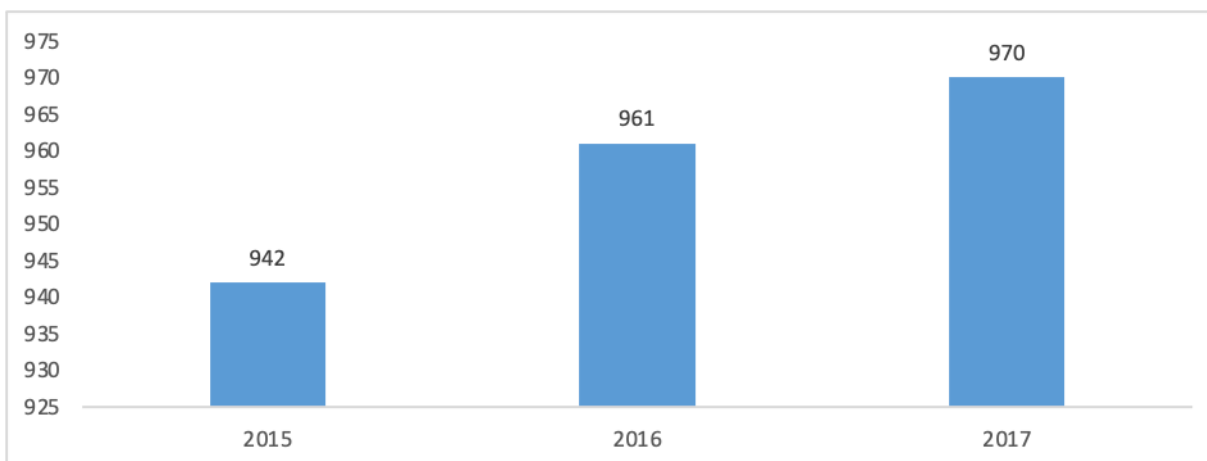
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2020

2.3.2.7.5. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak.

Selama tahun 2015 sampai 2017, jumlah posyandu aktif di Kabupaten Bone mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, Kabupaten Bone memiliki 942 posyandu aktif. Upaya pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan membuat jumlah posyandu aktif meningkat menjadi 961 di tahun 2016 dan akhirnya mencapai 970 posyandu aktif tahun 2017.

Gambar 2.124. Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

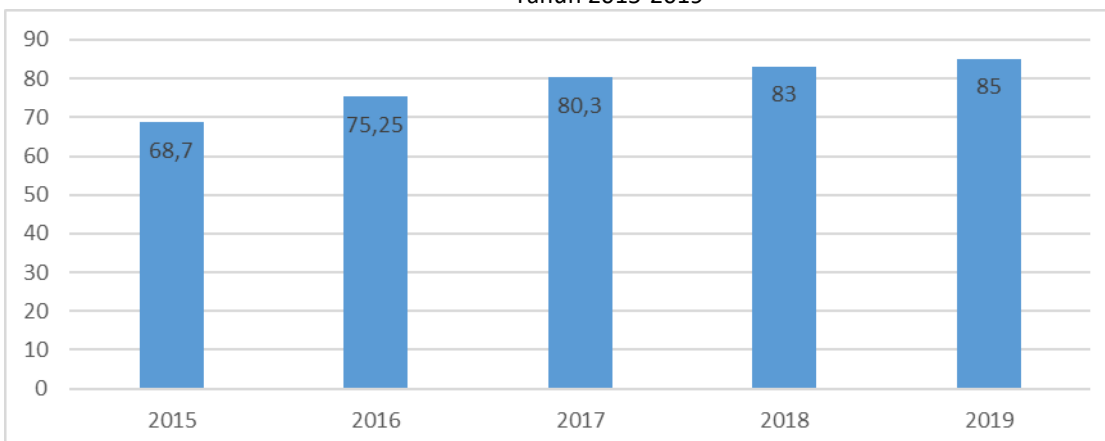


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2018

2.3.2.7.6. Swadaya Masyarakat Terhadap Program pemberdayaan Masyarakat

Persentase program pemberdayaan masyarakat yang mendapatkan swadaya masyarakat dalam berjalannya program tersebut terus meningkat dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2015 persentase jumlah program yang mendapat swadaya masyarakat baru mencapai 80,30 persen, kemudian terus meningkat sampai tahun 2019 dengan capaian 85 persen.

Gambar 2.125. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, 2020

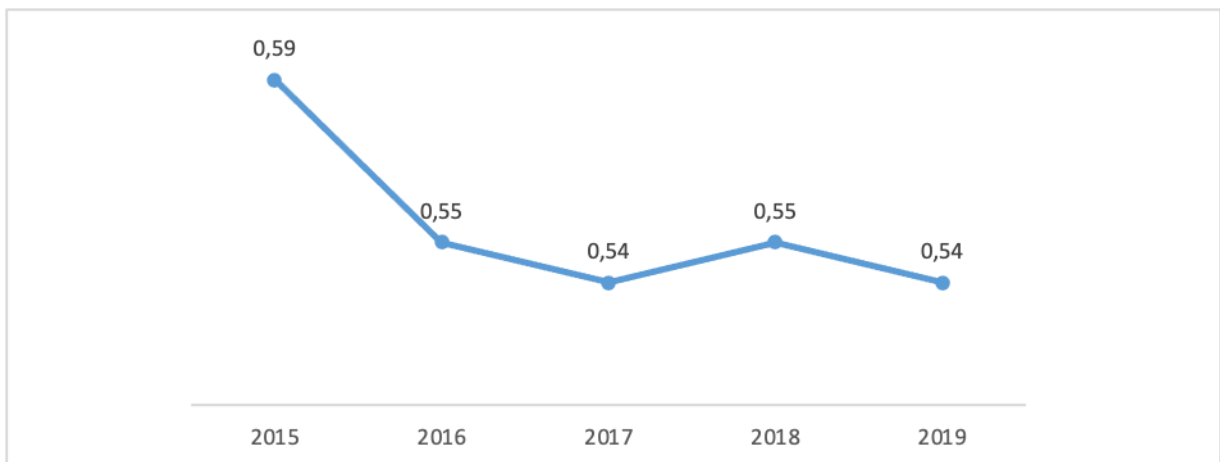
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk pada tingkatan tertentu harus dikendalikan. Jika pertumbuhan terlalu lambat akan berakibat pada berkurangnya partisipasi penduduk pada kegiatan perekonomian dalam satu wilayah. Sementara jika terlalu cepat, pertumbuhan penduduk pada kelompok pendapatan yang rentan dapat berimplikasi pada masalah sosial baru.

Sepanjang tahun 2015 sampai 2019, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Bone. Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Bone bertumbuh sebesar 0,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Bone, membuat di tahun 2016 dan 2017 laju penduduk kembali melambat dari 0,55 persen ke 0,54 persen. Capaian di tahun 2017 ini berlanjut di tahun 2019 dengan capaian laju pertumbuhan penduduk adalah 0,54.

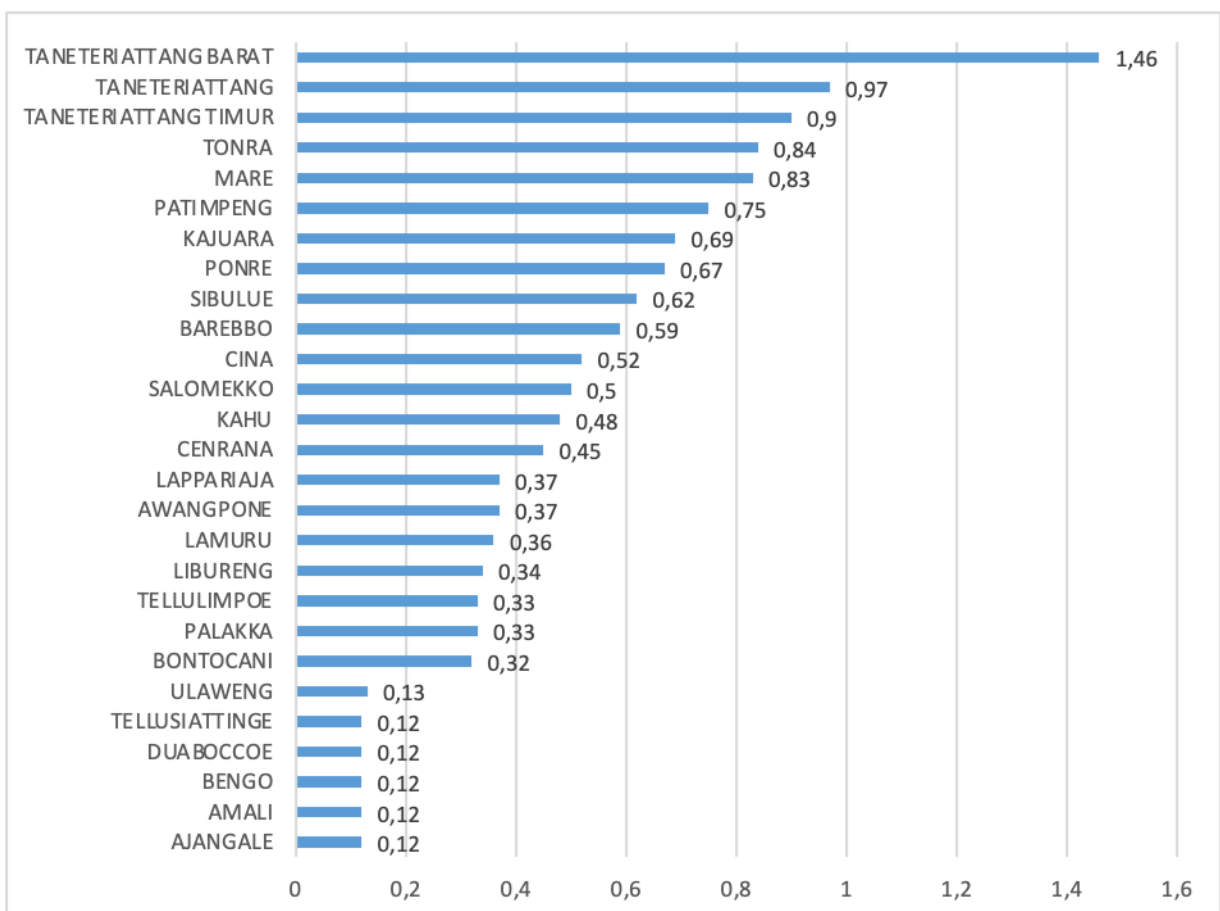
Gambar 2.126. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bone, 2020

Lima kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di tahun 2019 adalah Tanete Riattang Barat sebesar 1,46 persen, Tanete Riattang 0,97 persen, Tanete Riattang Timur 0,90 persen, Tonra 0,84 persen, dan Mare 0,83 persen. Sementara lima kecamatan di Kabupaten Bone dengan laju pertumbuhan paling rendah berada di Bengo, Tellu Siattinge, Amali, Ajangale, dan Dua Bocoe masing-masing sebesar 0,12 persen.

Gambar 2.127. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2019



Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka, 2020

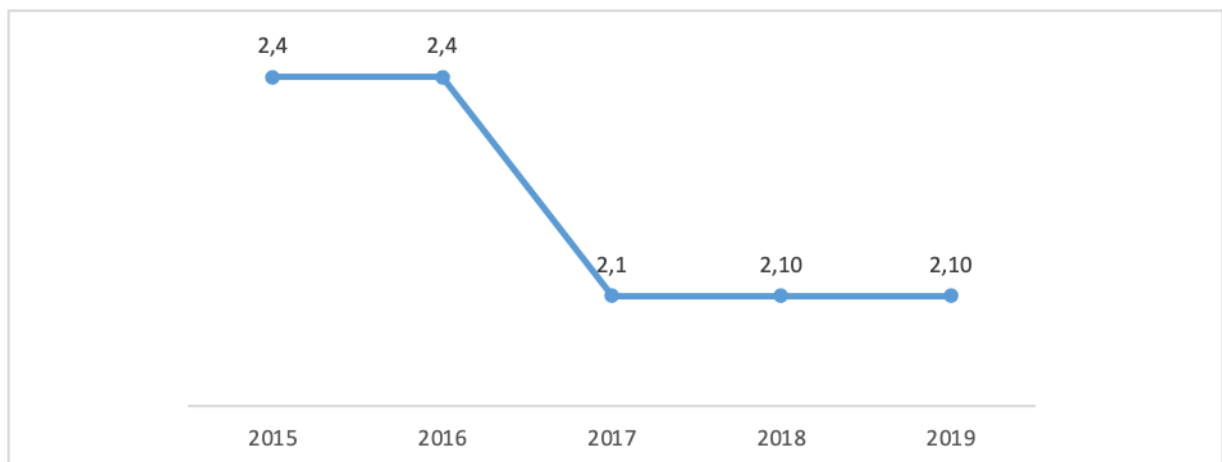
2.3.2.8.2. Total Fertility Rate (TFR)

Melambatnya laju pertumbuhan penduduk Bone dalam kurun waktu 2015-2019 dapat disebabkan karena tingkat kesuburan atau TFR juga menunjukkan tren melambat dalam kurun waktu yang sama. TFR pada akhirnya menunjukkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan

pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Konsep Definisi TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Sejak tahun 2015 dan 2016 angka TFR Kabupaten Bone konstan di 2,4, menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai dua anak selama masa usia suburnya. Capaian ini sedikit menurun di tahun 2017 sampai tahun 2019, dimana TFR Kabupaten Bone pada waktu tersebut mengalami penurunan menjadi 2,1.

Gambar 2.128. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bone tahun 2015-2019

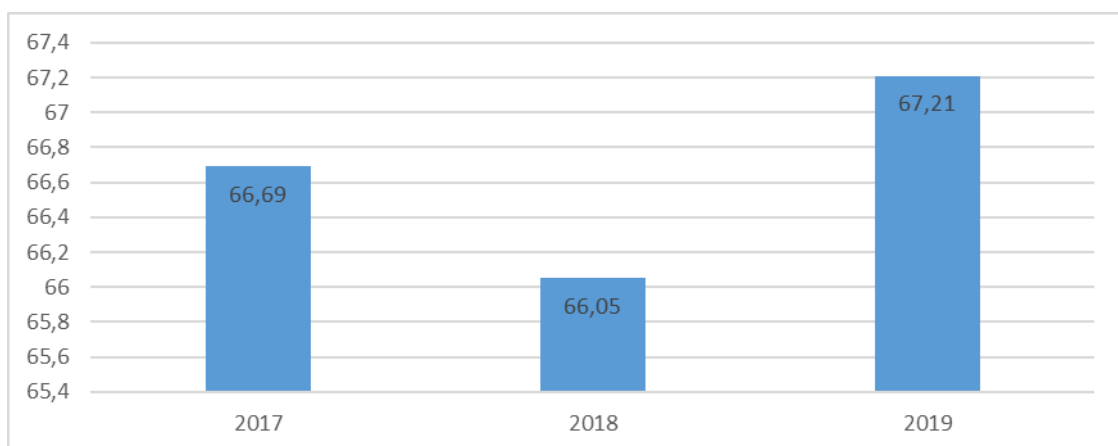


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.3. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi CPR maka semakin banyak perempuan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi, begitupun sebaliknya. Angka pemakaian CPR Kabupaten Bone mengalami kecenderungan yang meningkat dalam rentang tahun 2017-2019. Pada tahun 2017, dari semua pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bone, sebanyak 66,69 persen telah menggunakan alat kontrasepsi. Angkanya sempat turun di tahun berikutnya menjadi 66,05 persen, sebelum akhir mengalami kenaikan 67,21 persen di tahun 2019.

Gambar 2.129. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15– 49 Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2017-2019

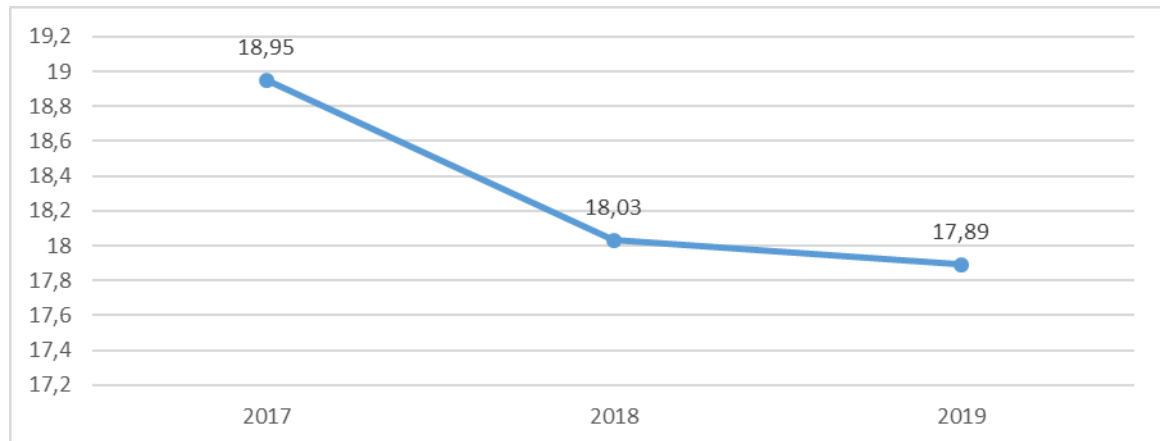


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.4. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need KB merupakan kebutuhan pasangan usia subur (PUS) untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, cakupan PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan KB-nya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 cakupan PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan KB-nya mencapai 18,95 persen. Hingga memasuki tahun 2018 dan 2019 pemerintah daerah berhasil menurunkan proporsi PUS menjadi masing-masing 18,03 persen dan 17,89 persen.

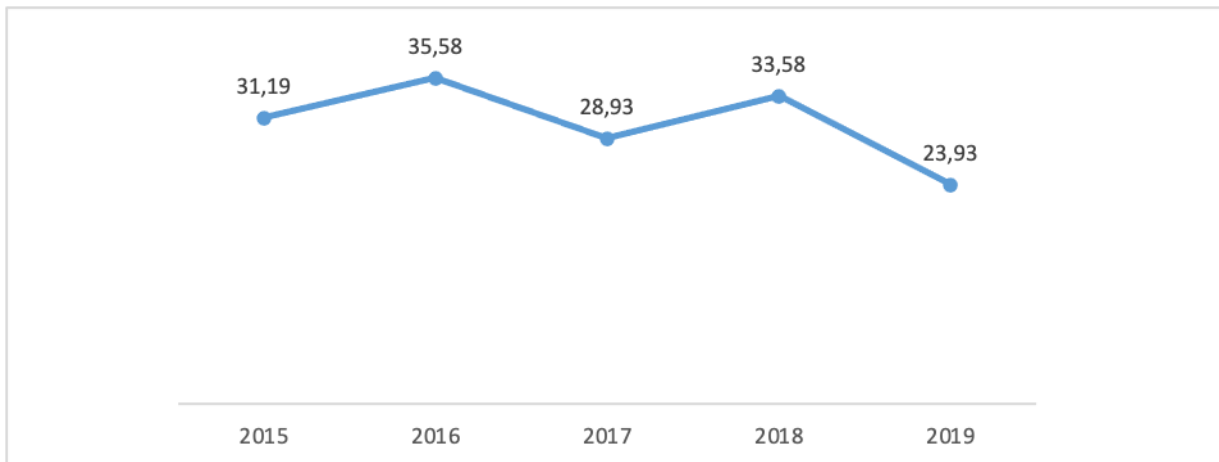
Gambar 2.130. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*) di Kabupaten Bone 2017-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Gambar 2.131. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Bone, 2020

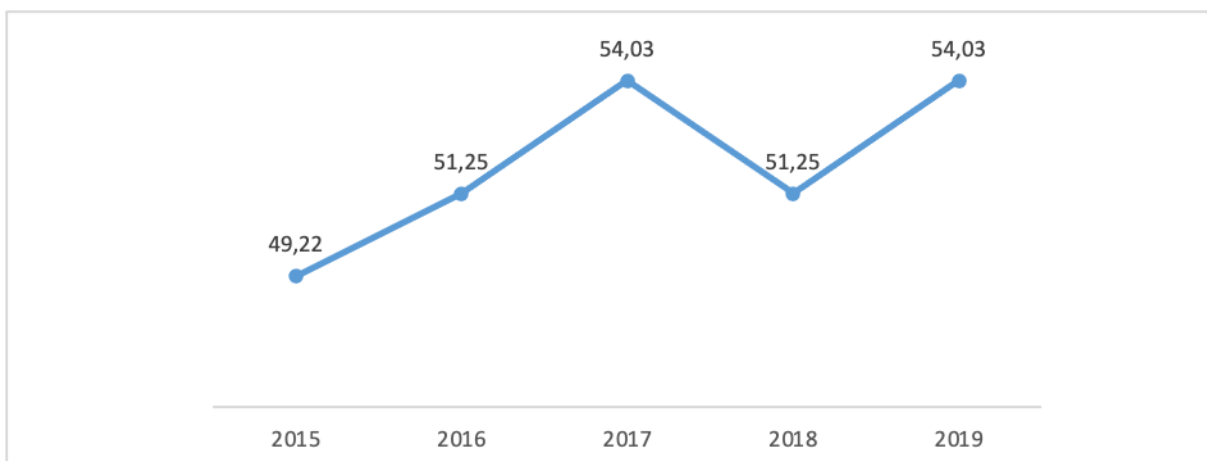
Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan penduduk adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP). MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase penggunaan MKJP di Bone cenderung menurun. Meski sempat terjadi peningkatan di tahun 2016, yaitu dari 31,19 persen di tahun 2015 menjadi 35,58 persen, persentase penggunaan MKJP menurun di tahun 2017 menjadi 28,97 persen. Fluktuasi sempat terjadi di tahun 2018 dengan terjadi peningkatan angka persentase menjadi 33,58 persen. Hingga di tahun 2019, persentase pengguna MKJP kembali menurun menjadi hanya mencapai 23,93 persen.

2.3.2.8.6. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Salah satu caranya adalah membentuk Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial dan emosional yang berlangsung antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Tidak hanya itu, BKB juga dapat menjadi sarana pemerintah daerah untuk mengampanyekan pentingnya mengendalikan kelahiran melalui penggunaan KB.

Efektifitas program BKB ini terlihat dari cenderung meningkatnya angka cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Di tahun 2015 cakupan anggota BKB yang mengikuti program KB mencapai 49,22 persen. Angka ini terus meningkat di tahun 2016 dan 2017 dengan capaian masing-masing adalah 51,25 persen dan 54,03 persen. Meski sempat menurun di tahun 2018 (51,25%), di tahun 2019 angka cakupan anggota BKB yang ber-KB kembali mencapai 54,03 persen.

Gambar 2.132. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

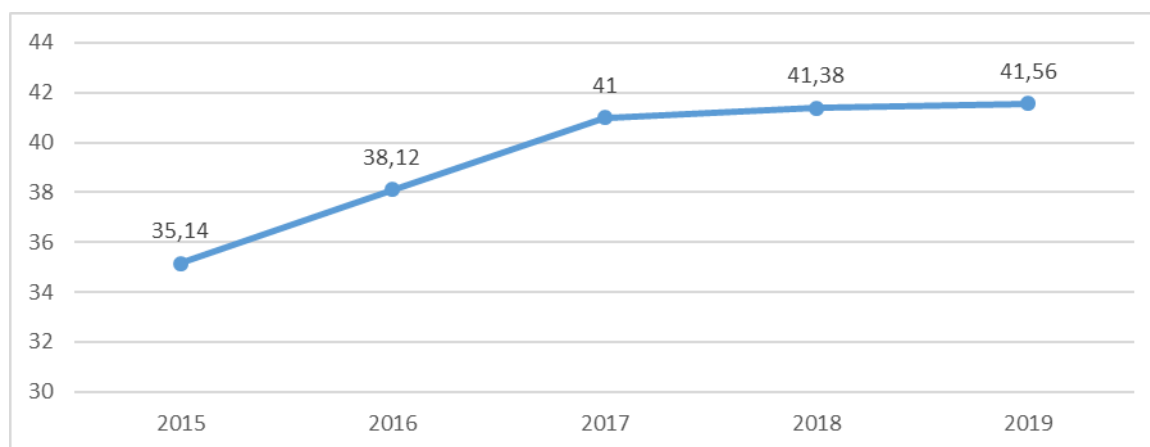


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.7. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB di Kabupaten Bone juga cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2015-2017. Sebanyak 35,14 persen anggota BKR di tahun 2015 sudah mengikuti program KB. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menambah cakupan anggota BKR di Kabupten Bone untuk terlibat dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk sehingga persentasenya meningkat di tahun 2016 menjadi 38,12 persen. hingga pada tahun 2019, angka cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone sudah mencapai 41,56 persen.

Gambar 2.133. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

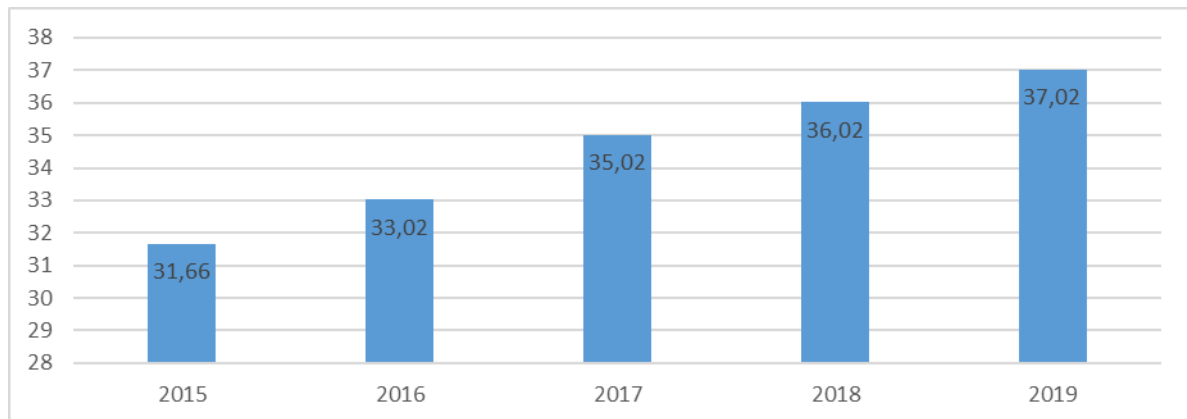


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.

Gambar 2.134. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



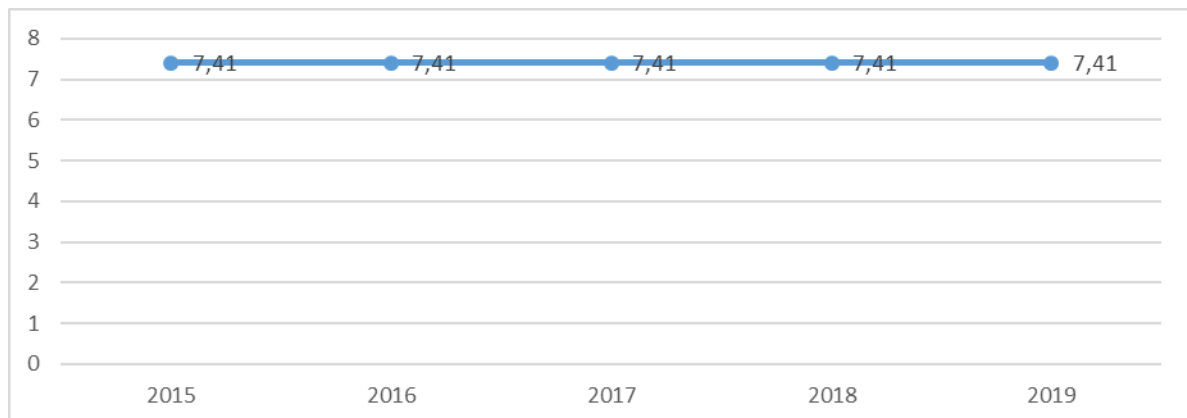
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bone, 2020

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Bone yang mengikuti program KB juga mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, cakupan lansia anggota BKL yang ber-KB mencapai 31,66 persen. Di dua tahun terakhir, proporsi anggota BKL yang terlibat menggunakan KB kembali bertambah, masing-masing 33,02 persen tahun 2016 dan 37,02 persen tahun 2019.

2.3.2.8.9. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Disetiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 19 Tahun 2017 diartikan sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kegiatan dan atau rangkaian pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Dalam regulasi ini, PPKS penting keberadaanya untuk mewujudkan sebuah keluarga harmonis.

Gambar 2.135. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone 2015-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bone, 2020

Dalam rentang tahun 2015-2019, jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Bone belum mengalami perubahan. Persentase jumlah PPKS terhadap jumlah kecamatan di Bone dalam rentang tahun tersebut masih 7,41 persen atau baru terdapat dua (2) PPKS yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.

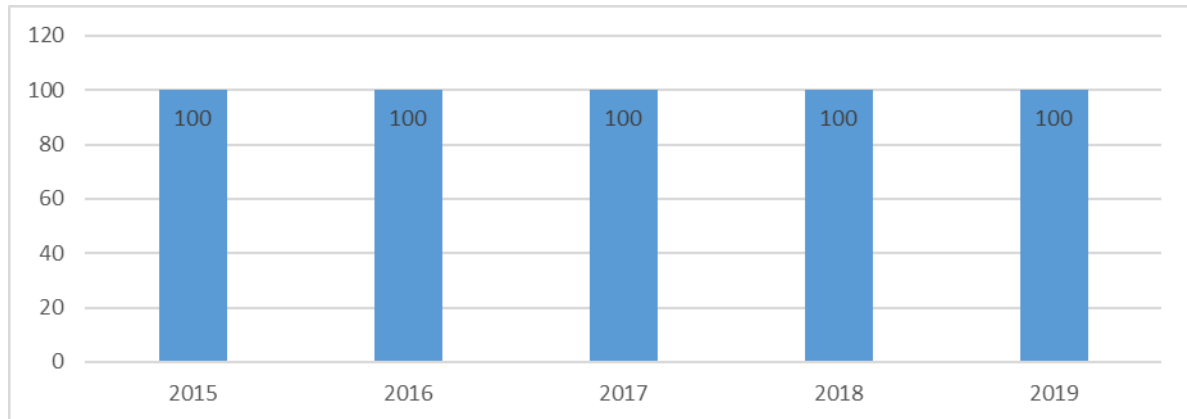
2.3.2.8.10. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena peranya yang penting, maka pelibatan PKB/PLKB dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, seluruh PKB/PLKB telah terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten

Bone atau telah mencakup seratus (100) persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bone.

Gambar 2.136. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

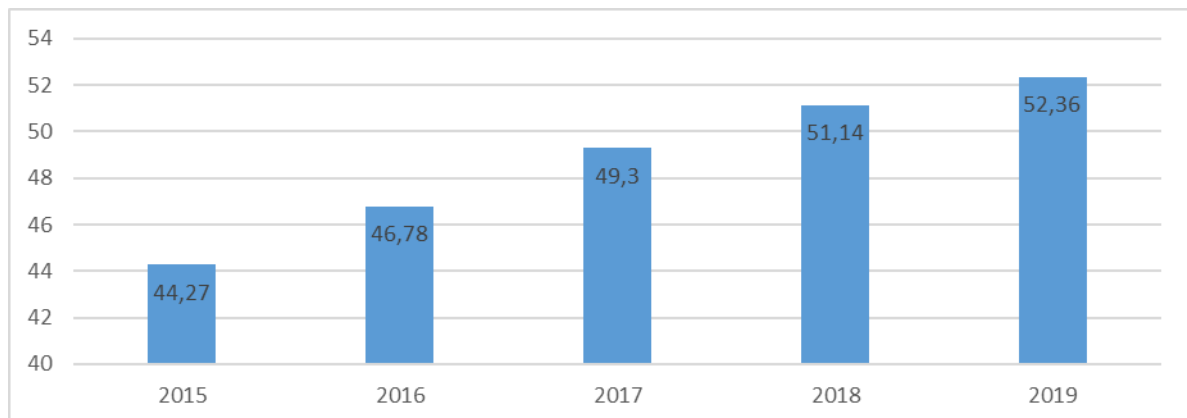


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.11. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan yang akan mendorong keluarga dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Tujuan UPPKS mencakup kegiatan yang mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga yang sejahtera diharapkan akan menjadi peserta KB mandiri.

Gambar 2.137. Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, 2020

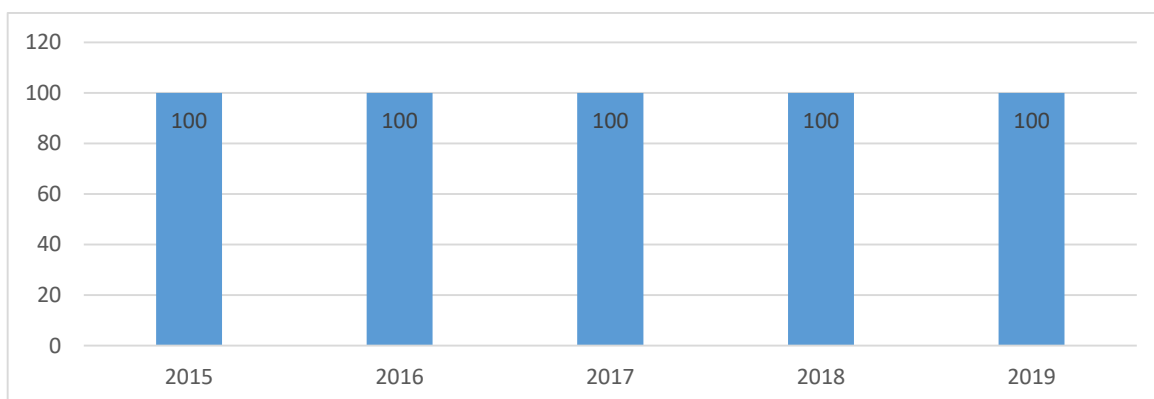
Anggota UPPKS di Kabupaten Bone yang ber-KB mandiri cenderung mengalami peningkatan. Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri pada tahun 2015 hanya mencapai 44,27 persen. Cakupan PUS yang ber-KB terus meningkat setiap tahun sampai pada tahun 2017 menjadi 49,30 persen. Meskipun anggota UPPKS yang ber-KB mandiri mengalami peningkatan setiap tahun, sampai pada tahun 2019, cakupannya telah mencapai lebih dari 50 persen.

2.3.2.8.12. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa atau kelurahan. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan

petugas pembantu harus disebar di semua desa. Di Kabupaten Bone, rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bone sudah mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Bone yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Gambar 2.138. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Kab. Bone (persen), Tahun 2015-2019

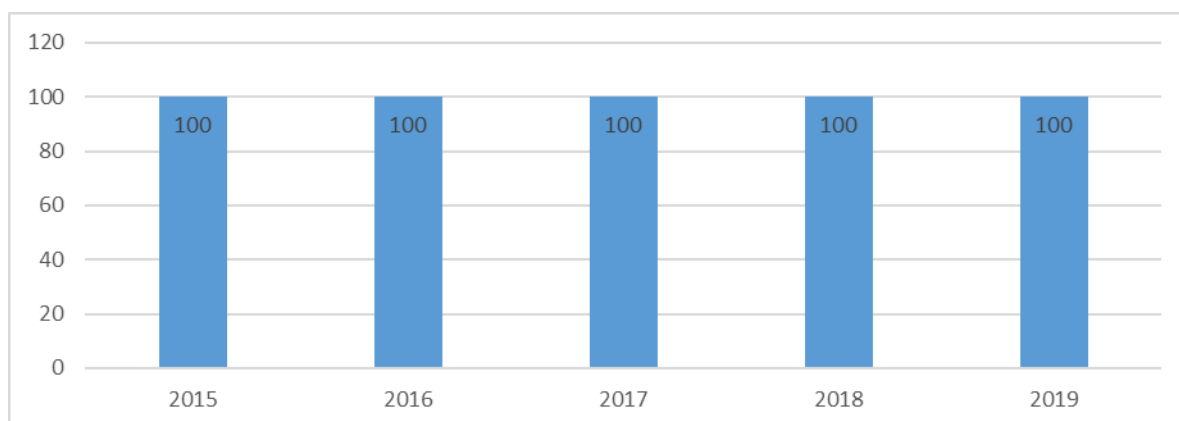


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.13. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Usaha pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian penduduk harus dibarengi dengan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan keduanya merupakan salah satu faktor penentu konsistensi masyarakat dalam mengikuti program KB. Salah satu daerah yang memiliki angka cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100 persen adalah Kabupaten Bone. Capaian ini telah berlangsung sejak tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan stok alat dan obat kontrasepsi untuk mengantisipasi perkiraan permintaan masyarakat.

Gambar 2.139. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

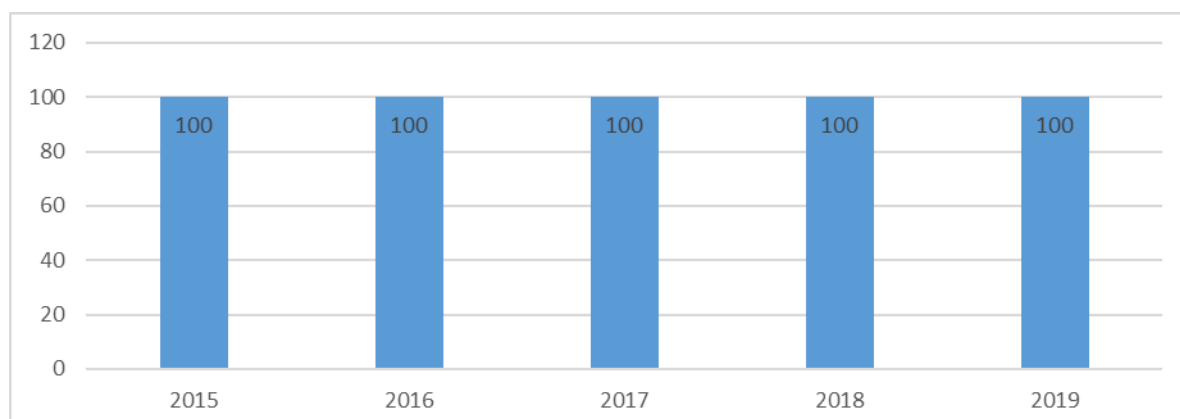


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.14. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) melalui kerjasama antara Faskes dan BPJS Kesehatan. Sepanjang tahun 2015-2019, pemerintah daerah Kabupaten Bone telah memastikan bahwa semua Faskes dan jejaringnya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilihat dari angka persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan telah mencapai 100 persen.

Gambar 2.140. Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

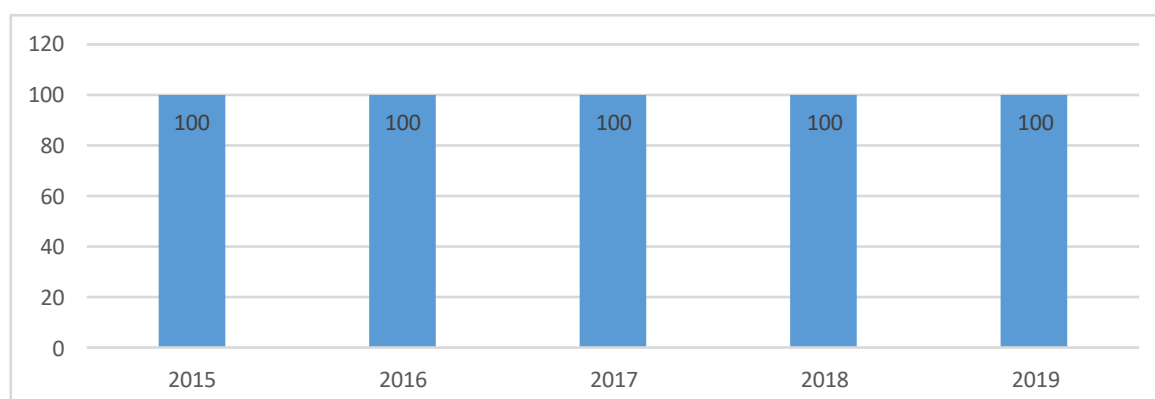


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.15. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa

Salah satu jenis data keluarga yang mesti dikumpulkan adalah data mikro keluarga. Data mikro keluarga adalah data yang memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data keluarga berencana, dan data tahapan keluarga sejahtera untuk menunjang kegiatan operasional program keluarga berencana. Pemerintah Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2019 telah menyediakan informasi data mikro keluarga dilihat dari angka cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa yang sudah mencapai 100 persen.

Gambar 2.141. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



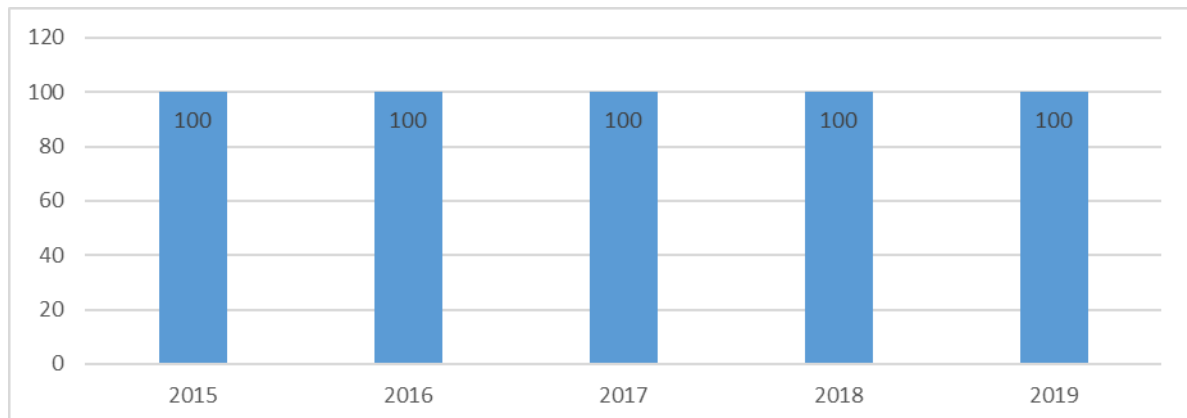
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.16. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Dalam membangun keluarga, ada delapan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga di Indonesia karena dianggap sebagai acuan dan fondasi kehidupan oleh setiap keluarga. BKKBN menyebut bahwa kedelapan fungsi tersebut adalah Fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi pendidikan.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi keluarga di Kabupaten Bone sudah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tak ada satupun anggota kelompok kegiatan di Kabupaten Bone yang tidak melakukan pembinaan keluarga dengan pendekatan delapan fungsi keluarga.

Gambar 2.142. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

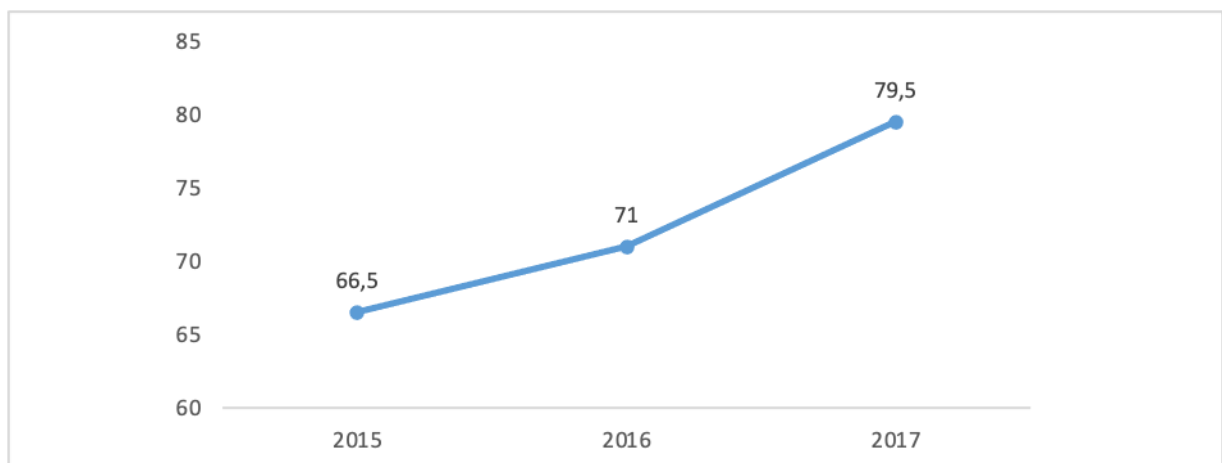


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.8.17. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Bagi keluarga yang memiliki balita, pemahaman dan pelaksanaan pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak merupakan faktor penentu baik atau tidak perkembangan anak. Jika orang tuanya paham bagaimana cara mengasuh dan membina anak sejak balita, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang berkarakter dan berperan dalam lingkungan dan masyarakatnya.

Gambar 2.143. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

Meski belum mencapai 100 persen, angka cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Bone mengalami kenaikan setiap tahun sepanjang tahun 2015-2017. Pada tahun 2015, sebanyak 66,50 persen keluarga telah melaksanakan pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Di dua tahun berikutnya (2016-2017), angka proporsi keluarga ini meningkat masing-masing menjadi 71 persen dan 79,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sudah lebih 2/3 dari jumlah keluarga yang ada. Capaian ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone di tahun 2017 hanya tersisa 20,50 persen keluarga yang punya balita namun masih belum paham dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

2.3.2.9. Perhubungan

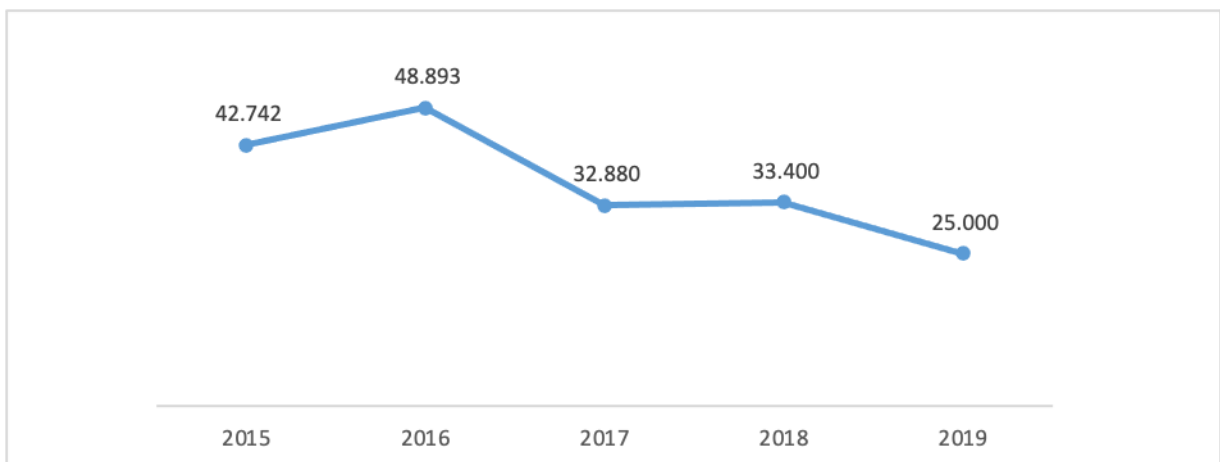
2.3.2.9.1. Jumlah Arus Penumpang

Jumlah arus penumpang secara sederhana menggambarkan seberapa luas cakupan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan dalam aspek perhubungan dari pemerintah daerah.

Semakin besar jumlah arus penumpang yang keluar/masuk menuju suatu daerah akan berimplikasi pada bertambahnya sarana-prasarana perhubungan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Jumlah arus penumpang yang keluar-masuk dari dan ke Bone dalam lima tahun terakhir (2015-2019) mengalami tren penurunan. Di tahun 2015 jumlah penumpang angkutan yang keluar-masuk Bone mencapai 42.742 penumpang, lalu meningkat di tahun selanjutnya dengan jumlah penumpang sebanyak 48.893 penumpang. Selanjutnya, di tahun 2017 arus penumpang berkurang menjadi 32.880 penumpang hingga bertambah kembali di tahun berikutnya menjadi 33.400 penumpang. Sampai di tahun 2019, jumlah penumpang angkutan mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun tersebut arus penumpang hanya mencapai 25.000 penumpang.

Gambar 2.144. Jumlah Arus Penumpang Kabupaten Bone, Tahun 2015-2019

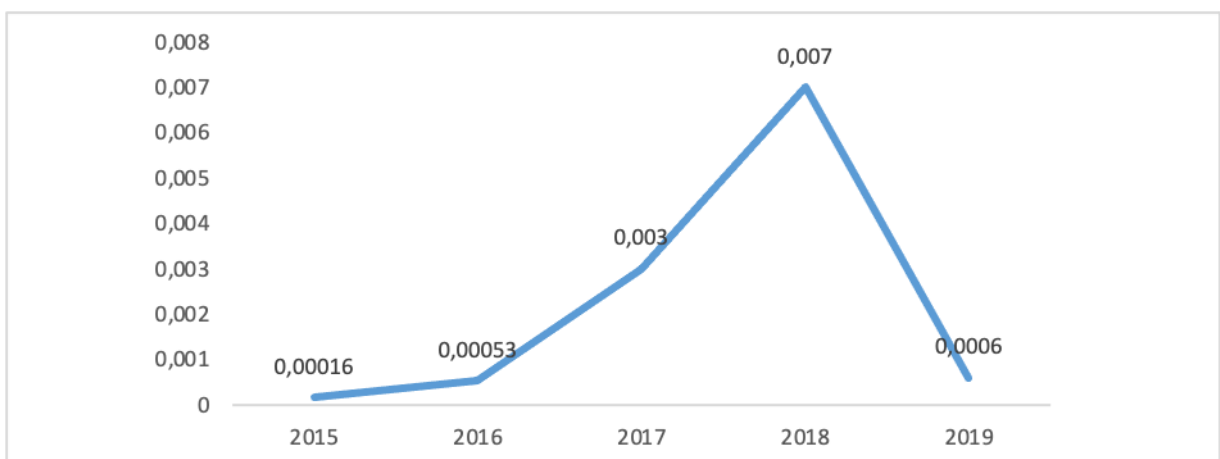


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.2. Rasio Izin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Oleh karena itu, kendaraan yang diperbolehkan mengangkut penumpang adalah kendaraan yang telah memiliki izin trayek. Rasio izin trayek menggambarkan jumlah angkutan umum yang tersedia untuk satuan penduduk tertentu. Dalam lima tahun terakhir, rasio izin trayek di Bone terus menurun disebabkan karena jumlah angkutan yang memiliki izin lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2013, angka rasio izin trayek untuk tiap penduduk mencapai 0,00016, lalu terus meningkat sampai tahun 2018 menjadi 0,007. Angka rasio ini kemudian menurun di tahun 2019 dengan angka rasio mencapai 0,0006.

Gambar 2.145. Rasio Izin Trayek Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

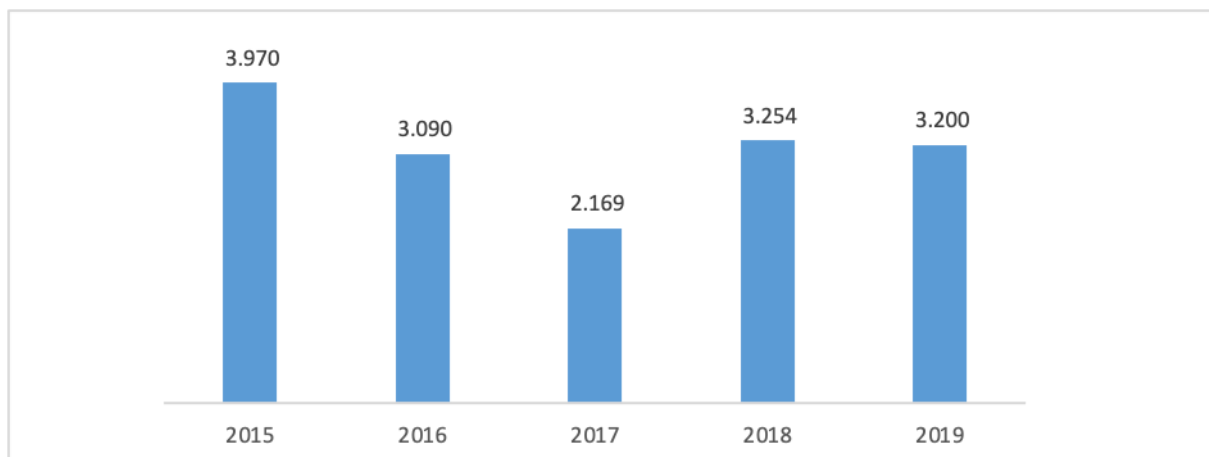


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir merupakan pengujian kendaraan, terutama kendaraan umum, secara berkala untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Namun uji kir yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2018 adalah pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Gambar 2.146. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

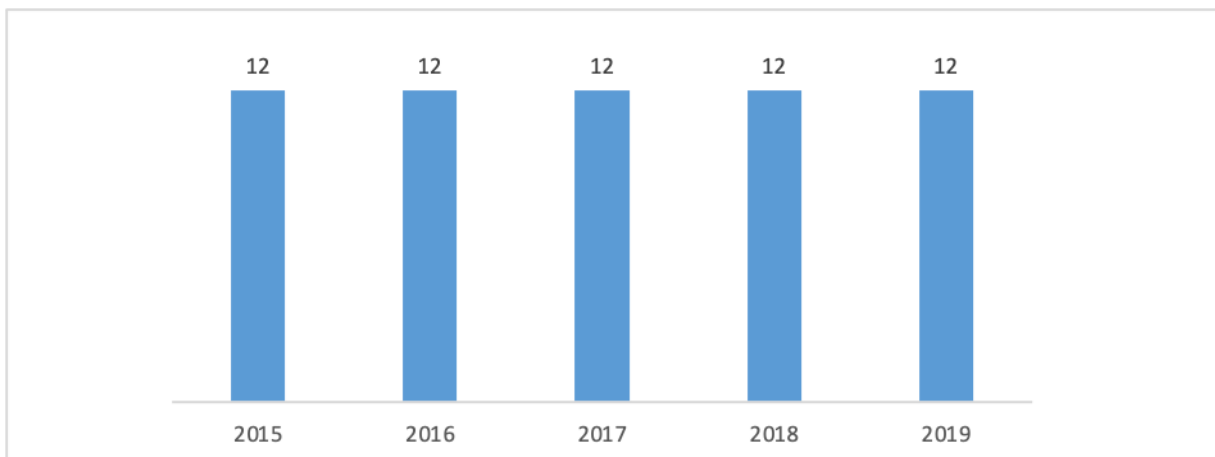
Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, terjadi tren penurunan jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kir. Pada tahun 2015, terdapat 3.970 kendaraan umum di Bone yang melakukan uji kir, lalu terus berkurang sampai pada tahun 2017 menjadi 2.169 kendaraan. Capaian ini kemudian meningkat sampai pada tahun 2019, yaitu dengan capaian jumlah kendaraan sebanyak 3.200 kendaraan. Meski begitu, jumlah kendaraan yang melakukan Uji Kir di tahun 2019 masih lebih rendah dibandingkan capaian di tahun 2015.

2.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah yang maju perekonomiannya tentu didukung oleh ketersediaan infrastruktur laut, udara dan darat yang mampu memfasilitasi mobilitas barang dan jasa serta penduduk dalam suatu daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan dalam jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Sejak tahun 2015 hingga 2019, Bone total memiliki 12 pelabuhan laut, udara, dan terminal bis. Jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah nampaknya perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur ini mengingat pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan perpindahan arus barang dan jasa, sehingga perlu mendapat dukungan infrastruktur.

Gambar 2.147. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

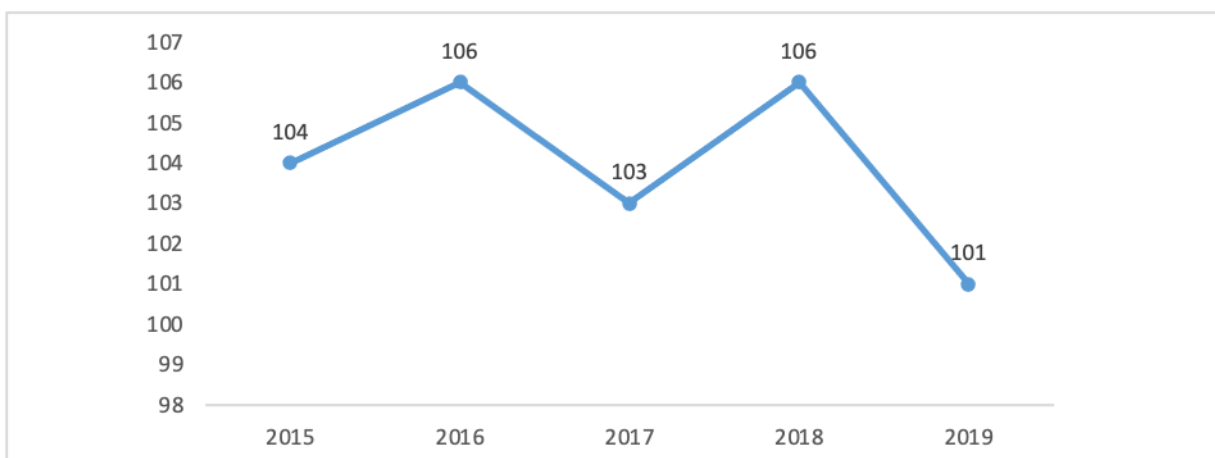


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Secara umum seluruh kendaraan umum yang terdapat di Kabupaten Bone telah melakukan Uji Kir. Angka persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Bone selalu berada di atas 100 persen dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2015, terdapat 104 persen angkutan umum dengan kepemilikan KIR, lalu meningkat menjadi 106 persen di tahun 2016. Hingga di tahun 2019 terdapat 101 persen atas jumlah angkutan umum yang telah memiliki KIR di Kabupaten Bone. Capaian di atas 100 persen ini sekaligus menunjukkan bahwa angkutan umum yang melakukan uji KIR di Bone tidak hanya berasal dari Bone Sendri melainkan juga dari daerah sekitar lainnya.

Gambar 2.148. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

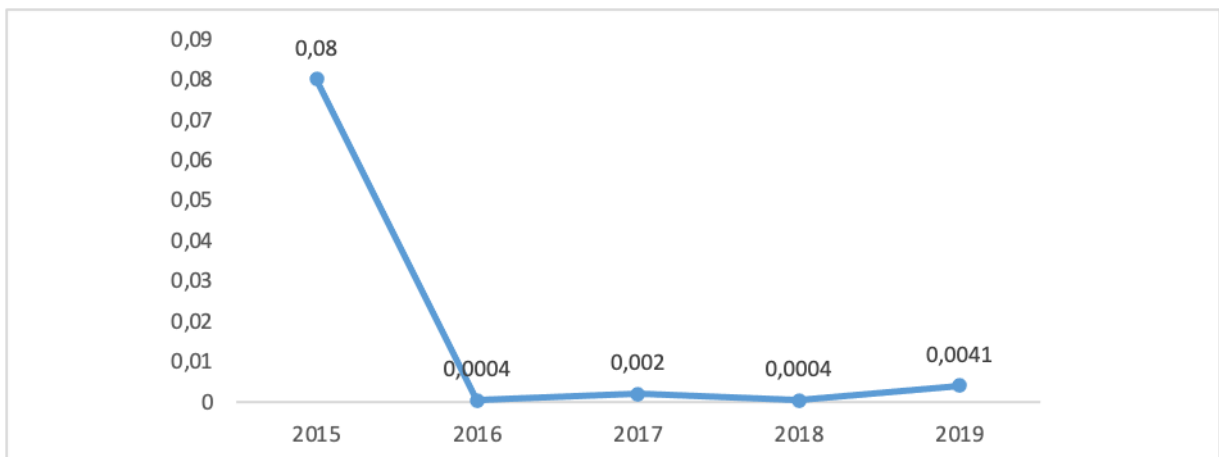


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.6. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat menunjukkan ketersediaan angkutan darat per penumpang angkutan darat. Dalam kurun waktu 2015-2017, persentase layanan angkutan darat di Bone menunjukkan tren penurunan. Di tahun 2015, persentase ketersediaan angkutan darat mencapai 0,08 persen lalu menurun sampai di tahun 2019 dengan nilai persentase mencapai 0,0041 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penambahan penumpang setiap tahunnya belum diikuti dengan penambahan armada angkutan darat sehingga cakupan layanan angkutan darat cenderung semakin berkurang.

Gambar 2.149. Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

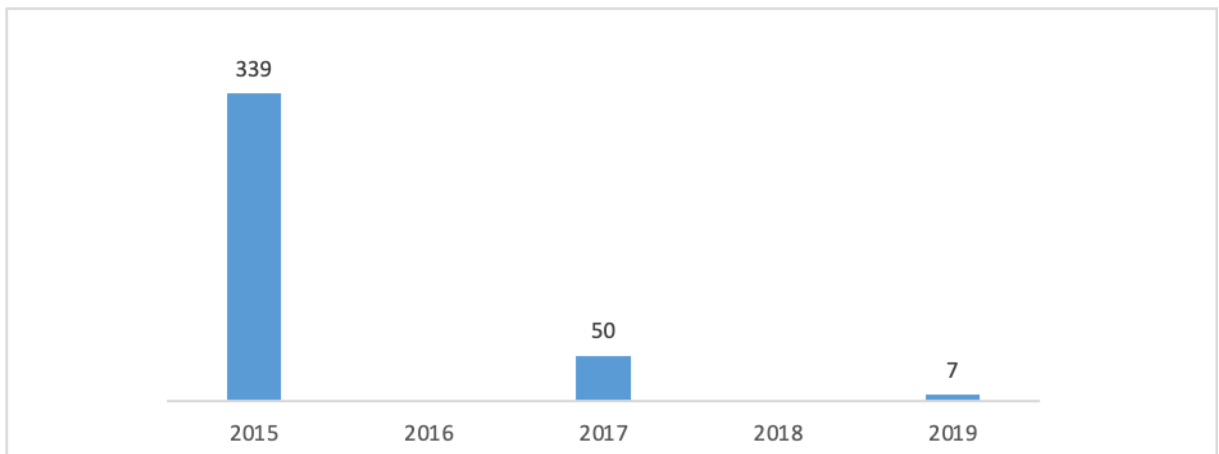


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.7. Pemasangan Rambu-Rambu

Hampir setiap tahun dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah Kabupaten Bone melakukan pemasangan rambu lalu lintas. Hanya di tahun 2016 dan di tahun 2018, pemerintah tidak melakukan pemasangan rambu lalu lintas. Di tahun 2015 dilakukan pemasangan rambu sebanyak 339 unit. Sementara di tahun 2017 dan 2019, terjadi pemasangan rambu masing-masing sebanyak 50 dan tujuh unit. Bila melihat jumlah rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Bone, maka perlu penambahan lokasi APBD untuk program pengadaan rambu-rambu lalu lintas serta mencari pembiayaan alternatif seperti Kemitraan dan Pihak Swasta. Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Bone mengalokasikan anggaran pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 200 unit dengan nilai sebesar Rp. 300 juta, tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran untuk semua kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga dana untuk pengadaan rambu lalu lintas dialihkan ke dana bantuan Covid-19.

Gambar 2.150. Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

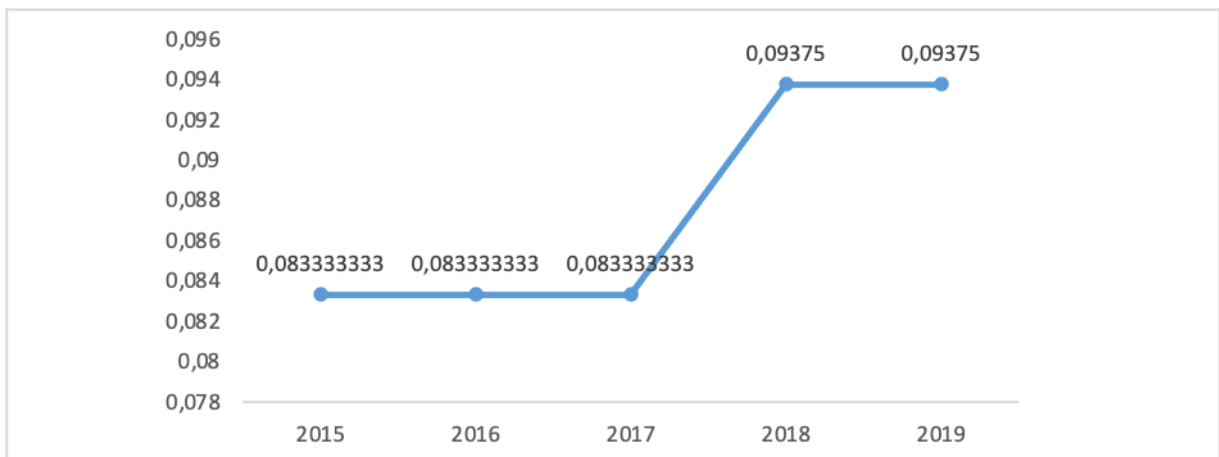


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Data perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan semakin berkurang. Di tahun 2015 nilai rasio ini mencapai 0,833 atau 1:60. Hal ini menunjukkan bahwa tiap Km panjang jalan dapat memuat 60 kendaraan. Hingga di tahun 2019, nilai rasio ini mencapai 0,093 atau 1:75 dimana tiap Km jalan memuat 75 kendaraan.

Gambar 2.151. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019

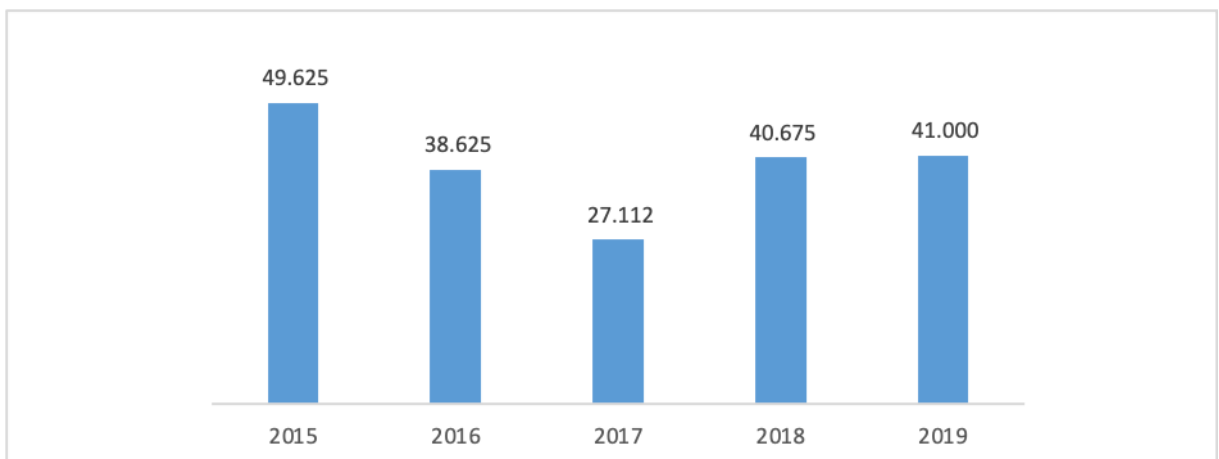


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.9. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Besarnya volume angkutan umum dapat dilihat dari jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya. Di Kabupaen Bone, terjadi tren penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, terdapat 49.625 orang/barang terangkut angkutan umum. Capaian ini terus menurun sampai tahun 2017, dimana jumlah orang/barang yang terangkut pada tahun tersebut mencapai 27.112 orang/barang. Angka ini kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2019 dengan capaian jumlah orang/barang sebanyak 41.000. Meski bertambah, namun jumlah orang/barang yang terangkut di tahun 2019 masih lebih rendah dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Gambar 2.152. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

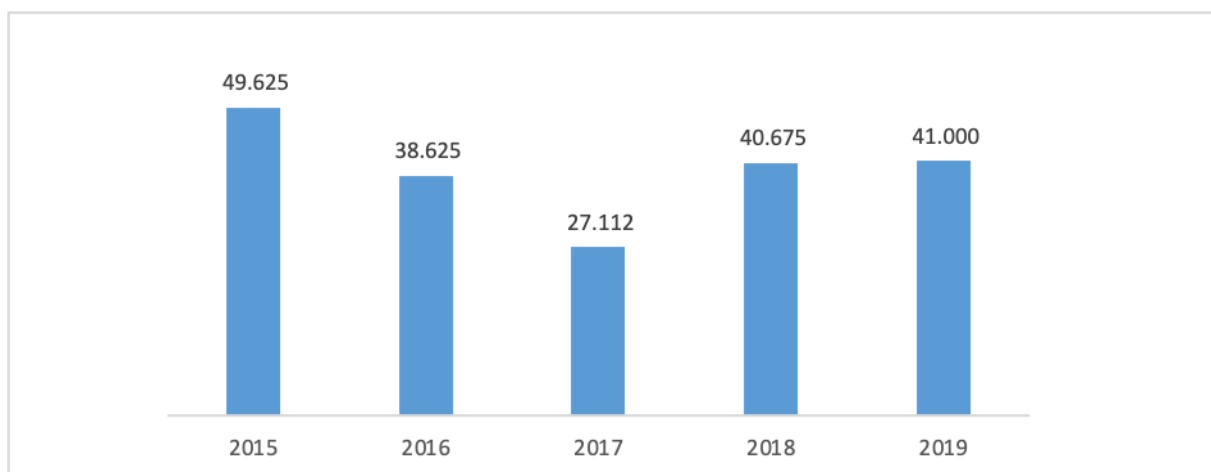


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.9.10. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Perekonomian suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal. Tahun 2015, terdapat 49.625 orang/barang yang melalui drmaga/bandara/terminal. Capaian ini terus menurun sampai tahun 2017, dimana jumlah orang/barang pada tahun tersebut mencapai 27.112 orang/barang. Angka ini kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2019 dengan capaian jumlah orang/barang sebanyak 41.000.

Gambar 2.153. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bertujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia melalui jaringan telekomunikasi. Di era masyarakat informasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi menjadi semakin tidak terhindarkan. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dalam bersosialisasi atau kegiatan tertentu lainnya harus difasilitasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Maka pemerintah, bersama-sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, berupaya memperluas cakupan layanan telekomunikasi agar akses masyarakat akan layanan telekomunikasi menjadi semakin terbuka.

Di tahun 2017, seluruh daerah yang berada di Kabupaten Bone telah mengakses layanan telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan angka cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bone telah mencapai 100 persen di tahun 2017.

Tabel 2.49. Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bone Tahun 2019 (dalam persen)

Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	100 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bone, 2019

Kabupaten Bone yang mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Kabupaten Bone adalah kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 80.9441 jiwa, 27 Kecamatan, 348 Desa, 44 Kelurahan, Jumlah Dusun sebanyak 1098, dan Lingkungan sebanyak 171. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus menjadi hambatan bagi Industri telekomunikasi. Tantangannya adalah bagaimana desa-desa yang terpencil dapat dijangkau atau diakses dengan layanan internet yang mudah, sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut dapat mengaksesnya.

Hambatannya adalah infrastruktur pelayanan dasar (jalan dan jembatan) menuju ke desa-desa terpencil belum memadai sehingga untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Base Transceiver Station (BTS) belum optimal.

2.3.2.10.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna telepon PSTN dan HP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Hal ini membuat persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dalam kurun waktu tahun 2017-2019 telah mencapai 91 persen.

Tabel 2.50. Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (dalam persen)

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Penduduk yang memiliki HP	667.902	671.163	768.335
2	Penduduk yang memiliki telpon PSTN	9.680	9.876	9.913
3	Total jumlah penduduk yang memiliki HP/ Telpon (1) + (2)	677.580	681.039	778.248
4	Jumlah Penduduk	742.912	746.273	856.861
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon (3) / (4)	91%	91%	91%

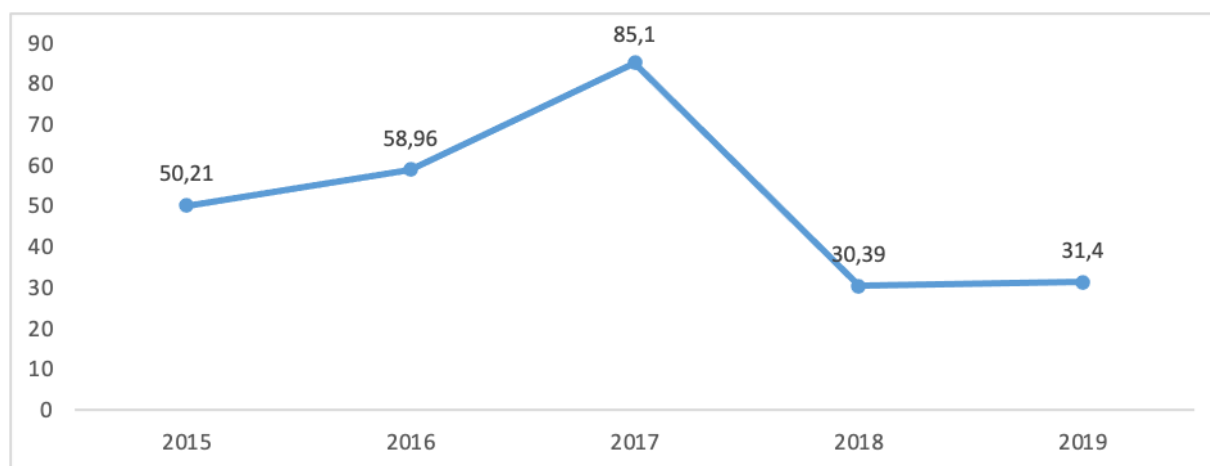
Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian, 2020

2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Dalam kurun waktu 2015-2019, Bone mencatat angka persentase koperasi aktif yang terus meningkat sampai tahun 2017, lalu menurun cukup dalam di tahun 2018 dan 2019. Di tahun 2015, persentase koperasi yang aktif telah mencapai 50,21 persen atau lebih dari setengah dari total koperasi di Kabupaten Bone. Di dua tahun berikutnya, tercatat terjadi kenaikan angka persentase koperasi aktif, masing-masing sebesar 58,96 persen di tahun 2016 dan 85,10 persen di tahun 2017. Angka tahun 2017 sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang lima tahun terakhir dan menginformasikan bahwa di tahun tersebut hanya tersisa 14,9 persen koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Bone. Di dua tahun setelahnya yaitu di tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan yang cukup tajam dalam hal persentase koperasi aktif di Bone. Persentase koperasi aktif di tahun 2018 menurun menjadi 30,39 persen dan sedikit meningkat di tahun 2019 menjadi 31,40 persen.

Gambar 2.154. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

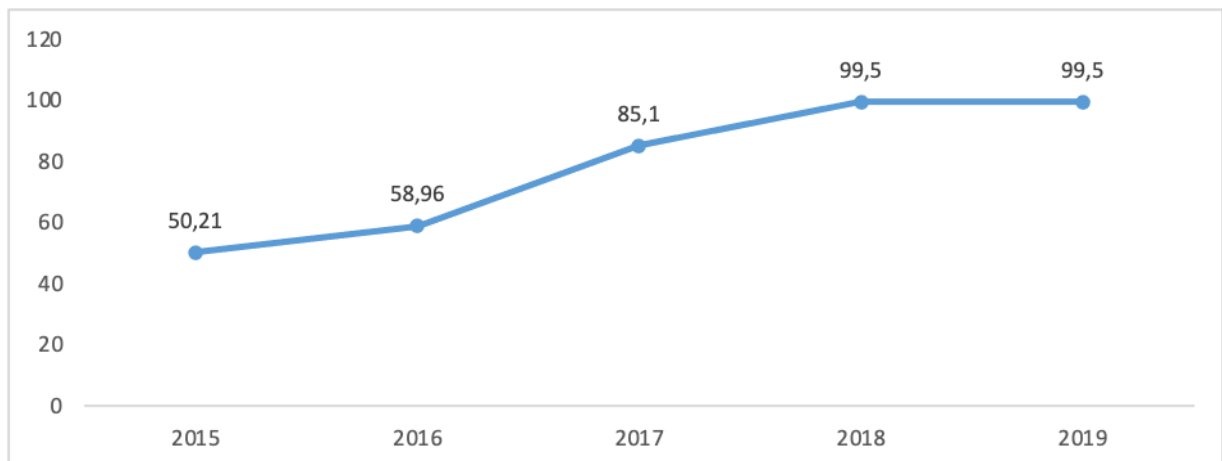


Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bone, 2020

2.3.2.11.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap keseluruhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bone dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung meningkat. Di tahun 2015, setengah (50,21%) dari UMKM berbentuk UMK. Capaian ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2016 angka persentase UMK meningkat menjadi 58,96 persen hingga secara akseleratif meningkat menjadi 99,50 persen di tahun 2019. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir kegiatan kewirausahaan masyarakat dalam bentuk UMK semakin bertambah tiap tahunnya.

Gambar 2.155. Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bone, 2020

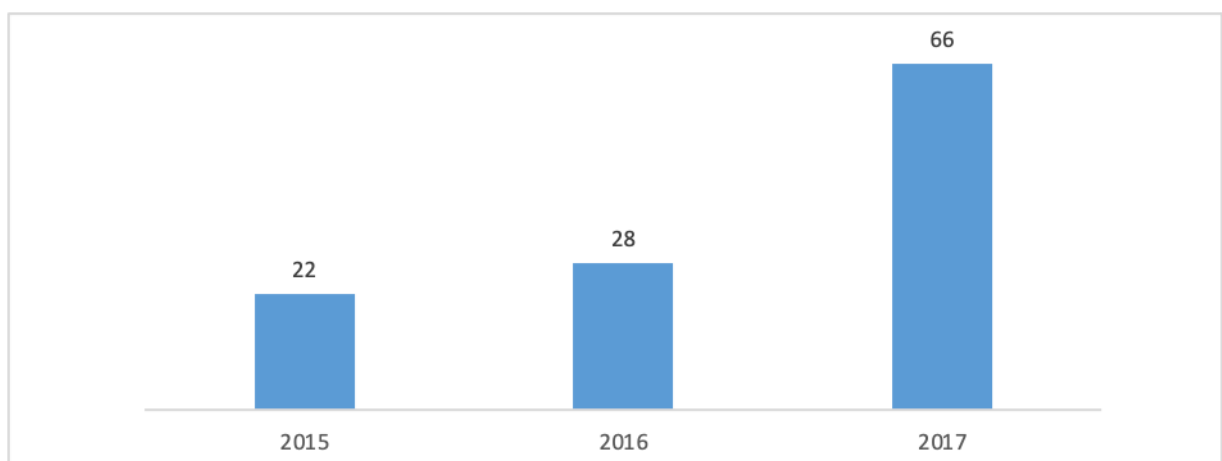
2.3.2.12. Penanaman Modal

2.3.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional

Modal atau investasi bagi pembangunan daerah dapat berperan dalam dua hal, yaitu sebagai kontributor untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan stok modal sehingga kapasitas produksi ekonomi menjadi semakin meningkat. Karena perannya yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk memfasilitasi penanaman modal yang akan masuk ke daerahnya. Peran pemerintah daerah kian ditegaskan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. PP ini mengemukakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada investor sesuai kewenangannya.

Jumlah investor berskala nasional semakin meningkat dalam kurun waktu 2015-2017. Sampai tahun 2017 terdapat 66 investor yang berskala nasional yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bone. Hal ini cukup meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mana jumlah investor berskala nasional pada waktu itu baru mencapai 22 investor.

Gambar 2.156. Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

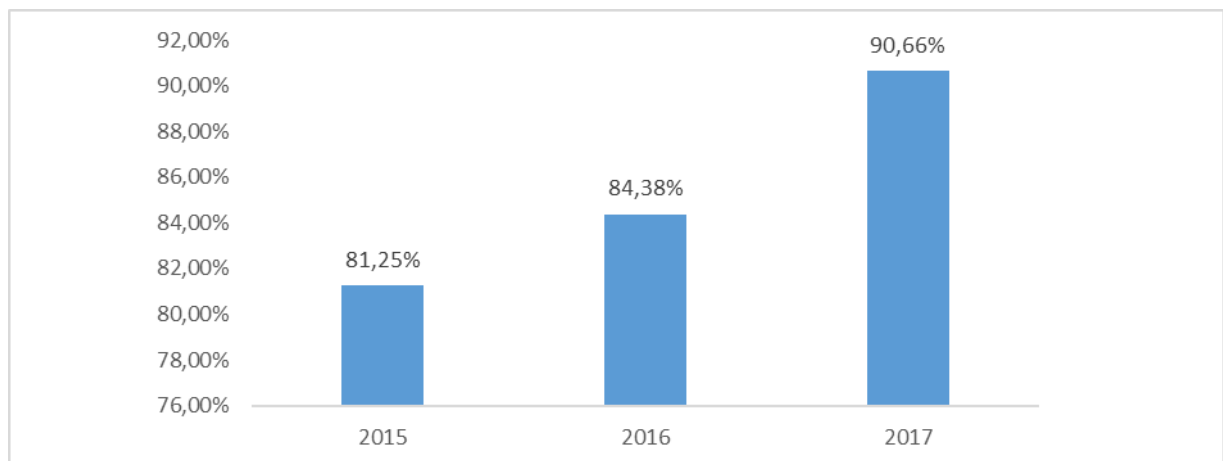
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.13.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16-30 tahun. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, dibutuhkan pemuda pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Untuk membangun pemuda, Pemerintah memberikan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Secara lebih spesifik, fungsi penyadaran dapat difasilitasi langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Tren persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017 hampir seluruh organisasi kepemudaan (90,66%) telah berstatus aktif. Capaian ini cukup meningkat dibandingkan yang terjadi di tahun 2015 (81,25%) dan tahun 2016 (84,38%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi kepemudaan di seluruh kecamatan se Kabupaten Bone.

Gambar 2.157. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

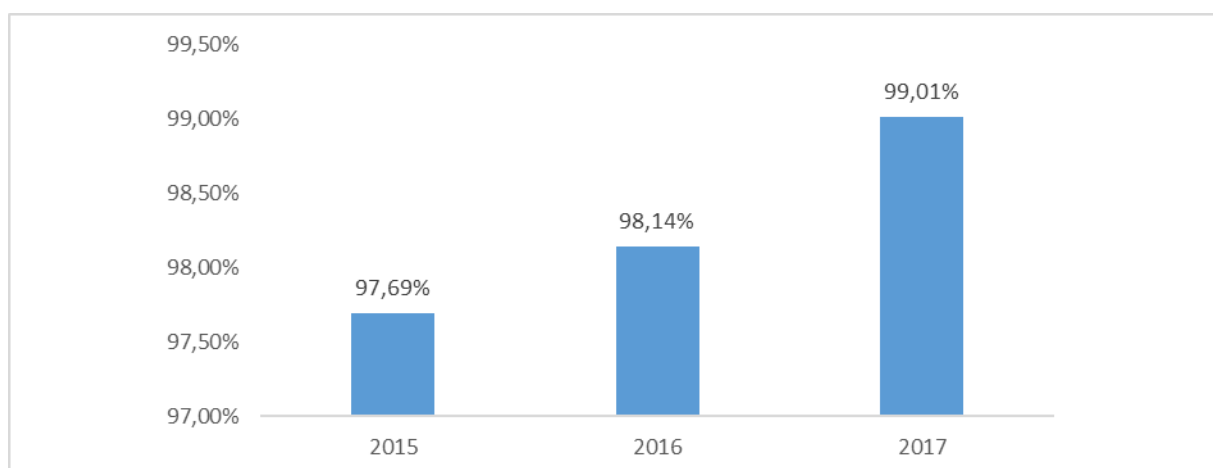


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.2. Persentase wirausaha muda

Persentase wirausaha muda dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 juga mengalami peningkatan. Di tahun 2017, hampir seluruh kegiatan wirausaha di Kabupaten Bone digerakkan oleh pemuda. Capaian persentase wirausaha muda di tahun ini mencapai 99,01 persen, cenderung meningkat dibandingkan tahun 2015 dengan capaian 97,69 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pemuda dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan di bidang kewirausahaan diseluruh kecamatan se-Kabupaten Bone.

Gambar 2.158. Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

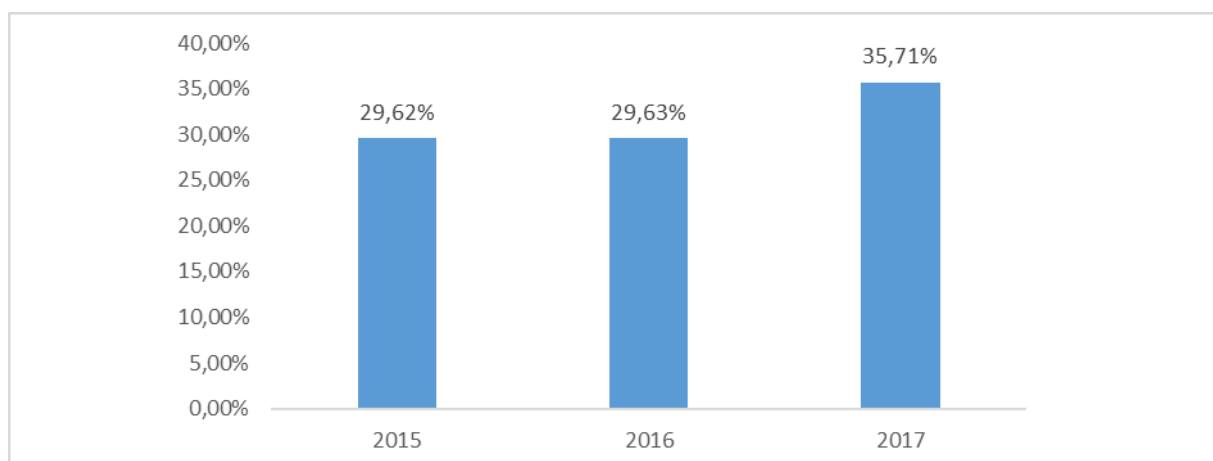


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Di tahun 2017, persentase cabang olah raga yang terbina oleh Pemerintah Daerah telah mencapai 35,17 persen. Meski cenderung masih rendah, namun hal ini telah meningkat dibandingkan capaian di tahun 2015 (29,62%) dan 2016 (29,63%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pengurus cabang olahraga dalam hal pembinaan atlet di setiap cabang olahraga serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di Kabupaten Bone.

Gambar 2.159. Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

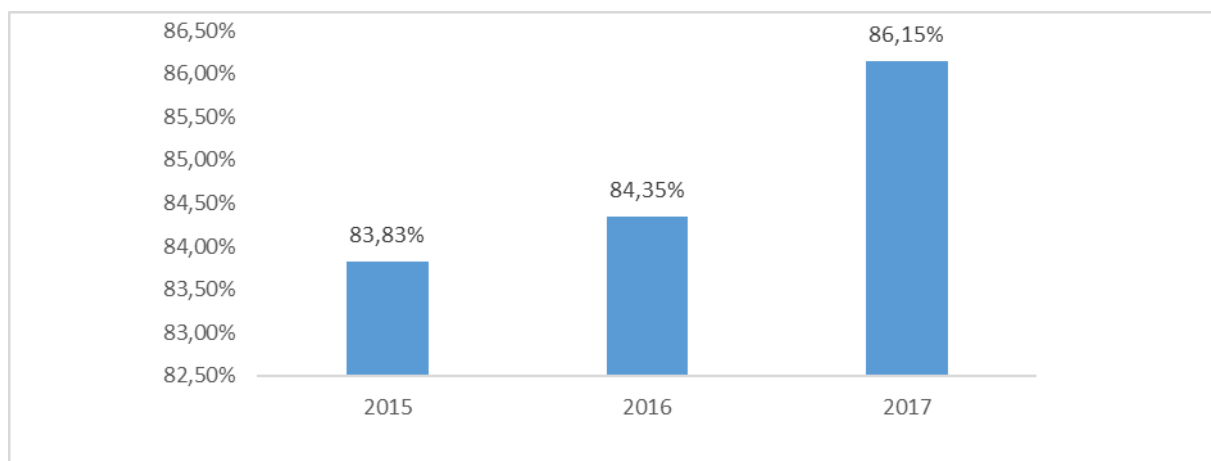


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikat dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2017, persentase pelatih olah raga yang telah tersertifikasi mencapai 86,15 persen, telah meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Di tahun 2015 dan 2016, persentase pelatih olah raga yang tersertifikasi masing-masing mencapai 83,83 persen dan 84,35 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah makin meningkatnya kerja sama antar pengurus cabang olah raga dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Gambar 2.160. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

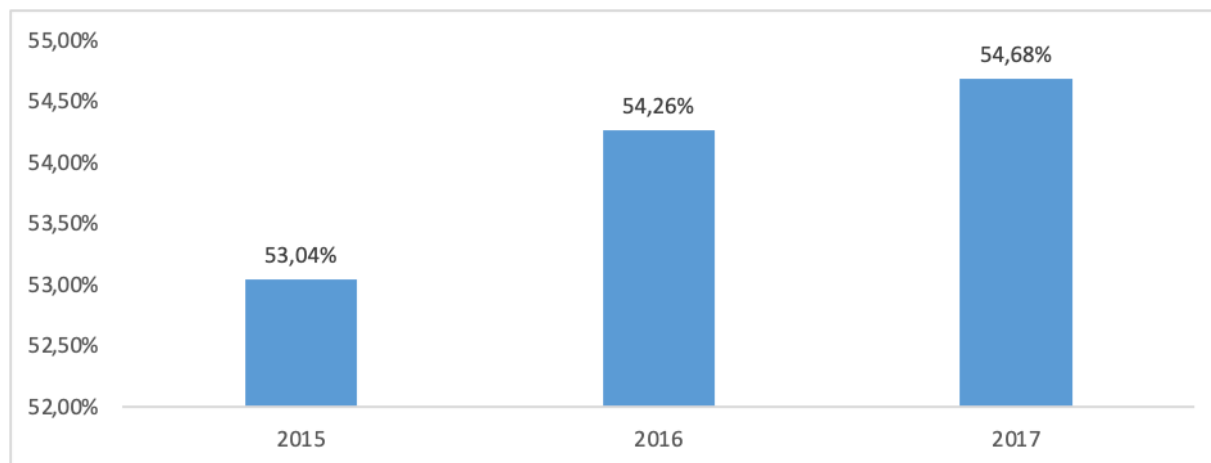


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pemerintah Kabupaten Bone menyadari pentingnya pembinaan atlet muda sejak masih bersekolah sebagai potensi atlet muda berprestasi di masa yang akan datang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan pembinaan atlet muda dari Tahun 2015 sampai dengan 2017. Di tahun 2017, cakupan pembinaan atlet muda mencapai 54,68 persen, telah meningkat dibandingkan dengan yang dicapai di tahun 2015 (53,04%) dan tahun 2016 (54,26%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlet usia muda (pelajar) pada setiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di setiap cabang olahraga di Kabupaten Bone.

Gambar 2.161. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet yang berprestasi dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 di seluruh cabang olahraga mengalami peningkatan. Di tahun 2017, terdapat 69 atlet Bone yang berprestasi di sepuluh cabang olahraga. Hal ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing jumlah atlet berprestasi mencapai 46 dan 62 atlet. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlet di setiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di setiap cabang olahraga di Kabupaten Bone.

Tabel 2 51. Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (orang)

No	Cabang Olahraga	Tahun		
		2015	2016	2017

1.	FORKI	6	6	8
2.	PASI	5	8	8
3.	PJSI	7	9	10
4.	PRSI	5	7	8
5.	PBSI	3	4	4
6.	TAEKWONDOIN	1	3	4
7.	PSTI	4	6	7
8.	PBVS	6	7	9
9.	PTMSI	3	5	5
10.	PERBAKING	5	7	6

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 konsisten di angka delapan (8) cabang olah raga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlet di setiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di setiap cabang olahraga di Kabupaten.

Tabel 2.52. Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (cabang olah raga)

Uraian	2015	2016	2017
Prestasi Cabang Olah raga	8 Cabang Olah Raga	8 Cabang Olah Raga	8 Cabang Olah Raga

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone, 2018

2.3.2.14. Statistik

2.3.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sejak tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bone telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD dikelompokkan menjadi delapan kelompok data yang mencakup informasi mengenai sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, keuangan daerah, dan aspek lainnya. Luasnya cakupan informasi ini didapatkan dari pengintegrasian sistem data dari OPD terkait untuk memasukkan data-data pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

Tabel 2.53. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

Indikator	Realisasi Capaian		
	2017	2018	2019
Tersedianya Sistem data Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.14.2. Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dalam membuat perencanaan, pemerintah daerah bergantung pada ketersediaan data baik pada level makro maupun mikro. Data-data makro misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB Penggunaan dan Lapangan Usaha, Kemiskinan, Pengangguran, Inflasi, dll. Untuk itu, ketersediaan data-data tersebut menjadi salah satu indikasi penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah. Institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan data-data tersebut adalah Badan Pusat Statistik dan secara berkala telah menerbitkan buku Kabupaten Bone Dalam Angka. Semua series publikasi Kabupaten Bone Dalam Angka dapat diakses langsung di website <https://bonekab.bps.go.id>

Gambar 2.162. Ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bone, 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

2.3.2.14.3. Buku "PDRB"

Selain menerbitkan setiap tahun buku Kabupaten Bone Dalam Angka, Badan Pusat Statistik juga menyediakan publikasi spesifik tentang kondisi produk domestik regional bruto. Buku ini mengulas secara lengkap dan rinci tentang PDRB Kabupaten Bone dari sisi penggunaan dan lapangan usaha. PDRB sektoral dijelaskan hingga level sub sector lapangan usaha sehingga pemerintah daerah relatif lebih mudah mengetahui motor penggerak perekonomian Kabupaten Bone. Dalam lima tahun terakhir, BPS Kabupaten Bone konsisten menerbitkan buku PDRB dari sisi penggunaan dan lapangan usaha.

Gambar 2.163. Ketersediaan Buku "PDRB" Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



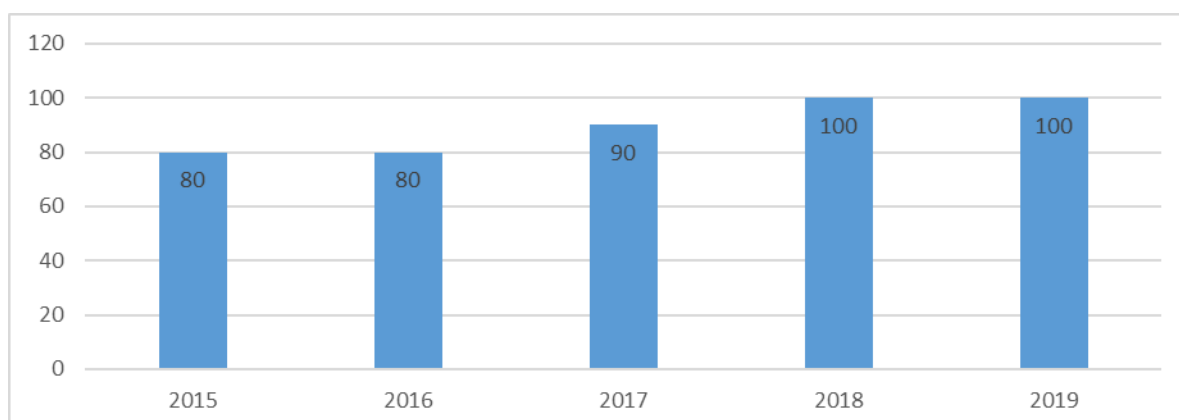
Sumber: BPS, 2020

2.3.2.15. Kebudayaan**2.3.2.15.1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya****2.3.2.15.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam melestarikan benda cagar budaya ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan antara lain adalah (1) menetapkan etika pelestarian cagar budaya; (2) mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah; (3) menghimpun data cagar budaya; (4) menetapkan peringkat cagar budaya; (5) menetapkan dan mencabut status cagar budaya; (6) membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; (7) menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya; (8) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; (9) mengelola kawasan cagar budaya; dan lain-lain.

Persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2015–2019 di Kabupaten Bone mengalami peningkatan. Hampir seluruh benda situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Bone telah dilestarikan oleh pemerintah daerah. Di tahun 2017, persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan telah mencapai 90 persen, Meningkat dari yang dicapai di dua tahun sebelumnya yaitu 80 persen di tahun 2015 dan 2016. Dan tahun 2019 telah mencapai 100 persen. Capaian ini dapat menjingkat karena terjalannya kerja sama yang baik dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan selaku pelaksana pengkajian dalam penetapan situs.

Gambar 2.164. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

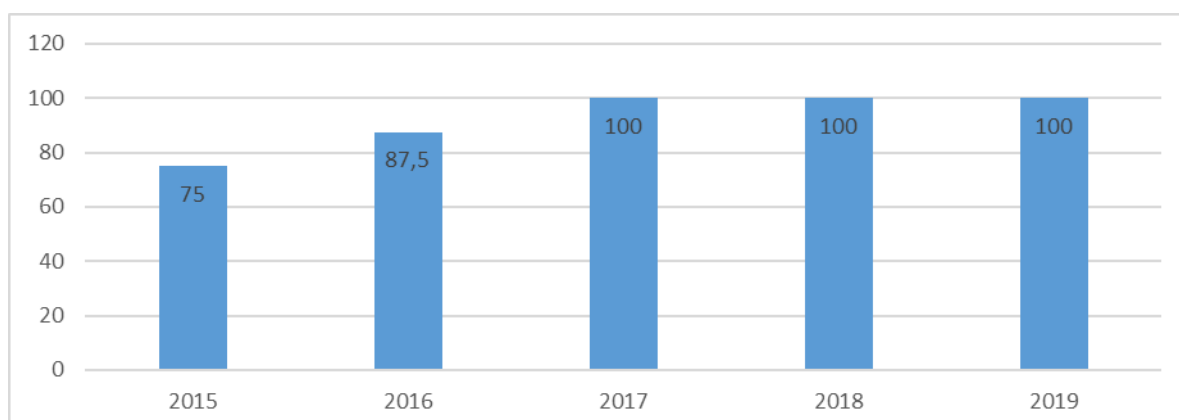


Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.15.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Persentase jumlah Karya Budaya Tahun 2015 sampai 2019 yang dilestarikan dan diinventarisasi cenderung meningkat dengan tingkat capaian yang sangat tinggi di tahun 2017. Di tahun 2015, persentase karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisir mencapai 75 persen. Capaian ini terus meningkat di dua tahun berikutnya hingga pada tahun 2017 dan hingga tahun 2019 telah terevitalisasi 100 persen, seluruh karya budaya yang ada di Kabupaten Bone telah terevitalisasi dan terinventarisir. Realisasi ini dapat terjadi mengingat banyaknya partisipasi masyarakat yang peduli tentang kearifan lokal budaya daerah untuk pelestarian nilai-nilai Seni Budaya Daerah.

Gambar 2.165. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

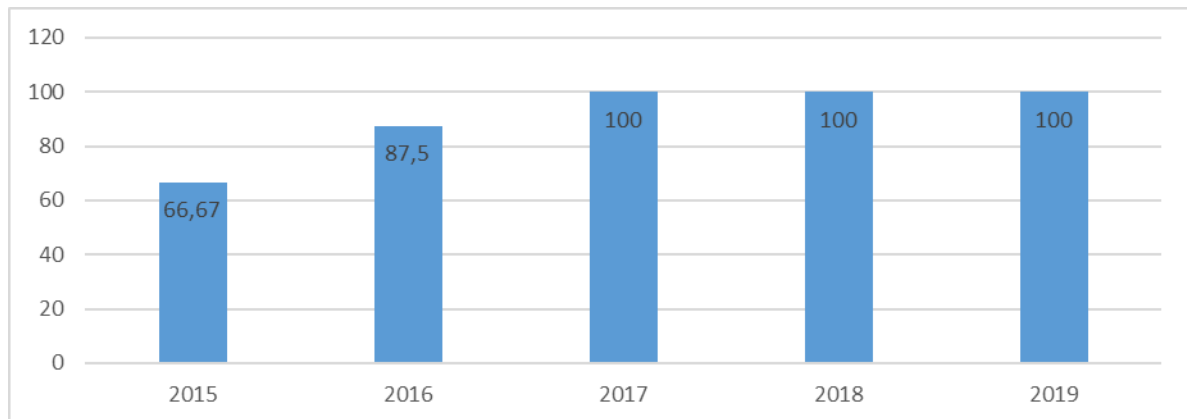


Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.15.4. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Persentase jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017, seluruh cagar budaya yang ada di Kabupaten Bone telah dikelola secara terpadu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Cagar Budaya yang telah dikaji dan dapat dijadikan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya untuk dikelola sebagai Aset Sejarah dan Situs Perpustakaan Daerah.

Gambar 2.166. Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



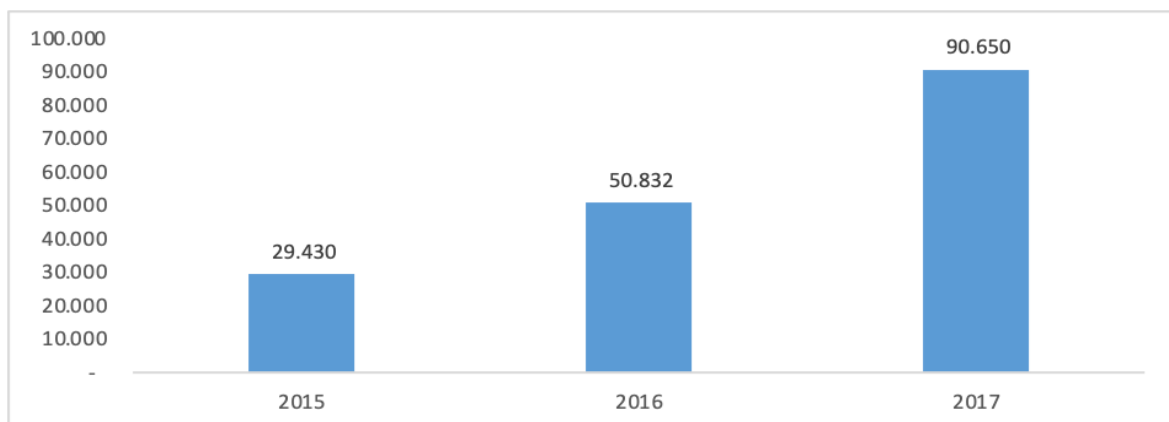
Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.16. Perpustakaan

2.3.2.16.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam regulasi ini, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu, tidak keliru ketika Perpustakaan dianggap sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Gambar 2.167. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (orang)



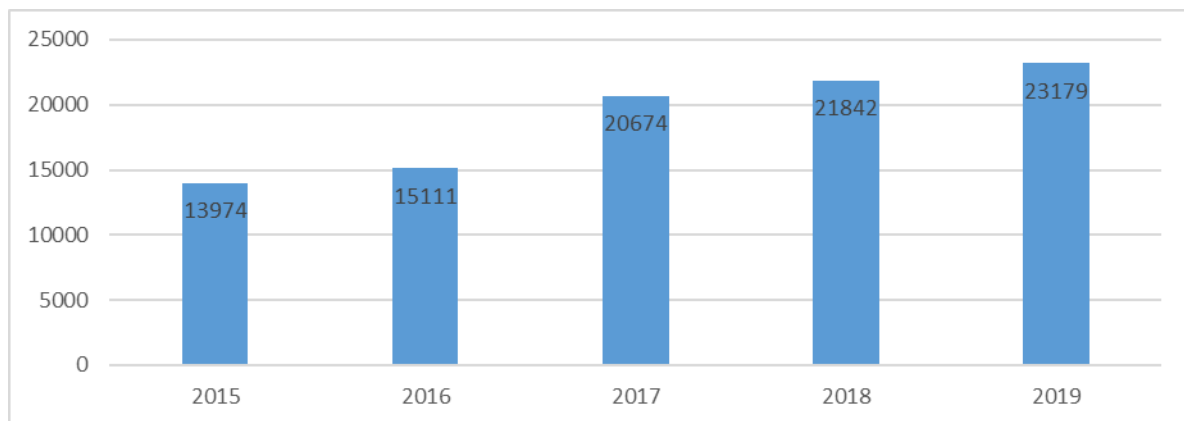
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2018

Setidaknya sepanjang tahun 2015-2017, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bone terus bertambah. Di tahun 2015, jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun mencapai 29.430. Peningkatan jumlah pengunjung juga terjadi di tahun 2016, dimana jumlah pengunjungnya mencapai 50.832 orang atau bertambah sebanyak 21.402 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak berhenti di tahun 2016, pada tahun 2017 jumlah orang yang berkunjung ke perpustakaan naik lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 90.650 orang pengunjung atau bertambah 78,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.2.16.2. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 meningkat. Setiap tahun dalam kurun waktu tersebut, jumlah koleksi buku bertambah lebih dari seribu buku. Di tahun 2015, jumlah koleksi buku mencapai 20.674 buku, lalu bertambah di tahun berikutnya menjadi 21.842 buku. Hingga di tahun 2019 telah terdapat 23.179 koleksi buku. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya makin meningkatnya peran pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi peningkatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dan peran serta Perpustakaan Nasional dalam memberikan bantuan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone.

Gambar 2.168. Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

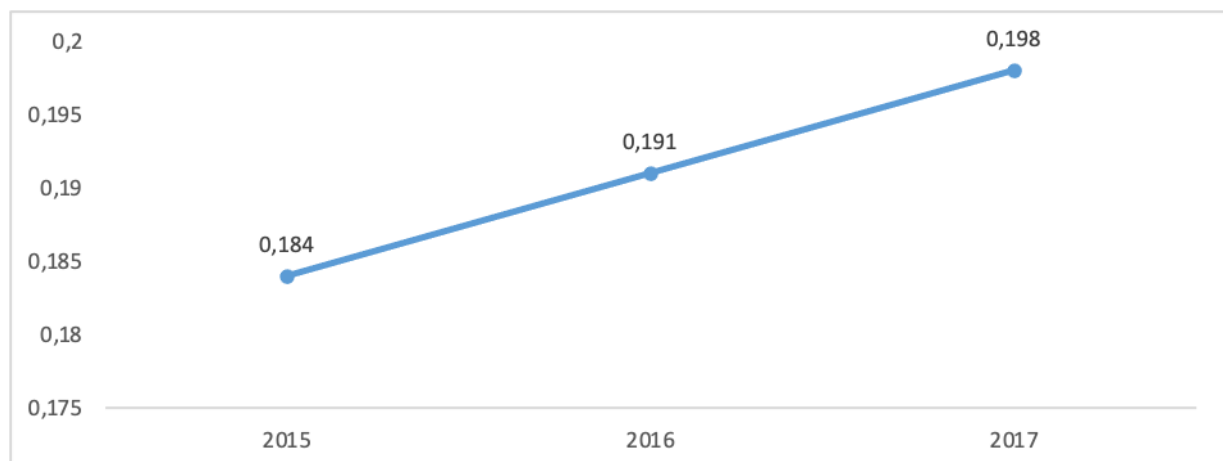


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2020

2.3.2.16.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Perpustakaan sebagai salah satu media memperoleh pengetahuan, penting untuk diperluas aksesnya dengan cara memperbanyak jumlah perpustakaan sesuai dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam rentang tahun 2015-2017, terjadi peningkatan rasio ketersediaan perpustakaan per seribu penduduk. Rasio perpustakaan per seribu penduduk di tahun 2015 mencapai 0,184, lalu meningkat di tahun berikutnya menjadi 0,191. Hingga di tahun 2017 angka rasio ini telah mencapai 0,198.

Gambar 2.169. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2018

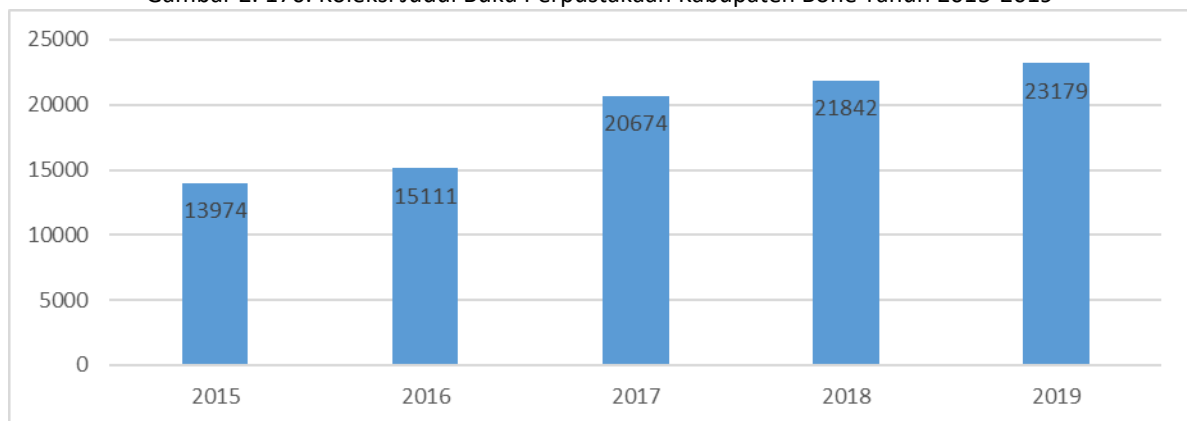
2.3.2.16.3. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Setidaknya dari tahun 2015 hingga 2017, rata-rata pengunjung perpustakaan sudah mencapai 56.971 orang.

2.3.2.16.4. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada perpustakaan umum daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Di tahun 2017, terdapat 9.108 judul buku di perpustakaan daerah. Capaian tersebut kemudian bertambah di tahun 2018 menjadi 9.692 judul buku. Sampai di tahun 2019 telah terdapat 11.520 judul buku. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, peran pemerintah Kabupaten Bone dalam memberikan sarana berupa bahan pustaka baik perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan desa/kelurahan atau komunitas baca, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan sebagaimana tujuan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone yaitu dapat meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat.

Gambar 2. 170. Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

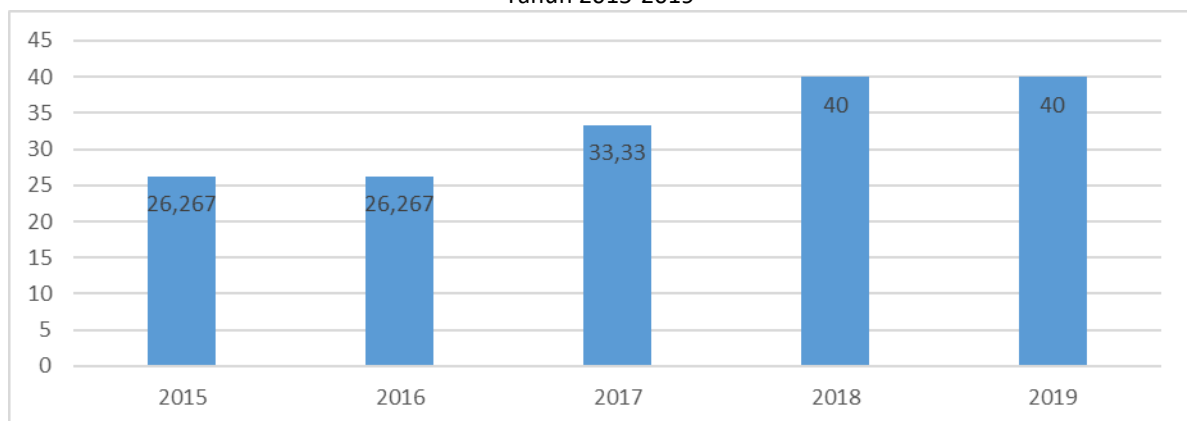


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2018

2.3.2.16.5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Jika di tahun 2015 dan 2016, persentase pustakawan yang bersertifikat baru mencapai 26,67 persen, di tahun 2017 capaian ini telah meningkat menjadi 33,33 persen. Dantahun 2019 sebesar 40 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya kerjasama antar pengelola perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan dapat dilaksanakan, serta peran Pemerintah Daerah Khususnya Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan Pembinaan Pengelola Perpustakaan di tingkat Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Komunitas Baca yang ada di Kabupten Bone.

Gambar 2. 171. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilaian yang Bersertifikat Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2020

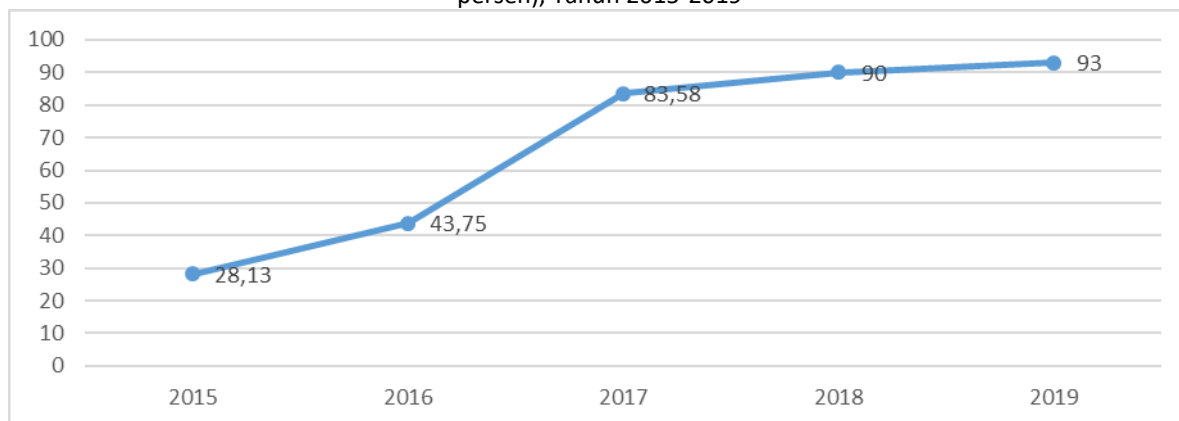
2.3.2.17. Kearsipan

2.3.2.17.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian ini, arsip merupakan dokumen penting karena berisi rekaman aktivitas lembaga negara. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku atau terstandarisasi.

Selama tahun 2015-2019, belum semua perangkat daerah di Kabupaten Bone melakukan pengelolaan arsip secara baku, meski angkanya terus bertambah. Tahun 2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Bone sudah mencapai 83,58 persen, sudah lebih baik dibandingkan yang dicapai di tahun 2015 (28,13%). Data capaian di tahun 2019 ini menunjukkan bahwa masih tersisa 7 persen perangkat daerah di Kabupaten Bone yang belum melakukan pengelolaan arsip secara baku.

Gambar 2.172. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Bone (dalam persen), Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone, 2018

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

2.3.3.1.1. Kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata di Bone terus meningkat dalam kurun waktu 2015-2019. Secara lebih spesifik, jumlah wisatawan lokal menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018, yaitu dari 96.140 wisatawan di tahun 2017 menjadi 210.167 wisatawan di tahun 2018. Capaian jumlah wisatawan lokal ini kemudian meningkat di tahun berikutnya (2019) dengan jumlah wisatawan mencapai 293.933. Jumlah wisatawan domestik sendiri mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2019, yaitu dari 40.433 wisatawan di tahun 2018 menjadi 255.320 wisatawan di tahun 2019. Di tahun ini juga terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yaitu dari 500 wisatawan di tahun 2018 menjadi 792 di tahun 2019.

Tabel 2.54. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (orang)

Tahun	Lokal	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2015	80.382	30.116	584	111.082
2016	91.800	31.200	500	123.500
2017	96.140	31.200	460	127.800
2018	210.167	40.433	500	251.100
2019	293.933	255.320	792	496.045

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bone, 2020

2.3.3.1.2. Lama kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan secara umum mengalami stagnansi dalam kurun waktu 2016-2019 dengan lama kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara masing-masing mencapai 5 hari dan 3 hari. Meski begitu, capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015. Di tahun tersebut, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara masing-masing mencapai 4 hari dan 3 hari.

Tabel 2.55. Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bone Tahun 2013-2019 (hari)

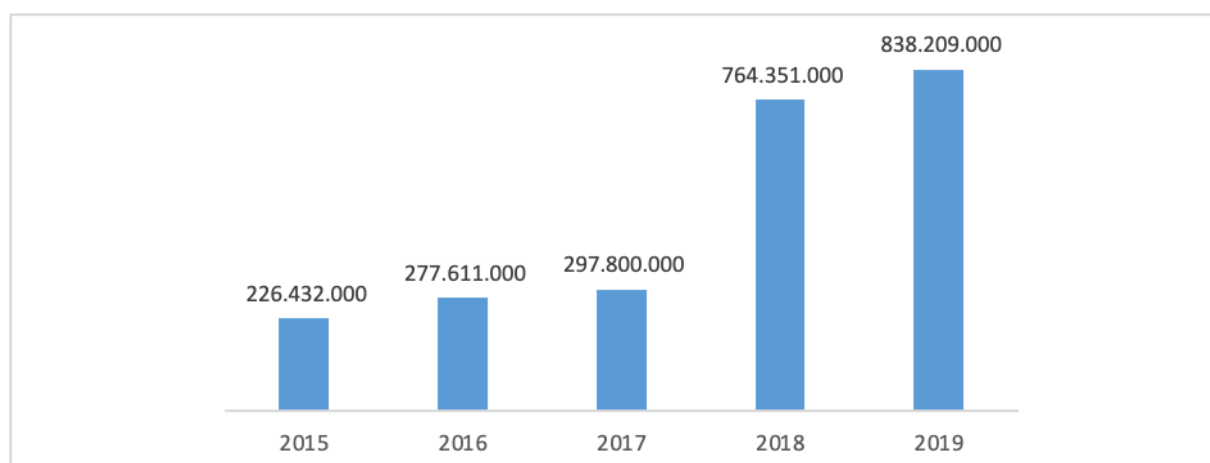
Lama Kunjungan Wisatawan (hari)	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Wisatawan Nusantara (Wisnus)	4	5	5	5	5
- Wisatawan mancanegara (Wisman)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bone, 2020

2.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Secara lebih spesifik, sektor pariwisata telah berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) Bone. PAD yang dihasilkan melalui pengelolaan pariwisata cenderung terus bertambah dalam kurun waktu 2015-2019. Di tahun 2019, PAD yang dihasilkan oleh pengelolaan pariwisata mencapai Rp838,209 juta, telah jauh meningkat jika dibandingkan pencapaian di tahun 2015 yang berjumlah Rp226,432 juta.

Gambar 2.173. PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Rp)

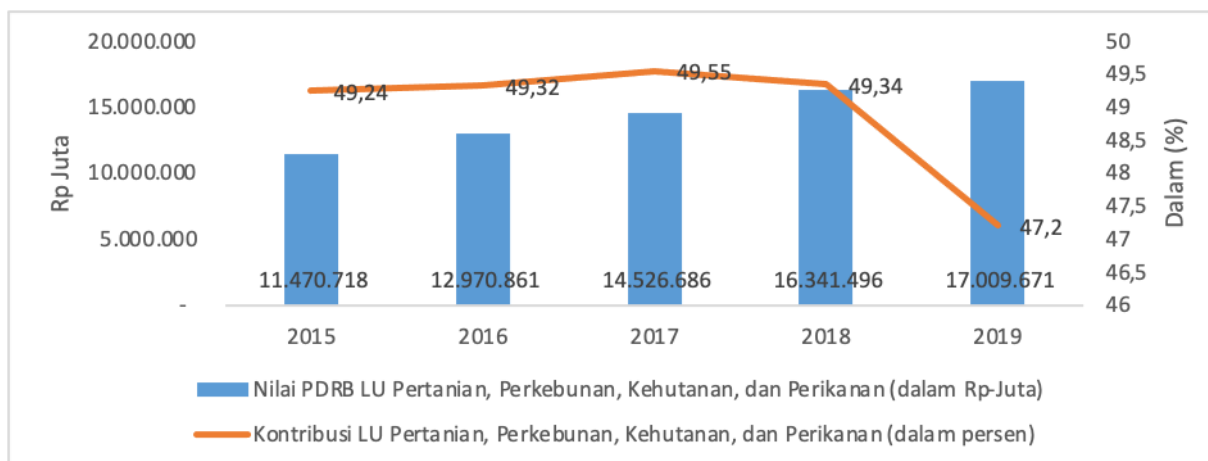


Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Bone, 2020

2.3.3.2. Pertanian**2.3.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dijadikan indikator untuk melihat secara lebih makro peran lapangan usaha pertanian/perkebunan terhadap pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Perhitungan indikator ini didasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian /perkebunan pada periode waktu tertentu terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku.

Gambar 2.174. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2015–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

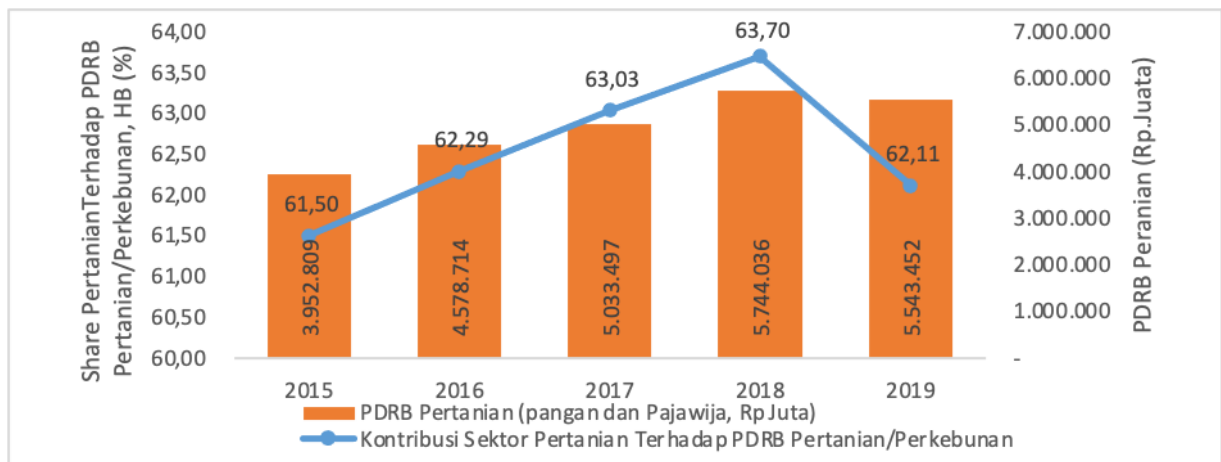
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Bone dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan pola yang fluktuatif pada kecenderungan yang menurun. Di tahun 2019, kontribusi sektor pertanian/perkebunan mencapai 47,20 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya (2018) dengan nilai kontribusi 49,34 persen. Capaian kontribusi sektor pertanian/perkebunan di tahun 2019 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di lima tahun sebelumnya (tahun 2015) dengan nilai kontribusi pada waktu tersebut mencapai 49,24 persen. Meski nilai tambah sektor pertanian/perkebunan menurut harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, penurunan kontribusinya yang sangat tajam di tahun 2019 perlu mendapat perhatian lanjut oleh pemerintah daerah.

2.3.3.2.2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian (pangan dan pawija) sebesar Rp3,95 triliun meningkat menjadi Rp5,54 triliun pada tahun 2019. Sektor pertanian pangan dan palawija di Kabupaten Bone tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, tetapi kecenderungan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian (pangan dan palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 61,50 persen meningkat yakni dari 62,11 persen di tahun 2019. Uraian tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) yang merupakan basis utama pertanian Kabupaten Bone memiliki kinerja perkembangan yang cukup baik.

Gambar 2.175. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



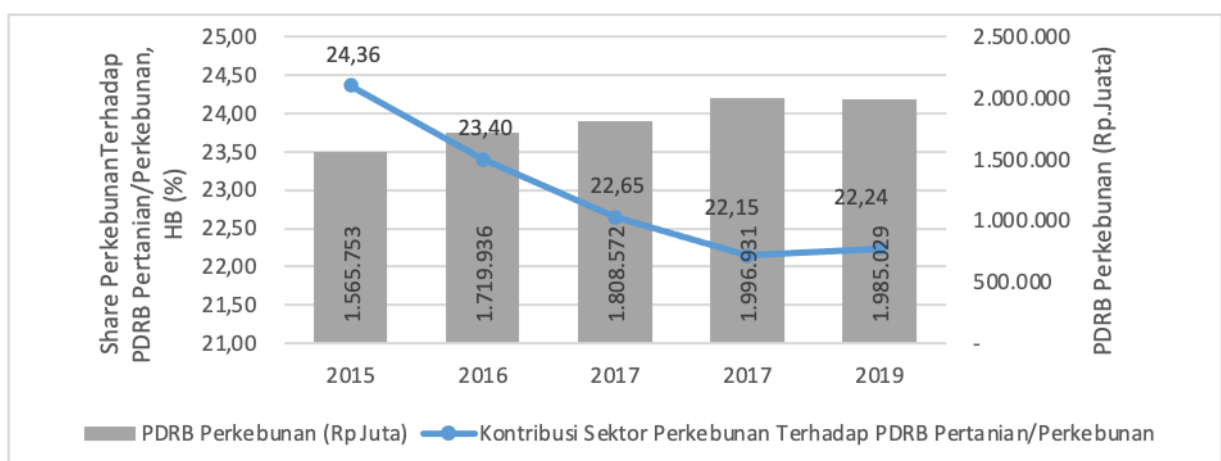
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.3.3.2.3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp1,57 triliun meningkat menjadi Rp1,98 triliun pada tahun 2019. Meskipun demikian sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan palawija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.176. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2015 – 2019



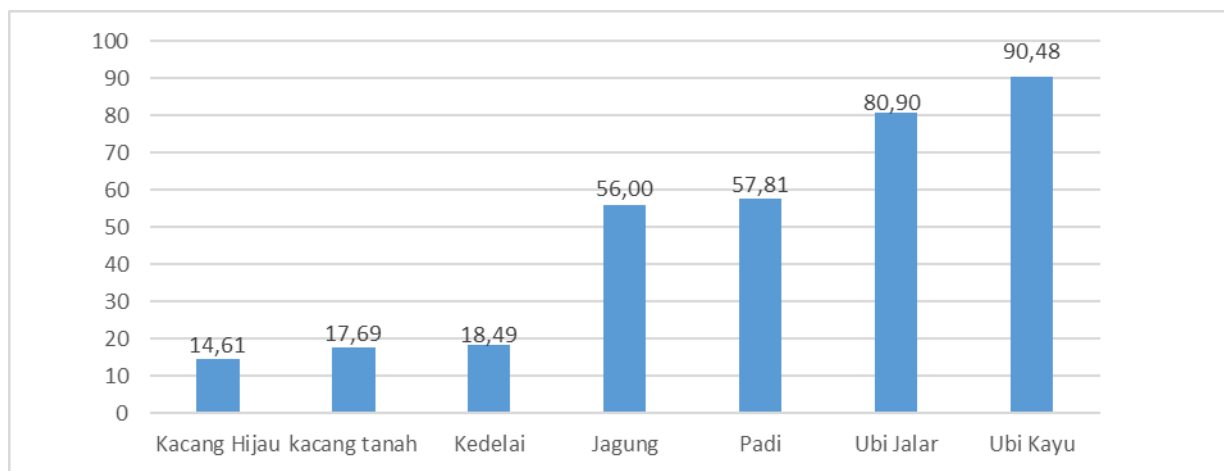
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Pada tahun 2015 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 24,36 persen sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 22,24 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

2.3.3.2.4. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Analisis mengenai data pangan akan lebih bermakna apabila ditinjau nilai produktivitas tanaman pangan. Besarnya produktivitas tanaman padi berada pada posisi ketiga yaitu 57,81 kuintal/ha. Produktivitas tertinggi dihasilkan oleh tanaman ubi kayu (90,48 kuintal/ha). Produktivitas tertinggi berikutnya dihasilkan oleh ubi jalar dengan rata-rata produksi 80,90 kuintal/ha.

Gambar 2.177. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun 2019 (Kuintal/Ha)



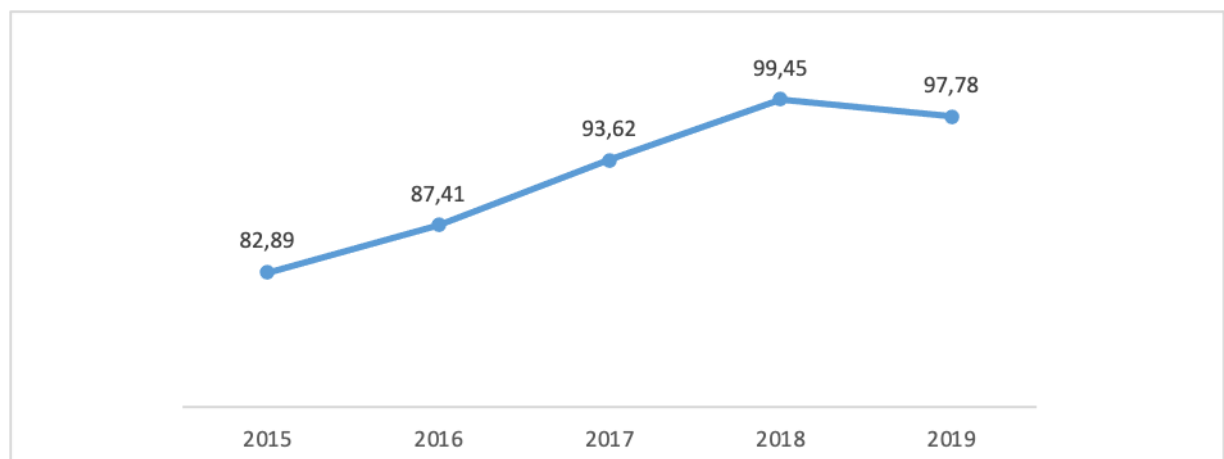
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.3.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.3.1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik di Bone cenderung meningkat dalam kurun waktu 2015-2019. Meski begitu, capaian indikator ini di tahun 2019 sedikit menurun yaitu dari 99,45 persen di tahun 2018 menjadi 97,78 persen di tahun 2019. Meski begitu capaian di tahun 2019 ini masih lebih baik dibandingkan dengan yang didapati di lima tahun sebelumnya. Di tahun 2015, persentase rumah tangga yang teraliri listrik baru mencapai 82,89 persen, lalu perlahan meningkat sampai tahun 2019.

Gambar 2.178. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

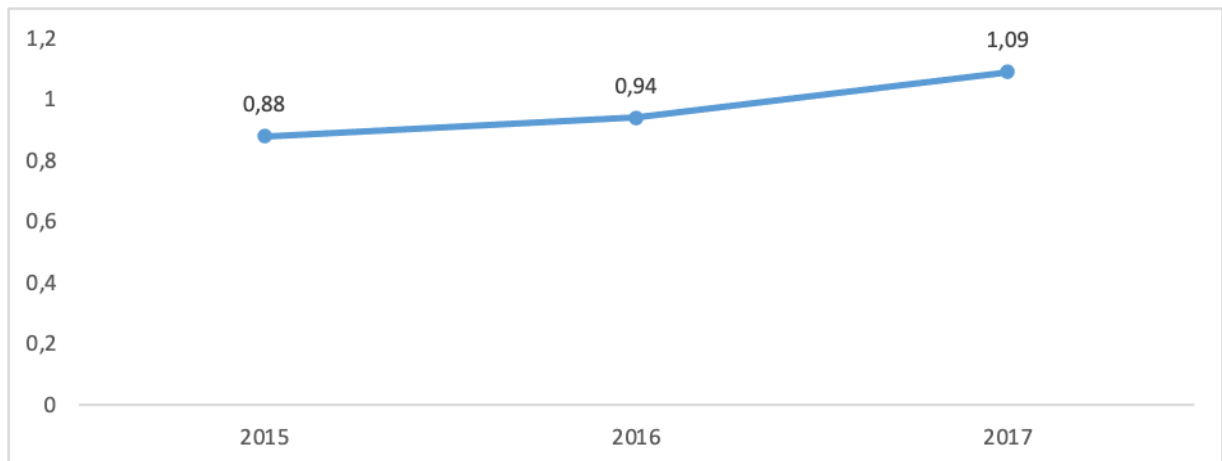


Sumber: Dinas Perindustrian Kab. Bone, 2020

2.3.3.3.2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Bone merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan daya listrik dalam mencukupi kebutuhan daya listrik. Hal ini dihitung dengan membagi daya listrik yang terpasang dengan jumlah kebutuhan daya listrik. Dalam rentang waktu tahun 2015-2017, daya listrik yang terpasang cenderung telah memenuhi kebutuhan daya listrik. Di tahun 2019, rasio ketersediaan daya listrik telah lebih dari satu (1,09), Cenderung meningkat dibandingkan yang dicapai di tahun 2015 dimana pada tahun tersebut rasio ketersediaan daya listrik mencapai 0,88.

Gambar 2. 179. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Bone, Tahun 2015-2017

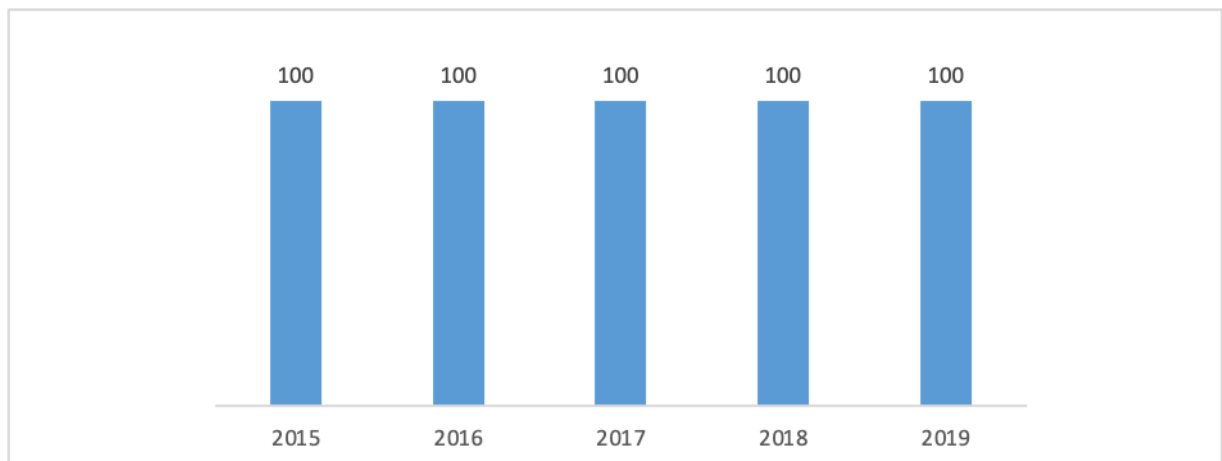


Sumber: Dinas Perindustrian Kab. Bone, 2020

2.3.3.3.3. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Sektor lapangan usaha pertambangan Bone memberikan kontribusi terhadap perekonomian Bone konsisten sekitar 6 persen dalam kurun waktu 2015-2019. Meski begitu seluruh usaha tambang di Bone masih belum memiliki izin dalam kurun waktu yang sama.

Gambar 2.180. Persentase Pertambangan yang Tidak Memiliki Izin Kabupaten Bone 2015-2019



Sumber: Dinas Perindustrian Kab. Bone, 2020

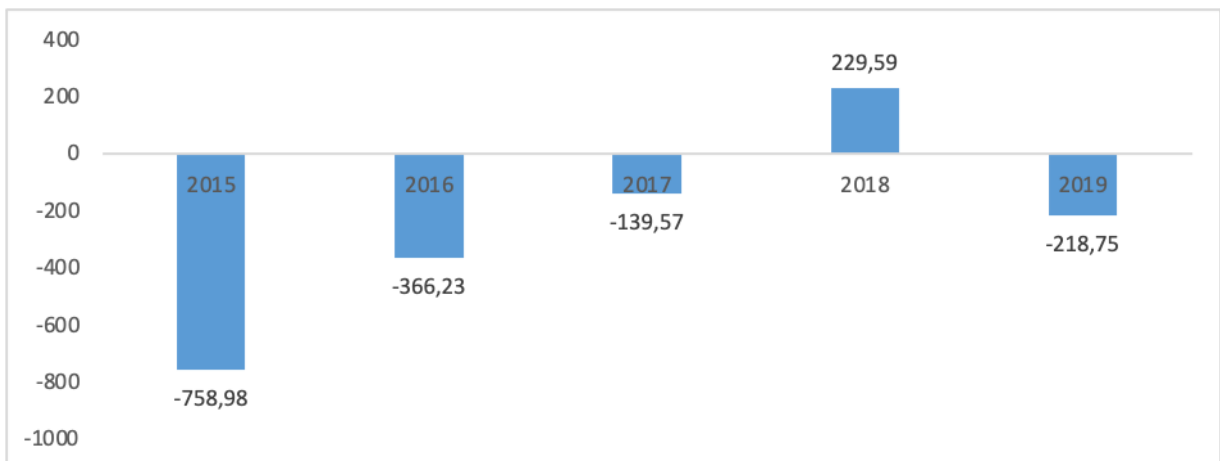
2.3.3.4. Perdagangan

2.3.3.4.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong perekonomian daerah, sebab produksi barang dan jasa seringkali juga tergantung dari output antara yang didatangkan dari luar daerah atau sektor perdagangan memperjual-belikan barang dan jasa dari luar daerah. Jika arus barang keluar (net ekspor) terus meningkat maka akan mendorong PDRB, begitupun sebaliknya. Sepanjang lima tahun terakhir, ekspor bersih Kabupaten Bone mengalami

tren yang cukup fluktuatif, dimana dari tahun 2015 sampai 2017, net ekspor konsisten berada pada capaian negatif. Di tahun 2018, net ekspor sempat menunjukkan angka yang positif hingga kembali negatif di tahun 2019. Di tahun 2015, net ekspor Kabupaten Bone mencapai minus Rp758,98 miliar. Di dua tahun berikutnya, capaian ini perlahan membaik dimana pada tahun 2016 dan 2017 net ekspor Kabupaten Bone masing-masing mencapai minus Rp366,23 miliar dan minus Rp139,57 miliar. Di tahun 2018 net ekspor sempat positif dengan capaian Rp229,59 miliar namun kembali negatif di tahun berikutnya (2019) menjadi minus Rp218,75 miliar.

Gambar 2.181. Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

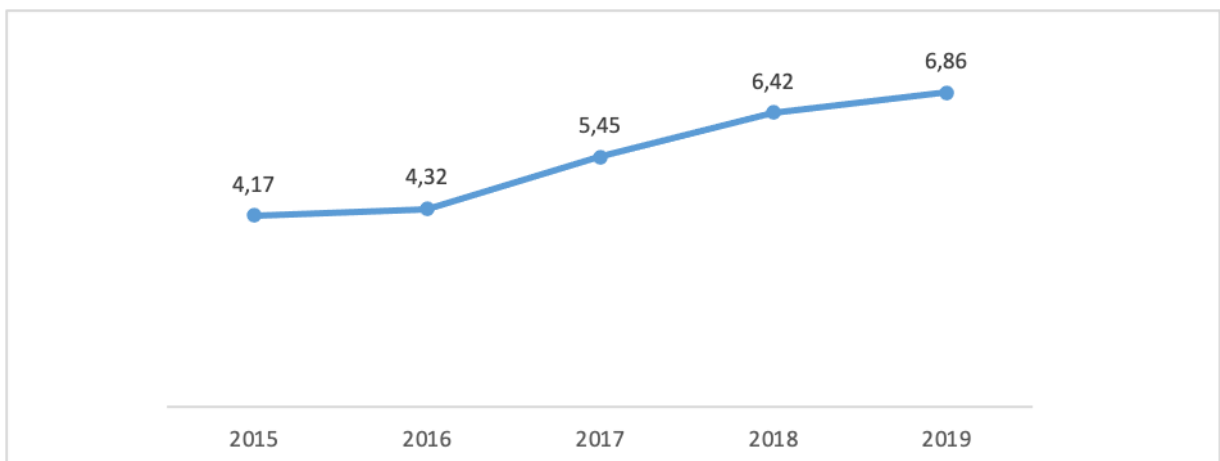


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

2.3.3.4.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan kelompok pedagang informal yang dibina mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019. Meski trennya meningkat, nilai cakupannya masih cukup kecil. Di tahun 2019 cakupan kelompok usaha informal yang dibina masih 6,86 persen, meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Di tahun 2015 persentase usaha informal yang dibina masih 4,17 persen.

Gambar 2.182. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perdagangan Kab Bone, 2020

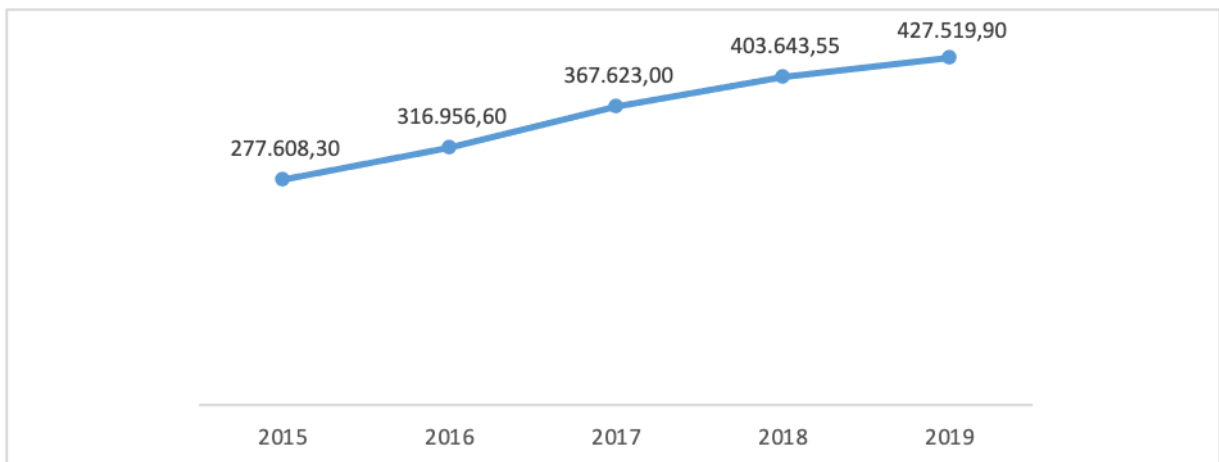
2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

2.3.3.5.1. Produksi Perikanan

Dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, sektor perikanan sendiri berkontribusi sebesar 47,37 persen terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut di tahun 2019. Artinya, hampir setengah dari total nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dikontribusikan melalui sektor perikanan. Nilai produksi perikanan Bone dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren yang terus meningkat. Hingga tahun 2019 jumlah produksi perikanan telah mencapai 427.519 ton, meningkat dibandingkan

tahun 2018 dengan capaian 403.643,55 ton. Capaian di tahun 2019 juga telah jauh melampaui capaian di tahun 2015, dimana pada tahun 2015 produksi perikanan mencapai 277.603 ton.

Gambar 2.183. Produksi Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (ton)

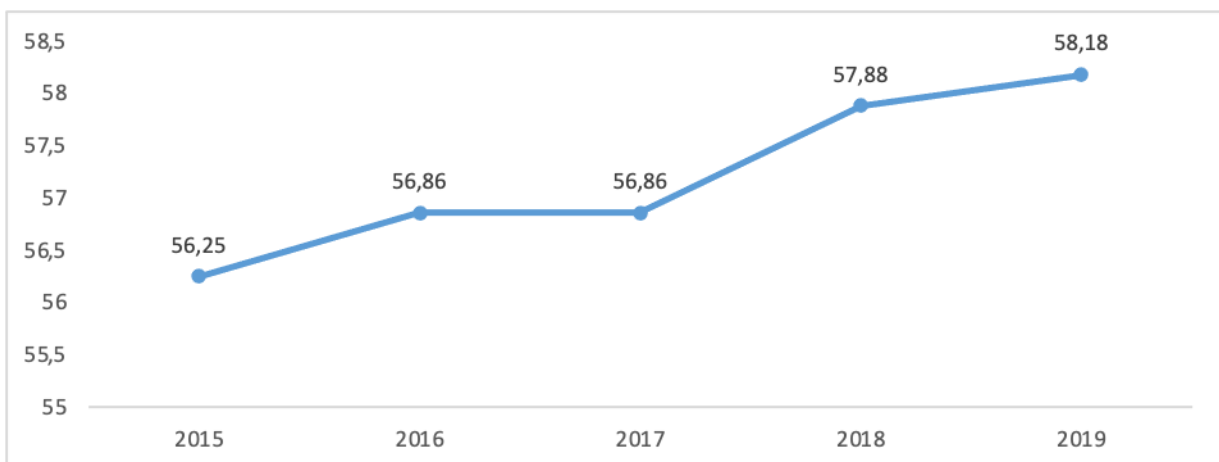


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2020

2.3.3.5.2. Konsumsi Ikan

Dalam rentang waktu antara tahun 2015-2019 terjadi peningkatan persentase konsumsi ikan di Bone. Indikator ini menggambarkan secara sederhana permintaan produksi ikan Bone untuk kebutuhan pasar lokal. Hingga tahun 2019, persentase konsumsi ikan mencapai 58,18 persen dari yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, sedikit meningkat jika dibandingkan capaian lima tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 konsumsi ikan mencapai 56,25 persen.

Gambar 2.184. Konsumsi Ikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



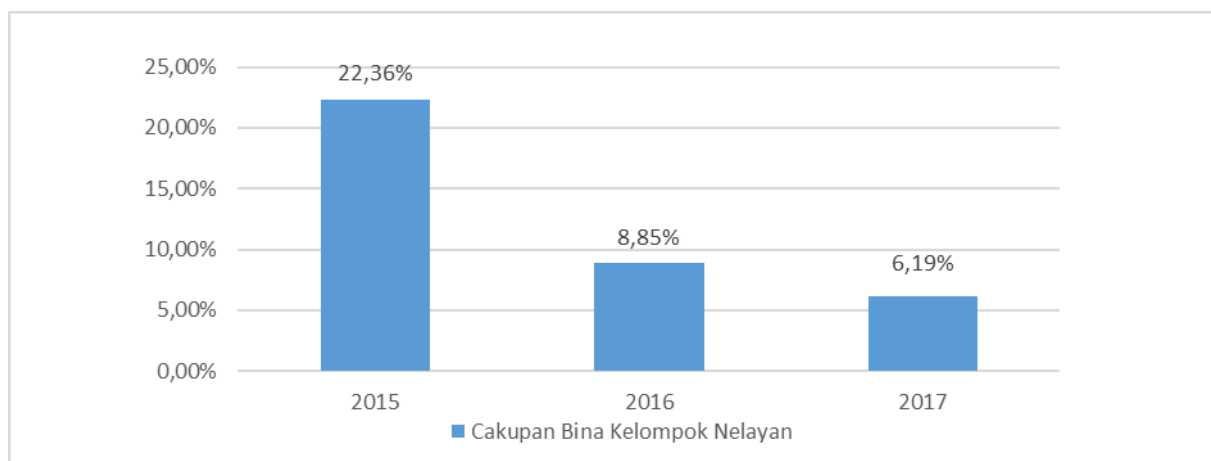
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2020

2.3.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Kegiatan pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap dan penyediaan fasilitas pendukung perikanan tangkap melalui pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan diharapkan dapat meningkatkan produksi penangkapan yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan terlihat semakin menurun dalam rentang tahun 2015-2017 sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan bina kelompok nelayan. Selain itu, pembinaan dilakukan secara bertahap dimana kelompok nelayan yang telah mendapatkan pembinaan di tahun tertentu tidak mendapatkan lagi di tahun berikutnya. Di tahun 2015 sebanyak 53 kelompok nelayan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kelompok nelayan (22,36%). Di tahun berikutnya capaian ini terus menurun dimana pada tahun 2016 sebanyak 20 kelompok (8,85%) yang mendapatkan pembinaan sementara di tahun 2017 terdapat 14 kelompok (6,19%).

Gambar 2.185. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2020

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Ditetapkan Dengan PERDA

RPJPD Kabupaten Bone Berlangsung dalam kurun waktu 2005-2025 dan telah ditetapkan dalam PERDA Kab. Bone No. 07 Tahun 2008.

2.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen RPJMD Kabupaten Bone telah ditetapkan melalui PERDA nomor 3 Tahun 2019.

2.3.4.1.4. Tersedianya Dokumen RKPD yang Ditetapkan Melalui PERKADA

Dokumen RKPD konsisten disusun tiap tahun dengan ditetapkan melalui PERKADA.

2.3.4.1.5. Tersedianya Dokumen RTRW yang Ditetapkan Melalui PERDA

Dokumen RTRW Kabupaten Bone berlaku dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2032 dengan ditetapkan melalui PERDA Kab. Bone No. 2 Tahun 2013.

2.3.4.2. Keuangan

2.3.4.2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2019 memuat opini wajar tanpa pengecualian. Capaian ini melanjutkan prestasi di tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kabupaten Bone juga memuat opini wajar tanpa pengecualian.

Meski begitu, BPK mencatat terdapat lima temuan yang penting untuk diperhatikan Pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bone tahun 2019. Temuan tersebut antara lain adalah:

1. Prosedur Penyertaan Modal di Pemkab Bone Tidak Dilengkapi Dengan Analisis Investasi;
2. Penetapan Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Optimal;
3. Pengelolaan Penerimaan PAD di RSUD Datu Pancaitana Belum Memadai;
4. Pengelolaan Belanja Hibah Kabupaten Bone Tahun 2019 Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Kelebihan Pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp139.763.173,31.

Sehubungan dengan temuan tersebut BPK merekomendasikan agar:

1. Pengelola investasi (BPKAD) selaku BUD di Pemkab Bone menyusun rencana investasi yang komprehensif dan berkelanjutan;
2. TAPD agar melakukan perhitungan yang tepat sesuai ketentuan terhadap penganggaran TPP-Beban Kerja dalam menyusun prognosis anggaran;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Tata Usaha melakukan pengawsan secara optimal terhadap pengelolaan keuangan di RSUD Datu Pancaitana; dan
4. Menginstruksikan Kepala OPD untuk lebih selektif dan cermat dalam mengusulkan penerima hibah uang.

Tabel 2.56. Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1	2015	WDP	Hasil Audit LKPD Tahun 2014
2	2016	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2015
3	2017	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2016
4	2018	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2017
5	2019	WTP	Hasil Audit LKPD Tahun 2018

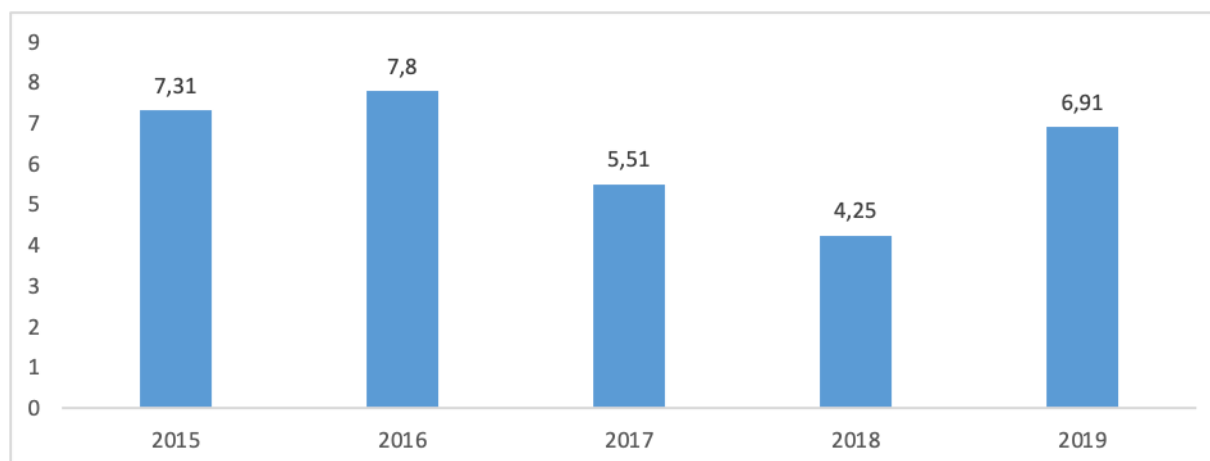
Sumber: BPK, 2020

2.3.4.2.2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Tren proporsi SILPA dalam APBD Bone cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 2015-2019. Tren peningkatan proporsi SILPA terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai 2016, lalu menurun sampai tahun 2018 hingga kembali meningkat di tahun 2019. Meski begitu secara umum, persentase SILPA terhadap PDRB cenderung menurun dalam kurun waktu tersebut. Di tahun 2019 proporsi SILPA dalam APBD Bone mencapai 6,91 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2018. Namun masih lebih rendah dibandingkan capaian di lima tahun sebelumnya dimana pada tahun tersebut persentase SILPA mencapai 7,31 persen terhadap PDRB.

Gambar 2.186. Persentase SILPA Kabupaten Bone 2015-2019

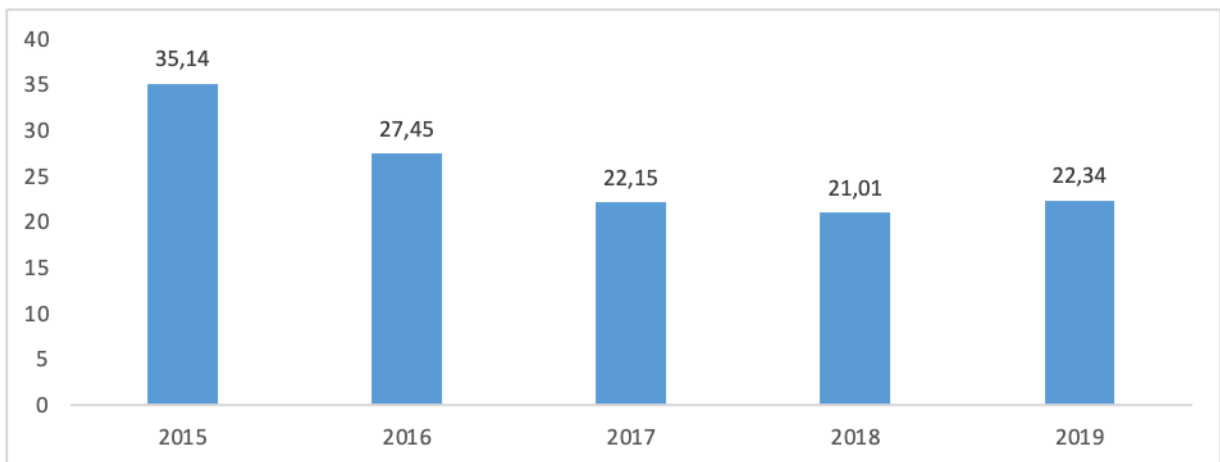


Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

2.3.4.2.3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan terhadap total APBD mengalami tren penurunan sejak tahun 2015 sampai 2019. Besarnya persentase belanja pendidikan di tahun 2015 disebabkan karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat cukup besar yang disebarkan di Dana Alokasi Khusus Pendidikan, BOS dan belanja Sertifikasi sehingga meningkatkan persentase belanja pendidikan sebesar 35,14 persen dari total APBD. Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 terjadi penurunan hingga 22,34 persen dikarenakan anggaran DAK pendidikan yang mengalami penurunan. Meski begitu capaian belanja pendidikan dalam kurun waktu tersebut masih di atas persentase yang diamanatkan dalam belanja pendidikan.

Gambar 2.187. Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

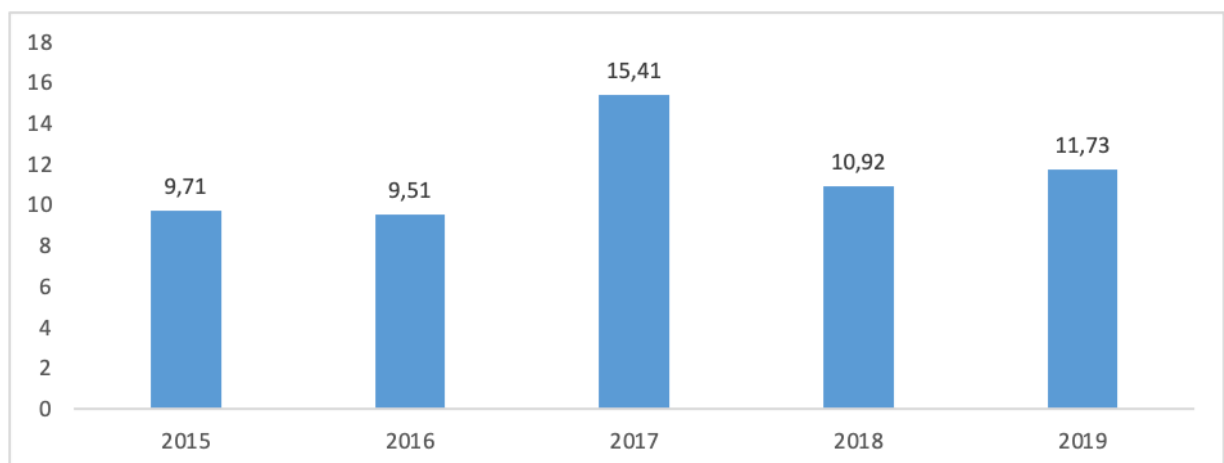


Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

2.3.4.2.4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Terjadi fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan persentase belanja kesehatan dalam APBD dalam rentang waktu tahun 2015-2019. Di tahun 2015 persentase belanja kesehatan terhadap APBD mencapai 9,71 persen lalu meningkat sampai tahun 2017 menjadi 15,41 persen. Capaian di tahun 2015 (9,71%) dan 2016 (9,51%) belum memenuhi standar minimum sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dimana anggaran kesehatan seharusnya memiliki persentase sebesar sepuluh persen. Pada tahun 2017 pengalokasian pada sektor kesehatan mencapai angka persentase 15,41 persen, capaian ini telah melebihi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di dua tahun berikutnya angka persentase ini mengalami penurunan masing-masing menjadi 10,92 persen di tahun 2018 dan 11,73 persen di tahun 2019. Meski begitu, capaian ini masih berada di atas standar nasional sebesar 10 persen.

Gambar 2.188. Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



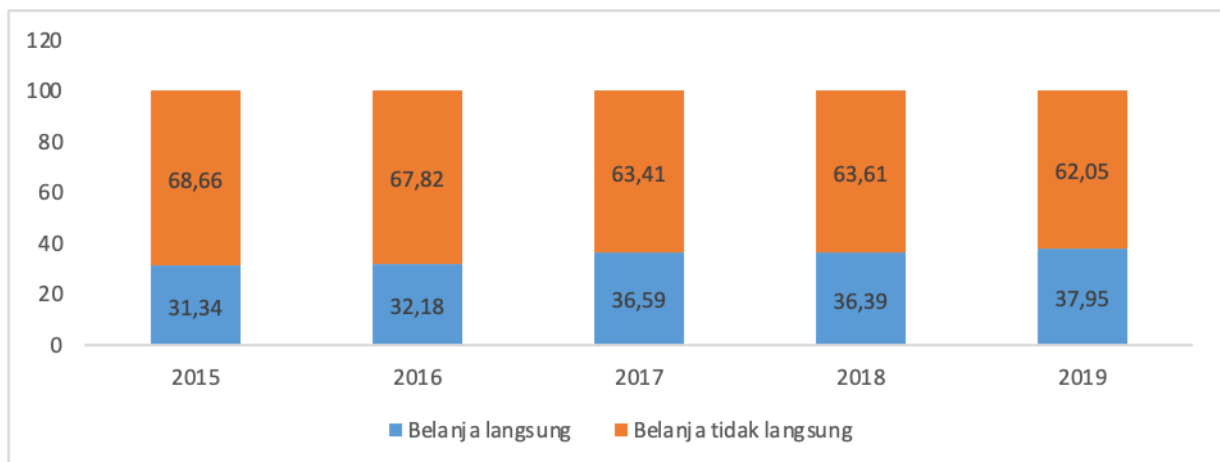
Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

2.3.4.2.5. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi APBD yang besar untuk belanja langsung akan berdampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya ketika komponen belanja langsung paling dominan adalah belanja modal.

Gambar 2. 189. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone

Tahun 2015-2019



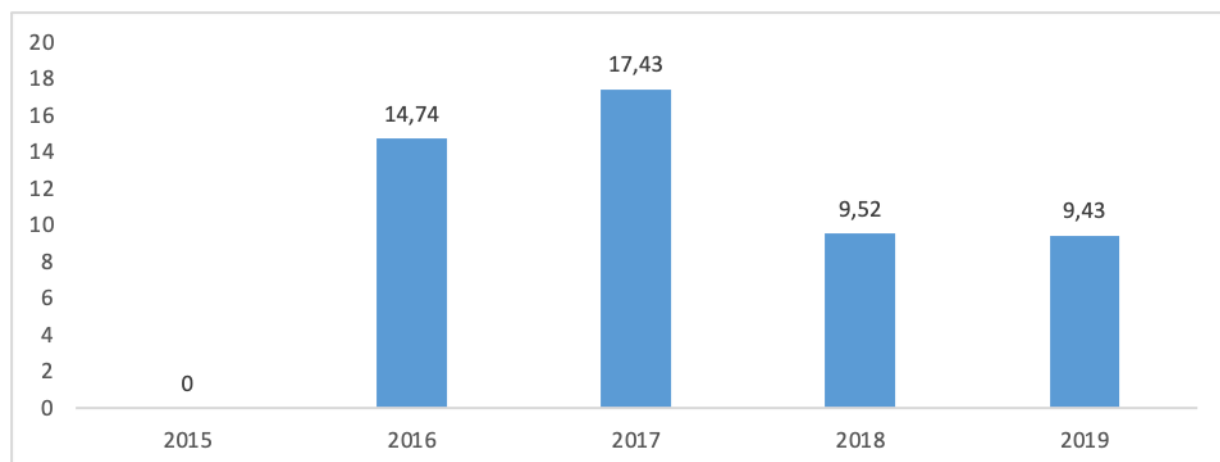
Sumber: BKAD Kabupaten Bone, 2020

Namun, sepanjang tahun 2015 sampai 2019, Kabupaten Bone mengalokasikan sebagian besar APBD untuk membiayai belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Secara rata-rata hampir 2/3 APBD Kabupaten Bone digunakan untuk belanja tidak langsung, sementara untuk belanja langsung hanya 1/3. Meski begitu persentase belanja tidak langsung ini semakin berkurang dalam kurun waktu tersebut. Di tahun 2015, alokasi belanja untuk belanja tidak langsung mencapai 68,66 persen. Capaian ini semakin berkurang di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 persentase belanja tidak langsung mencapai 62,05 persen.

2.3.4.2.6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Persentase Bagi Hasil Kabupaten Bone ke pemerintah cenderung fluktuatif dalam rentang tahun 2015-2019. Di tahun 2016, alokasi anggaran ke pemerintah desa masih mencapai 14,74 persen, lalu meningkat di tahun berikutnya menjadi 17,43 persen. Meski menurun di tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing alokasi di APBD mencapai 9,52 persen dan 9,43 persen, namun hal ini sudah memperlihatkan perbaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2015. Pada rentang tahun 2016 dan 2017 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pemerintah kabupaten wajib memberikan anggaran sebesar 10% dari Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi di daerah.

Gambar 2.190. Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Desa Kabupaten Bone Tahun 2015-2019



Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

2.3.4.2.7. Penetapan APBD

Pelaksanaan penetapan APBD Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2017 selalu tepat waktu. Hal ini dapat terealisasi karena pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Bone dilaksanakan dengan sinergi yang baik antara pihak

eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah sehingga penetapan anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tepat waktu sebelum 31 Desember.

Tabel 2.57. Penetapan APBD Kabupaten Bone Tahun 2015-2019

No	Tahun	Waktu Penetapan APBD	Hasil Penilaian
1	2015	24/12/2014	Tepat Waktu
2	2016	22/12/2015	Tepat Waktu
3	2017	30/11/2016	Tepat Waktu
4	2018	30/11/2017	Tepat Waktu
5	2019	30/11/2018	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Bone, 2020

2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.3.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dijelaskan sebagai proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat ini terdiri dari dua jenis yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Di tahun 2015, PNS di Kabupaten Bone secara rata-rata telah mengikuti kegiatan Diklat sebanyak lima (5) jam pembelajaran (JP). Jumlah JP ini kemudian meningkat di dua tahun berikutnya yaitu masing-masing tujuh (7) JP di tahun 2016 dan tujuh (7) JP di tahun 2017.

Tabel 2.58. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2017 (jam pelajaran)

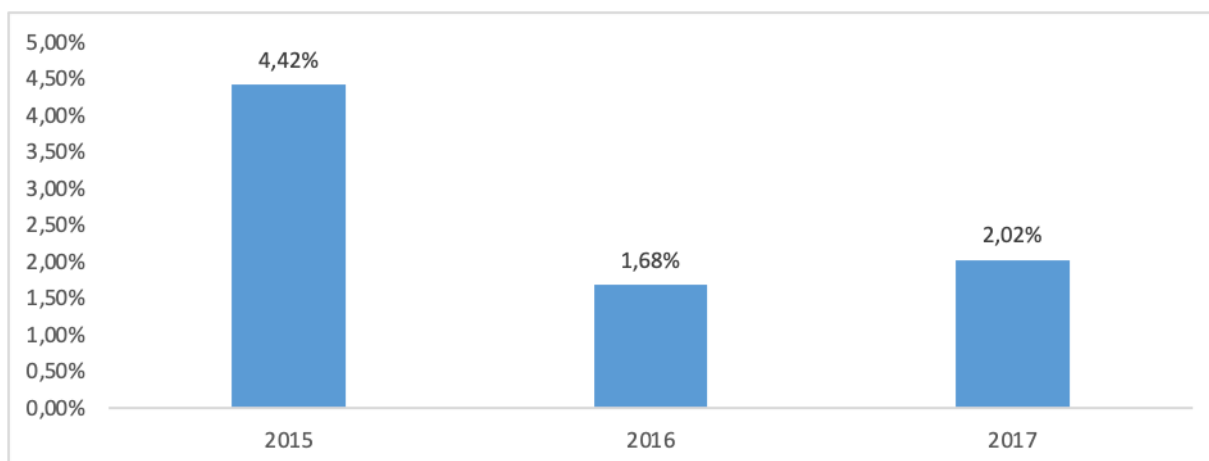
Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian		
	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 JP	7 JP	7 JP

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan dua instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebab melalui pendidikan dan pelatihan, ASN dapat meningkatkan kapasitas pelayanan mereka kepada masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2015-2017, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal cenderung menurun. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di tahun 2015 mencapai 4,42 persen lalu menurun pada titik 1,68 persen dan 2,02 persen masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Bone belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Gambar 2.191. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

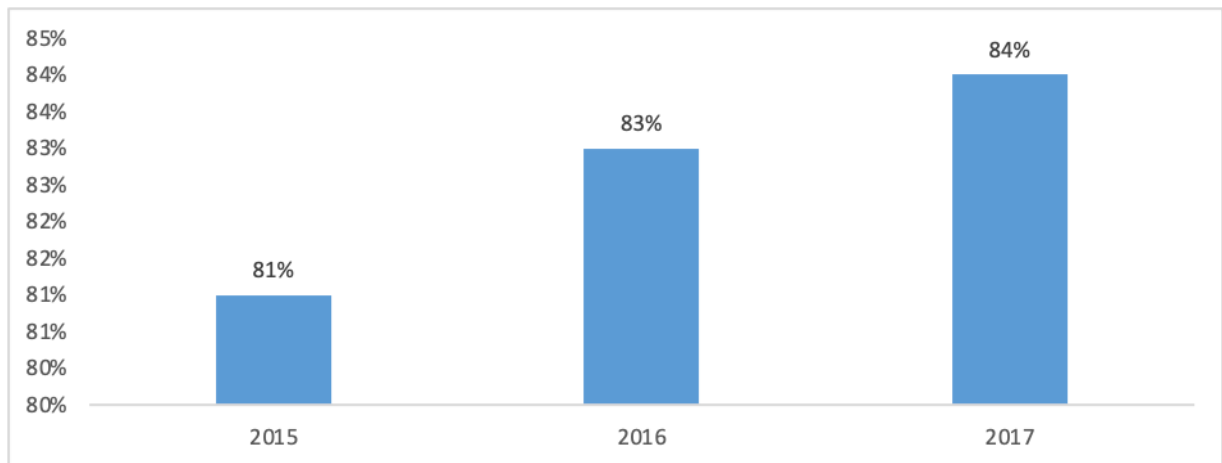


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Berbeda dengan persentase ASN secara keseluruhan, angka persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2015 sampai 2017 terus meningkat. Di tahun 2017, angka persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural telah mencapai 84 persen. Hal ini cenderung meningkat dibanding dua tahun sebelumnya. Di tahun 2015 angka persentase ini mencapai 81 persen, lalu meningkat di tahun 2016 menjadi 83 persen.

Gambar 2.192. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

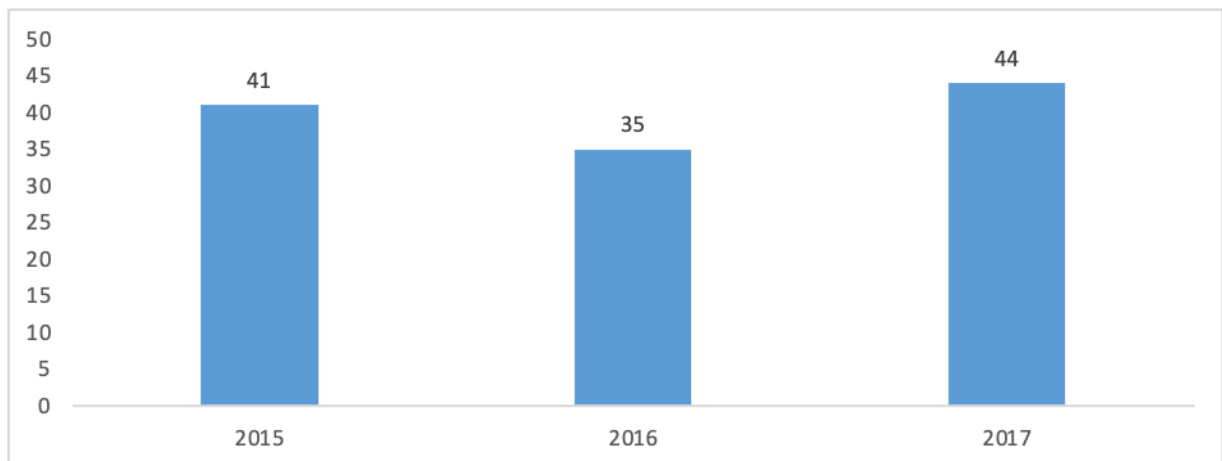


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan. Meski di tahun 2016 jumlah jabatan pimpinan tinggi sempat mengalami penurunan, yaitu dari 41 jabatan di tahun 2015 menjadi 35 jabatan di tahun 2016, angka ini kembali bertambah di tahun 2017 menjadi 44 jabatan.

Gambar 2.193. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017

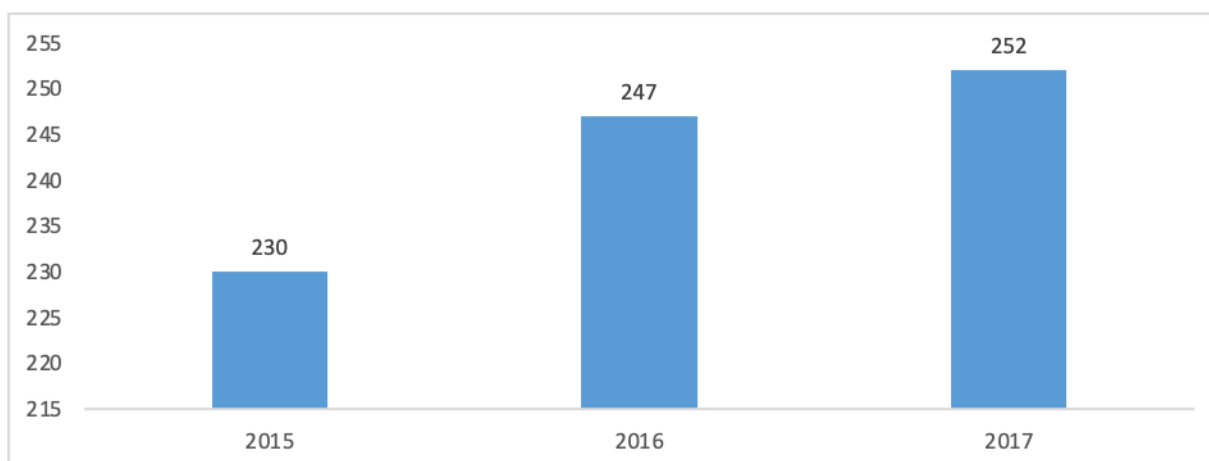


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Berbeda dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang tidak banyak mengalami perubahan, jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone justru cenderung bertambah. Pada tahun 2015, jumlah orang yang menjabat jabatan administrasi adalah 230 orang. Pada tahun 2016, terjadi penambahan cukup banyak ASN yang menjabat jabatan administrasi di Kabupaten Bone hingga mencapai 247 orang, lalu kemudian meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 252 orang.

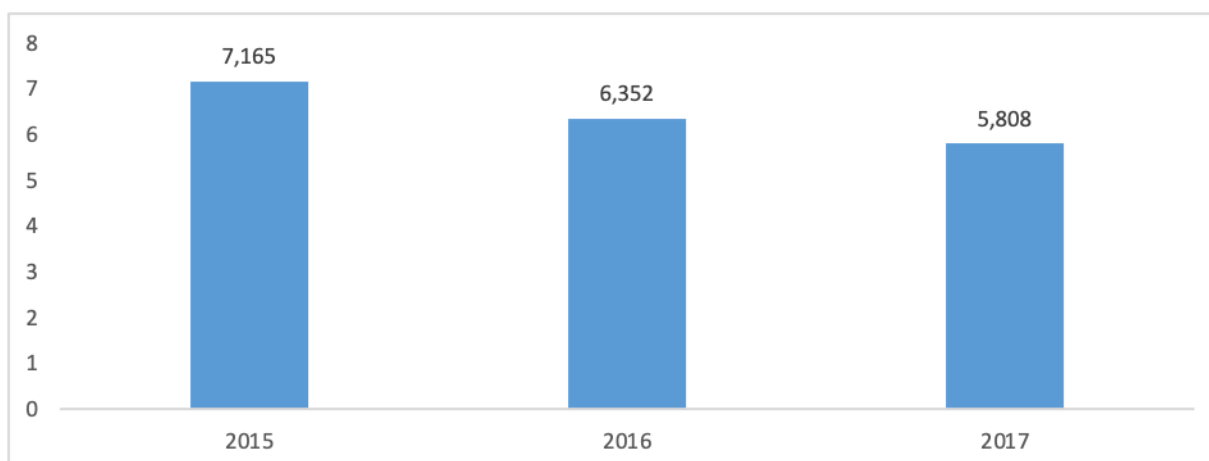
Gambar 2.194. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Gambar 2.195. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam rentang tahun 2015-2017 cenderung berkurang. Jumlah pemangku jabatan fungsional di tahun 2015 mencapai 7.168 orang. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2016, dimana jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone hanya 6.352 orang dan terus berlanjut di tahun 2017 menjadi sebanyak 5.808 orang.

Tabel 2.59. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, Tahun 2017 (orang)

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	39	-	39
SLTP/Sederajat	54	6	60
SMA/Sederajat	1.107	1.014	2.121
Diploma I, II	262	578	840
Diploma III/Sarjana Muda	88	548	636
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	2.223	3.582	5.805
Jumlah	3.773	5.728	9.501

Sumber : BPS Kab. Bone, 2018

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

2.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Jumlah kegiatan kelitbangan pada tahun 2015 mencapai dua (2) kegiatan. Di tahun 2016, kegiatan kelitbangan kemudian bertambah menjadi delapan (8) kegiatan hingga pada tahun 2017

kembali meningkat menjadi sembilan (9) kegiatan. Dalam hal pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut, capaian keberhasilan implementasinya konsisten berada di angka seratus persen setiap tahunnya.

Tabel 2.60. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2015-2017 (dalam persen)

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan Dalam RKP	Jumlah Kelitbangan Dalam RPJMD	%
1	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2016	8 Kegiatan Kelitbangan	8 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2017	9 Kegiatan Kelitbangan	9 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.61. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2015-2017 (dalam persen)

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah	%
1	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2016	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2017	4 Kegiatan Kelitbangan	4 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, 2018

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone selalu mencapai seratus persen dimana jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti mulai tahun 2015 hingga 2017 masing-masing sebanyak 2 kegiatan di tahun 2015 dan 2016 dan 4 kegiatan di tahun 2017.

2.3.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dapat terlaksana pada tahun 2017 dengan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sebanyak 75 OPD dari total 82 OPD (91%). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masih ada sekitar tujuh (7) OPD yang belum difasilitasi.

Tabel 2.62. Persentase Unit Kerja yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2015-2017 (dalam persen)

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi	Jumlah Total Perangkat Daerah	%
1	2015	-	-	-
2	2016	-	-	-
3	2017	75 OPD	82 OPD	91%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, 2018

2.3.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan terkait dengan penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Selanjutnya pada tahun 2016 dilaksanakan pengumpulan data-data terkait dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Hingga pada tahun 2017 telah dilakukan implementasi kegiatan SIDa dimana pada tahun tersebut terdapat 122 jumlah inovasi yang telah diusulkan.

Tabel 2.63. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

No	Tahun	Jumlah Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	Jumlah Inovasi yang Diusulkan	%
1	2013	2	-	-
2	2014	1	-	-
3	2015	-	-	-
4	2016	-	-	-
5	2017	-	122	-

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone, 2018

Di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bone bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara menandatangani MOU untuk menjalankan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara. Maka dengan adanya penandatanganan MOU dengan LAN RI tersebut, berbagai OPD kemudian memasukkan usulan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten dimana jumlah usulan pada saat itu terdapat sebanyak 122 usulan.

2.3.4.5. Pengawasan**2.3.4.5.1. Persentase tindak lanjut temuan**

Tabel 2. 64. Jumlah Temuan BPK-RI Dan Tindak Lanjutnya
Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI beserta Tindak Lanjut Temuannya Tahun 2006-2017

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Telah Selesai Ditindak Lanjuti		% Tindak Lanjut	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai
2017	10	-	23	31.174.700,00	18	31.174.700,00	78,26%	100%
2016	9	223.447.905.068,14	30	216.041.919.432,11	18	213.160.610.266,83	60,00%	98,67%
2015	21	489.670.425,99	52	489.670.425,99	33	489.670.425,99	63,46%	100%
2014	36	1.735.280.595,00	91	1.735.280.595,00	62	1.109.095.265,00	68,13%	63,91%
2013	34	530.328.176,29	87	530.328.176,29	48	509.254.352,29	55,17%	96,03%
2012	24	64.452.865.379,77	61	2.065.688.966,00	50	1.773.509.789,65	81,97%	85,86%
2011	16	561.250.997,30	33	511.420.958,30	29	476.987.313,00	87,88%	93,27%
2010	30	952.088.450,65	100	313.914.450,65	47	313.914.450,65	47,00%	100%
2009	17	553.708.522,50	37	553.708.522,50	34	553.708.522,50	91,89%	100%
2008	39	9.612.606.800,00	66	2.475.358.600,00	59	2.310.449.398,00	89,39%	93,34%
2007	21	11.092.520,00	44	11.092.520,00	42	11.092.520,00	95,45%	100%
2006	17	2.220.503.777,48	33	1.914.616.377,48	32	1.703.776.377,48	96,97%	88,99%
TOTAL	274	304.567.300.713,12	657	226.674.173.724,32	472	222.443.243.373,39	71,84%	98,13%

Sumber: data rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Per Desember, 2020

Data yang terdapat pada tabel di atas, mengacu pada Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pengelolaan Keuangan dan Asset Lingkup Pemerintah Kab. Bone selama kurung waktu Tahun 2006-2017 yang masing tersisa proses penyelesaian tindak lanjutnya.

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK – RI dari Tahun 2006-2017 sebanyak 274 Temuan dengan 657 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nilai temuan keuangan sebesar Rp. 304.567.300.713,12 dengan Nilai yang direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sebesar Rp. 226.674.173.724,32.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan nilai keuangannya secara umum merupakan temuan yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Dana Desa, Pengelolaan Asset, Sertifikasi Guru, dan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan serta Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Nilai Keuangan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, pertanggungjawaban dana desa merupakan aspek temuan yang harus mendapat perhatian lebih bahkan menjadi isu strategis hingga tingkat Nasional. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa kedepannya menjadi salah satu prioritas utama dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone tanpa mengabaikan aspek temuan lainnya, sehingga jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dapat berkurang secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya

Dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI hingga Tahun 2017, sesuai Tabel di atas diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut berdasarkan jumlah rekomendasi temuan sebesar 71,84 % dan persentase penyelesaian tindak lanjut berdasarkan nilai rekomendasi temuan sebesar 98,13 %. Tersisa 185 Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, yang terdiri dari 173 Temuan Administratif dan 12 Temuan Keuangan dengan nilai keuangan sebesar Rp. 4.230.934.221,35.

Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK-RI sebesar 71,84 % masih kurang dari target capaian kinerja sebesar 90 % hingga Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah termasuk Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga kedepannya kinerja penyelesaian tindak lanjut ini akan ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun Tim Tindak Lanjut Kabupaten.

Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri atas: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita, Produktivitas Total Daerah, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa, Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum, Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR, Angka Kriminalitas Yang Tertangani, dan Rasio Ketergantungan.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumahtangga perkapita di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan secara progresif. Pengeluaran konsumsi pangan rumahtangga tahun 2015 sebanyak Rp. 259.057 perkapita dan pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi telah mencapai Rp. 360.172 perkapita. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat meningkatnya pemenuhan berbagai jenis kebutuhan rumahtangga. Selain itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan pangan rumahtangga.

Tabel 2.65. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019 (Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran konsumsi rumah	259.057	310.213	331.890	331.908	360.172

	tangga Per Kapita					

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan

Sejak lima tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2015 sampai tahun 2016, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017, namun demikian kembali meningkat pada tahun 2018.. Data dalam waktu lima tahun terakhir proporsi pengeluaran non pangan meningkat dari 49.02 % menjadi 51.52 % pada tahun 2019. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Asumsi tersebut berdasarkan teori Engel yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka proporsi pengeluaran untuk non pangan semakin besar.

Tabel 2.66. Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita di Kabupaten Bone Tahun 2015-2019(Rp)

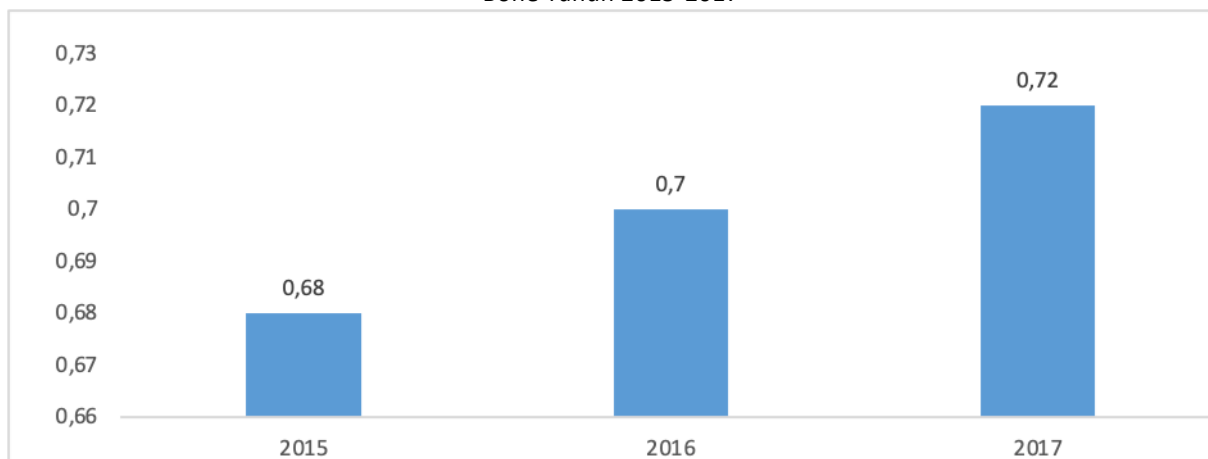
No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	49.02 %	49.65 %	48.90 %	51.58%	51.52%

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020

2.4.2. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Perekonomiaan daerah tidak hanya bertumpu pada produksi barang dan jasa domestic, namun berkaitan juga dengan aktivitas perdagangan dengan daerah lain. Semakin besar aktivitas perdagangan daerah maka semakin terbuka perekonomian daerah tersebut dan tentu menguntungkan jika aktivitas ekspor lebih besar daripada impor. Hal itu pula yang terjadi di Kabupaten Bone, dimana dalam lima tahun terakhir perekonomiannya semakin terbuka. Keterbukaan ekonomi Kabupaten Bone dapat dilihat dari rasio ekspor dan impor terhadap PDRB yang konsisten meningkat dari 0,66 tahun 2013 menjadi 0,68 tahun 2014 dan 2015. Kenaikan angka keterbukaan ekonomi Kabupaten Bone terulang di tahun 2016 dan 2017 masing-masing mencapai 0,70 dan 0,72.

Gambar 2.196. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Bone Tahun 2015-2017



Sumber: BPS, 2018

2.4.3. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 2.67. Jumlah Kasus Kriminal yang Dilaporkan dan Diselesaikan Kabupaten Bone Tahun 2019

Kasus Kriminal	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Kasus yang Dilaporkan	Persentase Kasus yang Diselesaikan
Kebakaran	35	35	2,93	3,75
Perzinaan	5	9	0,42	0,96
Perjudian	6	3	0,50	0,32
Pembunuhan	8	11	0,67	1,18
Penganiayaan Berat	6	5	0,50	0,54
Penganiayaan Ringan	107	107	8,97	11,46
Pencurian Berat	3	3	0,25	0,32
Pencurian Ringan	86	49	7,21	5,25
Pencurian dengan Kekerasan	3	2	0,25	0,21
Pencurian Kendaraan Bermotor	18	12	1,51	1,28
Pencurian Hewan	8	7	0,67	0,75
Narkoba	62	58	5,20	6,21
Penggelapan	20	14	1,68	1,50
Penipuan	18	19	1,51	2,03
Pengrusakan	19	10	1,59	1,07
Panadahan	-	-	0,00	0,00
Kejahatan Lain-lain	153	121	12,82	12,96
Pelanggaran KUHP/Non KUHP	-	-	0,00	0,00
Laka Lantas	636	469	53,31	50,21
Jumlah	1.193	934	100,00	100,00

Sumber: BPadan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020

Sepanjang tahun 2017, tercatat angka kriminalitas di Kabupaten Bone yang dilaporkan sebesar 1.193 kasus, namun yang bisa diselesaikan hanya 934 kasus atau 78,29 persen. Masyarakat Kabupaten Bone sebagian besar melaporkan beberapa kasus kriminal, namun yang paling banyak dilaporkan adalah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas). Pada tahun 2017, lebih dari 1/2 tindakan kriminal Laka Lantas dilaporkan ke pihak berwenang dengan jumlah kasus mencapai 636, namun yang mampu ditangani hanya 469 kasus atau 50,21 persen. Tidak hanya Laka Lantas yang tidak semua laporan mampu diselesaikan, beberapa kasus seperti pencurian ringan, pencurian kendaraan bermotor, narkoba, dan kejahatan lainnya belum sepenuhnya tuntas diselesaikan.

Pada tahun 2017, pelaporan pencurian ringan mencapai 86 kasus atau 7,21 persen dari total tindakan kriminal yang dilaporkan, tapi hanya 49 kasus yang dapat diselesaikan atau proporsinya hanya 5,25 persen dari seluruh kasus yang diselesaikan. Begitupun dengan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dimana persentase kasus yang dilaporkan mencapai 1,51 persen sedangkan kasus terselesaikan hanya 1,28 persen.

Kasus kriminal ekstraordinari (luar biasa) seperti peredaran narkoba nampaknya juga masih sulit untuk diselesaikan di Kabupaten Bone meski pihak berwenang berupaya untuk menekan laju perdagangan obat-obat terlarang. Tahun 2017, sebanyak 62 kasus kejahatan narkoba dilaporkan, jumlah tersebut setara dengan 5,20 persen dari seluruh laporan kasus kriminal yang masuk sepanjang tahun 2017. Tetapi, pihak berwenang hanya mampu menyelesaikan sebanyak 58 kasus atau 6,21 persen dari semua kasus yang berhasil diselesaikan.

2.4.4. Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan menghubungkan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok bergantung secara ekonomi dengan kelompok yang kemungkinan besar menjadi kelompok yang aktif secara ekonomi. Melalui angka beban ketergantungan, dapat diketahui juga kelompok mana yang lebih bergantung kepada para pekerja, apakah kelompok anak-anak yang lebih dominan, atau kelompok penduduk usia lanjut yang lebih dominan. Dengan demikian, penetapan kebijakan dukungan sosial terhadap masing-masing kelompok dapat lebih terfokus dan tepat sasaran.

Angka beban ketergantungan yang tinggi mengindikasikan bahwa penduduk yang aktif secara ekonomi menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan menyediakan pelayanan sosial

yang dibutuhkan oleh anak-anak dan penduduk usia lanjut yang secara ekonomi bergantung terhadap mereka. Tingginya angka beban ketergantungan penduduk muda berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak

Tabel 2.68. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Bone Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	27.88	27.57	27.28	27.02	26.77
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	7.40	7.52	7.64	7.78	7.93
3	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	64.72	64.91	65.07	65.20	65.30
4	Angka Beban Ketergantungan	54.52	54.06	53.67	53.36	53.14

Sumber: Indikator Kesra Kabupaten Bone 2019

Tabel 2.68. memperlihatkan perkembangan angka beban ketergantungan Kabupaten Bone tahun 2015 -2019 menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, angka beban ketergantungan sebesar 54,52 dan terus menurun hingga menjadi 53,14 pada tahun 2019. Angka tersebut bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 53 hingga 54 penduduk tidak produktif.

2.4.5. Fokus Iklim Berinvestasi

Lama proses penerbitan layanan perizinan pada tabel diatas adalah merupakan standard pelayanan maksimal, yang mana rata rata proses layanan selama 3 (tiga) hari kerja, kecuali beberapa izin yang memerlukan kajian dan kunjungan lapangan (bila diperlukan), memerlukan waktu proses layanan perizinan lebih dari 3 hari kerja tergantung dari jumlah tim teknis yang terlibat dalam kajian teknis terkait izin tersebut. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang prosesnya mencapai 12 (dua belas) hari kerja, izin Tenaga Izin Usaha Penanaman Modal 6 (enam) hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal 7 (tujuh) hari kerja dan beberapa izin yang penerbitannya maksimal 5 (lima) hari kerja.

Tabel 2.69. Lama Proses Pelayanan Perizinan Tahun 2019

NO	JENIS IZIN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12 (dua belas) Hari Kerja.*
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) Hari Kerja.*
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3 (tiga) Hari Kerja.*
4	Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI)	5 (lima) Hari Kerja.*
5	Tanda Daftar Gudang	5 (lima) Hari Kerja.*
6	Izin Reklame	5 (lima) Hari Kerja.*
7	Izin Sarana Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
8	Izin Tenaga Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
9	Izin Penelitian	3 (tiga) Hari Kerja.*
10	Izin Lingkungan	3 (tiga) Hari Kerja.*
11	Izin Lokasi	5 (lima) Hari Kerja.*
12	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	5 (lima) Hari Kerja.*
13	Izin Trayek	5 (lima) Hari Kerja.*
14	Tanda Daftar Perusahaan	3 (tiga) Hari Kerja.*
15	Izin Prinsip Penanaman Modal:	
	Izin Prinsip PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perluasan PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perubahan PMDN	5 (lima) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Penggabungan PMDN	7 (tujuh) Hari Kerja.*
16	Izin Usaha Penanaman Modal :	
	Izin Usaha PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perluasan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perubahan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Penggabungan PMDN	6 (enam) hari kerja.*

17	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	3 (tiga) Hari Kerja.*

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, 2018

Lama Proses layanan perizinan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat 6 pasal 4 Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017, proses pengelolaan pelayanan perizinan mengacu pada standar pelayanan. Evaluasi kinerja terkait pelaksanaan Standar Pelayanan terkait kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP akan dimonitoring melalui kartu kontrol dan sistem monitoring oleh Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan 3 Bulan sekali yang hasilnya dipublikasikan dan dilaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Bupati. Adapun Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi yaitu : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal.

2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2. 70. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bone

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
5	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia								
6	Indeks Ketimpangan Williamson								
7	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan		10,72	10,07	10,28	10,55	10,06	10,08	10,0
8	Rasio Kesenjangan Kemiskinan		0,75	0,4	0,31	0,39	0,37		
9	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 per kapita per hari								
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		63,11	63,86	64,16	65,04	65,67		
11	Angka Melek Huruf (AHM)		50%	51%	100%				
12	Angka Rata-rata Lama Sekolah								
13	Angka Usia Harapan Hidup		66,01	66,12	66,22	66,5	66,88	66,64	66,8
14	Persentase Balita Gizi Buruk		0,44	0,4	0,25	0,49	0,37	7,47	6,2
15	Prevalensi Balita Gizi Kurang		3,85	3,42	4,29	7,59	5,91		
16	Cakupan Desa Siaga Aktif								
17	Angka Partisipasi Angkatan Kerja				4,55%	4,40%	4,30%	4,30%	
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja								
19	Tingkat Pengangguran Terbuka		3,51	3,80	4,55	4,40	4,55	4,30	4,5
20	Rasio Penduduk Yang Bekerja		96,49	96,2	95,04	95,64	95,45		
21	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja								
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas								
23	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja								

24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1								
25	Indeks Kepuasan Masyarakat								
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen							
27	Opini BPK		Wtp	Wtp	Wtp				
28	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	76	85	87	87,5	90	87,5	90
29	Penguatan Cadangan Pangan	Persen	10	10	10	-	15	15	15
30	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	60	60	60	60	60	60	60
31	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Persen	27,57	28,04	27,23				
32	kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	61,50	62,40	63,10				
33	Produksi Sektor Pertanian	Ton	1.320.000	1.520.842	1.664,71				
	- Padi	Ton	983.219	1.058.812	1.228.702	1.428.883	971.941	1.514.616	6
	- Jagung	Ton	284.070	379.789	424.441	402.486	403.044	426.635	9
	- Kedele	Ton	28.548	53.881	12.959	13.047	4.388	13.830	3
	- Cabe merah	Ton	2.003	1.650	1.330,0	22.060	1.843,8	23.000	
	- Bawang Merah	Ton	1.225	1.406	2.002,9	25.618	2.589,9	28.000	
34	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	26,81	25,63	24,92				
35	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	39.518	74.236	36.137				
	- Kakao	Ton	17.474.000	18.079.000	12.233.740	10.692.576	8.606.460	11.185.000	7
	- Cengkeh	Ton	3.769.000	4.748.000	4.744.559	4.949.310	5.056.760	5.098.000	9
	- Kelapa dalam	Ton	10.895	12.204.000	12.785.213	12.345.500	12.201.913	14.421.000	8
	- Tebu	Ton	7.035	36.238.793	40.133.700	40.561,01	42.510.310	42.042.000	10
	- Tembakau	Ton	374	373	530,37,000	765,7,000	753.622,86	780.000	9

36	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB								
37	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	0,10	0,10	0,10				
38	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	3,72	3,75	3,63	3,64	34,3	39,05	8
39	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0,125	0,154	0,165				
40	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	21,57	21,18	22,04				
41	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10,98	11,58	11,87	11,76	12,11	11,77	10
42	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	6,93	6,81	6,86	6,35	6,98	7,07	9
43	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB sektor Industri	Persen	8,98	10,98	12,98				
44	Pertumbuhan Industri	Persen	7,30	9,08	7,37	2,42	16,62		
45	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB								
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita		259.057	310.213	331.890				
2	Nilai Tukar Petani								
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	Persen	49,02	49,65	48,9				
4	Produktivitas Total Daerah								
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa								
6	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	Persen	0,68	0,7	0,72				
7	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum								
8	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR								

9	Angka Kriminalitas Yang Tertangani							82,34	121,
10	Rasio Ketergantungan	Persen	45,98	46,15	45,84				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan								
1.2.	Angka Partisipasi kasar		63,24%	60,38%	59,00%				
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan		9,020%	8,913%	6,285%				
1.4.	Angka Partisipasi Murni								
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/Paket C		69,32%	69,54%	71,21%				
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C								
1.6.	Angka Putus Sekolah:								
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		0,01%	-	-				
1.7.	Angka Kelulusan:								
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		100%	100%	100%				
2.	Kesehatan								

2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	7,19%	7,11%	5,83%	7,11%	5,83%		
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	0,36%	0,01%	0,27%				
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	7,33%	7,61%	6,13%	7,61%	6,13%		
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	6,54	6,09	4,56				
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	100,73%	87,05%	67,30%	87,05%	0,67		
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	%	12,39%	0,53	0,53				
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,17%	0,17%	0,17%				
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,00%	0,01%	0,01%				
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,45%	93,12%	92,28%	93,12%	92,28%		
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	98,92%	94,89%	99,19%				
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	0,97	0,92	100				
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,91	2,00	3,00				
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100				
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	4,92	17,08	26,35				
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	81	89					
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	3,4	2,7					

2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	12	13					
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	87	86					
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100					
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	0,220	0,160	0,190				
2.26.	Angka kejadian Malaria	%	0	0	1,4				
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%							
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%							
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100				
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%							
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%							
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%							
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	64,15	67,00					
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	100,00	99,81	69,37				
2.35.	Cakupan puskesmas	%	1,40	1,40	1,40	7,61	6,13		
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	19,89	19,89	19,89	19,89	19,98		
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94,62	93,63	94,07				

2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	91,09	92,30	89,70	93,63	94,07		
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	80,18	69,07	69,34	92,30	89,70		
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	68,24	70,52	70,21				
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100				
2.42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	85,70	91,00	86,60				
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100				
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%							
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%							
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		41,04%	43,21%	45,24%	44,01%	36,88%		
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		-						
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		-	-	-	-	-		
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		57,46%	61,68%	71,25%	59,18%	90,20%		
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air								

	(minimal 1,5 m)								
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar								
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70,81	73,34	84,82		76,18	77,62	
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%				83,5			
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	74,29	76,59	78,35		78,35	78,75	
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		0%	0%	0%	0%	0%		
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor								
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen			78,10	78,65	79,05	79,48	99,46
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha			3,71	4,30	4,31	4,68	92,09
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum								
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan								
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh	%					0,048	0,04625	0,048
3.1.17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan								
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk								
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk								

3.2.	Penataan Ruang:								
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya		-	-	0	0	0	0	0
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		-	-	20,95%	20,95 %	20,95%	20,95%	20,95%
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW		-	-	99%	99,8%	99,7%		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Rasio rumah layak huni	%			22		6,88	6,88	6,88
4.2.	Rasio permukiman layak huni								
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni						95,00		
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau								
4.5.	Persentase permukiman yang tertata	%				0,25	0,25	0,30	0,25
4.6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%		0,10	0,10	0,10	0,16	0,20	0,16
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-

4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)								
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)								
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	KK	70	55	50	47		74	
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)								
5.5.	Persentase Penegakan PERDA								
6.	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		92,66	90,69	91,03	90,62	91,03		
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani		57,00	55,49	62,69	55,49	62,69		
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		92,66	90,69	90,69	90,69	90,69		
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		0,36	0,70	1,43				
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		50	50	50				
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang		4,03	4,03	4,03				

	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial								
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100	35,65	12,96				
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		100	64,35	87,04				
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		17,41	18,07	18,07				
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1.	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		9	11	11				
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		3	6	5				
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		5,269	3,049	5,509				
1.4.	Keselamatan dan perlindungan								
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		3,400	4,500	5,700				
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		640	890	576				
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		256	336	192				
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		20	20	20				
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3		2,89	3,08	3,08				

2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		1,621	1,634	1,464	1,634	1,464		
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		86,67	86,67	86,67				
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		0	0	0				
2.4.	Rasio KDRT		0,07	0,12	0,05				
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur								
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan		91,23	94,46	94,46				
3.	Pangan								
3.1.	Ketersediaan pangan utama								
	a. Beras	Ton	153,4	155,36	157,2				
	b. Jagung								
	c. Kedelai								
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kkal/kapita/hari	2,100	2,100	2,800				
		gram/kapita/hari	59	59	59				
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	65	70	75				
4.	Pertanahan								
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat								

4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara								
4.3.	Penyelesaian izin lokasi								
5.	Lingkungan Hidup								
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	point			50	50	52,94	50	52,94
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	point			70	70	76,59	70	76,59
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan								
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota				59	90	108	50	108
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	tidak ada MHA di Kab. Bone			-	-	-		-
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional				-	-	-		-
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional				-	-	-		-
5.37.	Penetapan hak MHA				-	-	-		-
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan				-	-	-		-
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana								

5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				33	1	13	5	13
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada			6	12	9	-	9
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%			100	100	100	85	100
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	Ton			70.387	70.387	72,89		72,89
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%			10,62	14,5	14,6		14,6
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan								
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%			25	25	25	25	25
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	point	-	-	71,6	69,83	-	-	-
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,70	0,76	0,81	0,86	0,92	0,81	0,92
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran		0,69	0,72	0,81	0,81	0,92	0,81	0,92
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah								

6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	70,02	76,02	80,77	86,48	91,80	86,79	91,80
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	68,83	72,08	81,17	79,51	87,41	80,00	87,41
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		98,5	100	100				
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		69,30	85,69	97				
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		100	100	5,6				
7.4.	Persentase LSM aktif		55,30	61,90	74,40				
7.5.	Persentase LPM Berprestasi		60	76,70	90				
7.6.	Persentase PKK aktif		100	100	100				
7.7.	Jumlah Posyandu aktif		942	941	970				
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		80,30	83	85				
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat								
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0,59	0,55	0,54	0,55	0,54		
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,4	2,4	2,1	2,10	2,10		

8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB								
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk								
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk								
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan								
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		-	-	-				
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga								
8.9.	Ratio Akseptor KB								
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		66,69	66,05	67,21				
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)								
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun								
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		18,95	18,03	17,89				

8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		31,19	35,58	28,93	33,58	23,93		
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi								
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		49,22	51,25	54,03	51,25	54,03		
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		35,14	38,12	41				
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		31,66	33,02	35,02				
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		7,41	7,41	7,41				
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa								
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		100	100	100				
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		44,27	46,78	49,30				
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		100	100	100				
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		100	100	100				
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		100	100	100				

8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		100	100	100				
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)								
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		100	100	100				
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		66,50	71,00	79,50				
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita								
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes								
9.	Perhubungan								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	42,742	48,893	32,880	33,400	25,000	35,000	25,000
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00016	0,00053	0,003	0,007	0,0006	0,0006	0,0006
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	3,970	3,090	2,169	3,254	3,200	3,280	3,284
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	12	12	12	12	12	12	12
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,08	0,0004	0,002	0,0004	0,0041	-	0,0041
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	104	106	103	106	101	100	101
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	339	-	50	-	7	150	7

9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1 : 60	1 : 60	1 : 60	1 : 75	1 : 75	1 : 75	1 : 75
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Barang	49,625	38,625	27,112	40,675	41,000	41,000	41,005
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Barang	49,625	38,625	27,112	40,671	41,000	41,000	41,005
10.	Komunikasi dan Informatika								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%							
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	-	-				
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	91%	91%					
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%							
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%							
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	50,21	58,96	85,1	30,39	31,4		3,4
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif								
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif								
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	50,21	58,96	85,1	99,5	99,5		99,5
12.	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	22	28	66				

12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)								
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja								
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)								
13.	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif		81,25%	84%,38 %	90,66%				
13.2.	Persentase wirausaha muda		97,69%	98,14%	99,01%				
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga		29,62%	29,63%	35,71%				
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		83,83%	84,35%	86,15%				
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda		53,04%	54,26%	54,68%				
13.6.	Jumlah atlet berprestasi		45	62	69				
13.7.	Jumlah prestasi olahraga		8	8	8				
14.	Statistik								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi								
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"								
14.3.	Buku "PDRB"								
15.	Persandian								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi								

	Perangkat Daerah								
16.	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		83,33%	100%	133%				
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		80%	80%	90%				
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		75,00%	87,50%	100%				
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		66,67%	100%	100%				
17.	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun								
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah								
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk								
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun								
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan								
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat								
18.	Kearsipan								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku								
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan								
	Layanan Urusan Pilihan								

1.	Pariwisata								
1.1.	Kunjungan wisata								
	a. Wisatawan Nusantara								
	- Wisatawan Lokal	Orang	80.382	91.800	96.140	210.167	239.933	238.933	239.933
	- Wisatawan Domestik	Orang	30.116	31.200	31.200	40.433	255.320	54.767	255.320
	b. Wisatawan Mancanegara	Orang	584	500	460	500	792	700	792
1.2.	Lama kunjungan Wisata								
	a. Wisatawan Nusantara	Hari	4	5	5	5	5	5	5
	b. Wisatawan Mancanegara	Hari	3	3	3	3	3	3	3
1.3.	PAD sektor pariwisata	Rupiah	226.432.000	277.611.000	297.800.000	764.351.000	838.209.000	800.000.000	838.209.000
2.	Pertanian								
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	27,57	28,04	47,04	48,31	49,34	49,37	99,94
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	61,5	62,4	63,1				
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	26,81	25,63	24,92				
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB								
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	983.219	1.058.812	58,81	59,03	48,10	49,21	97,74

2.6.	Cakupan bina kelompok petani	Klp.Tani	170.853	187.939	76,49	81,28	83,27	48,88	170,36
3.	Kehutanan								
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	539,34	435					
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	3,32	3,32					
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan								
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	82,89	87,41	93,62	99,45	97,78	95	102,92
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	%	0,88	0,94	1,09				
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Perdagangan								
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	4,17	4,32	5,45	6,42	6,86	5,67	121%
6.	Perindustrian								
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,13	1,57	3,12				
7.	Transmigrasi								
7.1.	Persentase transmigran swakarsa								
8.	Kelautan dan Perikanan								

8.1.	Produksi perikanan	Ton	277,608.3	316.956 ,60	367.623 ,00	403.64 3,55	427,519 .9		
8.2.	Konsumsi ikan	%	56,25	56,86	56,86	57,88	58,18	58,17	
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	22,36	8,85	6,19				
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	201,8	149,37	111				
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman								
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial								
8.7.	Nilai tukar nelayan								
	Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada						
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada				Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada						
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%							
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%							

1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%							
2.	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2.2.	Persentase SILPA	%		7,8	5,51	4,25	6,91	100	100
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,31	7,8	5,51	4,25	6,91		
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	99	99	99				
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	98	98	99				
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	35,14	27,45	22,15	21,01	22,34	100	92,46
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	9,71	9,51	15,41	10,92	11,73	100	97,60
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung	%	31,34	32,18	36,59	36,39	37,95	100	93,28
	Perbandingan antara belanja tidak langsung	%	68,66	67,82	63,41	63,61	62,05	100	93,77
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0	14,74	17,43	9,52	9,43	100	99,86
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	24/12/2014 Tepat Waktu	22/12/2015 Tepat Waktu	30/11/2016 Tepat Waktu				
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	5 JP	7 JP	7 JP				
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti	%	4,42%	1,68%	2,02%				

	pendidikan dan pelatihan formal								
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	81%	83%	84%				
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	41	35	44				
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	230	247	252				
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	7,165	6,352	5,808				
4.	Penelitian dan pengembangan								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	kegiatan	2 keg	8 keg	9 keg				
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	kegiatan	2 keg	2keg	4 keg				
	Penerapan SIDA:								
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	jumlah	-	-	75 opd				
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	-	-	-				
5.	Pengawasan								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan								
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai								
5.3.	Jumlah temuan BPK	miai	21	10	20	19	0	0	
6.	Sekretariat Dewan								

6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota								
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD								

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses ini akan melibatkan banyak peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang terbaru sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai dasar hukum itu menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga urgensi gambaran keuangan daerah sebagai sebuah rangkaian proses perencanaan dan penganggaran harus disusun secara sistematis, logis dan akurat menjadi sebuah keniscayaan. Termasuk dalam penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bone ini. Dalam perspektif Perubahan RPJMD ini, penyajian gambaran keuangan daerah secara series akan mencakup update lima tahun realisasi (2015-2019) serta perubahan perspektif tahun rencana menjadi hanya tiga tahun (2021-2023). Gambaran keuangan daerah, fokus analisisnya pada dua aspek penting, yakni kinerja keuangan daerah masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja APBD dan beserta dengan segenap komponen-komponennya dan yang terkait dengan kinerja neraca daerah beserta dengan analisis rasio keuangan daerah. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu melingkupi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan daerah. Penyajian kinerja keuangan masa lalu, secara series akan mengalami perubahan dari series 2013-2017 menjadi series 2015-2019, melakukan update data realisasi keuangan daerah dua tahun terakhir (2018-2019) dan penghapusan penyajian dua tahun awal (2013-2014). Sedangkan penyajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, perubahannya pada update series dua tahun terakhir menjadi 2017-2019.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi analisis kinerja pelaksanaan APBD yang terdiri dari analisis pendapatan daerah beserta rinciannya, analisis belanja daerah beserta rinciannya, dan analisis pembiayaan daerah. Bagian ini juga menganalisis Neraca Daerah untuk memperoleh gambaran mengenai posisi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar atau memenuhi segala kewajibannya. Analisis tentang Neraca Daerah antara lain menggunakan alat analisis rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambaran kinerja APBD, disajikan secara sistematis mulai sisi pendapatan daerah beserta semua komponen-komponennya, sisi belanja daerah beserta dengan komponen-komponennya. Terakhir terkait pembiayaan daerah, baik pada aspek penerimaan daerah jika mengalami defisit, serta aspek pengeluaran daerah bila pembiayaan mencapai surplus. Semuanya dalam lima tahun terakhir, baik analisis pertumbuhannya maupun analisis terkait posturnya masing-masing.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Bone sepanjang tahun 2015 hingga 2019 cukup baik, dilihat dari angkanya yang bertambah persisten. Tahun 2015, pendapatan Pemda Kabupaten Bone masih sebesar Rp1.870,23 Miliar, setahun kemudian angka tersebut bertambah Rp172,30 miliar hingga totalnya mencapai Rp2.042,53 miliar. Kenaikan pendapatan daerah terus berlangsung di tahun 2017 dan 2018, masing-masing mencapai Rp2.201,70 miliar dan Rp2.251,44 miliar, namun selisih pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp159,17 miliar di tahun 2017 dan Rp49,74 miliar tahun 2018. Tahun 2019, pendapatan daerah Kabupaten Bone mencapai angka tertinggi

dalam lima tahun terakhir senilai Rp2.443,24 miliar atau bertambah sebanyak Rp191,80 miliar, juga menjadi kenaikan terbesar selama periode ini. Sepanjang periode tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Bone rerata tumbuh 6,95 persen, dimana angka tertinggi adalah 9,21 persen tahun 2019 dan terendah sebesar 2,26 persen tahun 2018. Walaupun angka nominalnya naik setiap tahun, namun penting menjadi perhatian karena angka pertumbuhan

Kenaikan tersebut disebabkan oleh realisasi tiga komponen utama secara simultan bertambah, terutama pada komponen dana perimbangan. Dana perimbangan tahun 2019 berkontribusi sebesar 65,63 persen terhadap total pendapatan daerah, sehingga perubahan pada komponen ini tentu sangat mempengaruhi total pendapatan. Selama lima tahun terakhir, dana perimbangan yang diterima Pemda Kabupaten Bone cenderung bertambah. Kenaikan paling tinggi terjadi di tahun 2016, dimana Kabupaten Bone menerima dana perimbangan sebesar Rp1.540,62 miliar, naik dari Rp1.242,61 atau bertambah Rp298,01 miliar. Setahun kemudian, pemerintah pusat mengurangi alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Bone sebanyak Rp27,99 miliar sehingga totalnya hanya Rp1.512,63 miliar. Pemerintah pusat mengurangi alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum yang tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp52,11 miliar turun ke Rp31,41 miliar dan Rp1.088,62 miliar turun jadi Rp1.069,49 miliar, sedangkan untuk DAK naik dari Rp399,89 miliar menjadi Rp411,73 miliar atau bertambah Rp11,84 miliar. Tahun 2018, pemerintah pusat menambah DAU dan DAK masing-masing sebanyak Rp0,93 miliar dan Rp42,85 miliar sehingga total keduanya menjadi Rp1.070,43 miliar dan Rp454,58 miliar, sedangkan DBH masih dikurangi. Karena penambahan tersebut, total dana perimbangan Kabupaten Bone mencapai Rp1.548,31 miliar tahun 2018. Dana Bagi Hasil masih tetap dikurangi di tahun 2019, hanya tersisa Rp17,18 miliar, tapi DAU dan DAK tetap ditambah masing-masing sebanyak Rp1.116,83 miliar dan Rp469,38 miliar, sehingga dana perimbangan naik jadi Rp1.603,39 miliar. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan dana transfer pemerintah pusat untuk Kabupaten Bone mencapai 7,02 persen, namun selama periode tersebut pertumbuhannya cenderung turun.

Komponen pendapatan daerah tertinggi Kabupaten Bone setelah dana perimbangan adalah lain-lain pendapatan yang sah. Jika dana perimbangan mengalami penurunan tahun 2017, lain-lain pendapatan yang sah sempat menurun di tahun 2016, dari Rp467,75 miliar ke Rp321,75 miliar atau berkurang cukup signifikan sebesar Rp146 miliar. Tapi setelah itu, realisasinya konsisten bertambah dari Rp408,59 miliar, kemudian Rp488,89 miliar, dan akhirnya menyentuh angka Rp609,38 miliar, tertinggi selama periode ini. Kenaikan tersebut menandai perubahan realisasi beberapa komponen lain-lain pendapatan sah, misalnya komponen pendapatan lainnya yang selama empat tahun tidak pernah ada realisasi, tahun 2019 tercatat sebesar Rp337,33 miliar. Pendapatan dari dana hibah juga naik dari Rp84,33 miliar ke Rp106,57 miliar, namun dana penyesuaian dan otonomi khusus turun drastis dari Rp306,62 miliar tahun 2018 kini tinggal Rp9,49 miliar. Pemerintah Kabupaten Bone juga mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya yang naik signifikan tahun 2019, dari Rp25,82 miliar untuk tahun 2018 menjadi Rp71,11 miliar. Kenaikan ekstrem pada beberapa komponen membuat pertumbuhan rata-rata lain-lain pendapatan sah selama lima tahun terakhir mencapai 10,02 persen dan membuat realisasinya jauh lebih tinggi dari pendapatan asli daerah

Sama halnya dengan dua komponen lain, pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir di tahun 2018. Namun sebelum turun, realisasinya sempat naik tiga tahun berturut-turut dari Rp159,87 miliar tahun 2015 menjadi Rp180,16 miliar tahun 2016, bahkan naik drastis hingga sampai Rp280,48 miliar ditahun 2017. Pada tahun 2016 dan 2017, Pemda Kabupaten Bone mendapat tambahan PAD masing-masing senilai Rp20,29 miliar dan Rp100,32 miliar. Setahun kemudian, realisasi PAD

turun Rp66,23 miliar sehingga totalnya tersisa Rp214,25 miliar, sebelum kemudian naik jadi Rp230,46 miliar atau bertambah Rp16,22 miliar. Walaupun tumbuh lebih tinggi dari dua komponen lainnya, tapi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 9,43 persen, proporsi yang masih sangat rendah.

Rendahnya realisasi PAD dibandingkan lain-lain pendapatan sah menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Bone sangat tergantung dari bantuan pihak lain, baik itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Kondisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa, Pemda Kabupaten Bone belum mampu memungut secara optimal komponen pajak dan retribusi daerah. Kontribusi terbesar justru datang dari komponen lain-lain PAD sah, alih-alih pajak dan retribusi. Realisasi lain-lain PAD sah lima tahun terakhir sudah berada diatas angka Rp100 juta, sementara pajak dan retribusi rerata realisasinya cuma Rp44,69 miliar dan Rp15,65 miliar.

Komponen PAD yang pertumbuhannya sangat tinggi adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencapai 32,16 persen rata-rata dalam lima tahun. Komponen ini naik beruntun selama lima tahun terakhir disaat tiga komponen naik pernah turun. Realisasinya tahun 2015 Rp2,95 miliar, kemudian naik jadi Rp4,18 miliar tahun 2016, selanjutnya sebesar Rp6,73 miliar, kemudian sebesar Rp7,06 miliar dan Rp8,56 miliar masing-masing ditahun 2018 dan 2019. Meski mampu tumbuh jauh lebih tinggi dari komponen lain, namun kontribusinya terhadap PAD masih sangat terbatas. Komponen pengelolaan kekayaan Kabupaten Bone pada dasarnya juga potensial untuk dijadikan sumber PAD karena didalamnya ada BUMD atau penyertaan modal.

Tabel 3. 1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, Tahun 2015-2019

No	Komponen Pendapatan Daerah	Miliar Rp					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
A	Pendapatan Asli Daerah	159,87	180,16	280,48	214,25	230,46	13,08
1	Pendapatan Pajak Daerah	35,13	37,61	44,73	51,24	54,78	11,87
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15,22	11,34	12,73	19,67	19,27	9,82
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,95	4,18	6,73	7,06	8,56	32,16
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106,57	127,03	216,29	136,28	147,85	15,24

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

B	Dana Perimbangan	1.242,61	1.540,62	1.512,63	1.548,31	1.603,39	7,02
1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	34,90	52,11	31,41	23,30	17,18	-10,62
2	Dana Alokasi Umum	977,81	1.088,62	1.069,49	1.070,43	1,116,83	3,50
3	Dana Alokasi Khusus	229,91	399,89	411,73	454,58	469,38	22,64
C	Lain Lain Pendapatan yang Sah	467,75	321,75	408,59	488,89	609,38	10,02
1	Hibah	-	11,04	-	84,33	106,57	-18,41
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	53,87	75,92	76,88	72,11	84,89	13,43
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	385,47	202,77	306,70	306,62	9,49	-23,27
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	28,41	32,02	25,01	25,82	71,11	42,37
6	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	337,33	0,00
Total Pendapatan Daerah		1.870,23	2.042,53	2.201,70	2.251,44	2.443,24	6,95

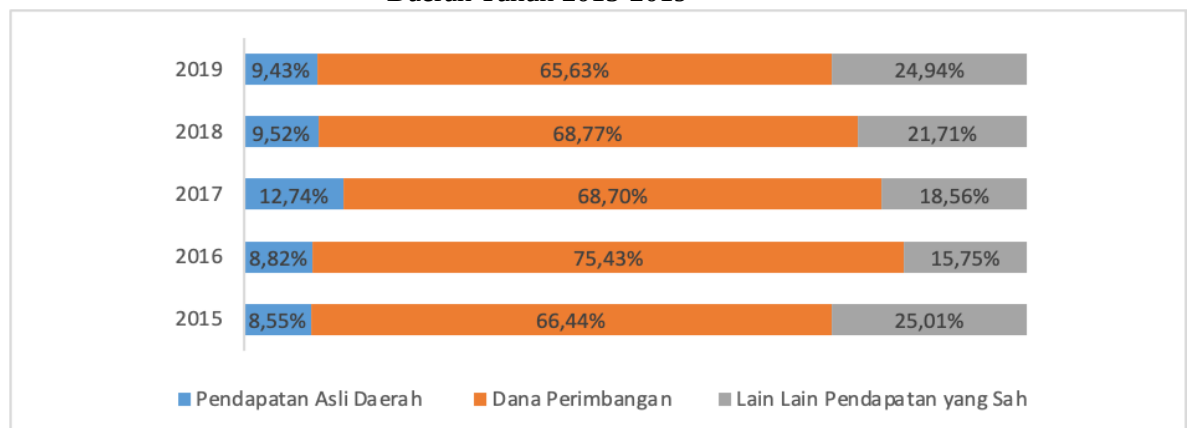
Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD, DPKAD Kabupaten Bone, 2015-2019

Realisasi komponen pendapatan secara tidak langsung menunjukkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Lebih dari setengah pendapatan daerah Kabupaten Bone disumbang oleh dana perimbangan. Selama lima tahun terakhir, proporsinya lebih dari 60 persen, bahkan tahun 2016 sempat mencapai 75,43 persen. Besarnya proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Bone menjelaskan bahwa ketergantungan fiskal masih sangat tinggi.

Tak hanya tergantung pada keuangan pemerintah pusat, keuangan Kabupaten Bone juga tergantung pada bantuan daerah lain dilihat dari proporsi komponen lain-lain pendapatan yang sah. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi komponen ini cenderung naik, setelah sempat turun dari 25,01 persen pada tahun 2015 ke 15,75 persen untuk tahun 2016. Setelah turun, tiga tahun selanjutnya proporsinya konsisten naik, dari 18,56 persen, kemudian jadi 21,71 persen, dan akhirnya mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 24,94 persen.

Sumber pendapatan yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah kontribusinya justru paling rendah, bahkan hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Sumbangan tertinggi PAD terhadap pendapatan daerah hanya 12,74 persen di tahun 2017, naik dari 8,82 persen setahun sebelumnya. Namun memasuki tahun 2018 dan 2019, proporsinya turun menjadi 9,52 persen dan 9,43 persen. Kontribusinya yang rendah harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah sebab UU No. 28 Tahun 2009 dibuat pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan fiskal, namun realitasnya Kabupaten Bone belum memperlihatkan hal tersebut.

Grafik 3.1. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019



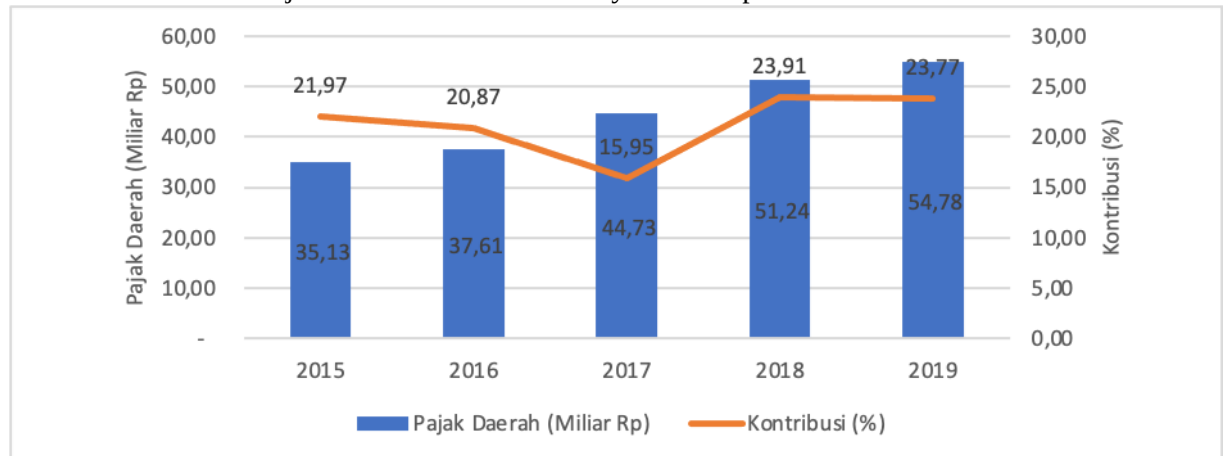
Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Bone tentu disebabkan oleh capaian komponen-komponennya, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan, dan lain-lain PAD sah. Setelah UU No. 28 Tahun 2009 diterbitkan untuk mengganti UU sebelumnya, perubahan signifikan dari pajak daerah adalah bertambahnya komponen menjadi 11, memasukkan PBB dan BPHTB. Salah satu tujuannya adalah memperkuat fiskal pemerintah daerah. Tapi rerata dalam lima tahun terakhir pemerintah daerah hanya mampu memungut pajak daerah sebesar Rp44,69 miliar. Tahun 2015, Pemda Kabupaten Bone mengumpulkan PAD dari pajak daerah sebanyak Rp35,13 miliar, kemudian naik dua tahun berturut-turut masing-masing jadi Rp37,61 miliar dan Rp44,73 miliar. Namun ditahun yang sama, kontribusinya terhadap PAD menurun, dari awalnya 21,97 persen, kemudian jadi 20,87 persen, dan turun pada level paling rendah sebesar 15,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi dan

pertumbuhan pajak daerah masih lebih rendah dari tiga komponen lain. Tahun 2018, peranan pajak daerah mencapai persentase tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 23,91 persen akibat dari kenaikan realisasi sebesar Rp51,24 miliar, sebelum akhirnya sedikit menurun ke 23,77 persen meski realisasinya bertambah jadi Rp54,78 miliar.

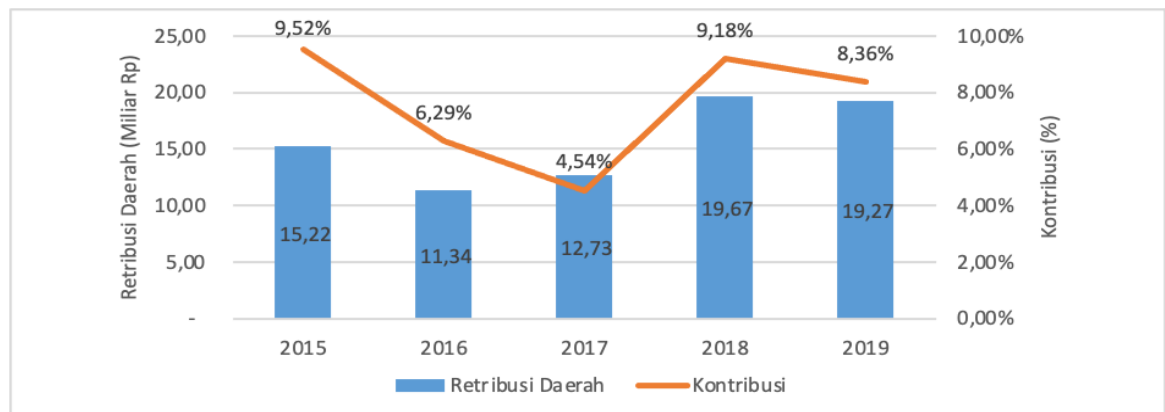
Grafik 3.2. Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

Cerminan kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD pada dasarnya tercermin dari kemampuan menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan balas jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat atau dalam bahasa populer, retribusi mencerminkan praktik “birokrasi wirausaha”. Namun praktik berwirausaha dalam tubuh pemerintah Kabupaten Bone belum memperlihatkan tanda-tanda. Selama lima tahun terakhir, realisasi retribusi daerah lebih fluktuatif dibandingkan pajak, tahun 2015 sempat mengumpulkan Rp15,22 miliar, tapi setahun kemudian turun jadi Rp11,34 miliar. Akibat penurunan tersebut, kontribusinya terhadap PAD juga mengecil, dari 9,52 persen ke 6,29 persen. Pemerintah daerah mengumpulkan lebih banyak retribusi di tahun 2017 dengan mencatat angka realisasi senilai Rp12,73 miliar, namun alih-alih naik, sumbangan terhadap PAD malah kembali turun pada level 4,54 persen. Kinerja pemungutan retribusi terbaik dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, dimana Pemda bisa mencapai angka Rp19,67 miliar, tertinggi selama periode ini, sebelum setahun kemudian angkanya sedikit menurun jadi Rp19,27 miliar. Pada dua tahun tersebut, proporsi retribusi daerah dalam struktur PAD Kabupaten Bone masing-masing mencapai 9,18 persen dan 8,36 persen. Rendahnya kontribusi retribusi daerah sebenarnya mendapat perhatian serius Pemda mengingat komponen retribusi dalam UU No. 28 Tahun 2009 cukup banyak dan seharusnya berkontribusi lebih besar dari sumbangannya yang sekarang.

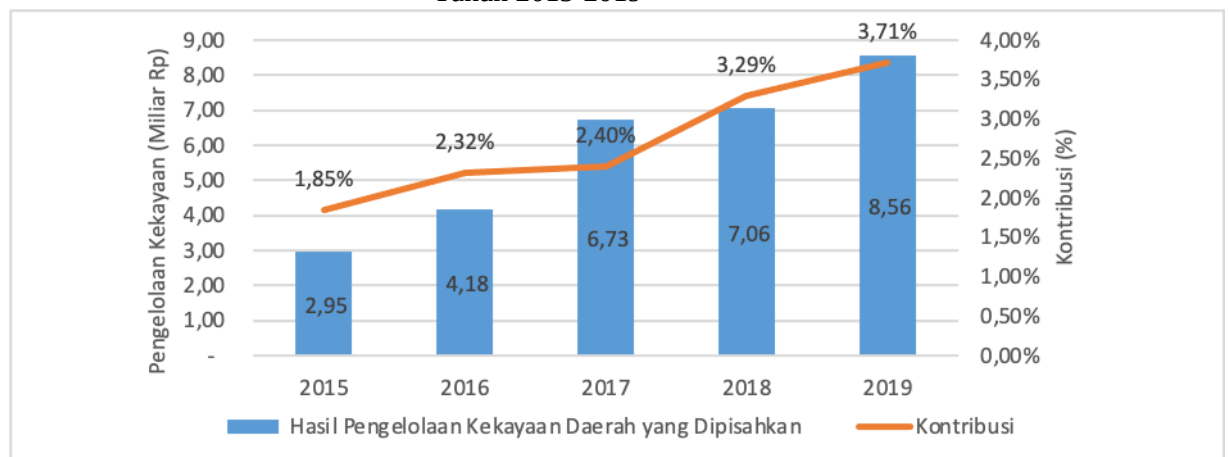
Grafik 3.3. Realisasi Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

Kinerja komponen pengelolaan kekayaan daerah jauh lebih baik dibandingkan dengan dua komponen sebelumnya, walau kontribusinya tidak pernah sampai 4 persen dalam lima tahun terakhir. Kinerja yang baik tersebut setidaknya dapat dinilai dari tren kontribusinya dan angka realisasi cenderung naik. Selama tahun 2015 hingga 2019, perubahan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD berada pada kisaran 1-3 persen, dengan persentase yang terus membesar. Kenaikan persisten kontribusi tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan yang dalam lima tahun terakhir rerata mencapai 32,16 persen, dengan angka pertumbuhan tertinggi sebesar 60,96 persen tahun 2017 dan paling rendah 4,87 persen di tahun 2018.

Grafik 3.4. Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019

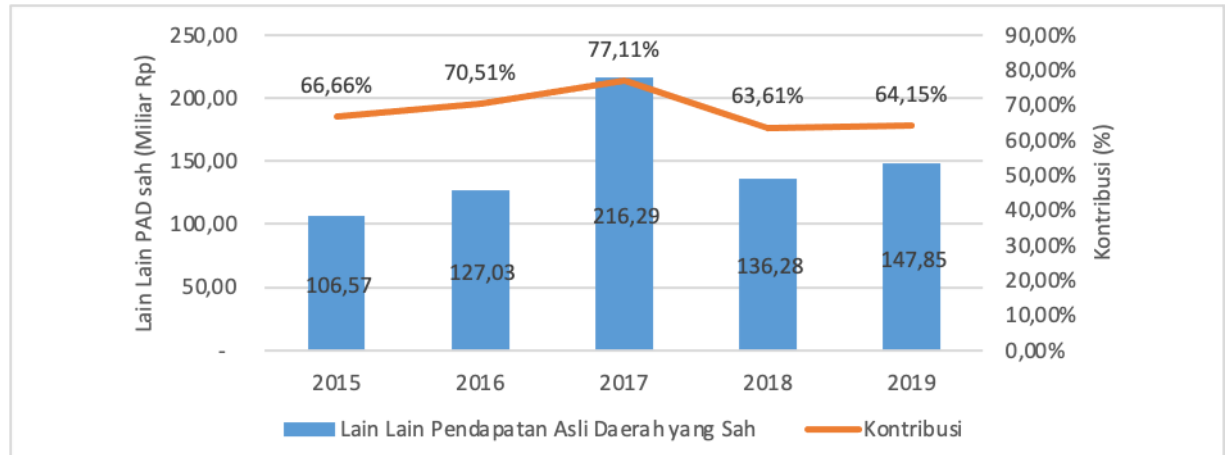


Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

Kontribusi paling besar justru datang dari komponen lain-lain PAD yang sah, menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bone lebih banyak dikontribusi oleh pemanfaatan aset daerah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, ganti rugi atas keterlambatan proyek, dan termasuk didalamnya pendapatan bunga. Selama lima tahun terakhir, kontribusi lain-lain PAD sah terhadap PAD Kabupaten Bone rata-rata mencapai 68,41 persen, dengan kontribusi terbesar mencapai 77,11 persen tahun 2017 karena pada tahun tersebut nilai realisasi mencapai Rp216,29 miliar, tertinggi dalam periode ini. Dominan lain-lain PAD sah didapatkan dari dua komponen yaitu hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan jasa giro. Tahun 2018, Pemda Kabupaten Bone

memperoleh pendapatan giro sebesar Rp7,17 miliar, mengindikasikan bahwa Pemda menyimpan banyak uang di perbankan.

Grafik 3.5. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2015-2019



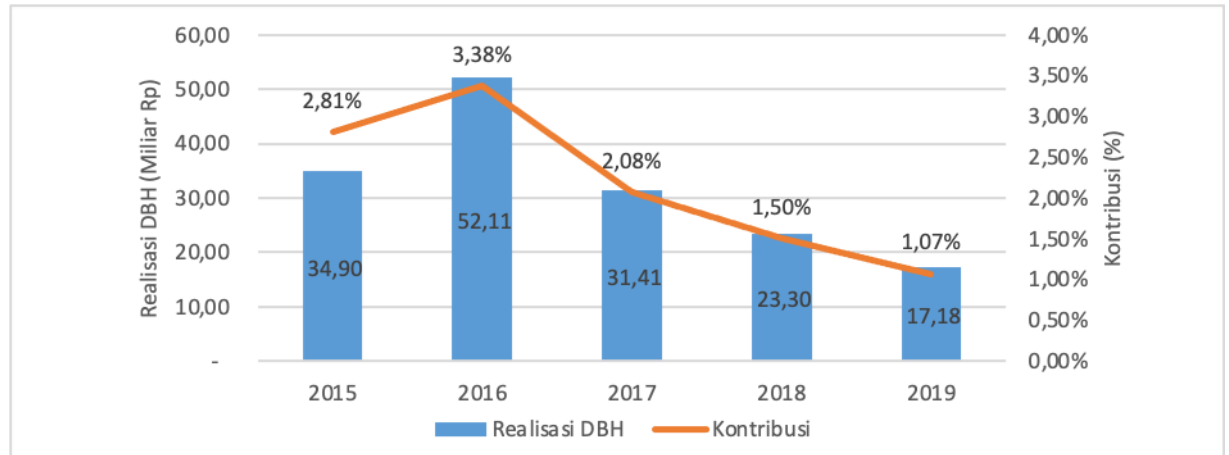
Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Selanjutnya, komponen dana perimbangan, sebagai salah satu daerah yang luas dan memiliki banyak penduduk di Sulawesi Selatan, wajar jika Kabupaten Bone mendapat dana perimbangan yang cukup besar karena besarnya kebutuhan fiskal, sementara kapasitas fiskalnya terbatas. Jika hanya mengandalkan PAD, Kabupaten Bone bahkan tidak mampu membiayai belanja rutin dan operasional, sehingga butuh bantuan dari dana perimbangan pemerintah pusat yang terdiri dari tiga komponen yaitu DBH, DAU, dan DAK.

Proporsi komponen DBH dalam struktur dana perimbangan Kabupaten Bone yang paling rendah dibandingkan DAU dan DBH karena berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap komponen DBH (pajak dan SDA) mendapat DBH paling banyak. Selama lima tahun terakhir, kontribusi DBH terhadap total dana perimbangan terus menurun, tahun 2019 hanya sebesar 1,07 persen. Tren penurunan kontribusi sejalan dengan penurunan realisasi DBH yang ditahun 2016 sempat naik tajam dari Rp34,90 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp52,11 miliar. Tapi setelah itu, tiga tahun berturut-turut realisasinya turun persisten, sampai di tahun 2019 Kabupaten Bone hanya mendapat Rp17,18 miliar.

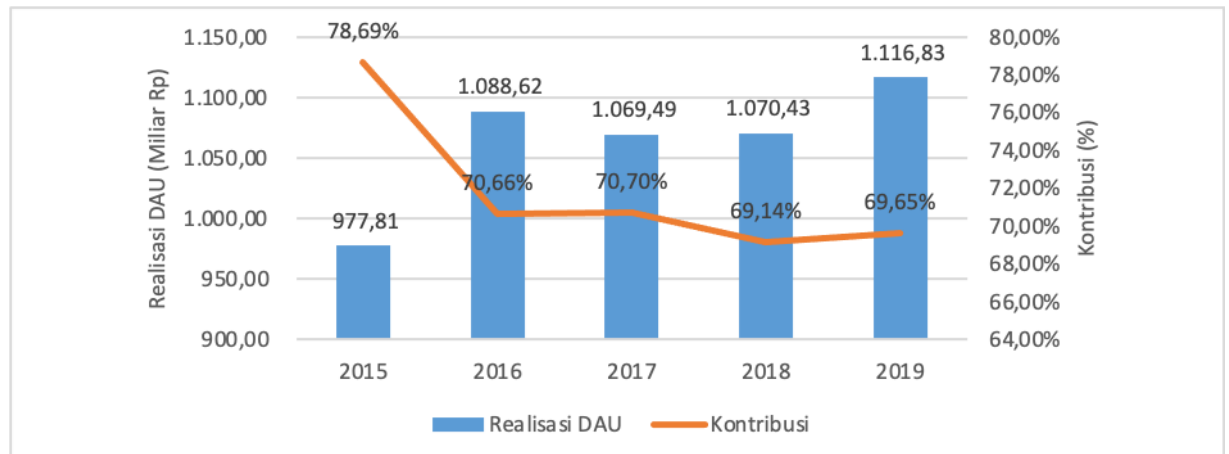
Grafik 3.6. Realisasi DBH dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2019



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

Turunnya realisasi DBH disebabkan karena terjadi penurunan pada komponen DBH pajak, meskipun pada komponen DBH SDA hampir semuanya mengalami kenaikan. Komponen DBH Pajak bumi dan bangunan tahun 2017 mencapai lebih dari Rp13 miliar, setahun kemudian turun jadi Rp. 9 miliar, sedangkan komponen Bagi hasil PPh 25 dan PPh 29 turun dari Rp11 miliar ke Rp7 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan DBH SDA masih lebih rendah dibandingkan penurunan DBH pajak.

Grafik 3. 7. Realisasi DAU dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2019



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

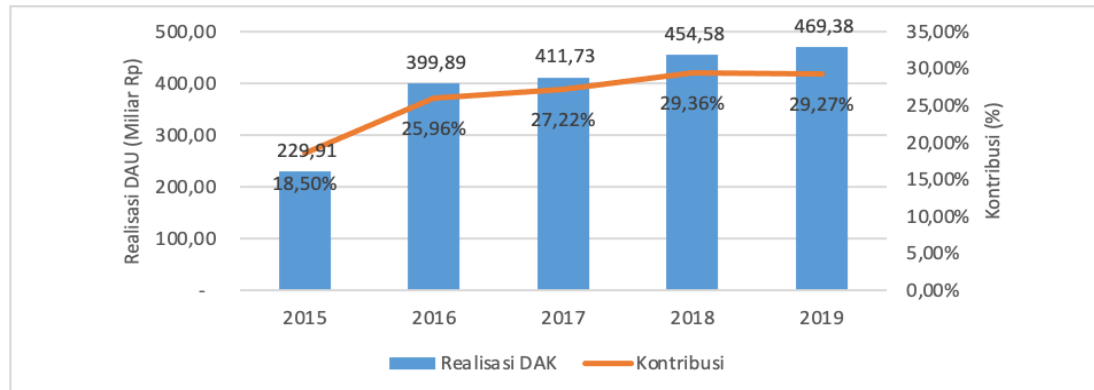
Pemerintah Kabupaten Bone mendapatkan dana perimbangan paling besar bersumber dari DAU. Rata-rata dalam lima tahun terakhir proporsi DAU dalam struktur dana perimbangan Kabupaten Bone mencapai 71,77 persen, namun trennya cenderung turun. Ketika realisasi DAU masih Rp977,81 miliar tahun 2015, proporsinya mencapai 78,69 persen, tapi kenaikan realisasi tahun 2016 menjadi Rp1.088,62 miliar justru diikuti dengan penurunan kontribusi jadi 70,66 persen. Kondisi tersebut juga terjadi di tahun 2019, dimana realisasi mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu Rp1.116,83 miliar, tapi kontribusinya hanya 69,65 persen.

Sumber dana perimbangan terbesar kedua Pemda Kabupaten Bone setelah DAU adalah DAK. Sesuai dengan namanya, DAK diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai skala prioritas

nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Jika Kabupaten Bone mendapatkan banyak DAK, itu berarti ada urusan daerah yang menjadi prioritas nasional atau masuk dalam salah satu kategori yaitu daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah pesisir, daerah ketahanan pangan, dan daerah potensi pariwisata.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi DAK terhadap dana perimbangan Kabupaten Bone mencapai 26,06 persen, dengan tren yang cenderung naik. Tahun 2015, Kabupaten memperoleh DAK sebesar Rp229,91 miliar dan empat tahun naik dua kali lipat yaitu Rp469,38 miliar. Sebagian besar DAK tersebut merupakan DAK non fisik, proporsinya mencapai 59,77 persen, sementara sisanya merupakan DAK fisik. Besarnya DAK non fisik yang diterima Kabupaten Bone bisa menjelaskan bahwa pemerintah pusat membantu Pemda Bone menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai, misalnya pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dll. Tahun 2019, ada empat tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Grafik 3.8. Realisasi DAK dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2019

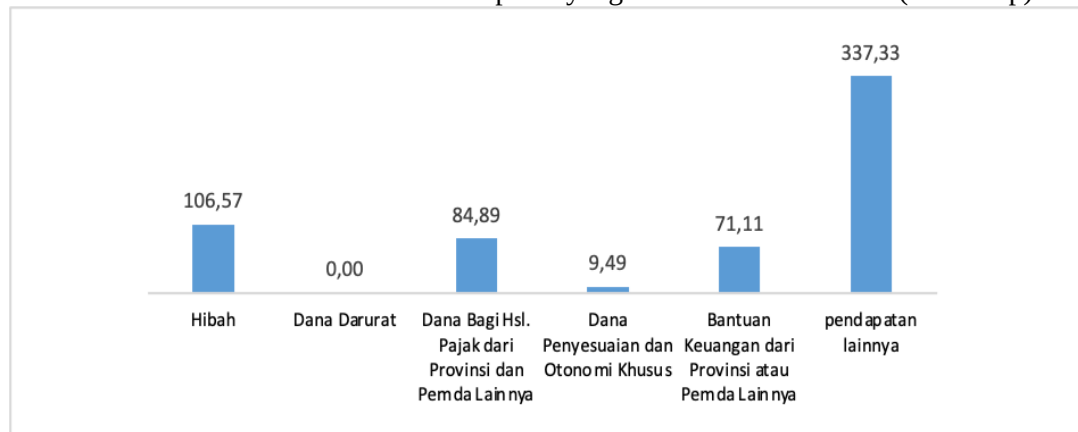


Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah yang ketiga berupa lain-lain pendapatan yang sah, menunjukkan kontribusi terbesar setelah dana perimbangan. kontribusi terbesar datang dari komponen lain-lain pendapatan yang sah. Beasrnya kontribusi komponen ini disebabkan oleh kenaikan yang cukup singnifikan pada beberapa komponen. Tahun 2019, hampir semua komponen lain-lain pendapatan yang sah, kecuali dana darurat, menghasilkan pendapatan, termasuk dana hibah mencapai Rp106,57 miliar. Komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Bone juga mendapat pendapatan dari komponen pendapatan lainnya sebesar Rp337,33 miliar, tertinggi diantara komponen lainnya.

Grafik 3. 9. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.1.2. Belanja Daerah

Semua literatur public expenditure analysis menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah seharusnya berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik yang berkualitas. Dampak tersebut bergantung apakah belanja pemerintah sebagian besar hanya dipakai untuk membiayai operasional pemerintah daerah atau digunakan sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui cash transfer.

Komponen belanja daerah terdiri atas dua kelompok besar, yakni alokasi belanja tidak langsung dan alokasi belanja langsung. Sama halnya dengan banyak daerah di

Indonesia, Kabupaten Bone juga mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja tidak langsung. Selama lima tahun terakhir, rerata pemerintah daerah menghabiskan Rp1.328,37 miliar anggaran untuk membiayai belanja tidak langsung, dimana realisasi paling rendah sebesar Rp1.192,43 miliar pada tahun 2015 dan tertinggi Rp1.424,92 di tahun 2018. Tahun 2019, Pemda menggunakan 59,45 persen belanja daerah untuk belanja tidak langsung.

Sebagian besar belanja tidak langsung Kabupaten Bone digunakan untuk membayar gaji pegawai. Tahun 2019 proporsi gaji pegawai dalam struktur belanja tidak langsung mencapai 65,73 persen dengan realisasi sebesar Rp924,15 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain gaji pegawai, Pemda Kabupaten Bone mengalokasikan cukup besar anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan Pemdes. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, alokasi belanja bantuan keuangan kepada institusi lain terus bertambah dari awalnya hanya Rp214,51 miliar, empat tahun kemudian naik dua kali lipat sebesar Rp449,39 miliar atau tumbuh rata-rata 21,29 persen. Jika diakumulasi, maka 90 persen lebih anggaran belanja tidak langsung dihabiskan untuk dua komponen belanja ini.

Walaupun proporsi belanja tidak langsung jauh lebih besar dibandingkan belanja langsung, tapi rerata pertumbuhannya dalam lima tahun relatif lebih rendah. Dari tahun 2015 sampai 2019, belanja tidak langsung hanya tumbuh rata-rata 4,29 persen, sedangkan belanja langsung naik rerata 11,09 persen. Karena pertumbuhan yang tinggi, selisih antara belanja tidak langsung dan belanja langsung hanya terpaut Rp447 miliar. Jika komposisi pertumbuhannya semacam ini bisa dijaga, maka tidak menutup kemungkinan, Kabupaten Bone menjadi satu dari sedikit dari di Indonesia yang proporsi belanja langsungnya lebih besar. Anggaran yang realisasinya rerata mencapai Rp818 miliar sepanjang lima tahun terakhir dihabiskan untuk dua peruntukan, yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kedua komponen belanja ini rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 16,35 persen dan 4,99 persen dengan proporsi terhadap total belanja langsung tahun 2019 sebesar 65,31 persen dan 34,69 persen.

Tabel 3 2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019

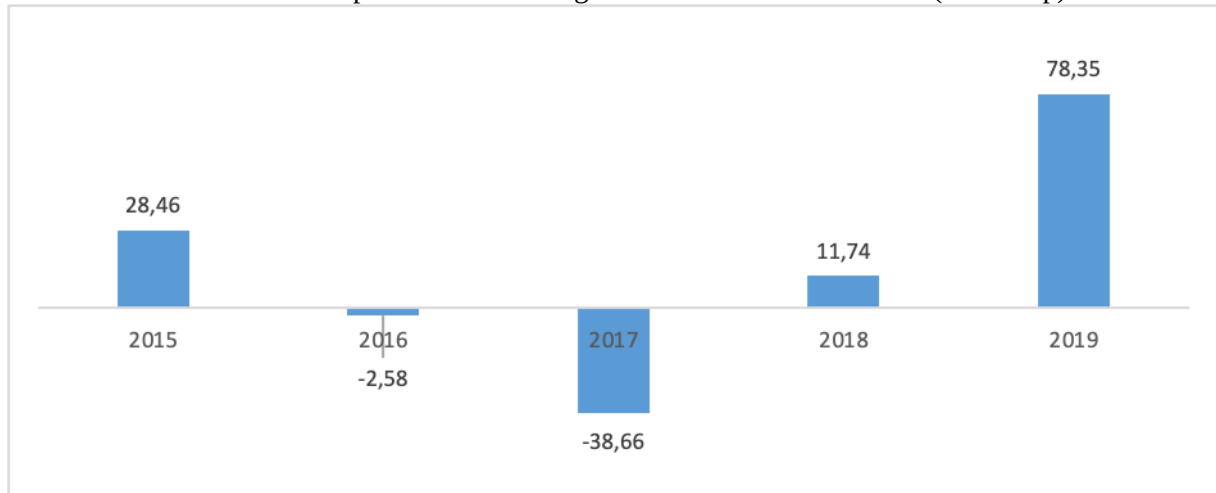
No	Komponen Belanja Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.192,43	1.296,19	1.322,34	1.424,92	1.405,95	4,29
1	Belanja Pegawai	894,67	922,89	862,71	849,44	924,15	0,97
2	Belanja Bunga	1,27	0,93	0,59	0,25	-	-55,03
3	Belanja Subsidi	28,63	7,30	-	-	-	-43,63
4	Belanja Hibah	2,16	11,26	33,18	97,61	23,64	183,76
5	Belanja Bantuan Sosial	50,96	35,11	50,05	71,75	1,25	-10,86
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	-	6,31	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	214,51	317,97	375,79	405,85	449,39	21,29
8	Belanja Tidak Terduga	0,24	0,73	0,01	0,01	1,20	100,00
B	Belanja Langsung	649,34	748,92	918,02	814,79	958,94	11,09
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	345,14	418,17	525,31	547,26	626,24	16,35
3	Belanja Modal	304,20	330,74	392,70	267,52	332,70	4,99
Total Belanja		1.841,78	2.045,11	2.240,36	2.239,71	2.364,89	6,54

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.1.2 Pembiayaan Daerah

Pola pertumbuhan pendapatan daerah yang relatif lebih lambat dari belanja daerah dalam beberapa tahun menyebabkan keuangan daerah Kabupaten Bone mengalami defisit. Sebelum mengalami defisit fiskal tahun 2016 dan 2017, keuangan daerah Kabupaten Bone mengalami surplus sebesar Rp28,48 miliar, namun dua tahun berturut-turut angkanya defisit, nilainya mencapai Rp2,58 miliar tahun 2016 dan terbesar adalah Rp38,66 miliar setahun kemudian. Memasuki tahun 2018 dan 2019, keuangan daerah kembali surplus dengan besaran Rp11,74 miliar dan kemudian naik drastis hingga menyentuh angka Rp78,35 miliar. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah daerah menggunakan penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Grafik 3. 10. Surplus/Defisit Keuangan Daerah Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

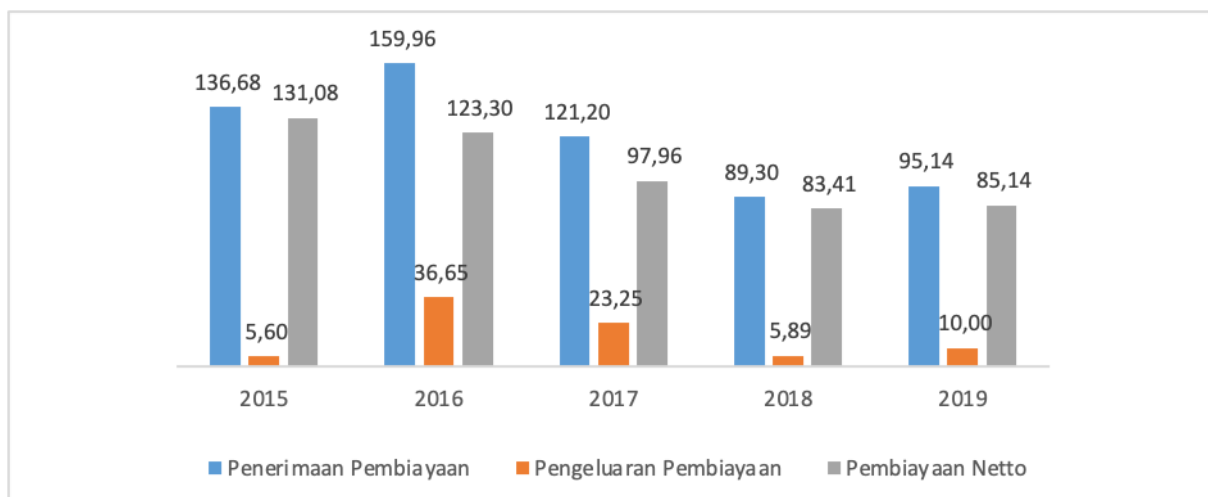


Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

Pemerintah Kabupaten Bone memiliki kas yang cukup untuk menutup defisit keuangan daerah melalui pembiayaan netto. Saat keuangan daerah mengalami defisit tahun 2016 dan 2017 total pembiayaan netto masing-masing mencapai Rp123,30 miliar dan 97,96 miliar, jauh lebih besar daripada nilai defisit. Itu sebabnya Pemda Kabupaten Bone memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA) pada dua tahun tersebut sebesar Rp120,72 miliar dan Rp59,30 miliar, berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan.

Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Jika pembiayaan netto-nya jauh lebih besar daripada defisit maka tersisa SiLPA, namun idealnya SiLPA tersebut harusnya dialokasikan untuk program pembangunan daerah lainnya yang masih membutuhkan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa SiLPA Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Namun kebijakan pengelolaan keuangan Pemda Kabupaten Bone tidak sepenuhnya mengikuti regulasi tersebut, sebab selama lima tahun terakhir saldo SiLPA tidak pernah nol, bahkan angkanya sampai ratusan miliar rupiah. Selain tidak mengikuti regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan semacam ini tentu tidak sejalan dengan tujuan keuangan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penghantaran layanan publik.

Grafik 3.11. Realisasi Komponen Pembiayaan Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2015-2019

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebut bahwa Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Analisis neraca daerah ini akan menggambarkan perkembangan realisasi pada komponen aset, akun, dan ekuitas dalam tiga tahun terakhir.

3.1.2.1. Aset, Kewajiban dan Ekuitas Daerah

Selama periode tiga tahun terakhir, nilai aset Pemda Kabupaten Bone konsisten mengalami kenaikan dan rerata tumbuh 5 persen. Tahun 2017, Pemda Kabupaten Bone memiliki total aset senilai Rp2.568.465 juta. Nilai tersebut kemudian naik masing-masing dua tahun terakhir menjadi Rp2.723.097 juta atau bertambah sebanyak Rp184.147 jutadan Rp2.855.438 juta atau meningkat Rp105.814 juta. Kenaikan nilai aset Pemda Kabupaten Bone disebabkan karena terjadi pertambahan pada aset lancar dan aset tetap yang dalam tiga tahun terakhir rata-rata naik 51 persen dan 7 persen.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Sama halnya dengan aset, kewajiban Pemda Kabupaten Bone juga mengalami kenaikan rata-rata 5,9 persen dalam periode yang sama. Tahun 2017, nilai total kewajiban Pemda sempat mengalami penurunan dari Rp27.901 juta di tahun 2017 menjadi Rp22.888 juta, sebelum kemudian naik sampai ke angka Rp29.716 juta. Semua kewajiban tersebut bersifat jangka pendek yang dikontibusi oleh komponen pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

Kenaikan aset yang lebih besar dibandingkan kewajiban, membuat kekayaan bersih Pemda Kabupaten Bone juga mengalami kenaikan. Tercatat dari tahun 2017 sampai 2019, ekuitas Pemda masing-masing mencapai angka Rp2.540.564 juta, kemudian Rp2.700.210 juta, dan Rp2.825.721 juta. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemda Kabupaten Bone mampu untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Namun untuk memastikan maka diperlukan analisis lebih mendalam pada neraca dengan melihat tiga indikator utama yaitu analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis aktivitas.

Tabel 3.3. Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2019

Komponen Neraca Daerah	Nilai (Rp Juta)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	8.941	57.639	89.436	300
Kas di Bendahara Pengeluaran	65	3,62	22,44	212
Kas di Bendahara Penerimaan	118	1,43	1,74	(39)
Kas dibadan Layanan Umum Daerah	4.304	2.132	6.989	89
Kas Dana JKN	4.932	3.100	2.787	(24)
Kas Bendahara BOS	2.749	515	14.260	1.294

Komponen Neraca Daerah	Nilai (Rp Juta)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	
Kas Lainnya	28.254	31.755	50.000	35
Setara Kas	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	10.000	-	-	(50)
Piutang Pajak	9.284	9.988	10.912	8
Penyisihan Piutang Pajak	(3.021)	(4.114)	-	(32)
Piutang Retribusi	7.852	14.559	23.482	73
Penyisihan Piutang Retribusi	-91	(1.194)	(6.585)	832
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Piutang Lainnya	638,19	24.007	23.636	1.830
Penyisihan Piutang	-	(5.307)	-	(50)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	34.682	34.554	35.161	1
Bagian Lancar TGR	127	-	-	(50)
Persediaan	14.352	36.088	24.676	60
Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	123.189	209.034	274.778	51
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-
Investasi Non permanen	-	-	-	-
Investasi NP-Dana Bergulir	-	-	-	-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-	-
Investasi Permanen	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah	32.078	33.374	48.451	25
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	32.078	33.374	48.451	25
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	32.078	33.374	48.451	25
ASET TETAP				
Tanah	609.730	596.475	594.709	(1)
Peralatan dan Mesin	396.561	438.890	494.818	12
Gedung dan Bangunan	942.561	936.023	1.102.420	9
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.710.769	1.841.529	1.949.368	7
Aset Tetap Lainnya	50.904	53.344	53.912	3
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.324	41.298	26.754	29
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.625.179)	(1.616.739)	(1.825.346)	6
JUMLAH ASET TETAP	2.106.672	2.290.819	2.396.634	7
DANA CADANGAN		-	-	-
Dana Cadangan	30.000	-	-	(50)
JUMLAH DANA CADANGAN	30.000	-	-	(50)
ASET LAINNYA		-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	6.354	5.775	4.738	(14)
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	2.084	2.201	2.197	3
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.447	1.629	1.629	6
Aset Tak Berwujud	1.095	1.339	2.434	52
Aset Lain Lain	265.542	178.926	125.645	(31)
Akumulasi Amortasi Aset Tak Berwujud	-	-	(1.068)	-
Jumlah Aset Lainnya	276.524	189.870	135.574	(30)
JUMLAH ASET	2.568.465	2.723.097	2.855.438	5

Komponen Neraca Daerah	Nilai (Rp Juta)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5	-	-	(50)
Utang Bunga	160	-	-	(50)
Utang Pajak	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	2.889	-	-	(50)
Pendapatan Diterima Dimuka	149,42	155,35	211,70	20
Utang Belanja	21.061	19.568	27.249	16
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.634	3.164	2.256	(21)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27.901	22.888	29.716	6
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-	-
Utang Negri Sektor Perbankan	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri Pemerintahan Pusat	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jk Panjang	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	27.901	22.888	29.716	6
EKUITAS				
EKUITAS	2.540.564	2.700.210	2.825.721	5,47
JUMLAH EKUITAS DANA	2.540.564	2.700.210	2.825.721	5,47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.568.465	2.723.097	2.825.721	4,89

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, series

3.1.2.2. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari dua jenis rasio yaitu rasio lancar dan rasio quick atau rasio cepat. Current rasio atau rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan total asset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Semakin besar perbandingan asset lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan Pemda dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya, sementara Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan parameter asset lancar dikurangnya persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya.

Rasio lancar dalam tiga tahun terakhir lebih dari 2, menggambarkan bahwa kemampuan aset Pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sangat baik. Tahun 2017, kemampuan aktiva lancar Pemda untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya adalah 4,42 kali. Angkanya kemudian naik menjadi 9,13 kali dan 9,25 kali di tahun 2018 dan 2019. Kenaikan tersebut tidak lepas dari pertumbuhan aktivitas lancar yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kewajiban jangka pendek. Meskipun rasio lancar bisa mencapai angka 9, namun tidak sepenuhnya bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Bone memiliki keuangan yang sehat. Tingginya rasio lancar juga menunjukkan bahwa Pemda Bone tidak menggunakan aktiva lancarnya secara optimal. Idealnya angka rasio lancar berada pada kisaran 2-3, di bawah itu menunjukkan kemampuan aktiva lancar untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek masih rendah, tapi di atas itu juga menunjukkan ketidakmampuan Pemda mengelola aktivitas lancarnya.

Sama halnya dengan rasio lancar, angka rasio cepat juga menunjukkan nilai yang lebih dari 3. Tahun 2017, angka rasio cepat Pemda Kabupaten Bone mencapai 3,90 kali, menjelaskan bahwa kemampuan kas Pemda untuk menyelesaikan kewajiban mencapai 3,90 kali. Angka rasio tersebut naik hingga mencapai 7,56 kali di tahun 2018 dan 8,42 kali tahun 2019. Angka rasio cepat yang lebih dari

tiga menunjukkan bahwa Pemda tidak menggunakan kasnya dengan baik atau menumpuk di rekening kas daerah. Kondisi ini tentu tak begitu baik, sebab banyak program Pemda yang seringkali tidak terlaksana dengan alasan kekurangan anggaran, padahal cukup banyak kas yang ditimbun oleh Pemda.

Tabel 3. 4. Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

No	Rasio Keuangan Daerah	2017	2018	2019
1	Rasio Likuiditas			
	Rasio Lancar	4,42	9,13	9,25
	Rasio Cepat	3,90	7,56	8,42
	Rasio Kas	1,01	1,39	1,68
2	Rasio Solvabilitas			
	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0109	0,0084	0,0103
	Rasio hutang terhadap modal	0,0110	0,0085	0,0104

Sumber: DPKAD Kabupaten Bone, series

Angka rasio lancar dan rasio cepat sudah menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Bone memiliki aktivitas lancar yang memadai untuk menanggung kewajiban jangka pendek dan sekaligus menggambarkan bahwa Pemda juga tidak optimal dalam mengelola kas. Namun untuk mempertegas kedua rasio tersebut, ditambahkan satu angka rasio yaitu rasio kas. Fungsinya persis sama dengan dua rasio sebelumnya yaitu menunjukkan kemampuan kas perusahaan (aktiva lancar) melunasi kewajiban jangka pendek. Interpretasi dari hasil rasio kas adalah dibawah 1 dan diatas 1, dimana rasio kas di bawah 1 menunjukkan bahwa aktivitas lancar Pemda tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya, sementara jika hasilnya diatas 1 maka Pemda bisa membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Hasil perhitungan rasio lancar Pemda Kabupaten Bone selama tiga tahun terakhir diperoleh angka rasio diatas 1 yaitu 1,01 tahun 2017, 1,39 tahun 2018, dan 1,68 tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Bone memiliki aktiva lancar yang memadai untuk membayar semua hutang lancar. Namun sama dengan dua rasio sebelumnya, angka rasio lancar yang tinggi juga sekaligus mengindikasikan bahwa Pemda menumpuk banyak kas yang seharusnya digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah atau setidaknya dipakai untuk menghasilkan pendapatan pajak dan retribusi yang lebih besar.

Selain rasio likuiditas, analisis keuangan daerah juga menggunakan rasio solvabilitas atau leverage ratio untuk mengukur seberapa besar aktiva Pemda dibiayai oleh utang. Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Dari hasil perhitungan rasio total hutang terhadap total aset Pemda Kabupaten Bone, didapatkan angka lebih kecil dari 1 atau 0,0109 di tahun 2017, 0,0084 tahun 2018, dan 0,0103 tahun 2018. Angka lebih kecil dari 1 menjelaskan bahwa aset Pemda yang dibiayai oleh hutang tidak mencapai 1 persen atau bisa juga diartikan bahwa total hutang Pemda (jangka pendek dan jangka panjang) bisa dibayar dengan menjaminkan total aset yang dimiliki. Angka rasio yang lebih kecil dari 1 disebabkan salah satunya karena dalam beberapa tahun terakhir Pemda Kabupaten Bone hanya memiliki hutang jangka pendek dan tidak punya hutang jangka panjang, sehingga aset yang jumlahnya sangat besar sangat mampu menutupi kewajiban tersebut.

Tidak cukup mengukur kemampuan membayar total kewajiban, solvabilitas keuangan Pemda juga perlu diukur dengan melihat tingkat kemandirian finansial Pemda berkaitan dengan utang. Indikator yang digunakan adalah rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio. Jika pada rasio likuiditas semakin tinggi angkanya semakin baik, maka pada rasio hutang terhadap modal, semakin rendah angkanya semakin baik karena menunjukkan bahwa keuangan Pemda tidak terbebani dengan kewajiban, sementara jika semakin tinggi mengindikasikan bahwa keuangan Pemda dibiayai sebagai besar dari hutang.

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal dihasilkan angka rasio yang lebih kecil dari 1 sepanjang tiga tahun terakhir yaitu 0,0110, 0,0085, dan 0,0104 masing-masing pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Angka ini menunjukkan bahwa intervensi hutang dalam keuangan Pemda tidak sampai 1 persen, yang berarti keuangan Pemda sangat mandiri dari kewajiban.

Hasil analisis neraca keuangan Pemda Kabupaten Bone memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan keuangan pemerintah daerah masih sangat sehat dinilai dari angka rasio likuiditas dan

solvabilitasnya Namun hasil tersebut juga menunjukkan kelemahan Pemda dalam mengelola aktiva mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan lebih memilih menumpuk kas di rekening daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemda Kabupaten Bone untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset agar dapat mengoptimalkan pelayanan publik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan daerah. Proporsi penggunaan anggaran lebih spesifik untuk alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah. Sementara kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan penggunaan surplus atau kebijakan sumber-sumber pembiayaan untuk anggaran defisit. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mengambil rentan waktu tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 mengingat dokumen ini merupakan Perubahan RPJMD 2018-2023, maka rentan waktu tersebut memasukkan dua tahun yang telah dilalui pada periode RPJMD tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Arah kebijakan belanja daerah Pemda Kabupaten Bone secara umum menggambarkan alokasi belanja tidak langsung mencapai 59 persen, sebaliknya 41 persen sisanya untuk alokasi belanja langsung. Pada komponen belanja tidak langsung, lebih dari 50 persen anggaran dipakai membayar gaji pegawai, sementara pada komponen belanja langsung 65 persen dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

Jika dilihat lebih rinci terkait dengan besaran belanja pegawai atau belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, total realisasi belanja Pemda Kabupaten Bone untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami sempat turun dari Rp1.455,34 miliar tahun 2017 ke Rp1.333,87 miliar tahun 2018 atau turun berkurang Rp121,48 miliar, namun bertambah di tahun 2019 hingga Rp1.465,13 miliar atau naik Rp131,26 miliar. Penurunan di tahun 2018 disebabkan oleh pengurangan alokasi pada belanja tidak langsung yang awalnya mengalokasikan sebanyak Rp859,42 miliar untuk tahun 2017 kemudian berkurang jadi Rp845,94 miliar dan pengurangan pada belanja langsung dari Rp595,92 miliar ke Rp487,93 miliar. Tahun 2019, kedua komponen tersebut ditambah hingga totalnya masing-masing senilai Rp921,56 miliar dan Rp543,57 miliar.

Sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada belanja tidak langsung digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, proporsinya tahun 2019 mencapai 68 persen terhadap total belanja langsung dan 43 persen dari total belanja daerah dengan realisasi senilai Rp629,35 miliar, naik dibandingkan nilai setahun sebelumnya. Walau begitu, dibandingkan dengan tahun 2018, proporsi belanja gaji dan tunjangan tahun 2019, baik terhadap belanja tidak langsung maupun terhadap total belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur relatif lebih rendah.

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone, Tahun 2017-2019

No	URAIAN	Nilai Belanja (Miliar Rp)		
		2017	2018	2019
A	Belanja Tidak Langsung	859,42	845,94	921,56
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	616,39	611,63	629,35
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	235,57	221,94	285,78
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7,15	12,13	6,30
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)	0,32	0,25	0,12
B	Belanja Langsung	595,92	487,93	543,57
1	Belanja Honorarium PNS**)	32,74	23,57	11,21
2	Belanja Uang Lembur**)	0,94	0,76	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	11,63	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS**)	3,35	3,81	4,69
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	65,05	72,24	78,22
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***)	31,20	32,82	34,36
7	Belanja Pakaian Kerja	0,77	0,36	0,56
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	0,65	0,78	0,85
9	Belanja Perjalanan Dinas**)	68,52	74,42	80,98
10	Belanja Modal (Kantor, mobil dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	392,70	267,52	332,70
TOTAL		1.455,34	1.333,87	1.465,13

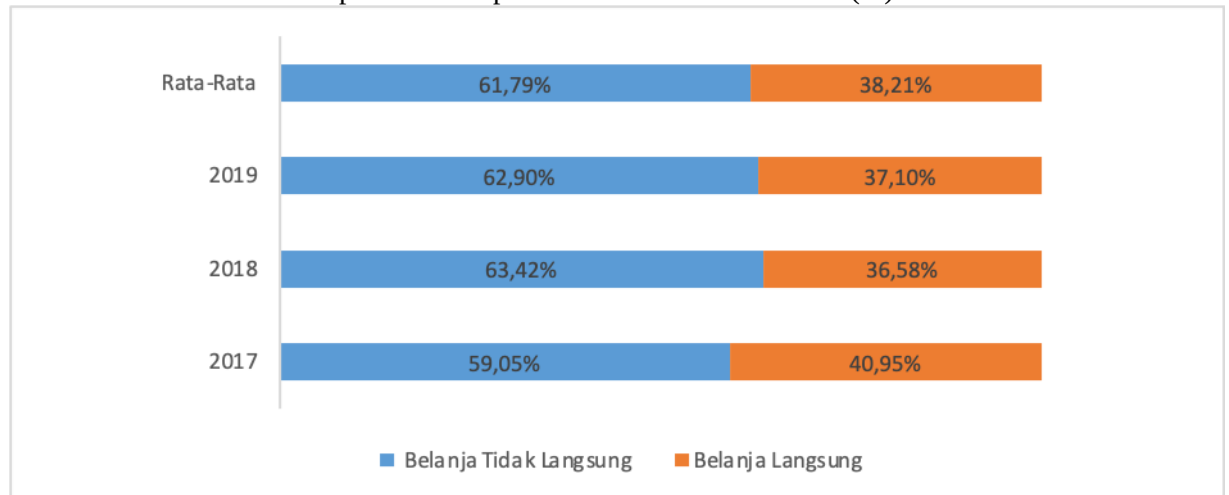
Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2017-2019

Proporsi terbesar kedua setelah gaji dan tunjangan adalah belanja tambahan penghasilan, angkanya sebesar 31 persen dari total belanja tidak langsung dan 20 persen terhadap total belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Dua komponen belanja tidak langsung tersebut menghabiskan 90 persen lebih belanja tidak langsung, sementara sisanya habis terpakai pada komponen belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dan belanja pemungutan pajak daerah.

Pada komponen belanja langsung, belanja modal masih menjadi komponen dengan proporsi anggaran terbesar, nilainya tahun 2019 mencapai Rp332,70 miliar, naik dari Rp1.333,87 miliar tahun 2018 dengan proporsi 61 persen dari belanja langsung dan 37 persen terhadap total belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Setelah belanja modal, belanja perjalanan dinas menjadi komponen dengan alokasi anggaran terbesar, realisasinya naik dari Rp74,42 miliar ke Rp80,98 miliar disaat sebagian komponen belanja langsung dikurangi. Pemerintah Kabupaten Bone juga menaikkan alokasi belanja premi asuransi kesehatan dari Rp72,24 miliar ke Rp78,22 miliar dan belanja makanan dan minuman pegawai dari Rp32,82 miliar ke Rp34,36 miliar. Proporsi keduanya terhadap total belanja langsung masing-masing 14 persen dan 6 persen.

Walaupun dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, tapi secara rata-rata angkanya masih 61,79 persen, sedangkan untuk proporsi belanja tidak langsung hanya 38,21 persen. Proporsi ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah Kabupaten Bone belum cukup ideal untuk orientasi pelayanan publik dan program pembangunan daerah yang secara langsung dapat dinikmati nilai kemanfaatan masyarakat secara luas. Fakta ini mengimplikasikan perlunya desain pola belanja daerah yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat melalui program-program yang berorientasi kemajuan daerah dan penciptaan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Grafik 3.12. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (%)



Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2017-2019

Tabel 3. 6. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017-2019 (%)

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Miliar Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Miliar Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2017	1.455,34	2.263,61	64,29
2	2018	1.333,87	2.245,59	59,40
3	2019	1.465,13	2.374,89	61,69

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2017-2019

Alokasi belanja Pemda Kabupaten Bone untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencatat persentase sangat besar diproporsikan dengan total pengeluaran yaitu penjumlahan antara belanja dan pengeluaran pembiayaan. Tahun 2017, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 64,29 persen dari total pengeluaran daerah, namun setahun kemudian turun jadi 59,40 persen akibat pengurangan belanja aparatur. Tapi tahun 2019, angkanya jadi 61,69 persen, namun masih sedikit lebih rendah dari persentase tahun 2017. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran daerah masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan aparatur, sehingga proporsi untuk komponen belanja lain hanya tersisa 38,31 persen.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah mencakup dua aspek penting, yakni analisis defisit riil dan analisis SiLPA. Defisit riil difokuskan pada komponen-komponen penutup defisit, serta SiLPA mencakup analisis komponen-komponen pembentuknya, baik SiLPA tahun sebelumnya maupun SiLPA tahun berkenaan.

Kuangan daerah Kabupaten Bone mengalami defisit yang semakin besar jika didasarkan pada perhitungan defisit riil, dimana yang dimasukkan sebagai pengeluaran bukan hanya total belanja tapi juga ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan defisit semacam ini disebut dengan defisit riil. Tahun 2017, Pemda Kabupaten Bone mengalami defisit riil hingga Rp61,91 miliar akibat dari kenaikan belanja dan pengeluaran pembiayaan sementara pendapatan daerah menurun. Tapi dua tahun kemudian, secara berturut-turut keuangan daerah mengalami surplus sebesar

Rp5,85 miliar untuk tahun 2018 dan bertambah signifikan di tahun 2019 sebesar Rp68,35 miliar. Kenaikan tersebut dipicu oleh pertambahan pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan pengeluarannya.

Tabel 3.7. Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Bone, 2017-2019 (Miliar Rp)

Uraian	Nilai Defisit/Surplus Riil (Miliar Rp)		
	2017	2018	2019
Pendapatan daerah	2.201,70	2.251,44	2.443,24
Dikurangi:			
Belanja Daerah	2.240,36	2.239,71	2.364,89
Pengeluaran Pembiayaan	23,25	5,89	10,00
Surplus/Defisit riil	(61,91)	5,85	68,35

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2017-2019

Defisit keuangan daerah yang terjadi di tahun 2017 bisa ditutupi dengan komponen penutup defisit anggaran yang terdiri sembilan komponen, namun sebagian besar komponen tersebut hanya ada pada komponen SiLPA.

Selama tiga tahun terakhir, Pemda Kabupaten Bone memiliki SiLPA yang memadai, bahkan untuk menutup defisit riil tahun 2017 sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 keuangan Pemda mengalami surplus maka, SiLPA tersebut bisa dialokasikan untuk tahun berikutnya, khususnya untuk pembiayaan daerah yang bersifat sangat mendesak pada awal tahun anggaran yang sedang berjalan. Ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk menutup defisit masih mengandalkan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sementara masih banyak komponen lainnya yang dapat menjadi alternatif sumber penutup defisit namun belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone seperti pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, dan beberapa yang lainnya.

Tabel 3. 8. Komponen Penutup Defisit Riil Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

Uraian	Komposisi Penutup Defisit Riil (%)		
	2017	2018	2019
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	100,00	100,00	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
Penerimaan Pembayaran ASKES	0	0	0
Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga	0	0	0
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	0	0	0

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bone, 2017-2019

Selanjutnya dari SiLPA yang dominan menjadi sumber penerimaan pembiayaan setiap tahun selama periode 2017-2019 ini, khusus untuk tahun 2017 sebagian besar dikontribusikan oleh sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan tahun 2018-2019 belum diperoleh data yang update.

Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2017-2019

No	Uraian	2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLP A	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	59.295					
2	Pelampauan penerimaan PAD	13.305	22				
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendaptan daerah yang sah	5.112	5				
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	95.569	161				
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun tahun belum terselesaikan	27.901	47				
7	Kegiatan lanjutan	21.107	36				

Sumber:
Perda
Pertanggung

jawaban APBD Kabupaten Bone, Tahun 2017

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menurut Permendagri Mo.86/2017 adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Untuk menghitung kapasitas fiskal riil, maka terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya, belanja daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta proyeksi asumsi makro ekonomi daerah yang mendasarinya.

Perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja daerah menggunakan struktur keuangan daerah berdasarkan PP No.12 tahun 2019. Struktur APBD berdasarkan PP tersebut secara garis besarnya sama dengan Struktur APBD menurut Permendagri 13/2006. Perbedaan terletak pada rincian dana perimbangan dan komponen belanja. Dalam PP 12/2019, dana perimbangan berganti menjadi pendapatan transfer dengan rinciannya adalah transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan), transfer dari pemerintah provinsi dan daerah lainnya. Sementara komponen belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan demikian, proyeksi pendapatan dan belanja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone menggunakan struktur PP No.12/2019.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Penetapan target keuangan daerah harus didasari atas asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial. Asumsi makro ekonomi dan sosial yang dimasukkan ke dalam analisis adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia. Penetapan besaran asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial tersebut untuk periode 2020-2023 disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini (Pandemic Covid-19). Pandemic Covid-19 tidak hanya menekan variabel-variabel makro ekonomi dan sosial pada skala nasional tetapi juga terjadi pada skala daerah termasuk Kabupaten Bone.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menguraikan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menghitung proyeksi rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yaitu: (i) Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Bone, (ii) Kebijakan di bidang Keuangan Negara, (iii) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan (iv) rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah. Asumsi makro ekonomi Kabupaten Bone pada periode 2021-2023 meliputi asumsi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup akseleratif pada periode 2015-2019. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8,34 persen per tahun selama periode tersebut. Namun dengan pandemic covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone mengalami pelambatan yang diprediksikan berada pada angka 5,11 persen pada tahun 2020 (RKPD, 2020). Namun kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan melalui berbagai upaya maksimal pemerintah daerah bersama dengan seluruh stakeholder. Dalam tiga tahun ke depan (2021-2023) adalah merupakan masa pemulihan ekonomi atau pasca pandemic Covid-19, pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan membaik dan berada pada range antara 7,78 persen pada tahun 2021 dan 7,95 persen pada tahun 2023 atau rata-rata bertumbuh 7,87 persen per tahun. Prediksi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone masih tetap diperkirakan didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan serta perkembangan sektor-sektor industri

kecil dan menengah. Percepatan pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap pendapatan daerah terutama pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Prediksi pertumbuhan ekonomi pada pasca pandemic akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun berjalan 2020, tingkat pengangguran di Kabupaten Bone adalah sebesar 4,22 persen yang kemudian diprediksikan akan terus menurun hingga 2,88 persen pada tahun 2023. Dalam kurun waktu 2020-2023, tingkat pengangguran diprediksikan rata-rata 3,32 persen pertahun. Di sisi lain, persentase penduduk miskin juga diprediksikan akan mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata 10,03 persen. Angka proyeksi ini lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang terhitung rata-rata sebesar 10,21 persen per tahunnya.

Tingkat inflasi yang cenderung turun hingga tahun 2020, diperkirakan terus mengalami penurunan yang cukup lambat dengan rata-rata penurunan 0,025 point. Target inflasi pada akhir periode RPJMD adalah 1,30 persen. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjaga margin keuntungan bagi sisi produsen. Demikian halnya IPM, juga diprediksikan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Target-target yang telah ditetapkan pada beberapa variabel makro ekonomi disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi akan cukup signifikan mempengaruhi target rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dalam tiga tahun ke depan.

Tabel 3. 10. Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Bone, 2020-2023

	2020n	2021*	2022**	2023**
Pertumbuhan Ekonomi	5,11	7,78	7,90	7,95
IPM	66,39	66,52	67,01	67,50
Persentase Penduduk Miskin	10,3	10,25	9,95	9,65
Tingkat Pengangguran terbuka	4,22	3,18	3,03	2,88
Inflasi	1,68	1,35	1,32	1,3
PDRB perkapita	47,98	49,14	52,47	53,84

Sumber: Proyeksi Tim RPJMD, 2020

Ket:

n = tahun berjalan

* = RKPD 2021

** = Proyeksi

Selain asumsi-asumsi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan daerah, terdapat juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat khususnya di bidang keuangan. Meskipun diakui bahwa pemerintah daerah mengalami tekanan dari sisi sumber-sumber pendapatan daerah akibat dari pandemic covid-19 namun pemerintah Kabupaten Bone tetap menempuh berbagai bentuk kebijakan-kebijakan di bidang keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Pada saat yang sama kebijakan ekspansi belanja pemerintah pusat dalam masa dan pasca pandemic akan berkontribusi pada penerimaan transfer pemerintah Kabupaten Bone sehingga pada tiga tahun ke depan, sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer diprediksikan akan mengalami peningkatan.

3.3.2 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Dengan mengacu pada prediksi asumsi-asumsi makro tersebut disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat khususnya di bidang keuangan, maka pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bone pada perubahan

RPJMD 2021-2023 diprediksikan akan mengalami peningkatan dari Rp 2.332,89 miliar menjadi Rp 2.646,02 miliar pada tahun 2023. Tambahan pendapatan diperkirakan akan mencapai Rp 323,3 miliar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir.

Besaran proyeksi pendapatan daerah diperoleh dari besaran proyeksi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bone. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Bone, maka PAD diprediksikan mencapai angka pada kisaran Rp244,86 milyar pada tahun 2021 hingga Rp277,73 milyar pada akhir periode RPJMD atau terdapat tambahan PAD sebesar Rp 61,7 miliar periode 2021-2023 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,7persen per tahun. Besaran angka tersebut dikontribusi oleh besaran target PAD pada tahun 2021. Namun kondisi covid-19 masih mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bone, maka pada dua tahun terakhir target PAD diperkirakan secara absolut meningkat tetapi dengan persentase pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun 2021.

Prediksi peningkatan PAD dikontribusi oleh masing-masing sumber-sumber PAD. Penyumbang tertinggi adalah lain-lain PAD yang sah sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Pada periode 2021-2023, rata-rata sumbangan Lain-lain PAD yang sah adalah 63,19persen terhadap total PAD. Sumber-sumber PAD yang memegang peran besar untuk ditingkatkan setiap tahun adalah penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua jenis objek pajak ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di daerah dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi dan prediksi inflasi yang terkendali selama tiga tahun ke depan, maka penerimaan yang bersumber dari pajak daerah diperkirakan meningkat dari Rp53,90 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp61,14 miliar pada tahun 2023. Selama periode tersebut, pajak daerah diperkirakan bertumbuh dengan rata-rata 7,2 persen per tahun dan kontribusinya terhadap total PAD rata-rata sebesar 22 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang juga diproyeksikan akan meningkat tiap tahunnya. Pendapatan retribusi daerah bertumbuh secara rata-rata 7,02persen per tahun atau secara nominal dari Rp23,25miliar di tahun 2021 menjadi Rp26,37 miliar pada tahun 2023. Angka prediksi ini seiring dengan prediksi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan setiap tahun. Salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi penetapan proyeksi asumsi makro ekonomi maupun prediksi pendapatan daerah ialah implementasi program-program strategis daerah yang diprediksikan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang social ekonomi. Secara keseluruhan, sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Bone diprediksikan mencapai rata-rata 10,49persen per tahun.

Meskipun diakui bahwa kondisi keuangan negara masih relatif kurang stabil sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, namun Dana perimbangan (transfer dari pemerintah) masih diprediksikan sebagai sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Bone dalam 3 tahun ke depan sebagaimana pada periode RPJMD sebelumnya. Transfer pemerintah pusat diperkirakan bertumbuh dengan rata-rata 12,6 persen per tahun. Transfer pemerintah pusat ditargetkan menyumbang secara rata-rata sebesar 80,77 persen per tahun terhadap total pendapatan daerah. Selain pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pendapatan transfer dari pemerintah provinsi ditargetkan akan mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 104,03 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 117,99 milyar pada tahun 2023. Secara keseluruhan total pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Bone mencapai Rp 2255,20 milyar pada akhir periode RPJMD. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata-rata 85,23 persen.

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan akan bertumbuh dengan angka negative pada periode 2021-2023. Pertumbuhan angka negative terutama dikontribusi oleh penetapan target yang menurun drastic pada tahun 2021 dibandingkan dengan target 2020. Akan tetapi, pada tahun 2022 hingga tahun 2023 kembali diperkirakan akan mengalami peningkatan dari Rp 99,71 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 113,09 milyar pada tahun 2023. Hanya ada dua pembentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatn hibah dan pendapatan lainnya.

Setelah mencermati proyeksi pendapatan daerah beserta rinciannya selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Bone masih cukup besar. Hal ini ditandai oleh sumbangan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah menempati urutan tertinggi dari seluruh jenis-jenis penerimaan daerah. Meskipun demikian, seiring dengan semakin membaiknya aktivitas perekonomian pada pasca pandemic Covid-19, maka target pendapatan dari PAD akan bertumbuh setiap tahunnya.

Tabel 3. 11. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 2021-2023 (Rp Milyar)

URAIAN (PP 58/ TA 2005)	REALISASI		URAIAN (PP 12/ TA 2019)	ANGGARAN TAHUN 2021	PROYEKSI		RATA RATA PERTUMBUHAN
	TAHUN 2019	TAHUN 2020			TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2	3	4	6	3	7	9	10
PENDAPATAN	2,443,239,348,077	2,362,378,792,321	PENDAPATAN DAERAH	2,332,890,487,998	2,423,317,573,197	2,546,022,915,842	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	230,462,002,384	271,455,489,753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244,863,813,698	253,297,199,267	271,028,003,216	
Pendapatan Pajak Daerah	54,776,702,857	54,735,355,216	Pajak Daerah	53,902,080,493	62,392,142,567	66,759,592,547	
Hasil Retribusi Daerah	19,274,791,794	22,181,941,946	Retribusi Daerah	23,247,694,400	25,186,206,810	26,949,241,287	
Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,558,628,147	10,647,161,905	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,983,630,905	17,291,642,680	18,502,057,667	
Lain-Lain PAD yang Sah	147,851,879,587	183,891,030,686	Lain-lain PAD Yang Sah	154,730,407,900	148,427,207,210	158,817,111,715	
DANA PERIMBANGAN	1,603,392,651,884	1,440,565,778,179	PENDAPATAN TRANSFER	1,988,316,337,000	2,066,024,667,930	2,165,799,421,327	
Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	17,179,515,954	18,754,681,283	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,884,289,337,000	1,913,503,767,930	2,009,178,956,327	
DANA BAGI HASIL PAJAK			Dana Bagi Hasil Pajak	16,117,129,000	17,728,841,900	18,615,283,995	
Dana Alokasi Umum (DAU)	1,116,830,949,000	1,000,527,318,000	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5,545,737,000	6,999,192,200	7,349,151,810	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	469,382,186,930	421,283,778,896	Dana Alokasi Umum	1,028,458,565,000	1,028,371,912,080	1,079,790,507,684	
			Dana Alokasi Khusus	474,454,501,000	495,505,306,950	520,280,572,298	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	609,384,693,808	650,357,524,389	Dana Insentif Daerah	25,925,549,000	31,110,658,800	32,666,191,740	
Hibah	106,566,072,100	111,197,545,150	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
Dana Darurat	-	-	Dana Keistimewahan	-	-	-	
Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	84,886,090,708	81,975,704,796	Dana Desa	333,787,856,000	333,787,856,000	350,477,248,800	

Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

URAIAN (PP 58/ TA 2005)	REALISASI		URAIAN (PP 12/ TA 2019)	ANGGARAN TAHUN 2021	PROYEKSI		RATA RATA PERTUMBUHAN
	TAHUN 2019	TAHUN 2020			TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2	3	4	6	3	7	9	10
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9,486,726,000	41,710,557,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Bantuan Keuangan	104,027,000,000	152,520,900,000	156,620,465,000	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	71,113,253,000	81,685,861,443		78,083,000,000	81,991,300,000	86,090,865,000	
Pendapatan Lainnya	337,332,552,000	333,787,856,000		-	-	-	
				25,944,000,000	70,529,600,000	70,529,600,000	
				99,710,337,300	103,995,706,000	109,195,491,300	
			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
			Pendapatan Hibah	99,710,337,300	103,995,706,000	109,195,491,300	
			Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	

Sumber : BKAD Kabupaten Bone

3.3.3 Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan regulasi terbaru, PP 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah terdiri atas empat komponen belanja yaitu alokasi belanja operasi, alokasi belanja modal, alokasi belanja transfer dan alokasi belanja tak terduga. Setelah mengetahui kemampuan keuangan dari aspek pendapatan daerah dalam tiga tahun depan, maka sub bab ini menguraikan proyeksi alokasi belanja dalam tiga tahun ke depan. Apakah pendapatan daerah yang telah diproyeksikan akan teralokasi secara keseluruhan untuk mendanai belanja daerah beserta rinciannya. Ketetapan proyeksi besaran alokasi belanja ditentukan oleh arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bone. Analisis proyeksi belanja turut menentukan besaran kapasitas fiskal riil untuk mendanai program-program pembangunan daerah jangka menengah. Selain itu, analisis proyeksi belanja dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai macam strategi agar dampak dari implementasinya betul-betul berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Bone. Dalam kurung waktu 3 tahun terakhir (2021-2023) arah kebijakan penganggaran ditempuh anggaran defisit.

Dalam menentukan besaran alokasi belanja ditentukan oleh tiga faktor yaitu asumsi indikator makro ekonomi, analisis kebijakan pembiayaan daerah, dan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Tabel 3.11, memperlihatkan proyeksi belanja daerah beserta rinciannya mulai 2021-2023. Dengan menyimak hasil proyeksi tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa belanja daerah secara nominal diprediksikan mengalami peningkatan dari Rp 2387,64 milyar pada tahun 2021 hingga Rp 2705,43 milyar pada tahun 2023. Pertumbuhannya diprediksikan mencapai 6,4 persen per tahun pada dua tahun terakhir. Proyeksi ini didasari oleh adanya asumsi makro ekonomi yang ingin dicapai pada periode yang sama. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berada angka 7,78 – 7,95. Untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan dukungan alokasi belanja. Selain target pertumbuhan ekonomi, juga target penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Pelambatan prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 karena masih terpengaruh dampak pandemic covid-19 dan pada saat yang sama sumber penerimaan daerah juga masih terbatas sehingga target belanja daerah pada tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi pada dua tahun ke depan, belanja daerah diprediksikan bertumbuh lebih cepat seiring dengan prediksi asumsi makro ekonomi daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bone adalah besarnya proporsi anggaran untuk belanja operasional yang didalamnya termasuk belanja pegawai. Target alokasi belanja daerah terbesar adalah belanja operasional yang mencapai Rp 1515,44 milyar pada tahun 2021, Rp 1613,95 milyar pada tahun 2022, dan Rp 1718,85 milyar pada akhir tahun 2023. Proporsi belanja operasional terhadap total belanja daerah rata-rata 63,5 persen per tahun. Selebihnya terdistribusi kepada tiga jenis belanja lainnya yaitu belanja modal sebesar 16,6 persen, belanja tidak terduga rata-rata 0,78 persen, dan belanja transfer 19,02 persen.

Untuk lebih mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan tingkat pengangguran, maka kebijakan pemerintah dari sisi belanja adalah meningkatkan porsi alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa belanja modal meningkat dari Rp 398,28 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 451,74 milyar pada tahun 2023. Selama tiga tahun tersebut, belanja modal ditargetkan bertumbuh lebih cepat pada angka 13,19 persen per tahun. Meskipun pertumbuhannya relatif cepat tetapi proporsinya terhadap total belanja masih terhitung kecil hanya 16,6 persen per tahun. Angka tersebut lebih rendah dari proporsi belanja transfer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2023, pemerintah Kabupaten Bone masih menempatkan belanja operasional sebagai prioritas belanja daerah.

3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mendanai program-program pembangunan jangka menengah ke depan. Perhitungan kapasitas fiskal untuk periode Perubahan RPJMD dimulai pada tahun 2021-2023. Komponen pembentuk kapasitas riil fiskal berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah seluruh penerimaan daerah dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah yaitu penjumlahan antara pendapatan daerah dan penerimaan yang diperoleh dari pencairan dana cadangan (jika ada) dan perhitungan Sisa lebih rii perhitungan anggaran. Struktur belanja daerah berdasarkan pada PP No.12 tahun 2019, tidak dikenal lagi nomenklatur belanja tidak langsung, maka perhitungan kapasitas fiskal

riil diperoleh dari selisih penerimaan daerah dengan belanja operasional, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan demikian, untuk memperbesar kapasitas riil keuangan daerah maka ada dua arah kebijakan yang ditempuh yaitu peningkatan target penerimaan daerah dan pengurangan atau penghematan belanja ketiga jenis komponen belanja tersebut.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah operasional, belanja tidak terduga dan belanja transfer maka diperoleh kapasitas riil fiskal untuk tiga tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Bone tidak membuat kebijakan tentang pembentukan dana cadangan namun diprediksikan terdapat SiLPA yang diperoleh dari hasil penghematan belanja sehingga kapasitas riil keuangan daerah bertambah pada tahun 2021 tetapi tidak berlanjut hingga akhir periode RPJMD. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah penjumlahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Demikian halnya, dalam kurung waktu tiga tahun kedepan pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman baru namun terdapat kewajiban pembayaran Bunga utang yang masih berlanjut hingga tahun 2023. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mendanai program-program pembangunan jangka menengah ke depan. Perhitungan kapasitas fiskal untuk periode Perubahan RPJMD dimulai pada tahun 2021-2023. Komponen pembentuk kapasitas riil fiskal berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah seluruh penerimaan daerah dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah yaitu penjumlahan antara pendapatan daerah dan penerimaan yang diperoleh dari pencairan dana cadangan (jika ada) dan perhitungan Sisa lebih rii perhitungan anggaran. Dengan demikian, kapasitas riil fiskal ditentukan oleh komponen-komponen tersebut. Untuk memperbesar kapasitas riil keuangan daerah maka ada dua arah kebijakan yang ditempuh yaitu peningkatan target penerimaan daerah dan pengurangan atau penghematan belanja tidak langsung.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tidak langsung maka diperoleh kapasitas riil fiskal untuk tiga tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Bone tidak membuat kebijakan tentang pembentukan dana cadangan namun diprediksikan terdapat SiLPA yang diperoleh dari hasil penghematan belanja sehingga kapasitas riil keuangan daerah bertambah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah penjumlahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Demikian halnya, dalam kurung waktu tiga tahun kedepan pemerintah daerah tidak melakukan pinjaman baru namun terdapat kewajiban pembayaran Bunga utang yang masih berlanjut hingga tahun 2023.

Tabel 3. 12. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp milyar)

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realiasi 2020	Proyeksi		
				2021	2022	2023
1	Pendapatan	2.443,24	24.19,91	2332,89	2.484,53	2.646,02
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih rill perhitungan anggaran	95,14	99,69	69,75	-	-
	Total penerimaan	2.538,38	2.519,60	2.402,64	2.484,53	2.646,02
	Dikurangi					
4	Belanja Pegawai	924,15	1.017,12	981,06	1.040,52	11.03,57
5	Belanja Tidak Terduga	1,20	1,50	20,00	20,00	20,00
6	Belanja Transfer	456,95	455,08	453,91	483,42	514,84
7	Pengeluaran	10,00	10,71	15,00	15,00	15,00

	pembiayaan					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1146,08	1035,19	932,66	925,60	992,61

Sumber: Hasil Proyeksi Tim, 2020

Pada tahun 2019, realisasi kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp 1146,08 milyar, namun dengan pandemic covid-19, target kapasitas riil keuangan daerah menurun drastic pada tahun berjalan dan diprediksikan akan berlanjut pada hingga tahun 2023. Kapasitas riil fiskal pada tahun 2021 sebesar Rp 932,66 Milyar menurun menjadi Rp925,6 Milyar pada tahun 2022, dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan kapasitas riil keuangan daerah namun diharapkan penggunaannya seoptimal mungkin sehingga target-target program pembangunan tetap dapat dicapai hingga akhir periode RPJMD 2023.

Peruntukan alokasi kapasitas fiskal telah diatur oleh Permendagri 86 tahun 2017 pada Pasal 157 berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas dikelompokkan menjadi tiga kelompok prioritas yaitu (i) alokasi anggaran untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, (ii) alokasi anggaran untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, (iii) alokasi anggaran untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp Milyar)

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
Kapasitas riil kemampuan keuangan	932,66	925,60	992,61
Prioritas I (50 %)	466,33	462,80	496,31
Prioritas II (30 %)	279,80	277,68	297,78
Prioritas III (20%)	186,53	185,12	198,52

3.4 Dampak Pandemi

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan daerah dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran serta pengurangan dana transfer ke daerah dan desa.

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa telah ditindaklanjuti dengan melakukan percepatan pelaksanaan refocussing, kegiatan dan realokasi anggaran tersebut melalui mekanisme revisi anggaran. Pelaksanaan revisi anggaran untuk realokasi belanja terkait antara lain:

- a. Kesehatan dan kemanusiaan guna pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 mengacu kepada Protokol Penanganan COVID-19
- b. Penyediaan Jaringan Pengaman sosial / social safety net
- c. Penanganan Dampak Ekonomi, mengelola dampak negatif secara prudent dan efektif termasuk memperhatikan prinsip value for money.

Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilaksanakan 2 tahap antara lain:

- a. Tahap Pertama

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melakukan Realokasi Anggaran seluruh SKPD sebesar Rp. 10.600.752.273,- (sepuluh milyar enam ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Refocussing Kegiatan sebesar Rp.8.714.544.075,- (delapan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

- b. Tahap Kedua

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengalami pengurangan Alokasi Dana Transfer Daerah dan Desa sebesar Rp. 219.294.975.000,- (dua ratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau berkurang 14.42% dan penurunan Target Pendapatan sebesar 3.12% antara lain:

- 1) DAU berkurang sebesar Rp.115.979.249.000,- (seratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau berkurang 10,25%
- 2) DAK berkurang sebesar Rp.94.674.126.000,- (sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau berkurang 20.39%
- 3) DID berkurang sebesar Rp. 6.109.432.000,- (enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau berkurang 12.76%
- 4) Dana Desa berkurang sebesar Rp.3.544.696.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau berkurang 1.05%.
- 5) Target Pendapatan berkurang sebesar Rp.6.607.048.145,- (enam milyar enam ratus tujuh juta empat puluh delapan seratus empat puluh lima rupiah)

Total pengurangan Pendapatan Daerah sebesar Rp.225.902.023.145,- (dua ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) Sehingga Pemerintah Daerah melakukan Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran 50% Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal seluruh Perangkat Daerah sesuai item belanja pada Surat Keputusan Bersama Menteri sebesar Rp.195.570.111.517,- (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan melakukan penyesuaian Anggaran Desa sebesar Rp.15.731.235.365,- antara lain:

- 1) Dana Desa yang berkurang sebesar Rp.3.544.696.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan alokasi Dana Desa yang ditetapkan pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020 mengalami pengurangan.
- 2) Alokasi Dana Desa berkurang sebesar Rp.11.525.834.500,- (sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus rupiah) berdasarkan formulasi pengalokasian Alokasi Dana Desa 10% dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bone
- 3) Bagi Hasil Pajak ke Desa berkurang sebesar Rp.561.747.925,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan formulasi pengalokasian Alokasi Bagi Hasil Pajak ke Desa 10% dari Target Pendapatan Pajak Pemerintah Kabupaten Bone
- 4) Bagi Hasil Retribusi ke Desa berkurang sebesar Rp.98.956.940,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan formulasi pengalokasian Alokasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa 10% dari Target Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bone

Realokasi Anggaran tersebut untuk menutupi selisih atau defisit atas pengurangan Dana Transfer Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020, dan realokasi selisih lebih untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19.

Pelaksanaan Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran terhadap seluruh SKPD sebesar Rp.231.245.529.434,- dan penyesuaian anggaran Desa sebesar Rp. 15.731.235.365,- dengan total Rp. 246.976.764.799,- (dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk menutupi selisih atau defisit atas pengurangan Dana Transfer Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.225.902.023.145,- (dua ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).** Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan indikator tersebut angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah (65,67) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Jeneponto. Penyebab rendahnya IPM Kabupaten Bone adalah masih rendahnya angka harapan lama sekolah anak usia 7 tahun ke atas yaitu 12,80 tahun, indikator kedua dalam perhitungan indeks pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah juga masih tergolong rendah 6,98 tahun, berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bone hampir menyelesaikan kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Selain itu, masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya akibat tingginya angka perkawinan anak, menjadi penyebab lainnya rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Bone tahun 2019 sebesar 66, 88 tahun lebih rendah dibandingkan dengan AHH Provinsi dan Nasional. Tinggi rendahnya AHH dipengaruhi banyak variable, terdapat beberapa variable yang menyebabkan AHH di Kabupaten Bone masih rendah. Penyebabnya adalah penurunan persentase persalinan yang ditolong tenaga medis dengan kompetensi kebidanan, belum optimalnya akses terhadap pelayanan kesehatan, masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, dan belum optimalnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat selain inflasi. Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Bone menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Daya beli penduduk pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.954 dan untuk indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone tahun 2019 sebesar 66,76. Kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang bekerja, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk,

- menjadi penyebab rendahnya Paritas Daya Beli.
2. **Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.** Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone mengalami perlambatan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun lalu maupun jika dibanding pada tahun 2015. Hal itu disebabkan oleh menurunnya produksi barang dan jasa akibat menurunnya daya beli masyarakat dan menurunnya kegiatan penanaman modal (investasi) oleh dunia usaha dan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 semakin mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi yang menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha atau sektor ekonomi mulai dari sektor pariwisata sampai perdagangan di Kabupaten Bone. Seluruh tempat wisata dan pendukungnya melakukan pengurangan produksi, pembatasan kapasitas dan jam operasional hingga mengurangi jumlah karyawannya demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya memberi dampak yang sangat besar bagi gerak roda perekonomian di Kabupaten Bone. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 hanya 7,01 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 8,91 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dipastikan mengalami kontraksi akibat pandemic Covid-19 terhambatnya distribusi barang akibat pembatasan sosial dan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya pendapatan karena kehilangan pekerjaan, dan menurunnya kegiatan penanaman modal (investasi) oleh dunia usaha dan masyarakat
 3. **Masih tingginya dan meningkatnya angka kemiskinan.** Kabupaten Bone masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2019 sebesar 09,93%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone juga mencatat angka terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 76.250 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi dan layanan publik, menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 hari pertama kelahiran bayi (HPK) menjadi prioritas dimasing-masing perangkat daerah terkait.
 4. **Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.** Pendapatan per kapita Kabupaten Bone masih relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita Kabupaten Bone sebesar Rp 47,50 juta, sekitar 16,14 persen lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 57,03 juta). Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Bone disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditas pertanian dan kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar, juga menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Bone.
 5. **Meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya tingkat produktivitas pekerja.** Angka pengangguran diukur dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone adalah 3,25 persen dimana TPT laki-laki 3,90 persen dan TPT perempuan 2,15 persen. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat produktivitas pekerja, artinya mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan

dan rendahnya tingkat pendidikan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sector, termasuk sektor ekonomi yang secara otomatis mempengaruhi tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran meningkat. Ini terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa lapangan usaha, seperti hotel dan restoran, perdagangan, transportasi, dll. Pandemi covid-19 juga berdampak pada penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bone, jumlah penduduk usia kerja yang terkonfirmasi covid-19 adalah sebesar 1209 orang dari keseluruhan total 556317 orang jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bone.

6. **Masih tingginya angka kriminalitas.** Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 1.193 kasus, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2016: 739 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2017, hanya 934 kasus yang diselesaikan atau 78,29 persen. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi para pihak dalam mencegah kriminalitas, masih terbatasnya keterlibatan para pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam proses penyadaran masyarakat, dan masih lemahnya proses penegakan hukum.
7. **Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.** Ini setidaknya diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78 persen, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar C, dan masih adanya sejumlah temuan BPK yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Belum dikedepankannya profesionalisme dalam pemberian layanan publik, masih kurangnya kesadaran SDM Aparatur sebagai pelayan masyarakat, Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, belum tersedianya SOP dalam setiap pemberian layanan publik, belum memadainya ketersediaan sistem informasi untuk menunjang pelayanan publik, dan belum maksimalnya pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Wajib:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pendidikan, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dibuktikan dari tingginya anak putus sekolah yang mencapai 86 ribu jiwa ;
- ♦ Sarana Fasilitas Belajar PAUD terbatas, dan kurangnya media pembelajaran dan alat peraga;
- ♦ Terbatasnya buku-buku panduan Tutor;
- ♦ Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi;
- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- ♦ Jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat domisili siswa;
- ♦ Rasio Guru dan Siswa SD/SMP yang belum memenuhi SPM Pendidikan;
- ♦ Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;
- ♦ Masih kurangnya PKBM sebagai wadah penyebaran informasi pendidikan keaksaraan;
- ♦ Kurangnya dukungan untuk mendorong gerakan pemberantasan buta aksara;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan yang mendukung peningkatan kecakapan hidup masyarakat.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kesehatan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya;
- ♦ Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek jenis pelayanan (Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas, Rujukan, Tradisional dll), aspek peralatan kesehatan maupun dari aspek lain;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan kalibrasi alat kesehatan;
- ♦ Kurang optimalnya penanganan kesehatan saat terjadi bencana alam;
- ♦ Masih perlu pengawasan intensif terhadap pengedaran obat dan makanan terhadap masyarakat;
- ♦ Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Bone;
- ♦ Masih tingginya angka kekurangan gizi pada Balita terutama Balita Stunting;
- ♦ Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi standar / belum mencapai target;
- ♦ Belum Semua Kecamatan, desa dan kelurahan melakukan Proses Kawasan Sehat secara Standar;
- ♦ Belum ada Desa/Kelurahan STBM, Belum mencapai Universal Akses Desa/Kelurahan ODF;
- ♦ Angka kejadian penyakit menular masih tinggi, penemuan kasus masih rendah dan pengobatan yang belum sesuai standar;
- ♦ Belum semua desa/kelurahan berstatus UCI;
- ♦ masih adanya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap;
- ♦ Masih tingginya angka penduduk miskin sehingga perlu intervensi terhadap faktor penyebab kemiskinan di bidang kesehatan;
- ♦ Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas;
- ♦ Perlunya Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana RS yang sudah ada;
- ♦ Masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu JKN;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Anak masih belum signifikan;
- ♦ Program Peningkatan Keselamatan Lansia;
- ♦ Rendahnya pengawasan intensif terhadap pengolahan makanan dan minuman pada industri-industri rumah tangga;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Ibu masih belum signifikan;
- ♦ Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Keterlambatan penemuan kasus kanker serviks dan payudara;
- ♦ Masih tingginya kebiasaan merokok yang merupakan faktor resiko penyakit tidak menular;
- ♦ Masih tingginya penderita katarak;
- ♦ Masih ada pasien ODGJ yang dipasung;
- ♦ Kasus Hipertensi semakin meningkat;
- ♦ Kasus DM semakin meningkat;
- ♦ Tuntutan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS harus Reakreditasi setiap 3 tahun)
- ♦ Belum sesuai Alas kesehatan dengan standar RS type B;
- ♦ Jumlah SDM belum memenuhi Standar RS type B;
- ♦ Indikator pelayanan rawat inap yang belum berada pada angka ideal;
- ♦ SIM RS belum terintegrasi optimal;

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

- ♦ Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun beton;
- ♦ Masih ada jembatan yang mengalami rusak berat;
- ♦ Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Rendahnya aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan wisata dan industri;
- ♦ Belum adanya pembagian kewenangan jalan mengakibatkan penanganan jalan tidak efektif;
- ♦ Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin kelayakan dan rendahnya kepatuhan terhadap fungsi ruang;
- ♦ Masih terjadinya alih fungsi lahan;

- ♦ Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- ♦ Masih adanya daerah irigasi baru (irigasi permukaan dan irigasi tambak) yang sudah didata namun belum terbangun jaringan irigasinya;
- ♦ Adanya kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang terjadi pada daerah-daerah irigasi permukaan yang sudah terbangun (eksisting) yang berpotensi mengganggu fungsi dan kinerja jaringan irigasi di daerah irigasi tersebut;
- ♦ Masih adanya daerah-daerah irigasi yang sudah terdaftar tapi belum memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan belum pernah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan;
- ♦ Masih adanya jaringan sungai (termasuk di dalamnya saluran pembuang) yang butuh untuk direhabilitasi / dinormalisasi (pengerukan, pasangan talud dan bronjong) yang jika dilaksanakan akan berpotensi mengganggu kinerja dan fungsi aset-aset pengairan yang ada di sekitarnya;
- ♦ Belum Optimalnya kelestarian sumber-sumber air (konservasi) untuk keperluan pertanian dan ketersediaan air baku;
- ♦ Belum optimalnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) khususnya pada kawasan-kawasan pemukiman di daerah pantai yang membutuhkan untuk melindungi kawasan tersebut dari banjir yang diakibatkan kenaikan air laut (pasang).
- ♦ Kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) dalam menanggulangi liapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah permukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah pantai tersebut akibat adanya fluktuasi pasang surut air laut di daerah-daerah pantai (kawasan pesisir) yang ada di Kabupaten Bone yang cenderung tidak menentu baik disebabkan pengaruh inkonsistensi iklim maupun pengaruh pemanasan global.
- ♦ Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada disekitarnya.
- ♦ Banyak sungai utama yang mengalami laju aggradasi (pendangkalan dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.
- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
- ♦ Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkaran/konservasi air tanah yang terbangun.
- ♦ Banyak bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
- ♦ Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
- ♦ Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.
- ♦ Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
- ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembenahan jaringan irigasi tambak yang sudah terbangun di Kabupaten Bone.
- ♦ Masih banyak potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.
- ♦ Belum memadainya tingkat pelayanan operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru terbentuk.
- ♦ Belum memadainya database irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi di pantai.
- ♦ Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka

memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.

- ♦ Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.
- ♦ Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.

4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, adalah:

- ♦ Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
- ♦ Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
- ♦ Tidak memadainya sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman;
- ♦ Masih adanya kawasan permukiman kumuh
- ♦ Tidak optimalnya pemeliharaan dan sarana dan prasarana umum.

5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA;
- ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal;
- ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merata;
- ♦ Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara;
- ♦ Masih adanya pelanggaran K3 oleh masyarakat;
- ♦ Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- ♦ Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
- ♦ Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
- ♦ Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- ♦ Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
- ♦ Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan;
- ♦ Belum memadainya sarana, prasarana dan SDA pendukung penanganan korban bencana;
- ♦ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana;
- ♦ Belum optimalnya penanganan pasca bencana;
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- ♦ Belum terpenuhinya kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
- ♦ Jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran.

6. **Urusan Sosial:**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

- ♦ Masih rendahnya penanganan fakir miskin melalui bantuan usaha KUBE.
- ♦ Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- ♦ Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah.
- ♦ Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas;
- ♦ Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya;
- ♦ Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi

sosial.

- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP).

7. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

- ♦ Rendahnya tingkat kesadaran pihak pengusaha untuk memberi hak pada karyawan seperti pesangon, insentif, upah yang layak, uang saku dll;
- ♦ Kurangnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan dan perselisihan;
- ♦ Rendahnya tingkat pengetahuan dari pengusaha tentang kepesertaan jamsostek;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- ♦ Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang kewirausahaan;
- ♦ Adanya peningkatan angka pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19;

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

- ♦ Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
- ♦ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ♦ Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
- ♦ Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;
- ♦ Rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
- ♦ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- ♦ Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;
- ♦ Belum optimalnya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- ♦ Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.

9. Urusan Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan pangan, adalah:

- ♦ Masih kurangnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah;
- ♦ Tidak meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah;
- ♦ Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras;
- ♦ Masih rendahnya ketersediaan protein hewani;
- ♦ Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan;
- ♦ Belum optimalnya pelaporan SKPG;
- ♦ Belum seimbang pola konsumsi masyarakat dimana masih di dominasi oleh karbohidrat, ketimbang protein hewani maupun nabati;
- ♦ Belum optimalnya informasi distribusi bahan pangan antar wilayah;
- ♦ Masih fluktuatifnya harga pangan ;
- ♦ Belum memadainya sarana dan pasarana distribusi pangan;
- ♦ Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- ♦ Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait tentang keamanan pangan;
- ♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- ♦ Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan;
- ♦ Masih rendahnya promosi pangan lokal;
- ♦ Belum optimalnya lembaga petani dalam menyediakan cadangan pangan;
- ♦ Masih rendahnya operasional dalam mengelola cadangan pangan.

10. Urusan Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan pertanahan, adalah:

- ♦ Masih banyaknya lahan/ aset pemerintah yang belum tersertifikasi;
- ♦ Masih banyaknya lahan strategis dan fasilitas umum yang belum menjadi aset pemerintah;
- ♦ Belum tersedianya Lahan Aset Pemda untuk pembangunan kawasan strategis dan fasilitas umum.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDGs dalam lima tahun terakhir
- ♦ Rendahnya Pengawasan terkait ketaatan hukum lingkungan dikarenakan belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup (pejabat Fungsional);
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional.
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah);
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;
- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan;

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena jaringan koneksi internet yang lambat dan jumlah aparatur yang terbatas;
- ♦ Tidak adanya peraturan mengenai sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- ♦ Tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- ♦ Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mutasi penduduk;
- ♦ Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sektor untuk meningkatkan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

- ♦ Kurang optimalnya peningkatan status desa;
- ♦ Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
- ♦ Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah perdesaan;
- ♦ Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- ♦ Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa;
- ♦ Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
- ♦ Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
- ♦ Belum akuntabel, transparan, dan partisipatifnya pengelolaan keuangan desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

- ♦ Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- ♦ Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok bina ketahanan keluarga;
- ♦ Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

15. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana dan prasarana transportasi, seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- ♦ Lemahnya sistem registrasi kepemilikan kendaraan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

- ♦ Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online;
- ♦ Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
- ♦ Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*. Belum terjangkau Jaringan Seluler;
- ♦ Belum memadainya infrastruktur jaringan.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

- ♦ Masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- ♦ Rendahnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan melalui BPR/LKM oleh koperasi dan UKM;
- ♦ Minimnya kualitas SDM dan kurangnya aparat pembina dan penyuluh koperasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bone;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan gerakan koperasi dan pelaku Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usaha;
- ♦ Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan promosi produk usaha mikro.

18. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

- ♦ Belum tersedianya database investasi dan regulasi insentif penanaman modal;
- ♦ Ketepatan jangka waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP;
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun realisasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkaji/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Belum memadainya kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan.
- ♦ Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

- ♦ Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan;
- ♦ Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
- ♦ Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda;
- ♦ Masih Kurangnya festival kepemudaan;
- ♦ Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif;
- ♦ Kurang pengetahuan pemuda tentang penyalagunaan narkoba;
- ♦ Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK;
- ♦ Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran;
- ♦ Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas;
- ♦ Kurang optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar;
- ♦ Masih kurangnya kegiatan kompetisi olahraga;

- ♦ Masih terbatasnya pembibitan atlet potensial;
- ♦ Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.

20. Urusan Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

- ♦ Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta *up-todate* yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.

21. Urusan Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan persandian, adalah:

- ♦ Belum memadainya peralatan dan tenaga pengelola persandian;

22. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

- ♦ Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan;
- ♦ Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian andalan penetapan situs;
- ♦ Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya;

23. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

- ♦ Rendahnya minat baca masyarakat;
- ♦ Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada;
- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan;
- ♦ Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka;
- ♦ Kurangnya pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi;
- ♦ Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan;
- ♦ Rendahnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan arsip;
- ♦ Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kelautan dan perikanan, adalah:

- ♦ Lemahnya kemampuan pelaku usaha di bidang kenelayanan, dalam kemandirian berusaha secara berkelanjutan;
- ♦ Masih rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan;
- ♦ Rendahnya legalitas berusaha bagi pelaku usaha perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

- ♦ Terbatasnya pelaksanaan festival, event/ pameran pariwisata;
- ♦ Belum optimal peran kelompok sadar wisata;
- ♦ Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- ♦ Belum memadainya daerah destinasi pariwisata di Kabupaten Bone.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian, adalah:

- ♦ Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
- ♦ Rendahnya akses petani terhadap permodalan;
- ♦ Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang berbasis agribisnis;
- ♦ Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal peningkatan teknologi pertanian;
- ♦ Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian;
- ♦ Terus berlangsungnya alih fungsi lahan;

No.	Perda No.2 Tahun 2013	Luas (Ha)	Selisih Luas (Ha)	Luas (Ha)	Revisi RTRW Kabupaten Bone
1	Hortikultura/Lahan Basah	-	48.299,89	48.299,89	Hortikultura
2	Hutan Lindung	38,688.36	-10.684,09	28.004,27	Hutan Lindung
3	Hutan Produksi	15,246.92	-579,92	14.667	Hutan Produksi
4	Hutan Produksi Terbatas	81,011.00	-3.814,70	77.196,30	Hutan Produksi Terbatas
5	-		424,2	424,2	Industri

Sumber Data : Dinas PUPR tahun 2020

- ♦ Masih adanya pertanaman hampur yang dilakukan oleh petani;
- ♦ Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi kedelai sehingga pada saat panen raya harga kedelai di tingkat petani sangat rendah;
- ♦ Belum optimalnya pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah lingkungan;
- ♦ Masih rendahnya penanganan pasca panen;
- ♦ Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis;
- ♦ Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan;
- ♦ Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak;
- ♦ Masih rendahnya jumlah akseptor IB;
- ♦ Masih rendahnya jumlah ternak bibit sapi bersertifikat;
- ♦ Terbatasnya sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (Kontainer);
- ♦ Kurangnya tempat pemasaran hewan;
- ♦ Belum maksimalnya penanganan penyakit ternak Antrax dan Rabies.

4. **Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan energi dan sumberdaya mineral, adalah:

- ♦ Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- ♦ Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone;
- ♦ Rendahnya kesadaran para pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibannya;
- ♦ Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- ♦ Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- ♦ Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
- ♦ Masih terbatasnya data potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- ♦ Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ♦ Masih terbatasnya data potensi sumber daya mineral, air tanah dan mata air

5. **Urusan Perdagangan**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

- ♦ Kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan;
- ♦ Masih banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat;
- ♦ Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ♦ Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera;
- ♦ Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan UKM untuk melakukan kegiatan ekspor;
- ♦ Kurangnya promosi produk unggulan daerah.

6. **Urusan Perindustrian**

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

- ♦ Rendahnya inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain/ kemasan produk industri;

- ♦ Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri;
- ♦ Kurangnya wawasan pengusaha IKM dalam hal manajemen, kewirausahaan, mempromosikan produk IKM;
- ♦ Terbatasnya modal usaha dan rendahnya akses terhadap sumber-sumber permodalan;
- ♦ Masih rendahnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
- ♦ Masih kurangnya sentra-sentra pengembangan industri.

C. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan pembangunan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sehingga perumusan kebijakan kurang berkualitas;
- ♦ Kurangnya data yang akurat, valid, dan relevan serta up to date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk Perencanaan yang Baik;
- ♦ Lemahnya Kapasitas Aparat Perencana dilihat dari kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan Teknis Perencana khususnya ketersediaan tenaga teknis perencana;
- ♦ Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan.

2. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah;
- ♦ Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- ♦ Kontribusi/ Rasio PAD terhadap APBD masih rendah;
- ♦ Belum memadainya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perpajakan;
- ♦ Belum tercapainya pengalokasian belanja modal minimal 30% terhadap APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan APBD
- ♦ Belum cepat dan akuntabelnya pengelolaan kas daerah khususnya dalam implementasi transaksi non tunai yang menjadi kebijakan baru dari pemerintah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Masih rendahnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan (Diklat PIM);
- ♦ Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti tugas belajar dan mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan;
- ♦ Belum sinkronnya pengadaan PNS dengan kebutuhan riil;
- ♦ Belum terlaksananya secara optimal pengembangan pegawai berdasarkan pola karier;
- ♦ Belum terlaksananya penerapan peraturan disiplin pegawai secara konsisten dan konsekuen;
- ♦ Belum sesuai penempatan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan;
- ♦ Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja pegawai.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penelitian dan pengembangan adalah:

- ♦ Belum tersedia informasi tentang peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan hasil pengkajian;
- ♦ Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi wilayah serta inovasi teknologi;
- ♦ Masih rendahnya penelitian terhadap sektor-sektor unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- ♦ Belum adanya penelitian dan pengembangan teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan;
- ♦ Belum berjalannya fungsi litbang sebagai motivator dan inisiator dalam pembangunan;
- ♦ Belum memadai sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan;
- ♦ Belum terlaksananya pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah;
- ♦ Belum terlaksananya sinergitas (ABG-C) Academition, Business, Goverment and Comunity;
- ♦ Belum tersedianya ekosistem inovasi untuk mendukung Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

5. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengawasan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditinjau dari tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, tingkat maturitas SPIP, capaian implementasi reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta aspek-aspek lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bone;
- ♦ Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI berdasarkan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus kepegawaian terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Belum memadainya tingkat ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal yang kompeten dan profesional pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ♦ Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP-Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditinjau dari akuntabilitas dan manajemen kinerja dan keuangan, pengelolaan SDM, ketersediaan anggaran beserta sarana dan prasarana pengawasan, dan dukungan layanan administrasi perkantoran.

6. Sekretariat Dewan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat dewan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- ♦ Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD;
- ♦ Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- ♦ Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindaklanjuti karena banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia yang ada;
- ♦ Masih sangat minim Ranperda inisiatif DPRD karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.

7. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat daerah, adalah:

- ♦ Belum memadainya manajemen layanan publik yang berbasis teknologi informasi;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan Review terhadap dokumen perencanaan baik substansi sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai;
- ♦ Belum Optimalnya pembiayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- ♦ Masih rendahnya kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Sekretariat;
- ♦ Belum tertibnya penatausahaan barang/aset daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah ;
- ♦ Belum memadainya manajemen layanan publik yang berbasis teknologi informasi;
- ♦ Belum optimalnya Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
- ♦ Belum optimalnya pelaksanaan Penataan Wilayah administrasi pemerintahan;
- ♦ Belum memadainya pemberdayaan kelembagaan dan penataan pemerintah;
- ♦ Masih kurangnya pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya alam;
- ♦ Belum optimlanya pelaksanaan pembinaan kelembagaan pada masing-masing SKPD;
- ♦ Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah;
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa;
- ♦ Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Sekretariat daerah ;

- ♦ Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa bagian dengan dinas/instansi/kantor;

4.2. Isu Strategis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

A. Isu Strategis Global

1. Pandemi COVID-19

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu, tetapi virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi sebagian orang yang berisiko tinggi. Kebanyakan korban berasal dari kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes.

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi.

Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama adalah Refocusing

Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Refocusing dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Realokasi yang dilakukan K/L antara lain untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen COVID-19. Penghematan juga dilakukan terhadap belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Semuanya ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja-belanja lainnya. Selain itu belanja modal ditunda untuk dikerjakan multi year, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya.

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan isu penting dalam pembangunan global saat ini dan 15 tahun ke depan (2016-2030). Secara konseptual, SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs ini terdiri atas 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator pembangunan.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sektor swasta dan lembaga donor. Secara kolektif kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan secara eksplisit mengenai pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDGs benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pencapaian SDGs harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bone. Rencana kerja pemerintah Kabupaten Bone telah mengarusutamakan pencapaian SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Dalam rencana aksi SDGs Kabupaten Bone telah ditetapkan target pencapaian terhadap 17 tujuan dan 55 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

1. *No Poverty*: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk manapun, meliputi 3 target
2. *Zero Hunger*: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, meliputi 3 target
3. *Good health and Well being*: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, meliputi 7 target
4. *Quality Education*: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, meliputi 3 target
5. *Gender Equality*: mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan, meliputi 5 target
6. *Clean Water and Sanitation*: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, meliputi 3 target
7. *Affordable and Clean Energy*: menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, meliputi 1 target

8. *Decent Work and Economic Growth*: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, meliputi 5 target
9. *Industry, Innovation and Infrastructure*: membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, meliputi 2 target
10. *Reduced Inequalities*: mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara, meliputi 1 target
11. *Sustainable Cities and Communities*: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, meliputi 5 target
12. *Responsible Consumption and Production*: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, meliputi 3 target
13. *Climate Action*: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, meliputi 2 target
14. *Life Below Water*: melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi 1 target
15. *Life on Land*: melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, meliputi 2 target
16. *Peace, Justice and Strong Institutions*: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan, meliputi 5 target
17. *Partnerships for the Goals*: menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi 4 target

Adapun capaian pembangunan SDG's Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1-4 Pada tahun 2023, menjamin bahwa semua laki-laki dan Perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a) 1.4.1 (b) 1.4.1 (c) 1.4.1 (e) 1.4.1 (g) 1.4.1 (h) Jumlah : 6 Indikator
	1-5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* 1.5.1.(b) 1.5.1.(e) 1.5.2.(a) 1.5.3* Jumlah : 6 Indikator
2. Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1 pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.* 2.2.1.(a) 2.2.2.(b) 2.2.2.(c) Jumlah : 4 Indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.* 3.1.2.(a) Jumlah : 2 Indikator
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1.000.	3.2.1.* 3.2.2.* 3.2.2.(a) 3.2.2.(b) Jumlah : 4 Indikator
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) 3.3.2.(a) Jumlah : 2 Indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit yang tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a) 3.4.1.(b) Jumlah : 2 Indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e) 4.1.1.(g) Jumlah : 2 Indikator
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2. (a) Jumlah : 1 Indikator
	4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejujuran, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1.* Jumlah : 1 Indikator
	4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejujuran, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1.* Jumlah : 1 Indikator
	4.6 Pada tahun 2030, Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa terentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b) Jumlah : 1 Indikator
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1.* Jumlah : 1 Indikator
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a) Jumlah : 1 Indikator
6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus, pada kebutuhan kaum	6.2.1.(b) 6.2.1.(c) Jumlah : 2 Indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
	perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua	7.2 Pada Tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1.* Jumlah : 1 Indikator
	7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi ditingkat global sebanyak 2 kali lipat.	7.3.1.* Jumlah : 1 Indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.	8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.* 8.9.1.(c) Jumlah : 2 Indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri inklusif dan berkelanjutan, serta Medorong Inovasi	9.2 Mempromosikan Industrialisasi inklusi dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya dinegara kurang berkembang.	9.2.1.* 9.2.1.(a) Jumlah : 2 Indikator
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* Jumlah: 1 indikator
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a) 11.5.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b) Jumlah: 1 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b) Jumlah: 1 indikator
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi mitra Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan Dan kerjasama Triangular secara Regional Dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan	

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target
	timbal balik, termasuk melalui koordinasi Yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
Jumlah Tujuan TPB: 14	Jumlah Target TPB (Isu Strategis): 28	Jumlah Indikator : 51

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

b. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone namun belum mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD tahun 2018. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2. Tujuan dan Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target
1. Mengakhiri kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c) 1.3.1.(d) Jumlah: 2 indikator
	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwasemua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d) 1.4.1.(j) 1.4.1.(k) Jumlah: 3 indikator
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) 1.5.1.(c) Jumlah: 2 indikator
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2* 2.2.2.(a) Jumlah: 2 indikator
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2* Jumlah: 1 indikator
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3* 3.3.3.(a) 3.3.5* 3.3.5.(a) Jumlah: 4 indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan	3.4.1.(c) 3.4.2.(a) Jumlah: 2 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	kesehatan mental dan kesejahteraan.	
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) 4.1.1.(d) Jumlah: 2 indikator
	4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1* Jumlah: 1 indikator
6. Menjamin tersedianya serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d) Jumlah: 1 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a) 8.9.1.(b) Jumlah: 2 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b) 9.1.2.(c) Jumlah: 2 indikator
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b) 10.1.1.(c) Jumlah: 2 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan	16.9.1*

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	kelahiran.	Jumlah: 1 indikator
Jumlah Tujuan TPB: 11	Jumlah Target TPB (Isu Strategis): 18	Jumlah Indikator: 31

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

c. Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target

Berikut ini adalah indikator-indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMN 2019. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3. Tujuan dan Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, Perempuan dan anak-anak Dari semua usia, yang hidup Dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* Jumlah: 1 indikator
	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a) 1.3.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d) Jumlah: 1 indikator
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* 1.a.2* Jumlah: 2 indikator
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* 2.1.2* 2.1.2.(a) Jumlah: 3 indikator
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.1.(b) 3.7.2* 3.7.2.(a) Jumlah: 5 indikator
	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,	3.8.1.(a) 3.8.2* 3.8.2.(a) Jumlah: 3 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
	3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a) Jumlah: 1 indikator
	3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Jumlah: 1 indikator
	3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Jumlah: 1 indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1* 4.1.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Jumlah: 1 indikator
5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* 5.2.1.(a) 5.2.2* Jumlah: 3 indikator
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* 5.3.1.(a) 5.3.1.(b) Jumlah: 3 indikator
	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2* Jumlah: 1 indikator
	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a) 5.6.1.(b) Jumlah: 2 indikator
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b) 6.1.1.(c) Jumlah: 2 indikator
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai	6.2.1.(e)

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f) Jumlah: 2 indikator
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) 6.3.1.(b) 6.3.2.(b) Jumlah: 3 indikator
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) 6.5.1.(c) 6.5.1.(f) 6.5.1.(g) Jumlah: 4 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* 8.10.1.(a) 8.10.1.(b) Jumlah: 3 indikator
	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* 8.1.1.(a) Jumlah: 2 indikator
	8.3 Menggalakkan kebijakan Pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* 8.3.1.(a) 8.3.1.(b) 8.3.1.(c) Jumlah: 4 indikator
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* 8.5.2* 8.5.2.(a) Jumlah: 3 indikator
	8.6 Pada tahun 2020, secara Substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Jumlah: 1 indikator
	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2* Jumlah: 1 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di	9.2.2* Jumlah: 1 indikator

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	negara kurang berkembang.	
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang beradadi bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* 10.1.1.(a) 10.1.1.(d) 10.1.1.(f) Jumlah: 4 indikator
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1* Jumlah: 1 indikator
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	0.4.1.(b) Jumlah: 1 indikator
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a) 11.1.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* 11.5.2.(a) Jumlah: 2 indikator
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2* Jumlah: 1 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah: 1 indikator
13. Mengambil Tindakan Cepat	13.1 Memperkuat kapasitas	13.1.1*

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2* Jumlah: 2 indikator
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1* Jumlah: 1 indikator
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	16.1 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c) Jumlah: 1 indikator
	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a) 16.1.2.(a) 16.1.3.(a) Jumlah: 3 indikator
	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a) Jumlah: 3 indikator
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* 16.6.1.(a) 16.6.1.(b) 16.6.1.(c) 16.6.1.(d) 16.6.2.(a) Jumlah: 6 indikator
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a) Jumlah: 1 indikator
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1* 17.1.1.(a) 17.1.2* Jumlah: 3 indikator
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b) 17.18.1.(c) 17.18.1.(d) Jumlah: 3 indikator
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk	17.19.2.(b) 17.19.2.(c)

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target
	mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d) Jumlah: 3 indikator
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) Jumlah: 1 indikator
	17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
Jumlah Tujuan TPB: 15	Jumlah Target TPB: 50	Jumlah Indikator: 102

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

d. Indikator belum Memiliki Data

Pada indikator untuk mencapai TPB di Kabupaten Bone terdapat beberapa indikator yang belum memiliki data pada setiap tujuan dalam TPB di Kabupaten Bone:

Tabel 4. 4. Tujuan dan Target TPB yang Belum Memiliki Data

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1* Jumlah: 1 indikator
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a) 3.3.5.(b) Jumlah: 2 indikator
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2* Jumlah: 1 indikator
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e) 3.5.2* Jumlah: 2 indikator
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan	3.b.1.(a)

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
	vaksin dan obatpenyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Jumlah: 1 indikator
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Jumlah: 1 indikator
5.Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumentasi hasil revisi dari konferensi konferensi tersebut.	5.6.1* Jumlah: 1 indikator
	5.b Meningkatkan pengguna teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1* Jumlah: 1 indikator
6.Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a) Jumlah: 1 indikator
	6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b) Jumlah: 1 indikator
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Jumlah: 1 indikator
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,	9.1.1.(b) 9.1.1.(c)

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Jumlah: 2 indikator
	9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* 9.3.2* Jumlah: 2 indikator
	9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, pengembangan, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan Pengembangan	9.5.1* Jumlah: 1 indikator
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a) 9.c.1.(b) Jumlah: 2 indikator
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e) Jumlah: 1 indikator
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d) Jumlah: 1 indikator
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b) 11.3.2.(b) Jumlah: 2 indikator
	11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b) Jumlah: 1 indikator
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a) Jumlah: 1 indikator
	12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a) Jumlah: 1 indikator
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan	15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari	15.1.1.(a)

Tujuan	Target (Isu Strategis)	Jumlah Indikator Belum Memiliki Data
Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Jumlah: 1 indikator
16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4* Jumlah: 1 indikator
	16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a) Jumlah: 1 indikator
17.Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b) Jumlah: 2 indikator
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) Jumlah: 1 indikator
Jumlah Tujuan TPB: 13	Jumlah Target TPB: 29	Jumlah Indikator: 36

Sumber : Hasil Analisis Data SDG's Kabupaten Bone Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 36 indikator TPB yang belum memiliki data yang berkaitan dengan 13 tujuan dalam TPB. 36 indikator yang belum memiliki data tersebut merupakan tanggung jawab dari OPD yang ada di Kabupaten Bone. OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data setiap indikator yang belum memiliki data antara lain: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Satpol PP. Setiap OPD memiliki tanggung jawab pada beberapa indikator yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Ketersediaan data merupakan suatu hal penting yang perlu dipenuhi oleh setiap OPD agar dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan pembangunan Kabupaten Bone dapat sesuai dengan kondisi di wilayah perencanaan. Sehingga, perencanaan pembangunan khususnya RPJMD pun dapat sesuai. Oleh karena itu, OPD yang bertanggung jawab atas ketersediaan data di atas dapat menindaklanjuti sehingga mendapatkan data yang relevan untuk proses analisis perencanaan pembangunan Kabupaten Bone.

3. Revolusi Industri 4.0

Di pertemuan tahunan internasional yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) beberapa tahun lalu memperkenalkan sebuah konsep baru yang dapat merepresentasikan perubahan kehidupan umat manusia pada semua aspek. Konsep ini menggambarkan bagaimana cara manusia hidup, cara manusia bekerja, dan cara individu berinteraksi mengalami perubahan secara fundamental seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Istilah tersebut kemudian dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 (Industrial Revolution 4.0).

Penggunaan terminologi revolusi dalam konsep ini merefleksikan terjadinya perubahan tiba-tiba dan radikal/mendasar pada semua aspek kehidupan manusia sehingga membuat buram batasan antara lingkungan fisik, digital dan biologis. Jika tiga bentuk revolusi industri sebelumnya (1.0, 2.0, dan 3.0) manusia dan teknologi bekerjasama dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, revolusi industri 4.0 justru membuat peran tenaga kerja dalam lini industri menjadi marginal (disruption). Berkembangnya artificial intelligence (AI), robotics, the internet of things (IoT), industri mobil tanpa supir (driverless car), 3D printing, nanotechnology, biotechnology, materials science, energy storage dan quantum computing merupakan penanda bahwa era revolusi industri 4.0 sudah dimulai.

Hingga saat ini, begitu banyak bukti yang menunjukkan efek positif perkembangan teknologi pada semua bidang pekerjaan. Sektor pertanian termasuk salah satu dari sekian banyak sektor yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kita dengan mudah melihat begitu banyak petani di negara-negara ekonomi maju dan berkembang, seperti Eropa, Amerika Serikat, dan China menggunakan teknologi (kecerdasan buatan/artificial intelligence) untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Tidak heran jika negara berlahan pertanian sempit seperti Belanda mampu menghasilkan komoditas kentang dengan produksi dua kali lipat lebih banyak daripada pertanian konvensional. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan skala produksi usaha terus meningkat dan membuat biaya marginal produksi sama dengan nol.

Sebagai bagian dalam dunia yang berubah ini, pemerintah Kabupaten Bone sudah sepatutnya memahami dan menjadikan revolusi ini sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Revolusi lingkungan eksternal ini sangat penting, mendasar, mendesak, dan berefek jangka menengah/panjang, dan sangat menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

4. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi

beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

5. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

B. Isu Strategis Nasional

1. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan publik dapat lebih dioptimalkan. Seperti halnya SDGs, pencapaian SPM harus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya memperkuat kelembagaan, mendesaikan kebijakan, mengkoordinasikan program, dan mengalokasikan anggaran yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendesain berbagai program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Seiring dengan perkembangan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Bone, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks. Agenda-agenda yang terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan harus benar-benar tercermin di dalam desain perencanaan pembangunan daerah.

4. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sekitar dua tahun lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Prioritas pembangunan kawasan perdesaan terletak pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan mencakup pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, dan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

C. Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1.1 Konektivitas Wilayah

Pulau Sulawesi merupakan suatu entitas ekonomi yang diharapkan memiliki konektivitas antar wilayah melalui kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Integrasi jaringan transportasi darat, laut, dan udara menjadi faktor yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah tersebut. Kabupaten Bone berada dalam jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bone untuk meningkatkan arus mobilitas barang dan orang sehingga pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

1.2. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, juga sangat terkait dengan investasi di daerah. Isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jaringan kereta api, pengembangan pelabuhan laut, pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

1.3. Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan

Selama satu dekade terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai isu strategis daerah. Sejak tahun 2008, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Pada saat bersamaan, pemerintah Sulawesi Selatan juga mengimplementasikan kebijakan kesehatan gratis dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, membantu meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

2. Isu Strategis Kabupaten Bone

2.1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bone sudah mulai menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan yang lebih optimal. Isu pendidikan yang masih perlu mendapat perhatian adalah peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah terkendala pada kondisi geografis sehingga akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan rendah serta belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMA di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bone. Untuk menjaga kualitas pendidikan perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas pendidikan sejak usia dini. Dan peningkatan lulusan sekolah dengan pendidikan yang berbasis keterampilan life skill. Pada pembangunan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dan terbangunnya suatu lingkungan yang sehat dan perilaku sehat masyarakat. Salah satu focus Pemerintah Kabupaten Bone adalah upaya pengendalian masalah gizi balita, dalam hal ini stunting. Prevalensi balita stunting (pendek) berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 adalah 37,3 persen yang menunjukkan penurunan di tahun 2019 menjadi 30 persen. Angka ini masih berada diatas angka provinsi dan nasional. Upaya intervensi gizi spesifik difokuskan pada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-23 bulan.

2.2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang potensial mampu mewujudkan peran aktif dalam pembangunan menuju pencapaian kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Gambaran keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Bone cenderung meningkat, meskipun dari segi peringkat masih masuk terendah di Sulawesi Selatan. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 yaitu 65,04 dan mengalami peningkatan menjadi 65,67 pada tahun 2019. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sector kesehatan dan sector pendidikan.

Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimana pada tahun 2019 mencapai 66,88 tahun. Sedangkan pembangunan sector pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,80 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,98 tahun di tahun 2019.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone untuk berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Rumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, memperhatikan tujuh prioritas pembangunan Nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bone selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi, yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.2. MISI

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.

6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 5.1. Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

5.3. KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023 DENGAN RPJPD KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2023 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025 adalah:

"Bone yang Lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis"

Dengan Visi tersebut diharapkan Kabupaten Bone pada tahun 2025 mendatang terwujud menjadi:

1. Sejahtera, mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Demokratis, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan didukung dengan tata pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif sebagai gambaran *good governance*.
3. Berkeadilan, mengandung makna bahwa kesamaan hak dalam pelayanan kemasyarakatan.
4. Damai, mengandung makna bahwa terciptanya kondisi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bone diliputi suasana damai, aman, dan tenteram tanpa rasa khawatir dan takut.
5. Agamis, mengandung makna bahwa kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budaya serta menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar Visi jangka panjang Kabupaten Bone tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

3. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
4. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan.
6. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan kebudayaan, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olah raga.
7. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Tabel 5.1. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Bone dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone

VISI RPJPD BONE	VISI RPJMD BONE	
SEJAHTERA	MANDIRI	SEJAHTERA
DEMOKRATIS	MANDIRI	
BERKEADILAN	BERDAYA SAING	
DAMAI	BERDAYA SAING	SEJAHTERA
AGAMIS	SEJAHTERA	

Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Tabel 5.2. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bone dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone

MISI RPJPD BONE	MISI RPJMD BONE
Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dengan priritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat
Mewujudkan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
	Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kesejahteraan social, kualitas beragama, pengembangan kebudayaan, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga	Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan harmonisasi kelompok masyarakat	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Bone harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- Inovatif dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- Kompetitif dimaknakan sebagai Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.
- Produktif dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- Inklusif dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- Berkarakter dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Tabel 5.3. Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone

VISI RPJMD SULSEL	VISI RPJMD BONE	
INOVATIF	BERDAYA SAING	
PRODUKTIF	SEJAHTERA	
KOMPETITIF	BERDAYA SAING	
INKLUSIF	MANDIRI	SEJAHTERA
BERKARAKTER	MANDIRI	

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.4. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Misi RPJMD Kabupaten Bone

MISI RPJMD SULSEL	MISI RPJMD BONE
Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

	Nepotisme (KKN)
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter	Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya
Meningkatkan produktivitas dan berdaya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
	Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik
	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran 1, disebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Keselarasan Visi RPJMN tahun 2020-2024 dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Tabel 5.5. Keselarasan Visi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone

VISI RPJMN	VISI RPJMD BONE	
MAJU	MANDIRI	SEJAHTERA
BERDAULAT	BERDAYA SAING	
MANDIRI	MANDIRI	
BERKEPRIBADIAN	SEJAHTERA	

Sedangkan keselarasan sembilan Misi RPJMN tahun 2020-2024 dengan enam Misi RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

tabel 5.6. Keselarasan Misi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Bone

MISI RPMN	MISI RPJMD BONE
Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
Mencapai lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya
	Meningkatkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat
Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpercaya	Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya
Perlindungan bagi segenap bangsa yang memberikan rasa aman pada seluruh warga	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, sefektif dan terpercaya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat
	Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik

Disebutkan bahwa RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi, Misi dan arahan utama Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

5.6. Tujuan dan Sasaran

Tujuan di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 5.7. Penjabaran misi ke dalam formulasi tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	2. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	5. Meningkatkan arus investasi dan mendorong inovasi daerah dalam pelayanan publik.
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum 7. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat

Sasaran di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level dampak (*impact*) dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran (kinerja dampak) pada periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi 2020	Target Kinerja			Kondisi Akhir 2023
								2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	“Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”										
1	Misi 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)									
	Tujuan 1	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	C	CC	B	B	BB	BB
	Sasaran 1.1	Berkurangnya kasus KKN		Proporsi OPD yang bebas dari KKN	Persen	85	88	90	95	98	99
	Misi 2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat									
	Tujuan 2	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin		Persen	10,05	11,12	10,00	9,89	9,80	9,80
	Sasaran 2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	Persen	7,01	4,32	6,68	7,21	7,53	7,53
	Sasaran 2.2	Meningkatnya perekonomian daerah secara berkelanjutan		Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	47,50	49,30	52,60	55,70	58,80	58,80
	Sasaran 2.3	Tersedianya lapangan pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,25	3,55	3,30	3,20	3,00	3,00
	Sasaran 2.4	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan		Indeks Gini	Indeks	0,366	0,372	0,370	0,367	0,363	0,363
3	Misi 3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya									
	Tujuan 3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	65,67	65,82	66,17	66,33	67,01	67,01

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi 2020	Target Kinerja			Kondisi Akhir 2023
								2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran 3.1	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat		Indeks Pendidikan	Indeks	58,82	59,61	60,40	61,69	61,98	61,98
	Sasaran 3.2	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat		Indeks Kesehatan	Indeks	72,12	72,41	72,78	73,14	73,51	73,51
	Sasaran 3.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	93,25	93,33	93,48	93,51	93,64	93,64
4	Misi 4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan									
	Tujuan 4	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun		Indeks	0,6297	0,6423	0,6519	0,6617	0,6716	0,6716
	Sasaran 4.1	Membaiknya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman		Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri	Persen	95	98	100	100	100	100
5	Misi 5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public									
	Tujuan 5	Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan public	Persentase penanaman modal terhadap PDRB		Persen	32,94	32,61	32,82	33,03	33,24	33,24
	Sasaran 5.1	Meningkatnya daya tarik investasi		Nilai PMDN/PMA	Rp Miliar	125	150	175	200	225	225
	Sasaran 5.2	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Tidak ada	955	1.050	1.155	1.270	1.270
6	Misi 6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat									
	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Angka Kriminalitas		Kasus	925	799	783	704	634	634

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi 2020	Target Kinerja			Kondisi Akhir 2023
								2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran 6.1	Membaiknya penegakan hukum		Persentase penurunan angka kriminalitas	Persen	85,06	86,38	97,99	89,91	90,06	90,06
	Tujuan 7	Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD		Persen	2,67	2,67	2,70	2,80	2,90	2,90
	Sasaran 7.1	Meningkatnya daya tarik pariwisata		Jumlah Wisatawan	Orang	496.045	10.300	516.000	523.000	534.000	534.000

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Sub-bab ini akan menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99]^[100]

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka selanjutnya dirumuskan berbagai strategi yang disajikan dalam sebuah matriks keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi sebagai berikut:

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).		
1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Berkurangnya kasus KKN	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		Menyediakan akses bagi pelaporan pengaduan masyarakat dengan pemanfaatan IT
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan Publik berbasis IT
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Misi 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat		
2. Meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar
		Mengupayakan peningkatan sentra industri pengolahan
		Meningkatkan sumber permodalan bagi IKM
	Menurunnya angka kemiskinan	Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.
		Peningkatan keterampilan masyarakat usia produktif
		Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi
	Tersedianya lapangan pekerjaan	Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan
		Peningkatan keterampilan tenaga kerja
		Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja
	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Meningkatkan taraf hidup kelompok penduduk 40% terbawah

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya		
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas
	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas
	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Menyebarkanluaskan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup
Misi 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan		
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Membaiknya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Menyediakan sarana prasarana pemukiman dan perumahan, terutama sanitasi yang layak
		Meningkatkan Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lingkungan Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Misi 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik		
5. Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan
	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital
Misi 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat		
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Membaiknya penegakan hukum masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
7. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat sejumlah strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6.2. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

		2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas pengawasan	Peningkatan efektifitas pengawasan	Peningkatan efektifitas pengawasan
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota	Pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota
3	Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin	Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan TKPKD	Peningkatan akses ekonomi, kesehatan dan sosial dasar	Peningkatan akses ekonomi, kesehatan dan sosial dasar
4	Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan	Pengembangan industri kecil dan menengah	Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah
5	Meningkatkan taraf hidup kelompok penduduk 40% terbawah	Penyediaan bantuan sosial dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil	Penyediaan bantuan sosial dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil	Penyediaan bantuan sosial dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil
6	Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas	Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktik baik untuk menjangkau yang belum terjangkau.	Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktik baik untuk menjangkau yang belum terjangkau.	Pemantapan dan reviu kapasitas kelembagaan dalam perencanaan Pendidikan di semua jenjang
		Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, di seluruh kecamatan
7	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkualitas	Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan
		Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil
8	Menyebarkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup	Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
9	Menyediakan sarana prasarana pemukiman dan perumahan.	Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih	Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih	Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih
11	Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital
11	Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital	Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital
12	Meningkatkan kesadaran	Pemantapan pembinaan	Akselerasi pembinaan	Pembinaan masyarakat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		2021	2022	2023
	masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
13	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah	Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal	Akselerasi pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal	Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023, maka pada RPJMD (pokok) telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Ketujuh prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone tersebut jika disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Nasional tampak gambaran yang menarik. Secara umum, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone bersesuaian dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Nasional. Namun isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, justru tidak menjadi prioritas Kabupaten Bone. Sebaliknya, penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha yang menjadi prioritas Kabupaten Bone justru tidak disebutkan di dalam prioritas Nasional dan prioritas Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, maka pada Perubahan RPJMD telah dilakukan penyesuaian dengan menambahkan isu lingkungan ke dalam prioritas pembangunan daerah. Penambahan isu lingkungan dilakukan pada prioritas keempat, sehingga prioritas keempat menjadi “percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana”. Dengan demikian, maka Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 6.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone

NO	PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS SULSEL (RPJMD SULSEL)	PRIORITAS KAB. BONE
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Penguatan infrastruktur wilayah.	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Pengembangan kawasan pertumbuhan.	Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi.	Percepatan pembangunan daerah dengan bertumpu pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pembangunan manusia.	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Pelestarian lingkungan hidup.	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program Pembangunan Daerah juga dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Kepala Daerah Terpilih pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 6.4. Penyesuaian Nomenklatur Program KDH Terpilih ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 86/2016 Beserta Perubahannya

No.	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri 90/2019
1	Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program informasi dan komunikasi publik Program aplikasi informatika
2	Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran badan usaha milik desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program peningkatan kerjasama desa
3	Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
4	Peningkatan bantuan usaha bagi industri dan UMKM dan menciptakan jenjang pemasaran hasil UMKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
5	Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program perencanaan lingkungan hidup Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
6	Program pengentasan kemiskinan by name by address	Program pemberdayaan sosial Program perlindungan dan jaminan sosial
7	Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Program penyelenggaraan jalan Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
8	Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
9	Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
10	Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan	Program pengelolaan pendidikan Program pengembangan kurikulum
11	Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Program pendidik dan tenaga kependidikan
12	Program pemberian insentif imam masjid dan guru mengaji	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
13	Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas	Program pemberdayaan sosial
14	Pembangunan dan pemanfaatan pusat layanan keselamatan terpadu (tenaga medis dan paramedik-pemadam kebakaran-penanganan bencana)	Program penanggulangan bencana Program penanggulangan kebakaran
15	Program perwilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
16	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
17	Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan peluang investasi (<i>potential region dashboard</i>)	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
18	Program menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia	Program pengembangan kebudayaan Program pembinaan sejarah

Tabel 6.5. Pemetaan Program Pembangunan Daerah Menurut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN	Berkurangnya kasus KKN	Program penyelenggaraan pengawasan
				Program Penunjang Pemerintahan Umum
	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program pelayanan penanaman Modal
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
				Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
				Program perencanaan dan pembangunan industri
				Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
				Program pengembangan UMKM
				Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
				Program pengelolaan perikanan tangkap
				Program pengelolaan perikanan budidaya
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				Program perekonomian dan pembangunan
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
				Program pengembangan ekspor
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Meningkatnya Kinerja Perekonomian	Program pemberdayaan sosial
				Program perlindungan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
			Daerah Secara Berkelanjutan	dan jaminan sosial
			Tersedianya lapangan pekerjaan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Program penempatan tenaga kerja
			Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program pengelolaan pendidikan
				Program pendidik dan tenaga kependidikan
			Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
				Program pemenuhan hak anak (pha)
	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan	Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Program pengembangan Perumahan
				Program penyelenggaraan jalan
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Program Pengendalian Pencemaran
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program penataan desa
				Program administrasi pemerintahan desa
				Program peningkatan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
				kerjasama desa
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Program pelayanan penanaman
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Program penelitian dan pengembangan daerah
	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum	Membaiknya penegakan hukum	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
				Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
		Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Program pemasaran pariwisata

Tabel 6.6. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bone

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)											
		Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN											
		Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan											
		Program informasi dan komunikasi publik	Persentase media saluran informasi dan aspirasi publik yang efektif (%)		100	1,123,069,700	100	1,235,374,470	100	1,277,374,470			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-government (%)		30	1,555,449,650	40	1,710,994,615	50	1,882,094,076			
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase ketersediaan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)		100	14,925,000,000	100	16,417,500,000	100	16,910,025,000			Sekretariat Daerah
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelayanan penunjang pemerintahan daerah (%)			286,484,124,717		307,643,951,539		334,571,363,509			
		Berkurangnya kasus KKN											
		Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP (%)	42	75	2.807.500.000	85	3.275.000.000	95	3.500.000.000	95	3.500.000.000	Inspektorat Daerah
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (%)	79	85		90		95		95		
			Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP (%)	5	25		50		75		75		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP (%)	90	97		98		99		99		
			Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat											
			Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan											
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi											
			Program pengembangan iklim penanaman modal	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (%)	158,26 0,000,0 00	15	137,39 0,000	18	265,19 2,000	21	158,38 9,000	21	158, 389, 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program promosi penanaman	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal	-	10	311,27 8,748	15	326,84 2,685	20	343,18 4,819	20	343, 184, 819	
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)		100	8,250,0 00	100	8,662,5 00	100	9,095,6 25			Dinas Pertanian
				Jumlah Ketersediaan Pengembangan Sarana Pertanian (liter N2)		2000	329,50 4,600	2000	345,97 9,830	2000	363,27 8,741			Dinas Peternakan
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)		100	25,504, 750	100	26,779, 988	100	28,118, 987			Dinas Pertanian
				Jumlah Ketersediaan Pengembangan Prasarana Pertanian		90	375,00 0,000	95	375,00 0,000	100	375,00 0,000			Dinas Peternakan
			Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai produksi perikanan tangkap										
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya										
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		20,00 0	252,00 0,000	25,000	264,00 0,000	30,000	276,00 0,000			Dinas Peternakan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri (%)		95	2,019,196,000	98	2,500,000,000	100	2,600,000,000			Dinas Perindustrian	
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%)		95	120,000,000	98	130,000,000	100	140,000,000			Dinas Perindustrian	
		Program pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, dan Menengah (%)		80	75,000,000	80	85,000,000	80	90,000,000			Dinas Koperasi dan UKM	
		Membaiknya daya beli masyarakat												
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)		85	62,470,000	90	113,000,000	95	119,900,000			Dinas Perdagangan	
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)		70	882,524,000	72	1,200,000,000	73	950,000,000				
		Tersedianya lapangan pekerjaan												
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan											
		Program penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan											
		Menurunnya angka kemiskinan												
		Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)		100	71,935,500	100	431,613,000	100	431,613,000			Dinas Sosial	
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial (%)		100	842,762,387	100	2,181,961,561	100	3,181,961,561				
		Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan												
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro,kecil menengah (%)		80	413,000,000	80	420,000,000	80	427,000,000			Dinas Koperasi dan UMKM	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase peningkatan harga barang kebutuhan pokok (%)									Dinas Perdagangan	
		Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya											
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif											
		Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat											
		Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud		76,07	15,500,000,00	79,97	16,275,000,00	83,86	17,577,000,00			Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		106,00	85,000,000,00	106,30	91,800,000,00	106,50	96,390,000,00			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		98,50	45,000,000,00	98,75	48,600,000,00	99,00	51,030,000,00			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		65,00	8,800,000,000	65,68	9,504,000,000	70,12	9,979,200,000			
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan Pendidik Bersertifikat (%)		95,93	1,200,000,000	97,96	3,000,000,000	100	4,750,000,000			
		Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat											
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	61,05									
			Angka Kematian Bayi	5,26									
			Angka balita gizi buruk	8,0									

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase perawat/bidan yang bersertifikasi											
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi											
			Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan											
			Persentase pemenuhan sediaan makanan dan minuman											
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)											
		Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak												
		Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat OPD (%)		75	140,000	80	145,000	85	150,000				
		Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak (%)		75	154,000	80	156,000	85	157,000				
		Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan												
		Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan												
		Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar												
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) (%)		100	2,681,569,200	100	4,547,326,120	100	4,103,558,732	100	14,327,875,052	Dinas Perhubungan	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum												
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.												

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik											
		Meningkatnya realisasi investasi											
		Program pelayanan penanaman modal	Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur (%)		80	700,08 7,500	85	770,09 6,250	90	847,10 5,875			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (%)		80	16,537, 500	85	18,191, 250	90	20,010, 375			
		Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik											
		Program penelitian dan pengembangan daerah	Presentase Implementasi Rencana kelitbangan (%)		30	1,950,0 00,000	40	2,300,0 00,000	50	2,470,0 00,000			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan (%)		30		40		50				
			Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah (%)		51.28	824,20 0,000	64.10	893,62 0,000	76.92	969,78 2,000			
			Persentase kebijakan inovasi dan pemanfaatan lptek yang diterapkan (%)		20		20		20				
		Meningkatkan budaya politik,penegakanhukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.											
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan hukum											
		Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat											
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)		100	1,448,0 66,755	100	1,520,4 70,093	100	1,596,4 93,597			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budava (%)		100	193,44 7,250	100	203,11 9,613	100	213,27 5,593			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Berkurangnya kasus kriminalitas											
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan		100	2,351,20,000	100	2,468,781,000	100	2,592,20,050		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat											
			Meningkatnya daya tarik pariwisata											
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (%)		100	13,681,571,100	100	14,130,000,000	100	15,543,000,000		Dinas Pariwisata	
			Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pelaksanaan pemasaran pariwisata (%)		100	1,111,377,400	100	1,200,000,000	100	1,320,000,000			

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Bab ini menguraikan gambaran kerangka pendanaan untuk mendanai program-program pembangunan daerah yang tertera dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bone periode 2021-2023. Kerangka Pendanaan untuk program-program dimaksud bersumber dari hasil perhitungan kapasitas riil fiskal Kabupaten Bone selama 2021-2023. Melalui kerangka pendanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber dana dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Beberapa sumber pendanaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk mendanai program-program penyelenggaraan pembangunan selain dari APBD Kabupaten antara lain: APBD Provinsi, APBN dan dana dari sektor swasta seperti CSR.

Gambaran kemampuan kapasitas fiskal riil pemerintah daerah Kabupaten Bone pada periode 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1. Hasil perhitungan Kapasitas fiskal tersebut diperoleh dari selisih antara proyeksi penerimaan daerah dan proyeksi belanja pegawai, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dengan demikian, kapasitas fiskal riil yang tertuang ke dalam Tabel 7.1. akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendanai seluruh program-program pembangunan daerah atau membiayai belanja langsung yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan.

Sebelum Pandemi Covid-19, kapasitas riil keuangan daerah Rp 1,146,08 milyar pada tahun 2019. Dampak covid-19 cukup signifikan mempengaruhi kapasitas riil keuangan daerah yang tercermin pada tahun 2020 sebagai tahun berjalan ditargetkan berkisar Rp 1035,19 milyar selanjutnya menurun hingga akhir periode RPJMD sebesar Rp 992,61 milyar pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023, kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan meningkat tajam atau bertumbuh pada 7,4 persen dari tahun 2022, namun secara rata-rata selama periode 2021-2023, target kemampuan keuangan daerah diperkirakan bertumbuh -1,14 persen. Meskipun target pertumbuhan kemampuan keuangan daerah melambat namun tetap diharapkan dapat mencapai target-target program-program pembangunan daerah.

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2021-2023 (Rp milyar)

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
	Kapasitas Riil Keuangan	932,66	925,60	992,61
1	BELANJA	2.387,64	2.541,53	2.705,43

1.1	Belanja Operasi	1.515,44	1.613,95	1.718,85
1.2	Belanja Modal	398,28	424,17	451,74
1.3	Belanja Tidak Terduga	20,00	20,00	20,00
1.4	Belanja Transfer	453,91	483,42	514,84

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD-P 2021-2023

Berdasarkan besaran dari kapasitas keuangan daerah pada periode 2021-2023, selanjutnya dialokasikan pada program-program perangkat daerah sebagaimana tercantum ke dalam Tabel 7.2. Besaran alokasi anggaran untuk masing-masing program per urusan tergantung pada target kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah per setiap urusan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Sub-bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang menjadi rujukan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Program perangkat daerah merupakan rangkaian tindakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, baik permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maupun yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, program perangkat daerah mencakup program pembangunan daerah yang relevan dengan urusan perangkat daerah bersangkutan dan program perangkat daerah itu sendiri.

Hasil pemetaan program Permendagri No.90 Tahun 2019, tercatat 123 program yang terdistribusi pada urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Masing-masing pengklasifikasian organisasi tersebut memiliki satu program penunjang urusan pemerintahan. Adapun nomenklatur program untuk masing-masing urusan pemerintahan beserta indikator kinerja dan target, serta besaran anggaran per tahun selama periode 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7. 2. Program Perangkat Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif Kabupaten Bone

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			GRAND TOTAL				2.387.637.961.953,00		2.541.534.429.479,94		2.705.434.167.396,14			
X	X		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	949.793.545.871	100	1.435.491.390.179	100	1.346.012.285.014	100	3.732.169.825.260	Semua Perangkat Daerah
01			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar											
01	01		Urusan pemerintahan bidang pendidikan											
		1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	100	100	84.184.105	100	138.689.602	100	169.810.677	100	392.684.384	Dinas Pendidikan
					100	100	42.031.131.000	100	172.710.000.000	100	172.225.000.000	100	386.966.410.000	
				Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100	100	8.133.131.000	100	16.275.000.000	100	17.577.000.000	100	41.985.131.000	
				Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi	100	100	58.531.300.000	100	65.984.430.000	100	73.842.873.000	100	198.358.603	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dalam Pendidikan PAUD (SPM)										
01	01	2	Program pengembangan kurikulum	Persentase Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	-	-	-	100	51,180,000.000	100	52,288,000.000	100	103.468.000.000	
01	01	3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi D-IV-S1 dan Bersertifikasi (%)	76	76,50	1.170.917.000	79,00	1.288.009.000	85,00	1.416.810.000	85,00	3.875.735.000	
01	01	4	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Dokumen Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	-	-	100	40,000,000	100	40,000,000	100	80,000,000	
01	02		Urusan pemerintahan bidang kesehatan											
01	02	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.00	4.50	179.080.000	4.25	196.988.000	4.00	216.687.000	40.00	592.755.000	Dinas Kesehatan
				Angka kematian ibu per 100000 kelahiran ibu	60.00	55.00	5.110.556.000	52.50	5.621.611	50.00	6.183.773.000	50.00	16.915.940.000	
				Angka balita gizi buruk	0.80	0.75	1.174.184.000	0.70	1.291.602	0.65	1.420.763.000	0.65	3.886.549.000	
				Cakupan Pemenuhan	84	85	67.000.000.000	86	70.748.780	87	73.000.000.000	87	210.747.780.000	RSUD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Layanan Kesehatan										
01	02	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi	100	100	44.049.000	100	227.600.000	100	242.600.000	100	514.249.000	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pemenuhan Kualifikasi SDM sesuai Standar RS Type B	75	84	9.300.000.000	85	9.740.000.000	90	10.180.000.000	90	29.220.000.000	RSUD
01	02	4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pemenuhan sdiaan farmasi	100	100	44.049.000	100	227.600.000	100	242.600.000	100	514.249.000	Dinas kesehatan
				Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan	100	100		100		100		100		
01	02	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS)	0.54	0.54	-	0.55	1.311.714.000	0.56	1.389.600.000	0.56	2.701.314	Dinas kesehatan
01	03		Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang											
01	03	1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	40	45	23.000.000.000	50	25.300.000.000	55	27.830.000.000	55	50,000,000,000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				banjir di WS kewenangan Kab/Kota (%)										Bina Marga cipta Karya dan Tata Ruang	
				Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota (%)	30	35		40		45		45	Bina Marga cipta Karya dan Tata Ruang		
				Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	30	35		40		45		45			
01	03.03	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	79.25	-	-	100	17.145.657.765	100	18.860.223.542	100	36.005.881.307	Bina Marga cipta Karya dan Tata Ruang	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Jumlah Sampah Kabupaten yang tertangani	65.00	-	-	70.00	901.524.900	75.25	991.677.390	75.25	1.893.202.290		Bina Marga cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	79.00	-	-	100	12.385.931.270	100	13.624.524.397	100	26.010.455.667		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				pengolahan air limbah domestik (SPM)										
01	03	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase yang ditangani	65.00	-	-	75.00	1.492.356.749	80.00	1.641.592.424	80.00	3.133.949.173	
01	03	1	Program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan permukiman dengan pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan	100	-	-	100	6.003.846.497	100	6.604.213.147	100	12.608.059.644	
01	03	2	Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang ditangani	100	-	-	100	20.274.375.989	100	22.301.813.588	100	42.576.189.577	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan pengendalian bangunan gedung dan lingkungannya	100	-	-	100	21.924.418.900	100	24.116.860.790	100	46.041.279.690	
01	03	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	71.29	71.79	544.478.200.410	72.29	88.657.067.344	72.79	95.322.774.078	72.79	726.458.041.832	
			Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100	-	-	20	500.000.000	50	500.000.000	50	1.000.000.000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	03	4	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan RTRW	100	100	802.547.400	100	1.116.199.778	100	1.227.819.956	100	3.146.567.134	Bina Marga cipta Karya dan Tata Ruang
01	04		Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman											
01	04	1	Program pengembangan perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	8.508.500.000	100	8.543.150.000	100	8.479.882.000	100	25.531.532.000	Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan
01	04	2	Program kawasan permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni	100	100	495.000.000	100	923.550.000	100	11.535.000.000	100	3.503.000.000	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah tidak layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan Tumbuh kembangnya Permukiman Kumuh	100	100	410.000.000	100	693.000.000	100	240.000.000	100	3.503.000.000	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Perumahan yang menunjang Fungsi Hunian (Jalan, Masjid, Sekolah, Lapangan Dll	0	100	845.000.000	100	945.500.000	100	1.300.000.000	100	3.090.500.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	05		Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat											
01	05	1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (spm)	100	100	1.016.770.000	100	6.548.530.960	100	8.548.530.960	100	16.270.300.960	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100	70	2.091.777.496	85	1.315.691.400	100	2.000.000.000	100	5.407.468.896	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
01	05	1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Korban Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	5,708,752,500	100	6.742.973.125	100	7.346.721.600	100	19.798.447.225	Dinas Pemadam Kebakaran
01	06		Urusan pemerintahan bidang sosial											
01	06.02	1	Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan		100	71,935,500	100	431,613,000	100	431,613,000	100	935.161.501	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)										Dinas Sosial
01	06.03	2	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)		100	-	100	246,922,700	100	246,922,700	100	493.845.400	
01	06.04	3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (spm)	100	100	640,365,142	100	1,686,655,642	100	1,730,027,000	100	4.057.047.784	
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (spm)	100	100		100		100				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (spm)	100	100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (spm)	100	100		100		100		100		
01	06.05		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social (SPM)	100	100	842,762,387	100	2,181,961,561	100	3,181,961,561	100	6.205.685.509	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	100	100		100		100				
01	06	5	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial	-	100	690,917,500	100	1,202,192,674	100	1,202,192,674	100	3.095.302.848	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)										
01	06	6	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	100	100	74,239,971	100	163,326,200	100	179,659,000	100	417.225.171	
02			Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar											
02	07		Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja											
02	07.02	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	-	-	76	79.582.990	78	157.300.000	78	236.882.990	Dinas Tenaga Kerja
	07.03		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	33	35	443.027.450	40	801.290.430	50	2.847.057.500	50	4.091.375.380	
02	07.05	3	Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola yang layak (PP/PKB, LKS, Bripartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	50	60	85.312.600	70	615.538.600	80	774.400.000	80	1.475.251.200	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Ketenagakerjaan)										
02	08		Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak											
02	08	1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Indikator (PUG) Peningkatan Strategi Pembangunan Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%)	85	90.50	568.100.000	91.50	624.910.000	92	687.401.000	92	1.880.411.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02	08	2	Program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	80	85.50	285.600.000	90.50	316.360.000	97.50	347.996.000	97.50	949.956.000	
02	08	3	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga yang mendapat pemberdayaan (%)	70.50	85.50	224.650.000	90.50	246.650.000	91.05	271.584.500	91.05	743.129.500	
02	08	4	Program pengelolaan sistem data gender dan	Persentase data indikator pengarusutamaan	85	90	38.640.000	95.50	40.524.000	98.00	44.576.000	98.00	123.740.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			anak	gender yang tersedia (%)										
02	08	5	Program pemenuhan hak anak (pha)	Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak (%)	90.00	90.02	295.220.000	90.50	324.742.000	91.05	357.216.200	91.05	977.178.200	
02	08	6	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	80	85.70	290.000.000	95.00	319.000.000	98.50	350.900.000	98.50	959.900.000	
02	09		Urusan pemerintahan bidang pangan											
02	09.02	1	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pengelolaan & keseimbangan cadangan pangan kabupaten	100	100	1.192.255.144	100	1,451,734,815	100	1,669,495,037	100	3.650.537.616	Dinas Ketahanan Pangan
02	09.03	2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat (%)	90	100	1.241.320.326	100	890.694.600	100	1.134.094.060	100	3.266.108.986	
02	09.04	3	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah rawan pangan yang di tangani	70	80	218.389.000	90	60.790.000	100	66.869.000	100	346.048.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02	09.05	4	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Jaminan Keamanan Pangan	90	100	1.642.994.239	100	107.915.000	100	134.132.900	100	1.885.042.139	
02	10		Urusan pemerintahan bidang pertanahan											
02	10.02		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	220.000.000	Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	10.04		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Mediasi SengketaTanah Garapan dalam Satu daerah Kabupaten/Kota	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	180.000.000	
	10.05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan Pemerintah	100	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	6.000.000.000	100	14.000.000.000	
02	10.06	2	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee*	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah yang diinventarisasi	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	500.000.000	
02	11		Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup											
02	11.02	1	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen	40	20	400,000,000	20	95.000.000	20	104.500.000	100	5.99.500.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				perencanaan lingkungan hidup (%)										Dinas Lingkungan Hidup
02	11.03	2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran (%)	40	20	994,000,000	20	1.935.000.000	20	212.850.000	100	3.141.850.000	
02	11.04	3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati (%)	-	5	50,000,000	5	428.000.000	10	450.000.000	20	900.000.000	
02	11.05	4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah B3 (%)	8	10	80,000,000	10	80.000.000	10	88.000.000	38	248.000.000	
02	11.06	5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan an pengelolaan ligkungan hidup (pplh)	Presentase Ketaatan Pelaku usaha terhadap hukum lingkungan (%)	70	70	160,000,000	75	170.000.000	80	187.000.000	80	517.000.000	
02	11	6	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Cakupan Peningkatan Kapasitas LH (%)	80	80	100,000,000	85	99.000.000	90	110.000.000	90	309.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			untuk masyarakat											
02	11	7	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Cakupan Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (%)	90	95	75,000,000	95	60.000.000	100	67.000.000	100	202.000.000	
02	11	8	Program pengelolaan persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani	25	30	5,460,000,000	35	5.345.000.000	35	5.900.000.000	35	6,600,000,000	
02	12		Urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil											
02	12	1	Program pendaftaran penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terhadap Kepemilikan KK, KTP dan KIA (%)	90	90	31.118.000	90	176.320.160	90	2.392.245.064	90	2.599.683.224	
02	12	2	Program pencatatan sipil	Cakupan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil terhadap Persentase Kepemilikan dokumen dan kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kematian dan Perkawinan (%)	90	90	42.805.000	90	136.551.320	90	687.328.980	90	886.685.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02	12	3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (%)	90	90	46.304.000	90	180.915.040	100	550.010.000	90	777.229.040	
02	12	4	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	90	90	16.182.000	90	30.415.000	100	102.900.000	90	149.497.000	
02	13		Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa											
02	13	1	Program penataan desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa (%)	0	0	-	0	-	100	55,000,000	100	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02	13	2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa (%)	100	100	-	100	187.729.900	100	300.000.000	100	487.729.900	
02	13	3	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase ketepatan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa (%)	75	77	12,702,077,726	79	10.061.731.230	80	3,260,000,000	80	26.023.808.956	
02	13	4	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat	100	100	399,999,340	100	550.537.810	100	1.200.000.000	100	2.150.537.410	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			adat	Hukum Adat yang aktif (%)										
02	14		Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana											
02	14	1	Program pengendalian penduduk	Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	100	100	1.207.920.000	100	1.499.310.000	100	1.676.565.000	100	4.383795.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02	14	2	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	100	100	6.118.016.000	100	6.909.448.676	100	7.820.885.166	100	20.848.349.842	
02	14	3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 -19 Tahun	100	100	1.404.096.500	55	1.913.385.000	55.01	2.173.567.500	100	5.491.049.000	
02	15		Urusan pemerintahan bidang perhubungan											
02	15	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) (%)	100	100	2.761.569.200	100	7.175.412.120	100	6.792.953.332	100	16.729.934.652	Dinas Perhubungan
02	16		Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika											
02	16	1	Program informasi	Persentase media	100	100	1,123,069,700	100	593.000.000	100	1.277.374.470	100	2.993.444.170	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan komunikasi publik	saluran informasi dan aspirasi publik yang efektif (%)										Komunikasi Informatika dan Persandian
02	16	2	Program aplikasi informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi (%)	30	30	1,555,449,650	40	1.693.000.000	50	1.795.994.615	50	5.044.444.265	
02	17		Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah											
02	17	1	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase capaian penilaian koperasi berprestasi (%)	80	80	230,500,000	80	236,500,000	80	242,500,000	80	709.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
02	17	2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase capaian kualitas kelembagaan koperasi (%)	80	80	197,000,000	80	204,000,000	80	209,000,000	80	610.000.000	
02	17	3	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase capaian penilaian dan penghargaan koperasi sehat (%)	80	80	195,000,000	80	201,000,000	80	210,000,000	80	606.000.000	
02	17	4	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase capaian kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (%)	80	80	136,000,000	80	140,000,000	80	144,000,000	80	420.000.000	
02	17	5	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase capaian produktifitas usaha koperasi (%)	80	80	40,000,000	80	45,000,000	80	50,000,000	80	135.000.000	
02	17	6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase Peningkatan Kualitas Usaha mikro,Kecil menengah (%)	80	80	413,000,000	80	420,000,000	80	427,000,000	80	1.260.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02	17	7	Program pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, dan Menengah (%)	80	80	75,000,000	80	85,000,000	80	90,000,000	80	250.000.000	
02	18		Urusan pemerintahan bidang penanaman modal											
02	18	1	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (%)	12	15	137,390,000	18	265,192,000	21	158,389,000	21	560.971.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02	18	2	Program promosi penanaman modal	resentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (%)	8	10	32.000.000	15	150.000.000	20	35.937.000	20	218.607.000	
02	18	3	Program pelayanan penanaman modal	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (%)	80	80	700,087,500	85	735,091,875	90	771,846,469	90	2.207.025.844	
02	18	4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (%)	5	35	38.500.000	50	42.350.000	65	46.585.000	65	127.435.000	
02	18	5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (%)	50	80	219.000.000	85	240.900.000	90	264.990.000	90	724.890.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02	19		Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga											
02	19	1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Cakupan pembinaan kepemudaan (%)	70	80	575.000.000	90	445.000.000	100	2.365.000.000	100	6,535,097,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
02	19	2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)	11	36	2.300.000.000	37	2.789.919.910	40	7,610,000,000	40	12.699.919.910	
02	19	3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase peningkatan SDM Kepramukaan (%)	-	22	465.000.000	-	-	25	1.310.000.000	25	1.775.000.000	
02	20		Urusan pemerintahan bidang statistik											
02	20	1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data statistic daerah yang dirilis tepat waktu (%)	95	95	108,530,300	100	47.000.000	100	120.000.000	100	275.526.100	Dinas Komunikasi dan Informatika
02	21		Urusan pemerintahan bidang persandian											
02	21	84	Program penyelenggaraan persandian untuk untuk pengamanan informasi	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita /Informasi Layanan Persandian (%)	100	100	108,526,100	100	111,383,330	100	120,000,000	100	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
02	22		Urusan pemerintahan bidang kebudayaan											
02	22	1	Program pengembangan	Persentase pengembangan	90	100	148.240.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	623.240.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			kebudayaan	kebudayaan (%)										Dinas Kebudayaan
02	22	2	Program pengembangan kesenian tradisional	Persestase pengembangan kesenian tradisional (%)	90	-	-	100	100.000.000	100	165.000.000	100	265.000.000	
02	22	3	Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah (%)	90	100	259.160.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	889.160.000	
02	22	4	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase peletarian pengelolaan cagar budaya (%)	90	100	618.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	1.143.000.000	
02	22	5	Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaaan permesiuman (%)	90	100	656.000.000	100	668.000.000	100	756.800.000	100	2.080.800.000	
02	23		Urusan pemerintahan bidang perpustakaan											
02	23	1	Program pembinaan perpustakaan	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan (%)	100	100	10.735.969.050	100	4.163.874.700	100	4.997.000.000	100	19.896.843.750	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
02	24		Urusan pemerintahan bidang kearsipan											
02	24	1	Program pengelolaan arsip	Persentase kualitas pelayanan dan Pengelolaan kearsipan (%)	100	100	143.287.850	100	37.749.450	100	745.250.000	100	926.287.300	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
02	24	2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	37.477.000	100	28.360.700	100	553.370.000	100	610.207.700	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03			Urusan pemerintahan pilihan											
03	25		Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan											
03	25	1	Program pengelolaan perikanan tangkap	produksi perikanan tangkap (Ton)	49,604.459	5,2580.73	1,168,250,000	55,735.57	1.185.173.470	59,079.7	1.303.690.817	59079,7	6.657.114.287	Dinas Perikanan
03	25	2	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	393,668.61	421,225.41	1,948,581,881	450,711.19	1.592.302.977	482,260.98	1.751.533.275	482,260.98	5.292.418.133	
03	25	3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan (Ton)	-	-	-	10,577.02	182.131.000	10,788.56	200.344.100	10,788.56	382.475.100	
03	26		Urusan pemerintahan bidang pariwisata											
03	26	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (%)	40	42	13,681,571,100	44	14,130,000,000	46	15,543,000,000	46	5.237.552.200	Dinas Pariwisata
03	26	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pelaksanaan pemasaran pariwisata (%)	48.69	48.80	1,111,377,400	48.95	1,200,000,000	49.06	1,320,000,000	49.06	838.325.091	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	0.0029	0.0050	250.000.000	-	-	0.0085	525.000.000	0.0085		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03	26	3	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	12.47	12.65	56.788.100	13.00	59.999.850	13.00	125.999.685	13.00	242.787.635	
03	27		Urusan pemerintahan bidang pertanian											
03	27	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	100	100	7.946.244.575	100	400.000.000	100	440.000.000	100	8.786.244.575	Dinas Pertanian
				Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	90	90	6.517.462.473	90	798.689.650	90	8.500.000.000	90	15.816.152.123	Dinas Peternakan
03	27	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	100	100	19.701.146.100	100	6.026.624.924	100	6.629.287.416	100	32.357.058.440	Dinas Pertanian
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	95	95	110.660.200	95	140.941.890	95	250.000.000	95	501.602.090	Dinas Peternakan
03	27	1 3 0 1	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masy. Veteriner	95	95	536.408.750	95	588.163.045	95	882.128.984	95	2.006.700.779	Dinas Peternakan
03	27	0 4 5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase realisasi pengendalian dan penanggulangan	100	100	180.000.250	100	416.778.500	100	458.456.350	100	1.055.235.100	Dinas Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				bencana pertanian (%)										
03	27	5	Program penyuluhan pertanian	Persentase realisasi kegiatan penyuluhan pertanian (%)	100	100	1.541.001.450	100	1.041.132.150	100	1.145.245.365	100	3.727.378.965	Dinas Pertanian
				Cakupan Program Penyuluhan Pertanian	95	95	375.000.000	95	269.090.150	95	550.000.000	95	1.194.090.150	Dinas Peternakan
03	29		Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral											
03	29	1	Program pengelolaan energi baru terbarukan	Cakupan peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan (%)	100	95	39.410.000	98	141.610.000	100	285.000.000	100	466.020.000	Dinas Perindustria n
03	30		Urusan pemerintahan bidang perdagangan											
03	30	1	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)		86	18,182,000.00	87	19,091,100	88	20,045,655		57.318.755	Dinas Perdaganga n
03	30	2	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)		70	882,524,000	72	1,200,000,000	73	950,000,000		3.032.524.000	
03	30	3	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	84	85	62,470,000	90	113,000,000	95	119,900,000	95	295.370.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
03	30	4	Program pengembangan ekspor	Cakupan Peningkatan Promosi Produk Unggulan (%)	80	85	141,407,000	90	164,163,750	95	172,371,938	95	477.942.687	
03	30	5	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat-alat Ukur ,Takar,timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku (%)	82	83	29,194,000	84	40,000,000	85	46,500,000	85	115.694.000	
03	30	6	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan Penggunaan dan Pasaran Produk Dalam Negeri (%)	75	80	22,484,000	85	56,000,000	90	58,800,000	90	137.284.000	
03	31		Urusan pemerintahan bidang perindustrian											
03	31	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	99.98	80	751.202.000	98	2.429.097.088	100	2.679.168.100	100	5.877.467.188	
03	31	2	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri	100	100	15.300.000	100	25.929.320	100	249.700.000	100	5.877.467.188	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait										Dinas Perindustrian
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait										
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota										
03	31	3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	43	43	14.350.000	44	32.400.000	45	325.000.000	45	371.750.000	
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45	45		46		47		47		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04			Unsur pendukung urusan pemerintahan											
04	01		Sekretariat daerah											
04	01	1	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase ketersediaan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahtraan rakyat (%)	100	100	15.178.660.500	100	16.555.550.000	100	17.618.417.000	100	49.352.627.500	Sekretariat Daerah
04	01	2	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan bahan perumusan pengoordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluai pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	3.511.000.000	100	4.248.000.000	100	3,382,005,000	100	11.141.005.000	
04	02		Sekretariat DPRD											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04	02	1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan realisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100	100	12.396.544.800	100	12.943.853.850	100	26,805,000,000	100	39.578.637.885	Sekretariat DPRD
05			Unsur penunjang urusan pemerintahan											
05	01		Perencanaan											
05	01	1	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi (%)	100	100	769.084.300	100	1.088.953.130	100	1.210.578.055	100	3.068.579.485	Badan Perencanaa n dan Pembangun an Daerah
05	01	2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi, PPM dan Infrastruktur kewilayahan (%)	100	100	1.586.814.850	100	2.050.000.000	100	2.265.906.742	100	5.902.721.592	
05	02		Keuangan											
05	02	1	Program pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	482.204.759.690	Tepat Waktu	553.425.235.659	Tepat Waktu	608.767.759.225	Tepat Waktu	1.644.397.754.574	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Penyaluran Belanja Daerah terhadap total	50.00	50.00		50.00		50.00				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				APBD										
				Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan terhadap total APBD	21.85	21.96		22		22		22		
				Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua (%)	93.74	97.49		100		100		100		
				Persentase SILPA terhadap total APBD (%)	2.76	2.41		2		2		2		
05	02	2	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah (%)	81.82	86.36	1.316.494.630	29.94	1.448.144.093	100	1.592.958.502	100	4.357.597.225	BKAD
05	02	3	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pencapaian Target (%)	108.34	-	2.773.857.735	-	3.593.047.237	-	6.131.512.869	-	12.498.417.841	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target (persen)	-	100		100		100		100		
05	03		Kepegawaian											
05	03	1	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	80	85	1.664.494.235	90	1.684.053.800	95	1.732.365.000	95	5.080.913.035	
05	04		Pendidikan dan pelatihan											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05	04	1	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	75	80	3.034.742.800	85	3.190.104.550	95	3.224.150.950	95	9.448.998.300	Badan Keggawaian dan Sumber Daya Manusia
05	05		Penelitian dan pengembangan											
05	05	1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase capaian hasil penelitian, kajian dan pengembangan Inovasi Daerah (%)	33	100	2.774.200.000	100	3.193.620.000	100	3.439.782.000	100	9.407.602.000	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
06	01		Inspektorat daerah											
06	01		1 Program penyelenggara an pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (%)	81	85	2.475.000.000	90	2.600.000.000	95	2.750.000.000	95	7.725.000.000	Inspektorat Daerah
				Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti (%)	95	97	350.000.000	98	515.000.000	99	585.000.000	99	1.410.000.000	
06	01		2 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/	75	80	325.000.000	85	450.000.000	95	550.000.000	95	1.325.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (%)										
				Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (%)	67	83	95.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	215.000.000	
07			Unsur kewilayahan											
07	01		Kecamatan											
07	01		1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	335,221,166	100	493,408,098	100	630,003,188	100	1.275.418.571	Semua di 27 Kecamatan
07	01		2 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	9,309,560,460	100	10,742,106,487	100	12,911,343,902	100	32.717.692.061	
07	01		3 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100	907,940,001	100	1,173,514,003	100	1,513,601,505	100	2.474.960.001	
07	01		4 Program pembinaan dan pengawasan	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi	100	100	983,054,350	100	741,522,225	100	876,493,926	100	2.148.157.702	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pemerintahan desa	Pengelolaan Dana Desa (%)										
08			Unsur pemerintahan umum											
08	01		Kesatuan bangsa dan politik											
08	01		1 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan (%)	100	80	549.310.500	85	604.241.550	90	664.665.705	90	1.818.217.775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08	01		2 Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100	75	1,448,066,755	80	1.592.873.431	85	1.752.160.774	85	4.793.100.959	
08	01		3 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100	75	792,289,600	80	871.518.560	85	958.670.416	85	2.622.478.576	
08	01		4 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial	100	80	193,447,250	85	212.791.975	90	234.071.173	90	640.310.398	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal perubahan RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ekonomi, sosial, dan budaya	dan Budaya (%)										
08	01		5 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	100	80	2.601.220.000	85	2.831.342.000	90	3.147.476.200	90	8.610.038.200	

Tabel 7. 3. Capaian Program Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019-2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019				2020			
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
		Pendidikan									
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63,88	68,99	407.987	10	39.426	72,44	461.246	DINAS PENDIDIKAN
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,87	105,90	165.618.071	93	68.761.223	105.95	126.637.464	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	97,95	97,90		-	-	98,00		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
		SMP/MTs								
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	87,16	87,50		1	776.433	87,80		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	81.53	82,00		18	559.005	82,30		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,11	0,10		-	-	0,09		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,20	0,18		-	-	0,15		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	1017,0	1017,36	92.521	98	90.854.1 50	1068,23	122.773	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	1471,11	1544,66		-	-	1621,89		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100	100	1.050.000	92	962.700	100	6.980.000	
	Program Pendidikan Menengah	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	60,30	60,35	3.035.647	2	68.251	62,16	3.439.700	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki- laki	62,80	63,50	5.881.810	28	1.647.74 7	65,00	7.164.043	
	Kesehatan									
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan realisasi ketersediaan obat (%)	100	100	5.403.049	98	5.299.12 4	100	5.963.354	DINAS KESEHA TAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan penyehatan lingkungan (%)	100	100	14.731.20 0	85	12.569.9 83	100	16.204.320	
	Program Pengawasan	Cakupan Pengawasan obat dan	100	100	17.000	79	13.375	100	18.700	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Obat dan Makanan	makanan (%)								
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	31.803.000	100	31.666.722	100	35.038.000	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan perbaikan Gizi masyarakat (%)	100	100	802.815	-	-	100	1.033.097	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lingkungan sehat (%)	100	100	721.643	79	567.452	100	823.807	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin(%)	100	100	24.400	-	-	100	26.840	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS (%)	100	100	112.215.626	75	84.722.165	100	123.437.189	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di PKM dan jaringannya (%)	100	100	16.307.690	95	15,452,217	100	18.438.459	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	-	100	508.866	129	654,612	100	759.753	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (%)	-	-	-	-	-	90	110.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan PKM yang melaksanakan program kesehatan lansia (%)	100	100	5.000	88	4,400	100	30.500	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (%)	100	100	13.750	72	9,934	100	15.125	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan (%)	80	80	5.374.210	59	3,153,263	80	5.793.931	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	266.585	100	266,435	100	458.244	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan PKM yang telah terakreditasi (%)	80	90	2.676.730	78	2,087,295	100	24.723.561	HATA KESE RSUD
		StatusAkreditasi Rumah Sakit(%)	Paripurna	Paripurna	203.463	-	-	-	-	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Cakupan pemenuhan layanan kesehatan rujukan (%)	73	75	40.546.271	96	39,084,362	77	65.000.000	RSUD

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang RS (%)	100	100	6.948.999	-	-	100	8.143.899	DINAS KESEHATAN RSUD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS tipe B (%)	100	100	8.420.000	-	-	100	8.860.000	
	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan rujukan (%)	100	100	71.969.362	110	79,154,562	100	74.969.362	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan kabupaten(%)	25,21	26,17	32.500.000	136	44,248,799	28,09	52.500.000	
		Persentase pembangunan jembatan (%)	31,31	31,83	3.000.000	-	-	32,45	4.000.000	
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yangdipelihara (%)	62,84	62,95	13.881.820	307	42,638,026	71,16	41.900.000	
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi (%)	100	100	125.000	56	69,940	100	150.000	
	Progran Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan status kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat (%)	100	-	-	-	-	100	250.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase data base jalan dan jembatan yang berbasis SIG (%)	62,84	-	-	-	-	100	440.000	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur jalan desa (%)	48,79	49,87	6.538.000	685	44,783,7 76	50,95	4.000.000	
	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasaranakebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80	90	6.195.700	13	835,981	100	3.175.000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang 100 persen (%)	100	100	927.150	93	863,763	100	1.230.000	
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan ruang 100 persen (%)	100	100	260.000	15	39,800	100	260.000	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian dan pengawasan ruang 100 persen (%)	100	100	50.000	48	24,050	100	50.000	
	Program Pengendalian Banjir	Persentase sarana dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	80	90	60.200.00 0	-	-	100	85.200.000	DINAS PENGELOLAANSDA
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (%)	70	80	10.200.00 0	-	-	100	10.200.000	
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase bangunan bersuplai air baku yang termanfaatkan (%)	-	10	9.500.000	1,337	127,057	20	8.000.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019				2020		
					Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Daerah Irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik (%)	-	70	40.050.000	36	14,296,488	75	38.530.000	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
		Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah layanan air minum dan sanitasi yang layak(%)	77,26	78,19	8.717.600	109	9,522,219	79,78	9.253.862	DINAS PERUMAHAN
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Persentase pengembangan luas wilayah strategis kawasan permukiman (%)	100	100	297.000	101	299,466	100	297.000	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian pengembangan perumahan yang representatif (%)	100	100	575.000	95	545,430	100	7.734.500	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan	100	100	15.000	-	-	100	25.000	
		Program Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (%)	100	100	8.996.657	153	13,806,162	100	9.041.657	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Persentase peningkatan jumlah sarana infrastruktur perkotaan (%)	100	100	12.970.000	111	14,352,689	100	14.267.000	
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
				2019				2020			
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)	
		Masyarakat									
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	5.530.600	68	3,786,29 9	100	6.083.660	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	550.650	444	2,447,13 7	100	605.715	
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				124.000	-	-		136.400	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	2.563.400	-	-	100	2.819.740	
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan ketersediaan logistik penanggulangan bencana (%)	100	100	288.625	100	288,624	100	404.988	BPBD
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana (%)	100	100	192.000	102	195,366	100	211.200	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)	100	-	-	-	-	100	52.700	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data kejadian bencana penanggulangan bencana (%)	100	100	190.750	175	332,979	100	291.825	
	Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan diklat aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100	-	-	-	-	100	50.000	
	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Tahapan Paska Bencana	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan paska bencana (%)	100	100	210.000	147	308,165	100	6.094.200	
	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	100	8.655.758	46	3.963.424	100	9.088.546	DINAS DAMKAR
	Sosial									
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	95.35	96,15	510.000	83	425,000	96,55	932.000	DINAS SOSIAL

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya									
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	73,35	80,25	318.259	96	305,349	87,15	1.120.000	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	25	60.000	-	-	50	204.000	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase disabilitas fisik dan mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (%)	32,20	48,15	60.000	-	-	65,05	241.500	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (%)	17,53	18,21	75.000	100	75,000	19,50	166.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	4,03	5,05	80.000	47	37,520	6,06	690.000	
	Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Jumlah areal pemakaman yang ditangani (areal)	1	1	60.000	7	60,830	1	185.000	
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	Tenaga Kerja									
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	2,24	2,20	430.000	75	323,345	2,17	500.000	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100				100		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (%)	73,26	73,45				74,05		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	69,81	72,84	1.264.133	84	1,056,267	75,88	1.386.971	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	59,50	64,60		-	-	69,70		
	Program Peningkatan	Besaran Pencaker yang terdaftar	78,19	78,29	1.382.931	61	845,826	78,49	1.520.724	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Kesempatan Kerja	dan yang ditempatkan (%)								
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Program keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase ketersediaan kebijakan/regulasi daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (%)	2,98	2,98	126.000	-	-	14,95	145.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat kabupaten,kecamatan, desa dan kelurahan (%)	11,55	24,66	509.130	103	526,878	39,77	843.494	
		Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak (%)	38,46	51,28		-	-	58,97		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak (%)	100	100	234.750	241	565,165	100	794.390	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan (%)	44,88	44,88	465.130	70	327,882	53,33	847.160	
	Pangan									
	Program Peningkatan	Cakupan ketersediaan energi dan	1128,5	1130	1.027.068	91	19,500	1132	1.235.029	APA KETAS DIN

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	protein (perkapita/hari)								
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	14	18		94	84,700	20		
		Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90	91		459	1,271,95 0	92		
		Tingkat Konsumsi Energi dan protein (perkapita/hari)	1.026	1.028		86	549,543	1.030		
	Lingkungan Hidup									
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan (%)	-	80	240.000	100	239,620	80	240.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampahkabupaten (%)	20	20	6.380.378	96	6,118,57 9	25	6.550.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran lingkungan hidup (%)	60	60	1.320.000	91	309,915	65	955.000	
		Persentase pemenuhan kriteria penilaian adipura (%)	50	70		99	919,085	75		
		Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan (%)	80	80		100	49,820	85		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase ketersediaan data informasi kualitas udara wilayah perkotaan (%)	70	70	65.000	100	64,680	75	65.000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA (%)	60	60	195.000	97	144,803	65	200.000	
		Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap pengelolaan lingkungan (%)	80	80		100	44,833	85		
	Pertanahan									
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase peningkatan pemahaman tentang sistem pendaftaran tanah (%)	100	100	75.000	100	75,000	100	90.750	DINAS PERUMAHAN
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase peningkatan penataan dan penguasaan serta pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)	100	100	2.500.000	121	2,720,891	100	2.550.000	
	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus/konflik tanah (%)	100	100	50.000	70	34,910	100	55.000	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SOP (%)	85	85	2.907.562	88	2,547,939	85	3.039.081	DINAS DUK CAPIL
	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks keberdayaan masyarakat pedesaan (%)	70	73	1.053.000	36	377,330	73	1.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Indeks partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	75	75	794.840	97	768,869	75	900.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang bersertifikat (%)	60	60	800.000	15	123,320	70	2.800.000	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK aktif di desa (%)	100	100	1.947.000	28	547,000	100	2.000.000	
	Program Pembinaan Administrasi Pemerintah, Keuangan dan Aset Desa	Persentase ketepatan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa (%)	-	75	249.840	59	147,980	75	695.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Persentase KPMD aktif (%)	-	85	80.000	-	-	85	80.000	
	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan	Persentase peningkatan status desa (%)	-	85	319.710	29	93,355	85	400.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Kelurahan									
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (%)	90	90	1.475.000	31	459,642	90	5.025.000	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Program Penataan Pengendalian Penduduk	Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	100	100	322.545	60	194,327	100	314.662	DINAS PENG.PENDUDUK DAN KB
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	0,67	0,68	10.041.799	98	9,862,477	0,69	10.238.392	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan kontrasepsi (%)	28,93	30	89.750	33	29,650	32,5	150.643	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	0,49	0,50		-	-	0,51		
	Program Pengembangan Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%)	35,02	36	142.464	224	318,983	37	152.214	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%)	41	42		-	-	43		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	54,03	55		-	-	56		
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan siswa yang telah diadvokasi (%)	-	75	366.615	77	281,739	75	612.360	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /mahasiswa (%)	-	100	151.125	152	230,203	100	155.000	
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan PUS yang telah mengikuti penyuluhan KHIBA (%)	100	100	173.764	106	183,742	100	178.000	
	Perhubungan									
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	-	-	-	-	100	415.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan realisasi peningkatan pelayanan angkutan (%)	100	100	131.000	116	152,027	100	143.100	
	ProgramPembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	100	185.000	-	-	100	200.000	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan realisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)	100	100	299.000	26	77,000	150	1.114.900	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas LLAJ	Cakupan realisasi rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ (%)	100	100	59.920	175	104,919	100	405.912	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Cakupan realisasi peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (%)	100	100	133.600	98	130,814	100	146.960	
	Komunikasi dan									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
				2019				2020			
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)	
		Informatika									
		Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan pengolahan komunikasi dan informasi publik (%)	100	100	135.000	237	320,199	100	148.500	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	100	1.658.000	176	2,915,73 7	100	3.332.700	
		Program Kerjasama dengan Mass Media	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	100	121.000	234	283,709	100	133.100	
		Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi (%)	100	100	35.000	236	82,496	100	38.500	
		Program Pengembangan dan Implementasi E- Goverment	Persentase pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (%)	100	100	66.000	235	155,236	100	72.600	
		Program Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengelolaan dokumen berita/ informasi layanan persandian (%)	100	100	110.000	245	269,071	100	121.000	
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi (%)	80	80	720.138	100	721,541	80	786.000	DINAS KOPERASI & UKM
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro (%)	80	80	147.436	31	46,435	80	150.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah									
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil menengah (%)	99.91	80	318.250	94	300,580	80	405.000	
	Penanaman Modal									
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	136	150	31.764	99	31,354	175	34.941	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor penanamanmodal (investor)	43	50	336.204	148	496,094	60	369.825	
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase ketersediaan dokumendata base iklim investasi (%)	5	65	42.974	71	30,473	75	47.271	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur (%)	70	75	859.452	99	847,542	75	1.318.016	
	Kepemudaan dan Olahraga									
	Program Pengembangan dan Kesenjarian Kebijakan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	81	85	100.000	-	-	90	150.000	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Pemuda									BADAN KESBAN GPOL
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pembinaan kepemudaan (%)	45	60	1.193.300	70	839,357	70	1.400.000	
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda (%)	99	99	197.000	25	48,280	99	325.000	
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba (%)	45	20	300.000	-	-	40	325.000	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	58	60	300.000	-	-	65	310.000	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	45	50	2.401.000	29	697,000	50	2.500.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)	30	30	1.200.000	15	179,999	35	1.460.000	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (%)	90	92	3.220.832	64	2,071,077	94	3.681.874	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	100	100	123.600	45	55,600	100	429.780	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	73	74	851.748	65	550,035	75	894.335	
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	Presentase keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara (%)	4,7	5,6	564.587	39	221,592	6,8	592.816	
	Statistik									
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	Persentase dokumen statistik daerah dirilis tepat waktu (%)	80	90	230.000	187	431,024	90	253.000	DINAS KOMINFO
	Kebudayaan									
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)	100	100	212.000	274	580,272	100	612.020	DINAS KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase jumlah peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	813.069	94	765,543	100	1.709.976	
		Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi (%)	100	100				100		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat (%)	100	100	267.136	100	267,130	100	378.850	
	Perpustakaan									
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	100	100	906.350	74	670,259	100	1.095.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Kearsipan									
	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan ketersediaan kebijakan sistem pengelolaan kearsipan (%)	100	100	69.500	51	35,375	100	180.000	
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	100	100	387.000	73	283,972	100	435.500	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase kualitas pelayanan kearsipan (%)	100	100	50.000	-	-	100	75.000	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan (%)	100	100	59.000	94	55,475	100	74.000	
	LAYANAN URUSAN PILIHAN									
	Pariwisata									
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (orang)	153.493	153	981.800	96	944,646	169	1.000.000	DINAS PARIWIS ATA

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase peningkatan objek daya tarik wisata (ODTW) (%)	100	100	5.064.653	61	3,113,83 0	100	9.300.000	
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) (%)	100	100	651.736	98	639,936	100	350.000	
	Pertanian									
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani (%)	100	100	1.837.935	89	1,637,55 6	100	1.911.281	DINAS PERTANIAN TPHP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah Produksi : - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Bawang Merah - Cabe (ton) -Sukun (ton) - Kelapa (Ton) - Kopi (ton) - Kakao (ton) - Cengkeh (ton) - Tebu (ton)	1.428.8 83 402.486 13.047 26 22 40 14.282 319 10.692 4.949 40.561	1.514.6 16 426.635 13.830 28 23 42 15.139 338 1.134 5.246 42.995	12.394.00 0	71	8,843,77 6	1.605.4 93 452.233 14.660 29 25 45 16.047 358 12.014 5.561 45.574	14.901.000	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,61	1,75	29.788.00 0	-	-	1,76	42.682.150	
		Persentase peningkatan diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	-	-				17,5		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
				2019				2020			
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan	Produksifitas : - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedelai (ton) - Bawang Merah (Kw/Ha) - Cabe Besar (Kw/Ha) -Sukun (Kw/Ha) - Kelapa (Kw/Ha) - Kopi ((Kw/Ha) - Kakao (Kw/Ha) - Cengkeh (Kw/Ha) - Tebu (Kw/Ha)	59,03 55,89 19,42 84,50 42,70 0,60 1293,00 420,00 542,00 722,00 40,501, 50	62,57 59,24 20,59 89,57 45,26 0,64 1370,58 445,2 552,84 736,44 41,311, 53	904.887		391,079	66,33 62,8 21,82 94,94 47,98 0,67 1452,81 471,91 563,9 751,17 42,137, 76	1.009.054	
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Persentase tenaga penyuluh yang terlatih (%)	100	100	814.528	204	1,661,69 0	100	895.981	
		Program Standarisasi Kualitas Bahan baku	Persentase peningkatan produksi produktifitas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	100	100	128.780	487	627,283	100	130.000	
		Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan	Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	100	100	159.500	204	325,639	100	170.500	
		Peternakan									
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	100	100	398.120	613	2,440,12 8	100	399.143	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase tingkat penurunan kasus kejadian penyakit ternak (%)	100	100	240.000	105	252,125	100	240.000	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kesejahteraan kelompok peternak (%)	85	90	502.795	102	511,530	90	507.423	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	95	95	480.000	613	2,440,128	95	490.000	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase ketersediaan produk peternakan unggulan (%)	-	-	-	-	-	85	375.000	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase tingkat pemberdayaan penyuluh peternakan (%)	-	-	-	-	-	90	100.000	
	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase hasil produksi di bidang pertambangan (%)	-	85	61.224	85	61,223	90	740.000	DINAS PERINDUSTRIAN
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan pengadaan,pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	100	-	-	-	-	90	1.405.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	Cakupan peningkatan mutu pelayanan bagi pengusaha BBM dan Elpiji (%)	100	100	53.600	100	70,887	100	270.000	
	Program Pemetaan Geologi	Persentase pemetaan geologi (%)	-	100	161.350	100	173,950	100	690.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan AirTanah	Cakupan pembinaan pengembangan kegeologian dan air tanah (%)	-	-	-	-	-	100	1.960.000	
	Perdagangan									
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan rehabilitasi dan revitalisasi pasar (%)	12	11	5.666.649	87	4,915,864	12	6.854.715	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase ketersediaan data potensi unggulan (%)	75	80	155.376	97	150,376	85	170.914	
	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Cakupan bina usaha /UKM (%)	20	25	22.000	94	20,750	30	24.200.000	
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina pedagang kaki lima dan asongan (%)	20	25	10.347	100	10,347	30	876.382	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	80	85	121.576	94	114,567	90	216.025	
	Perindustrian									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi (%)	-	85	120.000	96	115,000	90	3.075.000	
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	100	100	278.020	18	49,960	100	1.145.000	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan tekhnologi industri (%)	-	-	-	-	-	100	905.000	
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan peningkatan struktur industri (%)	-	100	216.950	94	204,950	100	1.035.000	
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PP)	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)	-	100	1.499.000	-	-	100	1.954.000	
	Kelautan dan Perikanan									
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	46.746,90	47.681,83	1.810.400	75	1,354,745	49.112,29	2.057.740	
		Jumlah produksi nelayan (ton)	32.722,83	33.377,29		-	-	34.378,61		
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	356.896,90	371.172,56	2.529.550	-	-	389.731,19	2.777.480	
		Jumlah produksi pokdakan (ton)	248.964	261.412		-	-	274.483		
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Persentase jumlah pengembangan kawasan berbasis kluster (%)	100	100	750.500	98	736,464	100	825.550	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase jumlah nelayan yang terberdayakan (%)	100	100	300.000	100	300.000	100	330.000	
		Persentase jumlah legalitas usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	100	100	300.000	100	300.000	100	1.000.000	
	PENUNJANG URUSAN									
	Perencanaan Pembangunan									
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan aparat perencana yang telah mengikuti Bimtek perencanaan (%)	75	75	88.000	80	70,260	80	96.800	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	687.000	109	746,031	100	744.051	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	100	100	473.000	85	400,821	100	520.300	
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	100	100	575.000	130	749,255	100	632.500	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)	100	100	808.000	97	781,830	100	888.800	
	Keuangan									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
				2019				2020			
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	72,73	77,27	5.790.019	75	4,347,134	81,82	5.905.820	BADAN PENG.KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (%)	29,61	29,69		29.69		29,78		
			Ketetapan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
			Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	38,43	36,98		36.98		50		
			Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD (%)	61,57	63,02		63.02		50		
			Persentase Belanja Modal terhadap total APBD (%)	11,75	30		30		30		
			Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,53	15,61		15.61		15,68		
			Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD (%)	21,63	21,74		21.74		21,85		
			Persentase SILPA terhadap Total APBD (%)	4,23	3,15		3.15		2,76		
			Persentase penyaluran Belanja Daerah (%)	95	96,85		96.85		97,24		
			Persentase penyajian LKPD sesuai SAP berbasis Akrua (%)	86,67	90,13		90.13		93,74		
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Persentase SP2D yang diterbitkan kurang 2 (dua) hari (%)	97,30	98	275.880	98.00	275.880	99	289.674	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Keuangan Daerah									BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR (%)	95	96	182.500	25	44,962	97	186.150	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase realisasi PAD terhadap pencapaian target (%)	100	100	4.145.591	75	4,347,13 4	100	6.054.224	
		Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang tersusun setiap tahun (%)	100	100		75		100		
	Program Penatan PeraturanPerundang- Undangan	Persentase kenaikan objek pajak daerah setiap tahun (%)	0,14	0,16	166.980	6	17,061	0,18	201.054	
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	70	75	2.728.695	38	1,023,27 1	80	3.363.032	BKPSDM
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kediklatan (%)	65	70	130.000	70	90,742	75	285.000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi (%)	70	75	95.500	22	20,820	80	100.500	
	Penelitian dan Pengembangan									

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Persentase peningkatan hasil - hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan (%)	100	100	421.892	94	397,507	100	1.800.000	BALITBANGDA
	Program Pengembangan SIDa	Persentase cakupan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (%)	-	100	354.748	98	349,018	100	742.000	
	Pengawasan									
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas kinerja minimal B (>60 – 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (%)	<50	55	2.020.000	44	2,026,65 9	65	2.540.000	INSPEKTORAT DAERAH
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi (Skor)	>30-50	>50-60		-	-	>50-60		
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) (%)	<50	50		79	-	60		
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI (%)	85	90		85	-	95		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
		Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) (%)	75 75	80 80		- 82	- -	85 85		
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	350	375		-	-	400		
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	85	90		82	-	95		
		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	85	90		100	-	95		

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase jumlah aparat pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan (%)	45	50	312.500	64	200,830	60	395.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah elemen penilaian (Assessment) peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (%)	50	67	30.000	51	15,218	83	35.000	
	Pemerintahan Umum									
	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase pelayanan keagamaan yang terlaksana (%)	100	100	1.343.770	101	1,355,860	100	1.478.147	
	Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan (%)	100	100	255.140	101	256,830	100	280.654	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang ditetapkan (%)	100	100	1.074.220	83	888,387	100	1.181.642	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100	100	1.143.260	81	931,595	100	1.257.586	
	Program Peningkatan	Persentase peningkatan kategori	100	100	767.974	58	441,933	100	844.771	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	nilai LPPD (%)								
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina dalam bidang administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	347.378	64	223,825	100	382.115	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan penataan pemerintah (%)	100	100	670.663	11	71,475	100	737.729	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian dan penegasan batas wilayah antar daerah (%)	100	100	153.500	66	101,420	100	168.850	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana (%)	100	100	640.550	65	417,557	100	704.605	
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang efisien (tender) (%)	100	100	1.578.000	53	839,764	100	1.735.800	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik(%)	100	100	793.017	55	434,192	100	872.319	
	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya alam (%)	100	100	920.000	38	351,160	100	1.012.000	
	Program Pengembangan	Persentase ketersedian data dan	100	100	1.300.000	85	1,102,21	100	1.430.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Perekonomian Daerah	informasi perekonomian Daerah					2			
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	100	100	770.000	24	186,874	100	847.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	100	100	180.000	90	161,762	100	198.000	
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Persentase realisasi penataan administrasi kelembagaan Pemda (%)	100	100	1.353.951	101	1,371,889	100	1.489.346	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	95	100	228.402	112	255,998	100	262.662	
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Persentase realisasi pelayanan kegiatan kehumasan (%)	98	100	1.250.000	168	2,104,531	100	1.375.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	8.773.030	107	9,353,559	100	9.650.333	
	Sekretariat Dewan									
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	100	15.340.000	78	11,939,733	100	18.995.000	SEKRETARIA T DPRD
	Program Penataan	Persentase Realisasi Rancangan	100	100	300.000	6	17,061	100	310.000	

Kod e	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan CapaianKinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				2019				2020		
				Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
	Peraturan Perundang Undangan	Perda Inisiatif DPRD Yang tersusun (%)								
	Kecamatan									
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	100	100	1.072.568	94.22	1,010,58 0	100	1.179.825	KECAMATAN
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (%)	100	100	21.854.43 3	29.04	6,346,34 4	100	24.039.876	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	100	212.715	122.08	259,679	100	233.987	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (%)	100	100	12.271.67 8	109.05	13,382,5 93	100	13.498.846	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	4.624.322	46.88	2,167,84 3	100	5.086.754	
	Program bersifat rutin dan pelayanan internal pada setiap PD									

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2019				2020		
					Target	Rp (000)	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(17)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	398.433.464	15.13	60,289,021,762	100	439.257.409	SEMUA PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	43.310.118	73.17	31,691,671	100	47.924.519	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	100	100	1.312.775	42.43	557,000	100	1.444.053	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	2.034.996	118.96	2,420,761	100	1.943.145	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	1.639.394	101.20	1,659,097	100	1.803.334	
		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	100	3.840.784	66.53	2,555,207	100	4.224.863	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam perspektif jangka menengah merupakan perwujudan utama dari visi, misi, tujuan dan sasaran, serta program pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam satu periode pemerintahan. Artinya, pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka menengah akan mencakup dua indikator pokok, yakni indikator level dampak (*impact*) yang merujuk pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran, serta indikator level hasil (*outcome*) yang merujuk pada pencapaian realisasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Dalam perspektif perubahan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bone ini, dua level indikator untuk mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi terkini. Terdapat begitu banyak kondisi terkini yang belum termuat dalam Perda RPJMD 2018-2023, atau sudah termuat tetapi mengalami perubahan signifikan akibat perubahan lingkungan eksternal yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Beberapa kondisi tersebut, seperti secara global Pandemi COVID19 yang melanda semua negara, terjadi resesi ekonomi pada beberapa negara, termasuk Indonesia dan sejumlah daerah, perubahan kebijakan nasional dan regional (RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi), serta diterbitkannya sejumlah peraturan perundangan baru yang terkait dengan proses dan substansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Penyesuaian pada indikator kinerja pemerintah daerah dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bone ini akan menyesuaikan pada capaian dua tahun realisasi (2018-2019), perkiraan capaian tahun berjalan (2020) untuk selanjutnya memproyeksikan tiga tahun rencana yang masih tersisa (2021-2023). Perubahan dilakukan pada dua tingkatan kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menggambarkan pencapaian visi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah, serta perubahan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait secara langsung pada penyelenggaraan urusan, baik level indikator dampak (*impact*) maupun level indikator hasil (*outcome*).

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi enam indikator makro, sebagaimana Permendagri 18/2020, yakni: (1) indeks pembangunan manusia, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) PDRB per kapita, (4) tingkat kemiskinan, (5) tingkat pengangguran terbuka, dan (6) Rasio Gini. Selanjutnya mencakup indikator tujuan dan sasaran lainnya yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone hingga akhir periode RPJMD.

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bone Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Realisasi Tahun Terakhir	Perkiraan Tahun Berjalan	Target Kinerja			Kondisi Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	B	B	BB	BB
2	Proporsi Perangkat Daerah yang bebas dari KKN (%)	85	88	90	95	98	98
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,05	11,12	10,00	9,89	9,80	9,80
4	Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%)	7,01	4,32	6,68	7,21	7,53	7,53
5	PDRB/Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	47,50	49,30	52,60	55,70	58,80	58,80
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	3,55	3,30	3,20	3,00	3,00
7	Indeks Gini	0,366	0,372	0,370	0,367	0,363	0,363
8	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	65,67	65,82	66,17	66,33	67,01	67,01
9	Indeks Pendidikan (Indeks)	58,82	59,61	60,40	61,69	61,98	61,98
10	Indeks Kesehatan (Indeks)	72,12	72,41	72,78	73,14	73,51	73,51
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	93,25	93,33	93,48	93,51	93,64	93,64
12	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6297	0,6423	0,6519	0,6617	0,6716	0,6716
13	Persentase Peningkatan Status Desa mandiri (Persen)	-	9,82	12,8	15,6	18,21	18,21
14	Persentase penanaman modal terhadap PDRB (Persen)	32,94	32,61	32,82	33,03	33,24	33,24
15	Nilai PMDN/PMA (Rp Milyar)	125	150	175	200	225	225
16	Index Inovasi Daerah	-	955	1.050	1.155	1.270	1.270
17	Angka Kriminalitas (Kasus)	925	799	883	704	634	634
18	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	85.06	86.38	97.99	89.91	90.06	90.06

19	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Persen)	2,67	2,67	2,70	2,80	2,90	2,90
20	Jumlah Wisatawan (Orang)	496.045	10.320	516.000	523.000	534.000	534.000

8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang akan mendukung dan memastikan pencapaian IKU. IKK ini mencakup indikator level dampak (impact), baik pada aspek kesejahteraan masyarakat maupun pada aspek daya saing daerah, serta indikator level hasil (outcome) yang menggambarkan aspek pelayanan umum yang tersebar berdasarkan penyelenggaraan urusan dari segenap perangkat daerah.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bone Tahun 2020-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
X	Cakupan pelayanan penunjang pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
	Urusan pemerintahan bidang pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud (%)	84,55	85,50	86,50	87,00	87,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	95,81	95,82	95,85	95,88	95,88
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	88,66	89,50	89,30	90,00	90,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00
5	Persentase Dokumen penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan non Formal	0	100	100	0	100
6	Persentase Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan Pendidik Bersertifikat (%)	76,00	76,50	79,00	85,00	85,00
7	Persentase Dokumen Pengendalian Perizinan Pendidikan (Dokumen)	0	0	100	100	100
	Urusan pemerintahan bidang kesehatan					
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,12	95,50	96,00	96,50	96,50
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95,47	95,50	96,00	96,50	96,50
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,81	98,00	98,50	99,00	99,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	63,36	64,00	65,00	66,00	66,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,22	30,00	40,00	50,00	50,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,08	81,00	82,00	83,00	83,00

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
11	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar - Penjelasan IKK Outcome	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS (psda)	9,75	11,77	13,52	15	20
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (psda)	5,30	7,25	9,75	12,33	15
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (psda)	32,39	34,60	45,45	54,46	65
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Bone (pu)	79,25		82,50	84,30	84,30
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (Pu)	79		80,50	82,90	81,90
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten Bone (pu)					
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Bone (pu)	71,79	71,79	72,29	72,79	72,70
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (psda)	100%	100%	100%	100%	100%
9	proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (psda)	0	0	0	0	0
Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100	100	100
2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	82,73	84,55	86,16	88,45	88,45
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,3	7,0	6,7	6,4	6,4
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6,32	6,82	7,32	7,82	7,82
	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82	84	86	88	88
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	15	15	15
	Urusan pemerintahan bidang social					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	100	100
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					
	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	74	75	76	78	78
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	33	35	40	50	50
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja(Juta Rp)	9	9,5	9,7	10	10
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	55	60	70	80	80
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	55	60	65	70	70

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	46,32	47,50	48,23	49,01	49,01
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,33	0,31	0,29	0,27	0,27
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,40	5,39	5,38	5,37	5,37
	Urusan pemerintahan bidang pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	4.960	5.059	5.160	5.263	5.263
02	Urusan pemerintahan bidang pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	106.794	N/a	N/a	N/a	N/a
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100
02	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	63	63	64	65	65
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	66	68	70	72	72
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	60	68	70	72	72
	Urusan pemerintahan bidang administrasi dan pencatatan sipil					
1	Perekaman KTP Elektronik	98,82	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	23,55	30	35	40	40
3	Kepemilikan akta kelahiran	99,43	100	100	100	100
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Persen)	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa					
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	43,63	53,75	63,87	73,99	73,99
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	9,82	12,8	15,6	18,21	18,21
	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total) persentase	2,47	2,40	2,35	2,30	2.30
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,58	74	75	76	76
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,7	14,00	13,30	12,60	12,60
	Urusan pemerintahan bidang perhubungan					
1	Rasio konektivitas Kabupaten	26	29	31	34	34
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,44	0,42	0,40	0,36	0,36
	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	64	75	80	85	85
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	31	85	85	85	85
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	80	82	85	88	88
	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10	12	17	25	25
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	11,76	36,55	38,60	40,28	40,28
	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal					
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	12	15	18	20	20
	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	49	50	51	52	52
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,25	15,50	15,85	16,00	16,00

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	0	3	3	4	4
	Urusan pemerintahan bidang statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	95	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	95	100	100	100
	Urusan pemerintahan bidang persandian					
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100	100	100
	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100	100
	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	45	50	55	60	60
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14	16	18	20	20
	Urusan pemerintahan bidang kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	59,49	63,33	68,21	70,22	70,22
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	63,83	65,32	68,22	70,89	70,89
	Urusan pemerintahan pilihan					
	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (Ribuan Ton)	443,27	473,80	506,44	541,33	541,33
	Urusan pemerintahan bidang pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	48,69	48,80	48,95	49,06	49,06
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	40	42	44	46	46
3	Tingkat Hunian Akomodasi	56,25	57,02	58,99	60,61	60,61
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (persen)	12,32	12,47	12,65	13,00	13,00

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Persen)	0,0016	0,0029	0,0050	0,0085	0,0085
	Urusan pemerintahan bidang pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton/ Ha)	4,7	5,2	5,7	6,1	6,1
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (persen)	25	24	24	23	23
	Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	100	100	100	100	100
	Urusan pemerintahan bidang perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	71,99	80	90	100	100
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	82,52	83,25	84	84,7	84,7
	Urusan pemerintahan bidang perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	41,31	42,01	42,44	42,80	42,80
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	80	80	80	80	80
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45	45	70	70	70
	Unsur pendukung urusan pemerintahan					
	Sekretariat daerah					
1	Persentase Ketersediaan Bahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas,	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)					
3	Persentase ketersediaan bahan perumusan pengoordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	100	100	100
	Sekretariat DPRD					
123	Cakupan realisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100	100	100	100	100
	Unsur penunjang urusan pemerintahan					
	Perencanaan					
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial Budaya dan Infrastruktur Wilayah yang tersusun (%)	100	100	100	100	100
	Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,73	97,69	98,67	99,66	99,66
3	Assets Management	100	100	100	100	100
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya (Persen)	3,14	2,83	2,54	2,29	2,29
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60,52	59,91	59,31	58,72	58,72
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,09	9,00	8,91	8,91	8,82
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	80	80	80	80	80
9	Rasio PAD	10,03	10,50	10,50	10,50	10,50
	Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	277	280	283	286	286
2	pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,23	8,50	9,00	10,00	10,00
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
	tenaga kesehatan)					
	Pendidikan dan pelatihan					
1	Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	82	85	88	92	92
	Penelitian dan pengembangan					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah (%)	38,46	51.28	64.10	76.92	76,92
	Inspektorat daerah					
1	Opini BPK Berdasarkan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP	B	B	BB	BB	BB
3	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
4	Tingkat Kapabilitas APIP Inpektorat Daerah	Level 3 (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Penuh)	Level 3 (Penuh)	Level 3 (Penuh)
	Unsur kewilayahan					
	Kecamatan					
1	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	100	100
2	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100	100	100	100
4	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	100	100	100	100
	Unsur pemerintahan umum					
	Kesatuan bangsa dan politik					
1	Presentase peningkatan kemitraan pengembangan ideologi wawasan kebangsaan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	2020	Proyeksi			Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	
5	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100	100	100	100

8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya SPM, dijelaskan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6. Sosial

Menurut Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
18. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
21. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
22. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

23. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;Vpelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran;
24. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
25. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
26. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
27. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
28. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8.3
Penetapan Tabel Target Indikator SPM
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan/ Indikator	Targ et Prov insi	Capaian / Target				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
1	PENDIDIKAN						
1.1	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	85%	95,45%	100%	100%	100%
1.2	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	6,44%	5,28%	100%	100%	100%
1.3	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	74%	92,33%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN						
2.1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100%	94,12 %	100%	100%	100%
2.2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	87,5%	95,47 %	100%	100%	100%
2.3	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	99,9%	97,81 %	100%	100%	100%
2.	Jumlah balita yang	100	70,3%	63,36 %	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan/ Indikator	Targ et Prov insi	Capaian / Target				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
4	mendapatkan layanan kesehatan	%					
2. 5	Jumlah warganegara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	39,7 %	25,2 %	100%	100%	100%
2. 6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	25,3 %	100%	100%	100%	100%
2. 7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	71,9	68.33 9%	100%	100%	100%
2. 8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	13,7	100 %	100%	100%	100%
2. 9	Jumlah warga negara penderita diabetes millitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	52,6	100 %	100%	100%	100%
2. 10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	62,6	100 %	100%	100%	100%
2. 11	Jumlah warga negara terduga tuberculosisyang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2. 12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan/ Indikator	Targ et Prov insi	Capaian / Target				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
	(Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan						
3	PEKERJAAN UMUM						
3. 1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	81,31	82,49	100%	100%	100%
3. 2	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Pengolahan air limbah domestik	100 %	81,59	82,82	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT						
4. 1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	-	-	100%	100%	100%
4. 2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	-	-	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5. 1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100	700.5 81	100%	100%	100%
5. 2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100 %	100	3.800	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan/ Indikator	Targ et Prov insi	Capaian / Target				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
	informasi rawan bencana						
5. 3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100	18.79 1	100%	100%	100%
5. 4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100	700.5 81	100%	100%	100%
6	SOSIAL						

8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat dengan TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, menurut amanat peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya TPB/SDGs merupakan komitmen bersama antara secara global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.4
Penetapan Tabel Indikator TPB/ SDGs Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	-	-	-	-	-
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan							

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	96	97	98	88	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	Orang	7.953	8.748	9.622	10.583	11.641
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	27.5	28,0	28,5	29	30
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	KPM	32.755	31.954	31.153	30.352	29.551
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air	%	90	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	100	100	100	100	100
1.4.1.(f)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	109,84	118,82	120,88	123,52	125,04
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	100,17	110,18	111,5	114,2	116,35
1.4.1.(h)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	90	93	95	97	99
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN							
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7	6	5.5	5	4,5
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan atau berat berdasarkan pangan, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	%	9	8,8	8.6	8,4	8
2.1.3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan atau berat berdasarkan pangan, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	11	10	9.5	9	8,5
2.1.4	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum 1400kkl/kapita/hari	%	88	88.50	90.00	92,00	93,00
2.1.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	%	7	6	5.5	5	4,5

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	Harapan (PPH) mencapai; dan						
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							
2.2.1*	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita	%	6,20	6,15	6,10	6,05	6,00
2.2.1.(a)	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun	%	6,20	6,15	6,10	6,05	6,00
2.2.2*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	4,95	4,90	4,85	4,80	4,75
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia ibu hamil	%	33,70	33,70	33,65	33,60	33,55
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI	%	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50
2.2.3(c)	Prevalensi malnutrisi (Berat badan/tinggi badan) anak usia kurang dari 5 tahun	%	3,55	3,50	3,45	3,40	3,35
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Orang	140.516	147.542	154.919	162.665	170.798
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100000 KH	67,10	67,00	66,90	66,80	66,70
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	6,10	6,05	6,00	5,95	5,90
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	5,81	5,80	5,79	5,78	5,77
3.2.3 (b)	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 KH	4,54	4,53	4,52	4,51	4,50
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Org	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
3.3.2.(b)	Indeks Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	per 100.000 pddk	155	171	188	206	227
3.3.3.(c)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini	Persentase	60	70	80	90	100

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	untuk infeksi Hepatitis B.						
3.3.4.(d)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Persentase	50%	60%	70%	80%	90%
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persentase	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persentase	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Persentase	31,05	34,10	37,02	40,00	42,05
3.7.1.(c)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (unmetneed)	Persentase	17,50	17,10	16,80	16,60	16,30
3.7.1.(d)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase	50,00	52,00	55,00	57,00	60,00
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua Orang							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persentase	4	3	2	1	0
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Orang/Jiwa	960	970	980	990	1000
3.8.2.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persentase	96	97	98	99	100
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi Semua							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase	90	93	95	97	100
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dokter	3	3	3	3	3
3.c.2	Jumlah penduduk yang dicakup	Orang /	960	970	980	990	1000

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jiwa					
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	109,84	118,82	120,88	123,52	125,04
4.1.1.(a)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat	%	100,17	110,18	111,5	114,2	116,35
4.1.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat	%	115,94	117,53	120,24	122,8	125,5
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persentase	68,28	75,1	77	78,96	80
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase Pendidik yang Bersertifikasi Pendidikan :	-	-	-			
	Tingkat SD	%	75,00	80	85	80	95,25
	Tingkat SMP	%	99,00	100	100	100	100
4.c.2	Persentase Kepala SD/MI Berkualifikasi S1	%	99,08	100	100	100	100
4.c.3	Persentase Pengawas SD/MI yang Berkualitas S-1	%	100	100	100	100	100
4.c.5	Persentase Pengawas SD/MI yang Memiliki Sertifikasi Pendidik	%	100	100	110	100	100
4.c.6	Persentase Guru SD/MI yang memiliki Kualifikasi S-1	%	73,85	93,65	100	100	100
4.c.7	Persentase Guru SD/MI yang memiliki sertifikasi Pendidik	%	59,94	-	-	-	-
4.c.8	Persentase Kepala SMP/MTs Sekolah berkualitas S-1	%	97,63	100	100	100	100
4.c.9	Persentase Kepala SMP/MTs yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	94,07	100	100	100	100
4.c.10	Persentase Pengawas SMP/MTS yang berkualifikasi S-1	%	100	100	100	100	100
4.c.11	Persentase Guru SMP/MTS yang memiliki kualifikasi S-1	%	100	100	100	100	100
4.c.12	Persentase Guru SMP/MTs yang memiliki sertifikasi pendidikan	%	58,10	60,40	65,30	70,85	73,80
4.c.13	Persentase Guru SMP/MTs yang mengajar 24 Jam	%	89,64	89,64	90,00	91,25	92,20
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER							
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung	Kebijakan	1	1	1	1	1

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	pemberdayaan perempuan.						
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Jumlah	10	15	20	25	30
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase	90%	95%	100%	105%	110%
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Jumlah	5	5	5	5	5
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Jumlah	5	5	5	5	5
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Jumlah	4820	4820	4820	4820	4820
5.5.2	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
5.5.3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)	%	16,3 %	16,3 %	16,3 %	16,3 %	16,3 %
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	90	100	100	100	100
6.1.1.(c)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	90	100	100	100	100
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total	Desa/ Kel	100	200	300	372	372

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	Berbasis Masyarakat (STBM).						
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/Kel	372	372	372	372	372
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	-	-	-	-	-	-
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	-	-	-	-	-
TUJUAN 07 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Target 7.1 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat							
7.1.1 (a)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persen	109,84	120,82	132,9	146,19	160,08
7.1.2 (b)	Bauran energi terbarukan.	Persen	97	98	99	100	95
7.1.3 (c)	Intensitas energi primer.	Persen	92	94	96	98	100
TUJUAN 08 PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Juta					
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	%					
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-	-	-	-	-	-
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.						
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.						
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.						
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah		17,412	18,224		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan	Orang		14310	14215		
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Orang		n/a	n/a		
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak							

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
menempuh pendidikan atau pelatihan							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%		40 %	35 %		
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
9.1.1	Rasio jumlah desa yang memiliki jalan produksi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat/jumlah desa	Persen	29,33	28,02	27,50	26,32	25
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Kabupaten	Persen	61,25	62,20	63,02	64,25	65
9.1.2	Jumlah Pelabuhan Strategis	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Persen	6,4	6,54	6,94	7,34	7,74
9.3.2*	Pertumbuhan volume usaha mikro terhadap nilai industri kecil	Rupiah	693,72 9 M	694,22 0 M	694,73 0 M	695,31 1 M	695,81 9 M
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Swakarya	Desa Swakarya	57	75	95	125	150
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(a)	Berkurangnya Rumah Tangga Tidak layak Huni	RT	405 RT	4.478 RT	4.313 RT	3.852 RT	3.605 RT
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1.(b)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	%	2	2	2	2	2
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	6.536.4 57.000	5.882.8 11.300	5.294.5 30.170	4.765.0 77.153	4.288. 569.43 7
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	M3	101,23	156,75	215,53	277,58	339,63
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.6.1.(a)	Persentase RTH terhadap wilayah perkotaan	%	31	32	33	34	35
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan,							

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030							
11.b.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Buah	3	3	3	3	3
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB							
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan							
12.4.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang terigister	Unit	10 %	10 %	10 %	20 %	30 %
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Persen	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persen	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Target 12.6 Pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah							
12.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	%	3	3	3	3	3
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	-	-	-	-	-	-
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT							
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1*	Jumlah kelompok nelayan yang memperoleh penguatan kelembagaan dan bantuan	Kelompok	10	8	8	9	9
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlatih	Orang	30	30	30	30	30
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT							
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	-	-
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan	-	-	-	-	-	-

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	kondisi ekosistemnya.						
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	-	-	-	-	-	-
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% .	-	-	-	-	-	-
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	-	-	-	-	-	-
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah	90	95	100	105	110
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Jumlah	10	15	20	25	30
Target 16.3 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	%	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
Target 16.4 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Predikat	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	100	100	100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Predikat	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)
16.6.2.(a)	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persentase	63,95 %	63,95 %	64,19 %	64,23 %	64,25 %
Target 16.5 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir	%	90	93	95	97	99

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
	untuk penduduk umur 0-18 tahun						
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	65 %	65 %	75 %	85 %	100 %
Target 16.7 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional							
16.7.1.(a)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	%	29 %	40 %	60 %	75 %	100 %
16.7.2.(b)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Jumlah	5	15	20	26	66
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rupiah	2.359.890.501.300	2.483.852.069.980	2.614.462.143.724	2.752.087.416.616	2.897.115.599.031
17.1.2*	Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak.	Persentase	1,77	1,81	1,86	1,91	1,96
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	20 %	20 %	30 %	30 %	100 %
117.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Persen	20 %	25 %	25 %	25 %	100 %
117.8.2 (b)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	20 %	20 %	30 %	30 %	100 %
117.8.3 (c)	Tingkat penetrasi akses tetap pitlebar (fixedbroadband) di perkotaan dan di pedesaan	Persen	20 %	25 %	25 %	30 %	100 %
117.8.4 (d)	Proporsi individu yang menguasai /memiliki telpn gengggam	Persen	20 %	20 %	30 %	30 %	100 %
117.8.4 (d)	Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Persen	20 %	20 %	30 %	30 %	100 %
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional							

Kode	Indikator	Satuan	Base Line (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	87	88	89	90	90
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	85	85	87	87	88
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	-	-	-	-	-	-
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Jumlah	8435	8452	8473	8517	8638
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	95	95	96	96	97
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Persen	50	51	52	53	54

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD periode berikutnya (2023-2028).

Seluruh program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multi-year* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
2. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Mengingat Perubahan RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Penanggung jawab pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran Perubahan RPJMD kedalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Bone dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 dilakukan pada akhir periode Perubahan RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bone yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

